

Membangun Republik 1

by Baskara Tulus Wardaya

Submission date: 27-Sep-2017 02:27PM (UTC+0700)

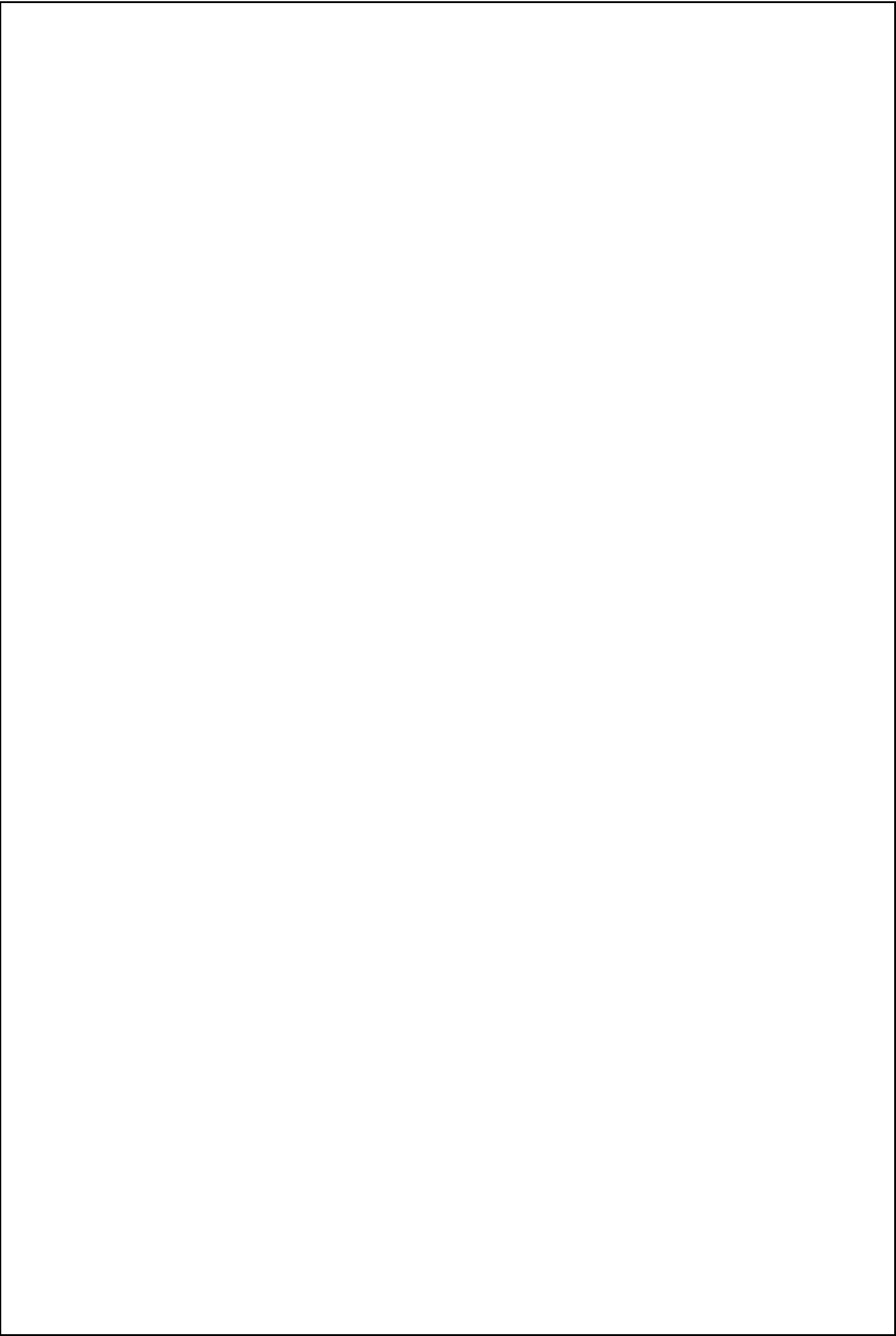
Submission ID: 853251513

File name: membangun_republik_1-50.pdf (747.17K)

Word count: 11481

Character count: 72228

MEMBANGUN REPUBLIK



BASKARA T. WARDAYA, SJ

(Editor)

MEMBANGUN REPUBLIK



Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama
**SARTONO KARTODIRDJO, TAKASHI SHIRAISHI,
BENEDICT ANDERSON, GEORGE KAHIN,
CLIFFORD GEERTZ, DANIEL LEV,
GOENAWAN MOHAMAD, DAN BILL LIDDLE**



MEMBANGUN REPUBLIK

Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahin, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle

Baskara T. Wardaya SJ (Editor)

Penyelaras akhir: Dyah Merta & Kevin Rinangga
Perancang Sampul: Teguh Prastowo
Perancang Isi: Teguh Prastowo

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
Cetakan I, II, 2017

5 terbitkan oleh:

PENERBIT GALANGPRESS (Anggota IKAPI)
Jln. Mawar Tengah 72, Baciro, Yogyakarta 55225
Tel. (0274) 554985, 554986 Faks: (0274) 554985
Email: redaksi@galangpress.com
www.galangpress.com

Bekerjasama dengan:

Sanata Dharma University Press (SDUP), **PUSDEMA** (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia), dan **APPTI** (Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia)

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Wardaya, Baskara T.;

MEMBANGUN REPUBLIK: Bercakap Tentang Sejarah Indonesia Bersama Sartono Kartodirdjo, Takashi Shiraishi, Benedict Anderson, George Kahin, Clifford Geertz, Daniel Lev, Goenawan Mohamad, dan Bill Liddle
Yogyakarta: Galangpress bekerjasama dengan SDUP, PUSDEMA, APPTI
Cet. II, 2017; 155x230 mm; xxviii+268 hal.
ISBN: 978-602-8174-19-0

I. Sejarah Politik
II. Judul

III. Wardaya, Baskara T.

Buku ini pernah diterbitkan dengan judul *Mencari Demokrasi* (979-8933-17-6) oleh Institut Studi Arus Informasi, Mei 1999.

Dicetak oleh:

PEKERJA TAKAN GALANGPRESS
Jln. Mawar Tengah 72, Yogyakarta 55225
Telp. (0274) 554985, 554986. Fax: (0274) 554985
Email: produksi@galangpress.com,
www.galangpress.com

*Untuk George Kahin, Benedict Anderson, Daniel Lev,
dan Clifford Geertz.*



Benedict Anderson di antara anggota kelompok Mengembangkan Wawasan (MW) di Madison, Wisconsin, A.S. (Dok. Pribadi)

Ucapan Terima Kasih

PADA MUSIM liburan Natal tahun 1994, sejumlah mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh studi di Amerika Serikat dan Kanada bertemu dan berkumpul di kampus Universitas Cornell, di kota Ithaca, Amerika Serikat. Sejumlah teman dan kerabat juga turut hadir. Dalam kesempatan itu para peserta bicara mengenai masalah-masalah aktual terkait dengan situasi di Indonesia, yang waktu itu sedang menderita “sesak nafas” berada di bawah himpitan kekuasaan Orde Baru. Sejumlah narasumber dihadirkan, baik yang berasal dari Indonesia sendiri maupun Amerika Serikat. Banyak topik dibicarakan, dari gagasan-gagasan tentang bagaimana melawan otoritarianisme hingga pentingnya memperkuat lembaga-lembaga negara dan lembaga-lembaga masyarakat. Begitu terkesan dan berhasilnya pertemuan tersebut, hingga para peserta menghendaki agar diadakan lagi pertemuan serupa.

Pada tahun berikutnya, yakni pada tahun 1995, pertemuan serupa pun diadakan. Kali ini di Universitas Wisconsin, di kota mungil Madison, A.S. Dalam pertemuan ini dibahas sejumlah topik penting juga, dari masalah negara hukum hingga bagaimana memperkuat masyarakat sipil (*civil society*). Pertemuan kedua ini pun berjalan dengan baik dan tidak kalah mengesankan. Seusai pertemuan para peserta membentuk sebuah jaringan komunikasi sebagai sarana untuk membantu mengembangkan wawasan satu sama lain terkait masalah-masalah sejarah, politik, budaya, dan berbagai dimensi

tentang Indonesia. Dalam perjalanan waktu, mereka yang tergabung dalam jaringan ini menamakan diri sebagai kelompok “Mengembangkan Wawasan”, sering disingkat MW.

Ada sejumlah orang yang pada awalnya memiliki inisiatif untuk bertukar pikiran dan yang kemudian melahirkan kelompok MW ini. Salah satunya di antaranya adalah orang yang dengan setia telah mengawal inisiatif tersebut sejak semula, yakni Professor Benedict Anderson dari Cornell University. Dialah yang menjadi “dedengkot” kami sejak pertemuan pertama di Ithaca, dan berlanjut hingga ke tahun-tahun berikutnya. Dialah pula sebenarnya yang memberi gagasan untuk menjadikan upaya “mengembangkan wawasan” sebagai ikatan dan inspirasi bersama yang diharapkan bisa menyatukan kami. Kami setuju. Berbekal ikatan dan inspirasi itu kami terus merasa terdorong untuk membuka seluas mungkin cakrawala pandangan (dan komitmen) kami terhadap Indonesia yang kami cintai bersama. Sejak itu ada sejumlah hal kami lakukan, termasuk mengadakan wawancara dengan para ilmuwan peneliti tentang Indonesia. Secara bersama-sama kami siapkan bahan dan topik-topik wawancara, kami lakukan wawancara, kami transkrip dan kami edit hasil-hasil wawancaranya, untuk kemudian kami sosialisasikan kepada publik. Kami ingin bahwa hasil-hasil wawancara kami itu bisa dijadikan bahan oleh sebanyak mungkin orang guna belajar bersama tentang sejarah, budaya, dan politik Indonesia.

21 Buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satu contoh hasil wawancara itu, berikut upaya untuk mensosialisasikannya. Sebagaimana bisa diduga, proses “kelahiran” buku seperti ini adalah panjang, karena harus melibatkan tahap koordinasi, persiapan materi wawancara, hingga ke teknis penerbitan dan sosialisasi. Ada banyak orang yang dalam proses panjang tersebut telah menyumbangkan tenaga, pikiran dan kerja keras mereka, dan kepada mereka semua kami ingin mengucapkan 26 terima kasih yang sebesar-besarnya.

Secara khusus kami ingin berterima kasih atas keterlibatan dan sumbangan yang luar biasa dari para anggota setia kelompok “MW”, terutama Amrih Widodo, Ben Abel, Ignas Legowo, Dharma Setiawan, Asep Saefuddin, Ajar Budi Kuncoro, Ery Seda, Sita Supomo, Togu Manurung, Nyoman

Wistara, Victor Remberth, Wita Krisanti, L. Andang Binawan, Rudiah Primariantari, Sunaryo, Alex S. Wijoyo, Rosida Nababan, Sienny, Agustina Utami, dan Revianto Budi Santosa dan yang lain. Secara langsung atau tak langsung mereka ini telah terlibat dalam wawancara dengan para nara sumber, berikut dalam proses transkrip dan editing atas hasil wawancara-wawancara tersebut. Dibutuhkan kesabaran untuk duduk selama berjam-jam seharinya, dalam rentang waktu berminggu-minggu guna mengerjakan hal itu, namun dengan tekun, rela-hati, dan penuh kerja keras mereka telah melakukannya. Oleh karena itu dua jempol perlu diacungkan sebagai ucapan selamat dan terima kasih untuk mereka semua.

Terima kasih yang tak terhingga tentu ingin kami sampaikan kepada para narasumber buku ini, baik yang masih ada bersama kita maupun yang telah mendahului kita. Kepada Profesor Sartono Kartodirdjo, Dr. Takashi Shiraisi, Dr. Benedict Anderson, Dr. George Kahin, Dr. Clifford Geertz, Dr. Daniel Lev, Bpk. Goenawan Mohamad, dan Dr. Bill Liddle kami ingin mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya. Dengan sabar dan tekun mereka telah melayani setiap permintaan wawancara kami, bahkan mengoreksi hasil-hasil transkrip yang kami sampaikan. Untuk itu kami sangat berterima kasih.

Tak lupa, kami juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang pernah menjadi bagian dari kegiatan-kegiatan MW selama ini, seperti Mohammad AS Hikam, Emil Salim, Sayidiman Suryohadiprojo, Nasaruddin Umar, Ephorus SAE Nababan, Mubariq Ahmad, Komang Aryana, Mudji Sutrisno, Luhut Pangaribuan, Hendro Sangkoyo, Hariman Siregar, I. Ismartono, Ayu Utami, Anton Gunawan, Ariel Heryanto, Jeffrey Winters, Audrey Kahin, Pramoedya Ananta Toer, Josephine, Frans Seda, Moeslim Abdulrahman, Dwight King, Justiani dan banyak yang lain yang tak mampu kami sebutkan satu per satu. Kepada mereka semua, kami juga sangat berterima kasih.

Terkait proses teknis penerbitan dan distribusi buku ini kami ingin berterima kasih kepada penerbit Galangpress di Yogyakarta, Penerbit Universitas Sanata Dharma (USD Press), dan PUSDEMA (Pusat Kajian Demokrasi dan HAM) yang telah bersedia untuk bahu-membahu guna

menjadikan rancangan tentang buku ini menjadi kenyataan. Kami pun ingin berterima kasih kepada kawan-kawan kami di ISAI (Institut Studi Arus Informasi) di Jakarta yang pada tahun 1999 telah bersedia menerbitkan edisi pertama buku ini dengan judul *Mencari Demokrasi*.

Karena adanya rentang masa yang sangat panjang sejak penerbitan pertamanya, banyak bagian dari naskah awal wawancara-wawancara ini telah hilang ditelan waktu. Oleh karena itu dibutuhkan kesediaan untuk melakukan pengetikan ulang atas naskah-naskah tersebut, dan hal itu telah dengan baik dikerjakan oleh sejumlah mahasiswa Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Untuk itu, kepada tim pengetikan ulang naskah buku yang terdiri dari Dyah Merta, Kevin Rinangga Adriyan, Clara Monica Christian Susanto, Maria Trifosa, Puji Astuti, Clara Pontifisia Selesiana, kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala jerih payah selama bertahun-tahun dalam rangka menerbitkan buku ini dapat membantu setiap pembaca untuk tidak hanya dengan hati gembira membacanya, melainkan juga semakin bersemangat untuk mempelajari sejarah dan politik Indonesia dengan segala dinamikanya.



Kelompok “Mengembangkan Wawasan” (MW) di kampus Universitas Cornell, A.S., akhir 1994. (Dok Pribadi)

Kata Pengantar

Bonnie Triyana

Pemimpin Redaksi majalah *Historia* (Jakarta)

“SETIAP GENERASI menuliskan sejarahnya sendiri,” kata Henry Morse Stephens di dalam tulisannya, “Nationality and History” yang dimuat di *The American Historical Review* volume 21, terbitan 1916. Kata dia, setiap orang dari generasinya melihat sejarah dengan cara dan sudut pandangnya masing-masing. Begitu pula sejarawan yang hampir pasti dipengaruhi oleh semangat zaman yang sedang berlaku semasa hidupnya.

Dalam tulisan yang sama sejarawan kelahiran Edinburg, Skotlandia, itu mengatakan, dirinya selalu berketat untuk memikirkan hal-hal apa saja yang bisa mempengaruhi sejarawan untuk tetap bisa menyampaikan pendapatnya tentang masa lalu secara netral, akurat dan benar. Dia juga insyaf bahwa sejarawan, sebagai manusia, kendati memiliki setumpuk data dari masa lalu, tak pernah bisa menghindar dari “godaan” untuk menafsir beberapa bagian periode sejarah berdasarkan kehendak pribadinya.

Seorang calon sejarawan yang dididik secara profesional di universitas selalu didorong untuk bisa mengambil jarak dengan peristiwa yang ditelitinya. Tujuan utama dari proses rekonstruksi masa lalu itu tak lain adalah untuk menghasilkan pemahaman yang holistik atas peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu. Sehingga bisa digunakan untuk memahami kondisi kekinian masyarakat sebagai hasil dari proses dialektis di masa lalu sekaligus bekal menyusun hidup yang lebih baik di masa yang akan datang.

Wawancara-wawancara yang dimuat di dalam buku *Membangun Republik* ini berada dalam semangat itu. Salah satunya adalah Sartono

Kartodirdjo, sejarawan yang menulis disertasi tentang pemberontakan petani Banten dengan pendekatan multidimensional untuk menampilkan keseluruhan rangkaian peristiwa perlawanan itu sebagai akumulasi berbagai faktor yang mendahuluinya.

Sebagai sejarawan, Sartono selalu berusaha mencari akal persoalan yang kerap kali mendera bangsa ini. Dia menyoroti praktik demokrasi yang terseok akibat merebaknya korupsi dan menghubungkannya dengan feodalisme yang masih tertanam kuat dalam alam pikiran elit di Indonesia. Dengan cara itulah dia menyuguhkan hipotesa tentang akar jawaban atas persoalan yang membelit bangsa Indonesia.

Sedangkan Ben Anderson mengajukan telaah terhadap perjuangan pembebasan nasional yang dipelopori para pemuda sekaligus kritik terhadap situasi di masa Orde Baru yang kental dengan suasana “bapakisme”. Takashi Shiraishi membahas politik pembuangan di masa kolonial sebagai tanggapan pemerintah kolonial Belanda atas gangguan-gangguan ketertiban yang dilakukan oleh para penentangannya. Hal yang sama yang kemudian juga dilakukan oleh rezim Soeharto lewat pembuangan tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) ke Pulau Buru.

Ketujuh intelektual yang diwawancarai di dalam buku ini, mulai dari Sartono, Shiraishi, Anderson sampai Goenawan Mohamad menyampaikan pemikiran-pemikiran mereka untuk membantu kita mencari dan memahami problematika yang sedang membelit bangsa Indonesia. Dalam semangat zaman yang sama pula mereka menarik benang merah yang menghubungkan masa kekinian mereka dengan peristiwa di masa lalu.

Tak lama berselang setelah mereka diwawancarai, Indonesia memasuki babak sejarah baru. Soeharto berhenti sebagai presiden atas tekanan mahasiswa dan dampak dari krisis ekonomi yang menghumbalang Indonesia. Kejatuhan Soeharto diikuti pula dengan gugatan atas narasi sejarah yang pernah ditulis semasa rezimnya berkuasa. Iklim demokrasi yang menciptakan ruang kebebasan turut pula dirasakan di bidang kajian sejarah. Selain di wilayah akademis, partisipasi masyarakat di dalam kegiatan kesejarahan pun meningkat pesat dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Sejarah pun tak hanya jadi materi kuliah di ruang kelas atau di seminar-seminar akademis semata, melainkan juga telah menjadi tren tersendiri di kalangan anak-anak muda generasi Y, julukan mereka yang besar di era revolusi teknologi informasi ini. Minat terhadap sejarah semakin luas. Di berbagai kota besar muncul komunitas-komunitas pecinta sejarah; dua dasawarsa yang lalu jumlah mahasiswa di jurusan sejarah bisa dihitung dengan jari namun kini jumlahnya kian membludak; seiring meningkatnya minat terhadap sejarah, stasiun televisi berlomba-lomba membuat program tayangan sejarah, dan media sosial hadir sebagai medium pertukaran bahkan “pertengkaran” versi-versi sejarah.

Setiap kali momentum bersejarah diperingati, selalu saja ada perdebatan pro-kontra di kalangan netizen. Misalnya peringatan hari Kebangkitan Nasional yang memunculkan pertanyaan kenapa harus Boedi Oetomo yang ditetapkan sebagai tonggaknya bukan Sarekat Islam atau peringatan hari Kartini yang kerap dipertanyakan karena penokohan Kartini dianggap rekayasa Belanda. Fenomena ini memunculkan pertanyaan apakah semangat menafsir sejarah itu semata datang karena temuan-temuan sumber sejarah yang baru atau memang tafsiran yang dilandasi sentimen-sentimen tertentu?

Polemik mengenai sejarah pun terjadi bukan karena sebuah artikel terbit di koran sebagaimana halnya tradisi polemik kaum intelektual angkatan Sartono. Perdebatan mengenai sejarah bisa dimulai dari 140 karakter cuitan di *Twitter* atau dalam satu alinea status *Facebook* bahkan dari selembarnya foto yang dibuat menjadi *meme*. Dan netizen bisa ikut aktif berkomentar secara langsung seakan tanpa batas penghalang lagi.

Media sosial telah mempertemukan semua itu dalam satu kubangan yang sama. Yang agak mengkhawatirkan di sini adalah pemanfaatan kisah sejarah sebagai isu untuk melegitimasi atau mendelegitimasi arti sebuah peristiwa sejarah atau peran seorang tokoh serta kelompok bangsa di masa lalu. Versi-versi sejarah tersebut, entah disengaja atau tidak, telah diplintir sedemikian rupa dan diviralkan di media sosial.

Acapkali fenomena itu datang seiring berlangsungnya suatu peristiwa politik, terutama sekali menjelang pemilihan kepala daerah atau pun pemilihan presiden sebagaimana yang sering kita saksikan bersama. Paling

hangat tentu saja adalah peristiwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017 yang beraroma sentimen rasial dan agama. Segala macam kisah sejarah turut dibawa ke dalam arena pertarungan kekuasaan. Salah satunya adalah isu tentang peran kelompok Tionghoa di dalam republik ini.

Misalnya di media sosial pernah merebak kabar tentang Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meresmikan monumen laskar Pao An Tui di Taman Mini Indonesia Indah akhir Februari 2016. Kecaman berhamburan di media sosial karena Pao An Tui adalah seteru kaum Republikan di masa-masa revolusi kemerdekaan. Kabar tentang peresmian monumen Pao An Tui itu menyebar cepat, dan menimbulkan beragam reaksi. Bahkan seorang pemuka agama ikut berceramah “sejarah” tentang kebiadaban laskar Pao An Tui semasa revolusi itu.

Belakangan diketahui kalau informasi peresmian itu bohong belaka. Menteri dalam negeri tidak pernah meresmikan monumen laskar Pao An Tui, melainkan monumen laskar Tionghoa-Jawa yang memberontak melawan VOC tak lama setelah peristiwa pembantaian Tionghoa di Batavia 1740. Monumen tersebut merupakan simbol persahabatan bangsa Jawa dengan Tionghoa di masa lalu dalam melawan kolonialisme Belanda. Namun apa daya, kabar hoax telah menyebar ke mana-mana, dan berpotensi menimbulkan kebencian terhadap kelompok etnis Tionghoa.

Tujuan pemutarbalikan itu tentu tak lain adalah untuk mendelegitimasi peran orang-orang Tionghoa di dalam membangun republik ini. Ujungnya bisa ditebak: orang Tionghoa tak bisa ikut berperan lebih di dalam urusan politik, apalagi jadi kandidat kepala daerah. Tujuan lainnya adalah mendelegitimasi pemerintah yang dituduh telah tunduk pada kelompok etnis tertentu.

Di era media sosial inilah sejarah bisa punya dua sisi yang membahayakan: ia bisa jadi sarana pertukaran informasi masa lalu, namun bisa juga mengancam keutuhan republik karena pemutarbalikan fakta sejarah yang membakar semangat kebencian. Di sinilah peran penting sejarawan untuk ambil bagian di dalam proses publik ini dan tak hanya berdiam diri di atas menara gading atas dasar kecemasan keberpihakan serta kehilangan netralitas.

Netralitas dalam pandangan saya hanya berlaku ketika seorang sejarawan melakukan proses rekonstruksi atas peristiwa di masa lalu atas nama keberimbangan penyampaian fakta. Imbang di sini dimaksudkan sebagai upaya untuk menyampaikan apa saja temuan yang bisa digunakan guna mendekati kebenaran peristiwa sejarah itu sendiri. Ibarat peristiwa kecelakaan kendaraan pada sebuah perempatan jalan, maka seorang sejarawan harus mampu menggali keterangan dari empat sudut sisi kesaksian yang berbeda.

Namun ketika sejarawan dimintai untuk memahami situasi kekinian, dia harus mampu berpihak pada kebajikan dan kemaslahatan publik. Dalam titik ini dia tak bisa lagi bersikukuh untuk netral dalam arti enggan terlibat di dalam proses menentukan arah jalannya sejarah berbekal pengetahuannya atas apa yang terjadi di masa lalu itu. Sejarawan harus merelakan dirinya menjadi intelektual organik yang ikut di dalam arus perubahan demi membangun republik yang lebih adil, menjunjung kesetaraan serta menjamin keberagaman.

Bukan mau apa-apa, tetapi seperti sudah diuraikan di atas, akhir-akhir ini aroma perpecahan menyebar kemana-mana. Praktik penyebaran kebencian bahkan menggunakan versi dan logika sejarahnya sendiri. Selain dalam soal rasialisme, muncul pula kecenderungan klaim sepihak yang menyebutkan bahwa kemerdekaan Indonesia hanya semata peran dari satu golongan agama mayoritas saja.

Merujuk pada teori falsifikasi Karl Popper, ditemukannya seekor angsa hitam bisa menggugurkan hipotesa bahwa semua angsa berwarna putih. Logika yang sama bisa digunakan dalam memahami perjalanan sejarah perjuangan negeri ini dalam membebaskan diri dari cengkeraman kolonialisme.

Dengan cara pandang itulah generasi muda di masa kini diharapkan bisa lebih adil dalam memandang sejarah dan memahami kehidupannya di masa kini sebagai hasil gotong-royong semua kalangan yang melawan penindasan atas nama apapun. Lagi-lagi di sinilah sejarawan mengambil peran penting untuk menentukan arah masa depan republik yang lebih berpihak kepada publik.

Oleh karena itu penting untuk menyampaikan pesan-pesan kebajikan dari masa lalu dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh publik. Kita tentu sadar jika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto kita menghadapi persoalan karena informasi terlalu banyak disensor. Sebaliknya kini kita menghadapi persoalan berhamburnya informasi yang menimbulkan bermacam syak wasangka. Jika dulu masyarakat hanya menerima pendidikan sejarah yang benar berdasarkan versi resmi pemerintah, sekarang ini berbagai macam cerita sejarah bisa ditemukan hanya dengan mengklik google.

Jika para sejarawan generasi Sartono menyampaikan pesan-pesan sejarahnya melalui media konvensional dan di dalam ruang-ruang kelas serta seminar, sejarawan di masa kini kian bertambah beban tugasnya berkat maraknya penggunaan media baru melalui jaringan internet. Sebagai penyambung kisah kehidupan masa lalu dengan masa kini, sejarawan seyogianya bisa lebih aktif menyiarkan pengetahuan sejarah di era yang penuh komodifikasi dan politisasi atas sentimen-sentimen yang berpotensi menghancurkan bangunan republik yang telah didirikan oleh para Bapak dan Ibu pendiri bangsa.

Dan buku yang berada di dalam genggamannya Anda ini adalah satu dari sekian ikhtiar menjadikan republik sebagai rumah anak bangsa dari berbagai latar belakang untuk mencapai cita-cita kehidupan bersama yang lebih baik. *Historia magistra vitae*, sejarah adalah sebaik-baiknya guru kehidupan. Merdeka!

Jalan Panjang Membangun Republik

Sebuah Catatan Pendahuluan

KEPULAUAN NUSANTARA sebelum datangnya kolonialisme adalah rangkaian kepulauan yang diperintah dalam sistem feodal dan monarki yang berdiri sendiri-sendiri—bahkan tak jarang bermusuhan satu sama lain. Di beberapa pulau berdirilah sistem pemerintahan dinastik dalam bentuk kerajaan-kerajaan yang besar dan berkesinambungan. Pada saat bersamaan di banyak pulau lain yang ada adalah sistem-sistem kekuasaan yang lebih bersifat feodal dan lokal. Dalam praktiknya, entah itu dalam sistem monarki luas atau feodal lokal, kekuasaan atas wilayah dan penduduk cenderung berada di tangan keluarga-keluarga tertentu dan dilaksanakan secara turun-temurun. Kepemimpinan tidak dibentuk atas kehendak rakyat atau wakil-wakilnya, melainkan hampir selalu berada di tangan sang penguasa tunggal berserta para kerabat dan pendukungnya.

Sistem-sistem pemerintahan tradisional seperti itu secara bertahap mengalami perubahan seiring dengan datangnya kekuatan-kekuatan kolonial, baik yang berasal dari Eropa maupun dari Asia sendiri. Sementara itu pada periode yang sama—dan juga jauh sebelum itu—Kepulauan Nusantara menerima berbagai pengaruh dari luar. Pengaruh itu datang dari India, Tiongkok, Persia, Yaman, Saudi Arabia, Portugis maupun berbagai tempat lain. Secara bertahap unsur-unsur dari luar itu merasuk ke dalam keseharian hidup penduduk Nusantara. Dari urusan pemeluk agama hingga masalah

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa karya-karya akademik para narasumber kita ini banyak yang sangat penting dan sudah menjadi “klasik” dalam seluk-beluk studi akademis tentang sejarah Indonesia, khususnya kajian tentang sejarah Indonesia pada paropertama abad ke-20.

kuliner, dari cara berpakaian hingga sistem pemerintahan, semuanya amat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang datang dari bangsa-bangsa lain tersebut. Jadilah Kepulauan Nusantara sebagai sebuah entitas geografis dan sosial yang sangat beragam. Keragaman etnis dan linguistik yang ada kini semakin diperkaya dengan bentuk-bentuk keragaman lain, entah itu keragaman religius, tradisi, sistem pemerintahan, seni, atau unsur-unsur keragaman yang lain.

Menarik untuk disimak bahwa ketika akhirnya sistem kolonial berakhir, seiring dengan

berakhirnya Perang Dunia Kedua, para perintis dan pejuang kemerdekaan memutuskan untuk *tidak* kembali ke sistem monarki atau feodal sebagaimana yang dianut di Kepulaun Nusantara pada masa pra-kolonial. Mereka lebih memilih untuk membangun sebuah sistem pemerintahan moderen dalam bentuk republik kesatuan yang dasarnya adalah demokrasi. Mereka tidak ingin bahwa kekuasaan hanya berada di tangan kelompok atau keluarga-keluarga tertentu tanpa melibatkan kehendak dan kebutuhan rakyat. Mereka lebih berhasrat untuk membangun sebuah negara kesatuan moderen yang bernama “Republik Indonesia”. Dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, mereka berusaha mendirikan sistem pemerintahan baru itu, sebagai ganti atas sistem pemerintahan kolonial dan pendudukan militer yang telah menimbulkan begitu banyak penderitaan segenap penduduk Nusantara.

Bisa diduga, republik kesatuan yang coba dibangun oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan itu harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Dibutuhkan perjuangan yang tidak singkat untuk membangun

7
sebuah republik. Sebagaimana kita ingat, dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada akhir tahun 1949, misalnya, ada tekanan kuat untuk membentuk Indonesia sebagai sebuah republik federal disertai hubungan (baca: ketergantungan) khusus dengan si bekas negara penjajah. Ada juga keinginan untuk menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara berbasis agama. Selain itu terjadi pula pemberontakan-pemberontakan daerah dengan tujuan memisahkan diri dari Republik. Belum lagi berbagai bentuk intervensi asing yang tujuannya merobohkan Indonesia sebagai sebuah negara Republik kesatuan. Di tengah kuatnya tekanan dan gejolak yang datang baik dari luar maupun dari dalam negeri itu para pendiri Republik dan anggota elit politik lainnya tampak berusaha sekuat tenaga untuk bisa tetap bersatu, bahu-membahu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia sebagai sebuah Republik kesatuan yang dasarnya adalah demokrasi.

Diterpa Krisis

Dinamika berbagai usaha untuk bisa tetap bersatu, bahu-membahu dan berjuang bersama demi tegaknya Indonesia sebagai sebuah Republik kesatuan yang dasarnya adalah demokrasi itulah yang menjadi tema pokok buku Anda ini. Melalui buku ini Anda dan kita semua hendak kembali belajar bersama tentang dinamika sejarah Indonesia dalam proses menuju sebuah Republik kesatuan. Secara khusus kita akan melihat dinamika tersebut dari periode pra-kemerdekaan hingga periode pertengahan tahun 1990-an.

Dalam upaya untuk kembali belajar bersama itu, melalui buku ini kita akan dipandu oleh para ilmuwan senior yang telah menghabiskan banyak pemikiran dan waktu hidup mereka untuk melakukan penelitian dan penulisan tentang sejarah Indonesia, khususnya sejak periode akhir masa kolonial. Merekalah yang dalam buku ini akan menjadi narasumber kita. Setiap narasumber akan kita minta untuk bertutur tentang tema atau periode tertentu, khususnya yang menjadi spesialisasi kajian akademik mereka. Tentu dalam perspektif sejarah Indonesia yang lebih luas. Format yang kita pilih adalah format tanya jawab dan percakapan informal disertai komentar-komentar yang sesuai. Sedapat mungkin pertanyaan-pertanyaan

yang kita ajukan akan didasarkan pada karya-karya atau aktivitas mereka terkait dengan sejarah Indonesia.

Bersama Profesor Sartono Kartodirdjo, misalnya, kita akan bertanya-jawab dan bercakap informal tentang bagaimana para pemuda Indonesia yang belajar ¹⁴ di Negeri Belanda pada awal abad ke-20 telah mulai memikirkan dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bahkan sebelum lahirnya rumusan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Melalui apa yang mereka sebut sebagai “Manifesto Politik“, menurut Prof. Sartono, para pemuda-pelajar itu telah mencita-citakan sebuah Indonesia yang: (a) dipimpin oleh orang-orang Indonesia hasil pilihan rakyat Indonesia sendiri; (b) dalam perjuangan kemerdekaannya tidak perlu dibantu oleh orang-orang luar; dan (c) sadar akan perlunya persatuan demi perjuangan bersama. Prof Sartono lantas menambahkan: “Dilihat dari itu maka Sumpah Pemuda itu hanyalah merupakan amplifikasi saja dari Manifesto Politik.“ Ia juga mengingatkan kita bahwa praktik korupsi di Indonesia itu merupakan bagian dari praktik feodalisme masa lalu. Padahal, menurut dia, sebenarnya semangat feodal itu sudah coba ditentang oleh kaum muda. Ditunjukkan bahwa dalam Kongress pertama Budi Utomo di Yogyakarta, dengan sengaja dihapuslah segala bentuk pembedaan peserta yang dasarnya adalah status sosial-politik. Entah itu bupati, wedana, mahasiswa, atau sekedar rakyat biasa semuanya diperlakukan sama. Tentang korupsi sendiri Prof Sartono berujar: “ [Dari sistem] feodalisme itu antara lain [adalah] birokrasinya ... yang diteruskan di Indonesia oleh Republik. Dioper [begitu] saja birokrasinya, sehingga timbul korupsi. Tidak ada pemisahan antara milik publik dan milik pribadi.“

Bersama Dr. Takashi Shiraisi, seorang ahli tentang Indonesia asli Jepang, kita akan berbincang tentang bagaimana pemerintah kolonial Belanda memutuskan untuk menjadikan Digul di Papua sebagai tempat pembuangan orang-orang Indonesia yang memusuhi penjajah Belanda. Dalam perbincangan ini akan kita lihat bagaimana pada awalnya Digul adalah tempat pemerintah kolonial membuang mereka yang terlibat dalam pemberontakan melawan Belanda yang dilancarkan oleh orang-orang muda anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1926-1927. Akan kita lihat pula bagaimana dalam perjalanan selanjutnya, setidaknya sejak sekitar

tahun 1930-an, tempat itu mulai dijadikan tempat pembuangan bagi orang-orang muda lain yang juga dipandang membahayakan kekuasaan kolonial di Hindia Belanda, termasuk Sjahrir dan Hatta. Tentang situasi di Digul sendiri, Dr. Shiraisi antara lain mengatakan: “... Menurut gubernur propinsi Maluku, Boven Digul itu ideal sebagai tempat buangan karena 100% terisolasi. Jaraknya dari muara sungai Digul itu 455 kilometer ke arah hulu, ke pedalaman. Itu sama dengan jarak Jakarta ke Semarang atau dari Amsterdam ke Paris. Tapi semuanya hutan lebat, rawa-rawa yang banyak nyamuk Malaria dan di sungainya banyak buaya.” Apa mau dikata, situasi pembuangan ke Digul yang begitu mengerikan itu ternyata tidak menyurutkan semangat para pejuang untuk mewujudkan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Dr. Benedict Anderson dari Cornell University, A.S., pada bagian berikutnya akan mengajak kita untuk bicara mengenai bagaimana orang-orang yang ia kategorikan sebagai kelompok “pemuda” telah menjadi pelopor dalam perjuangan mengusir penjajah dari bumi Indonesia dalam revolusi kemerdekaan. Tentang sebutan “pemuda” itu ia antara lain mengatakan: “Saya kira [sebutan] *anak muda* harus dibedakan dari [sebutan] *pemuda*. Menurut saya, kalau yang dikatakan anak muda itu berasal dari kelompok yang biasanya usianya 15-19 tahun. Jadi *cuma* [sebutan] demografis.” Sementara itu, masih menurut Dr. Anderson: “Kalau pemuda, jelas berarti, pada jaman itu, [yakni] sebagian dari golongan demografis yang merasa diri ikut perjuangan. Maka pada jaman itu sebutan pemuda itu merupakan sebutan yang sangat terhormat.” Peneliti tentang Indonesia dan penulis buku *Revolusi Pemuda* itu selanjutnya akan menguraikan kepada kita apa konteks yang melatar belakangi lahirnya militansi pemuda pada waktu itu, serta bagaimana para pemuda berelasi dengan elemen-elemen lain dalam masyarakat, yang juga sedang berjuang dalam revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Anderson mengatakan: “Adanya istilah revolusi pemuda, revolusi kemerdekaan, revolusinya Bung Karno dan pada suatu waktu ada pula revolusi yang dipimpin Presiden Soeharto, saya kira ini membuktikan betapa ‘sakti’-nya kata *revolusi* itu.”

Sementara itu Dr. George Kahin, yang adalah seniornya Benedict Anderson di Universitas Cornell, A.S., akan mengajak kita untuk berbagi pengetahuan tentang bagaimana elit politik pada dekade 1940-an, 1950-an dan 1960-an berkiprah dalam rangka mempertahankan kemerdekaan dan membangun sebuah republik yang baru. Selain kokoh dan berkesinambungan, di mata Dr. Kahin, tampaknya republik yang diperjuangkan para elit politik waktu itu adalah juga sebuah republik yang berhaluan kerakyatan. “Sebagian besar pemimpin revolusi mendukung bentuk-bentuk tertentu sosialisme”, tuturnya. Ia melanjutkan: “Banyak pemimpin Masjumi, seperti Natsir dan Sjafrudin Prawiranegara dan Mohammad Roem memandang diri sebagai ‘sosialis religius.’” Perlu dicatat bahwa pengetahuan yang ingin ia bagi bersama kita dalam buku ini bukan hanya pengetahuan yang ia peroleh dari orang lain, melainkan yang juga ia peroleh dari pengalaman pribadi di lapangan. Sebagaimana kita tahu, saat revolusi kemerdekaan RI sedang berlangsung, Dr. Kahin sedang berada di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Tak jarang ia bertemu secara langsung maupun tak langsung dengan tokoh-tokoh kunci dalam Revolusi Indonesia.

Dr. Clifford Geertz, seorang antropolog kawakan yang pada tahun 1950-an melakukan penelitian di Jawa Timur dan Bali, akan mengingatkan kita betapa dinamisnya situasi di tingkat masyarakat di Indonesia pada dekade itu, baik di ranah sosial, ekonomi maupun politik. Pengamatan tentang tahun 1950-an itu penting, menurutnya, untuk melihat latar belakang yang mendorong apa yang terjadi pada pertengahan tahun 1965, yakni ketika di Indonesia terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dituduh sebagai orang-orang yang berhaluan “kiri”. Tentang orang-orang Indonesia sebagai pelaku sejarahnya sendiri, Dr. Geertz mengatakan: “Ada ... kecenderungan untuk melihat Indonesia sebagai bentukan kolonial Belanda. Padahal kita harus melihat Indonesia sebagai pelaku.” Ia lebih percaya bahwa orang-orang Indonesia—dan bukan pihak-pihak asing—yang menentukan sejarah Indonesia. “Mereka sendirilah yang membuat sejarah,” tegasnya.

Dr. Daniel Lev, alumnus Universitas Cornell dan dosen ilmu politik di Universitas Washington, A.S., akan mendampingi kita untuk mencermati sejarah Indonesia pada periode tahun 1950-an. Bertolak dari studinya tentang

politik Indonesia antara tahun 1957 dan 1959 ia sempat menyebut sejumlah syarat penting yang harus dipenuhi untuk bisa membangun sebuah republik yang kokoh. Selain demokrasi dan kuatnya lembaga-lembaga pemerintah serta lembaga-lembaga masyarakat, syarat penting itu menurutnya juga menyangkut perlunya kontrol atas kelompok elit politik disertai pengelolaan yang cerdas atas modal/kapital yang ada. Sebagaimana disampaikan dalam buku ini, studinya tentang politik Indonesia telah mendorongnya untuk mengatakan: “³Harus diakui, dari segi politik-sosial-kebudayaan, Indonesia itu merupakan salah satu negara dan masyarakat yang paling kompleks di seluruh dunia.” Oleh karena itu menurut dia Republik Indonesia harus dikelola dengan baik dan melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat. Iapun lantas berpesan: “³Dalam [hidup bermasyarakat] kita harus selalu memikirkan: apa tujuan negara itu? Siapa yang bakal mendapat untung dari negara itu? Untuk apa masyarakat berkumpul membuat negara itu?”

Goenawan Mohamad, seorang intelektual terkemuka yang sebagai sastrawan sudah aktif berkarya pada awal tahun 1960-an tetapi juga turut terlibat dalam gerakan Reformasi pada pertengahan tahun 1990-an, akan mengajak kita untuk membahas dinamika perjuangan melawan pemerintahan otoriter Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Katanya tentang kegemaran Orde Baru untuk mengontrol informasi yang beredar di masyarakat: “Pemerintah yang tidak pernah dihadapi oleh pertanyaan-pertanyaan moral dan tidak biasa bertanggung-jawab semakin lama akan [semakin] hilang kapasitasnya untuk bisa [bersikap] persuasif.” Sekaligus ia merasa prihatin atas kurangnya kesadaran sejarah di kalangan anak muda: “Pengalaman dari generasi ke generasi itu tidak dihubungkan. Karena yang menyimpan memori ini tidak ada, kita pun harus belajar dari nol lagi. Karena tidak ada *institutional memory* itu kita jadi gampang mengulang lagi kesalahan sejarah”. Padahal, menurut pendiri majalah *Tempo* itu: “Adanya pemahaman sejarah yang baik bisa membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan.”

Selanjutnya Dr. Bill Liddle, seorang pengajar ilmu politik di Ohio State University di A.S., akan menyampaikan pandangan-pandangannya tentang Indonesia pada pertengahan tahun 1990an, ketika menurutnya Orde Baru

sedang menguat. Menurut Dr. Liddle dalam wawancara di buku ini, sejak tahun 1993 Orde Baru mengalami penguatan. Salah satu alasan yang ia pakai adalah: “Soeharto [telah] berhasil mengontrol kembali ABRI setelah menggunakan beberapa perwira ABRI ‘hijau’ untuk mengusir yang ‘merah-putih.’” Apa boleh buat, tak lama setelah wawancara dengan Dr. Liddle ini rejim pemerintahan Orde baru justru makin merosot, untuk akhirnya tumbang diterpa krisis ekonomi, disusul desakan gerakan reformasi yang dipelopori oleh anak-anak muda.

Pada bagian akhir buku Anda ini kami akan menambahkan tulisan dari Dr. George Kahin yang menurut kami cukup menarik dan relevan dengan percakapan kita. Melalui tulisan ini Dr. Kahin berusaha menepis anggapan bahwa para ilmuwan sosial yang melakukan penelitian di negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) memiliki kaitan dengan dinas intelejen Amerika Serikat atau perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki kepentingan di negara-negara tersebut. Untuk memperkuat sanggahannya itu Dr. Kahin antara lain bercerita tentang bagaimana pada suatu saat di Yogyakarta ia pernah didekati oleh seorang agen rahasia Amerika Serikat dan coba direkrut untuk bekerjasama dengannya, tetapi dengan tegas ia menolak. Tulisnya: ² “While carrying out dissertation research in Indonesia in 1948 I had bitterly antagonized the CIA’s first representative there during his brief visit to the revolutionary capital of Yogyakarta when he insisted that as the only U.S. citizen living there I had a duty to help him, and I categorically refused, causing him to denounce me both in Washington and Indonesia as “pro-Communist.” Dr. Kahin tidak takut bahwa sebagai akibat dari penolakannya itu ia dianggap tak loyal pada negaranya, bahkan dituduh sebagai simpatisan komunis.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa karya-karya akademik para narasumber kita ini banyak yang sangat penting dan sudah menjadi “klasik” dalam seluk-beluk studi akademis tentang sejarah Indonesia, khususnya kajian tentang sejarah ⁴ Indonesia pada paro-pertama Abad ke-20. Buku-buku itu antara lain: ⁴ *The Peasants’ Revolt of Banten in 1888* (Springer Netherlands: 1966) karya ⁹ Sartono Kartodirdjo; *An Age in Motion: Popular Radicalism in Java, 1912-1926* (Cornell University Press: 1990) karya

Takashi Shiraisi; *Revoloesi Pemuda: Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa, 1944-1946* (Pustaka Sinar Harapan: 1988) karya Benedict Anderson; *Subversion as Foreign Policy* (The New Press, New York: 1995) karya George McT. Kahin and Audrey R. Kahin; *The Transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 1957-1959* (Cornell Modern Indonesia Project: 1966) karya Daniel S. Lev; dan *The Interpretation of Cultures* (Basic Books: 1977) karya Clifford Geertz. Bersama buku-buku lain yang mereka tulis maupun yang ditulis oleh para peneliti tentang Indonesia yang lain, buku-buku tersebut telah menjadi acuan bagi studi-studi tentang Indonesia hingga sekarang.

Mengingat bahwa apa yang disampaikan di sini hanyalah hasil (dan seringkali bahkan hanya bagian) dari percakapan dengan masing-masing narasumber, diharapkan bahwa apa yang disampaikan dalam buku ini tidak akan menghalangi Anda untuk secara langsung membaca sendiri karya-karya publikasi mereka itu. Sebaliknya, kami justru ingin mendorong Anda untuk membaca karya-karya tersebut.

Re-kontekstualisasi

Sebagaimana diketahui, pada tahun 1999 buku Anda ini pernah diterbitkan dengan format yang berbeda dan dalam jumlah yang terbatas dengan judul *Mencari Demokrasi*. Selama beberapa tahun terakhir ini berbagai pihak ingin mendapatkan dan mempelajari kembali buku tersebut, namun ternyata sudah tidak tersedia lagi di pasaran. Sejak itu muncullah desakan untuk menerbitkannya kembali. Bertolak dari desakan-desakan itulah buku tersebut kami olah lagi untuk bisa kami hadirkan kembali ke hadapan Anda sekarang ini. Dalam proses penerbitan kembali buku ini kami telah melakukan sejumlah editing, revisi, serta penambahan materi. Selain itu kami juga melakukan semacam “re-kontekstualisasi” supaya gagasan-gagasan dan informasi yang disampaikan dalam wawancara yang telah berlangsung sekian tahun yang lalu itu tetap bisa kontekstual dan relevan untuk hari ini. Itulah sebabnya kami juga memutuskan untuk memberi judul yang baru, yang menurut kami juga lebih sesuai karena lebih mencerminkan isi buku.

Kami berharap bahwa revisi dan perubahan yang kami lakukan itu tidak hanya akan menjadikan buku ini lebih kontekstual dan nyaman dibacanya, melainkan juga bisa ikut mendorong Anda dan kita semua untuk semakin bersemangat dalam mempelajari sejarah berikut mengolah pengalaman bersama kita sebagai bangsa. Telah kita lihat di depan betapa panjang dan berlikunya jalan yang ditempuh oleh para pendahulu kita dalam membangun republik yang kita hidupi sekarang. Ada banyak sekali tantangan dan hambatan yang harus mereka hadapi untuk membangun sekaligus mempertahankan sebuah republik yang merdeka dan berdaulat. Siapa tahu di masa depan perjalanan dan perjuangan kita untuk mempertahankan Republik ini juga tidak akan kalah panjang dan berliku. Untuk itu perlulah kiranya bahwa sekarang ini kita pun mulai menyiapkan diri.

Baskara T. Wardaya SJ

Editor

Daftar Isi

Ucapan Terima Kasih — vii

Kata Pengantar, Bonnie Triyana — xi

Jalan Panjang Membangun Republik; Sebuah Catatan Pendahuluan — xvii

Bab Satu: Feodalisme, Korupsi dan Kolusi — 1

Sartono Kartodirdjo Tentang Pergerakan Nasional dan Pentingnya Sejarah

Bab Dua: Digul Sebagai Signpost — 17

Takashi Shiraishi Tentang Politik Kolonial Tahun 1920-an dan 1930-an

Bab Tiga: Revoloesi Pemoeda — 45

Benedict Anderson Tentang Perjuangan Kemerdekaan

Bab Empat: Equitable Distribution — 91

George McT. Kahin on the Indonesian Revolution

Bab Lima: Awas Buaya! — 113

Clifford Geertz Tentang Dinamika Sosial-Politik Tahun 1950-an dan 1990-an

Bab Enam: Lembaga, Elite, dan Kontrol — 155

Daniel S. Lev Tentang Demokrasi Tahun 1950-an dan 1990-an

Bab Tujuh: Menyalakan Lilin dalam Kegelapan — 189

Goenawan Mohamad Tentang Perjuangan Demokrasi 1990-an

Bab Delapan: Militer dan Orde Baru — 223

William Liddle Tentang Perjuangan Demokrasi tahun 1990-an

Bab Sembilan: ²The Making of Southeast Asian Studies: Cornell's Experience — 246

Oleh George McT. Kahin

Penutup — 257

Daftar Pustaka — 261

Indeks — 263

Tentang Editor — 268

Bab Satu

Feodalisme, Korupsi, dan Kolusi

Sartono Kartodirdjo

*Tentang Pergerakan Nasional dan
Pentingnya Sejarah*



PADA MASA hidupnya Profesor Dr. Sartono Kartodirdjo dikenal sebagai seorang perintis dalam studi sejarah di Indonesia. Dia membalik penulisan sejarah dari berorientasi Nerlando-sentris ke penulisan yang berorientasi Indonesia-sentris; dari berorientasi elitis ke berorientasi kerakyatan; dari berorientasi pada “orang-orang besar” ke berorientasi pada rakyat kebanyakan. Banyak buku dan makalah menarik telah ia tulis, termasuk ⁴ *The Peasants’ Revolt of Banten in 1888: Its Conditions, Course and Sequel: A Case Study of Social Movements in Indonesia* (1966); ⁶ *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia* (1982); *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900, Dari Emporium* ¹⁶ *sampai Imperium* (1987); *Perkembangan Peradaban Priyayi* (1987); *Pembangunan Bangsa tentang Nasionalisme, Kesadaran dan Kebudayaan Nasional* (1994); *Sejak Indische sampai Indonesia* (2005).

Dilihat dari itu maka Sumpah Pemuda itu hanyalah merupakan amplifikasi saja dari Manifesto Politik.

pentingnya sejarawan mempelajari “Manifesto Politik” yang dicanangkan para perintis pergerakan nasional pada tahun 1923, lima tahun sebelum diumumkannya Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Salah satu aspek yang ditekankan dalam Manifesto Politik itu, menurut Pak Sartono, adalah: “dalam keadaan Indonesia yang terdiri dari pelbagai unsur etnik, tanpa adanya persatuan, perjuangan kemerdekaan akan tidak akan berhasil. Jadi ini adalah masalah kesatuan, yang nantinya menjadi akar gagasan persatuan dan kesatuan”. Oleh karena itu tentang Sumpah Pemuda ia mengatakan: “Dilihat dari itu maka Sumpah Pemuda itu hanyalah merupakan amplifikasi saja dari Manifesto Politik”. Sementara itu tentang sejarah pada umumnya ia mengatakan: “... Perlu ditunjukkan bahwa sejarah itu tidak hanya berkaitan dengan masa lampau saja, melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang aktual. Sejarah bisa membantu mencari solusi bagi masalah-masalah yang ada sekarang”.

Perbincangan berlangsung di kediaman Sang Profesor di kompleks perumahan dosen, di kampus Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta. Perbincangan ini ditemani oleh kudapan tradisional dan dua gelas jus jeruk yang pekat warna kuningnya. Di bawah adalah petikan dari perbincangan tersebut.

Manifesto Politik

T (Tanya): Dalam beberapa kesempatan Pak Sartono suka menyebut Manifesto Politik. Sepertinya belum banyak yang tahu tentang Manifesto Politik itu. Apakah berkenan memberi pencerahan?

J (Jawab): Begini ya... Kalau ada yang belum banyak mendengar mengenai Manifesto Politik itu dia tidak sendirian. Bahkan kelompok-kelompok

Pada tanggal 30 April 2002 Pak Sartono, demikian kami biasa memanggilnya, bersedia melayani bicang-bincang informal dan tentang sejarah Indonesia yang dilengkapi dengan ungkapan pengalaman pribadi. Ia sangat menekankan

akademi ilmu pengetahuan saja selalu hanya menekankan Sumpah Pemuda. Mereka melupakan, atau bahkan belum mendengar mengenai, Manifesto Politik. Manifesto Politik itu sebenarnya sudah ada sejak tahun 1923; tetapi resmi dicantumkan dalam majalah *Himpunan Indonesia Merdeka* itu April 1925. Nah, di situ ada tiga pokok yang dicanangkan. Pertama, Pemerintah Indonesia itu sewajarnya dipilih oleh rakyat Indonesia sendiri dari antara tokoh-tokoh Indonesia. Ini *kan* sudah merupakan dasar dari demokrasi atau kedaulatan rakyat. Kedua, dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia tidak memerlukan bantuan dari pihak manapun. Nah, ini penjelasannya harus dilihat pada latar belakang waktu itu. Tahun 1925 itu Liga Komunisme itu sedang maju. Ada bahaya komunis akan menghasut atau menguasai gerakan nasionalisme. Maka dengan latar belakang itu baru bisa dipahami mengapa gerakan nasionalisme menolak bantuan dari pihak mana saja. Kalau dalam konteks sekarang ya sudah lain sama sekali, *hehe*.... Ketiga, dalam keadaan Indonesia yang terdiri dari pelbagai unsur etnik, tanpa adanya persatuan, perjuangan kemerdekaan akan tidak akan berhasil. Jadi ini adalah masalah kesatuan, yang nantinya menjadi akar gagasan persatuan dan kesatuan. Dilihat dari itu maka Sumpah Pemuda itu hanyalah merupakan amplifikasi saja dari Manifesto Politik.

Dalam salah satu buku terbitan Penerbit Kompas (Kartodirdjo: 2000) saya membahas masalah Perhimpunan Indonesia dan Manifesto Politik ini. Alasan saya, karena saya merasa masih perlu disebarluaskannya pengertian ini. Hal ini kurang diketahui dan dipahami. Padahal ini merupakan salah satu poin penting dalam rangka membantu menguraikan pembangunan bangsa. Nanti kalau masih ada kesempatan perlu diuraikan lebih lanjut misalnya ajaran-ajaran Bung Karno mengenai Marhaenisme, demokrasi sosial, dan sebagainya.

Nah, itu semua kiranya merupakan beberapa tema yang masih dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk dipahami secara lebih mendalam. Selain itu juga hal-hal yang menyangkut masalah perkembangan dari feodalisme ke demokrasi, masalah nasionalisme sebagai gerakan untuk integrasi berbagai unsur etnis, dan sebagainya.

Nasionalisme

T: Ben Anderson menekankan pentingnya gagasan “proyek bersama” alias common project dalam membangun ke-Indonesia-an. Di beberapa kesempatan ia menekankan bahwa sebagaimana dulu pada jaman Bung Karno nasionalisme bangkit sebagai bagian dari proses reka-bayang komunitas atau “imagined communities”, sekarang ini imajinasi yang sama perlu dibangkitkan kembali oleh kita sebagai bangsa. Dan itu seharusnya menjadi proyek bersama kita.

J: Dengan definisi Ben Anderson itu sebenarnya saya merasa kurang cocok. Perlu dilihat, kapan kita itu bicara soal “*nation*”. *Nation* pada jaman sekarang itu tak lagi bisa dikatakan “*imagined*”. Sekarang *nation* itu ‘kan sudah merupakan realitas. Waktu jaman Bung Karno, jaman pergerakan, memang betul kalau didefinisikan demikian. Tapi kalau sekarang, sudah lain.

Dalam [sebuah] seminar [di] Singapura, Norman Harper—seorang peserta dari Australia—mengatakan bahwa nasionalisme itu tidak ada. Menurut dia nasionalisme itu hanya bahasa orang yang hidup dari penguasa nasional. Nah, itu! Ketika mendengar hal ini Soedjatmoko marah betul. Ia menilai kata-kata demikian sebagai tindakan menyepelekan. Padahal di luar gedung seminar bisa dilihat begitu banyak bendera berkibar. Simbol-simbol dari apa bendera-bendera itu kalau bukan nasionalisme?! Kok bisa-bisanya menganggap nasionalisme itu tak ada.

Jadi kalau saya menangkap mashab-nya Ben Anderson, ya pada waktu kapan kita bicara soal *nation-state* itu. Waktu sedang kita gerakkan dan pada masa pergerakan nasional. Tapi setelah tahun 1950, katakanlah, hal itu sudah merupakan realitas. Anderson juga menerjemahkan *power* itu sebagai “sakti”. Ah, nanti dulu. Orang Amerika itu *mbok ya* belajar bahasanya dulu secara mendalam seperti orang Belanda, baru bicara atau menginterpretasi. Misalnya kata “sakti” itu tadi. Dalam pewayangan tidak cukup hanya sakti. Harus “*sakti mandra guna, mukti wibawa*”. Jadi ada empat unsur. Dan empat unsur ini sebenarnya sama dengan konsepnya Weber. Sebenarnya konsepnya Weber malah kurang satu. Dalam ungkapan *sakti mandra guna*, “*mandraaguna*” itu kan berarti kepandaian dalam segala kesenian dan pengetahuan. *Sakti* itu berkaitan dengan kekuasaan atau *political power*.

Tetapi kalau “*mukti wibawa*”, *mukti* di sini berarti “*material welfare*”. *Wibawa* itu *prestige*. Nah, dalam konsep Weber sudah ada itu. Dengan kata lain, konsep-konsep yang dikatakan Weber itu sudah ada pada kita. Tapi karena kepandaian dalam mengungkapkan, orang-orang itu tampak lebih meyakinkan.

Hal serupa juga terjadi dengan interpretasi Clifford Geertz. Bagaimana bisa dibikin kategori priyayi, santri, abangan? Ini kan kacau. Priyayi itu *kan* lawannya “*wong cilik*”. Sedang abangan itu lawannya santri. Jadi kotaknya itu sebenarnya ada empat. Di satu sisi ada priyayi dan *wong cilik*, di sisi lain ada santri dan abangan. Priyayi itu bisa santri, bisa juga abangan. Itu tergantung di mana. Kalau di Jawa Barat ya dengan sendirinya semua priyayi itu santri. Kalau di Gunung Kidul, Ponorogo, Wonogiri, priyayinya ya abangan. Di daerah Pantai Utara Jawa *wong cilik* itu ya semua santri. Di daerah yang kurang Islamnya *wong cilik* biasanya abangan. Jadi Geertz mencampur aduk. Di konsep dia *wong cilik* malah tak ada sama sekali. Di Pantai Selatan Jawa itu priyayinya ya abangan. Mereka melakukan upacara-upacara agama, tetapi juga masih wayangan, *klenengan*, membakar kemenyan, dan sebagainya.

T: Yang menarik, betapapun kelirunya interpretasi para ahli dari luar itu, dalam hal audience internasional, mereka jauh lebih dikenal.

*J: Nah, itulah. Itulah. Mungkin itu berkaitan dengan masalah komunikasi. Kita tak punya cukup alat-alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan kita. Dalam hal penerbitan mereka lebih baik. Sebenarnya seperti Pak Koentjaraningrat sendiri juga sudah pernah menerbitkan buku tentang *The Javanese Priyayi*. Ia juga sudah mengadakan pembagian-pembagian seperti itu. Tapi ya kurang dikenal. Dalam hal komunikasi itu memang kita kalah. Setiap kali orang omong tentang konsep “sakti” yang diacu pasti Anderson.*

Dalam pembicaraan-pembicaraan kita juga perlu membahas akar dari praktek-praktek KKN [Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, *Ed.*]. Sebenarnya ini kan bisa dikembalikan ke masalah feodalisme. [Presiden] Megawati mendefinisikan feodalisme sebagai “keranjang sampah”. Tapi orang kan tak mengerti bagaimana latar belakang terjadinya feodalisme. Pada konggres Budi Utomo pertama di Yogyakarta sudah ada awal dari berubahnya

feodalisme. Pada kesempatan itu pangeran, bupati dan mahasiswa duduk sejajar dan saling berbicara. Itu sudah terjadi, dan kita bisa memberi arti kepada gejala sejarah itu. Sayangnya dalam pelajaran sejarah biasanya hanya diajarkan bahwa pada tahun 1908 Budi Utomo didirikan.

[Dari sistem] feodalisme itu antara lain birokrasinya ... yang diteruskan di Indonesia oleh Republik. Dioper [begitu] saja birokrasinya, sehingga timbul korupsi. Tidak ada pemisahan antara milik publik dan milik pribadi. Itu oleh pemerintah kolonial para bupati memang dibuat luar biasa kuasanya, karena mereka itu masih dipandang sebagai penggede feodal, diikuti oleh rakyat. Nah, ini memang secara efektif digunakan oleh kolonialisme. Penguasaan atas rakyat cukup dilakukan melalui para bupati. Maka feodalismenya dipertahankan. Dan sampai akhir pemerintahan Belanda tidak dihapus, lalu dipakai oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu korupsi dan kolusinya tetap jalan terus.

Korupsi

T: Dalam kaitan dengan topik ini, salah satu komentar mengatakan bahwa secara ekonomis pemerintah kolonial Belanda menggunakan komunitas Tionghoa sebagai perantara, sedang untuk urusan birokrasi memakai kelompok “pangreh praja”. Nah, oleh pemerintah Orde Baru hal ini diteruskan. Konglomerat Tionghoa tetap dipakai untuk urusan ekonomi, sedang kelompok pangreh praja diganti dengan “pamong praja”.

J: Oh, itu juga bisa. Tetapi sebenarnya dulu di daerah-daerah tertentu, khususnya Jawa Timur, yang diangkat sebagai bupati-bupati itu Tionghoa. Betul itu. Di Surabaya, Lamongan, Sedayu, banyak Tionghoa diangkat sebagai birokrat lokal. Nah, nanti kita juga sampai pada sistem pada jaman Orde Baru itu sebenarnya masih sama dengan sistem di jaman Mataram Kartosuro. Waktu itu di Pantai Utara yang diangkat sebagai bupati-bupati itu biasanya keponakan-keponakan, menantu, atau kerabat lain dari para raja Mataram. Tapi ya logis. Mengapa? Karena jaraknya begitu jauh. Kalau ada pemberontakan, itu mestinya pemerintah pusat harus mengandalkan pemerintah lokal. Pemerintah lokal mana yang bisa diandalkan? Ya para

pejabat yang masih kerabat itu. Itulah bagaimana cara pemerintahan waktu itu dijalankan. Tetapi kalau sekarang hal itu tetap dijalankan, itu tidak ada artinya, *wong* sekarang itu dengan telpon orang bisa berhubungan dengan mana saja. Kalau waktu itu ya fungsional, tetapi sekarang itu tidak. Sekarang ini hal itu membuat semua yang diangkat sebagai pejabat tergantung pada penguasa. Lihat saja apa yang terjadi dalam kabinet-kabinet Pak Harto [Presiden Soeharto]. Kalau ada anggota kabinet yang tak bisa menyelesaikan masalah, ya semuanya lantas terserah Pak Harto. Nah, sebenarnya Pak Harto itu menjadi semakin berkuasa itu ya salah bawahannya. Karena semua lalu mengandalkan Presiden untuk menyelesaikan masalah. Karena mereka itu sangat tergantung pada pengangkatan pribadi. Ada satu yang bisa membangkang, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Tapi beberapa bulan saja ia sudah harus “out”. *Ha... ha... ha...*

Orang sering bertanya bagaimana memberantas korupsi. Ini masalah yang luar biasa besarnya. Nah berkaitan dengan ini, hati saya mengatakan perlunya dibangun suatu kebudayaan yang mampu menimbulkan pribadi yang penuh integritas. Rupanya kebudayaan integritas itu tak dikenal di Indonesia. Bandingkan saja misalnya, dengan di Jepang. Di sana kalau ada seorang menteri yang gagal ia akan langsung mundur atau kadang kala malah bunuh diri. Ini terjadi karena ada rasa hormat diri itu. Ada integritas. Kalau kita ini lain. Pokoknya mendapat harta. Wah, *lha* ini repot. Tak ada budaya yang menjunjung tinggi integritas ini.

T: Di sini, kalau perlu menuduh orang lain dulu sebelum dituduh....

J: Nah, itu! Atau, nanti mengadakan isu lain lagi untuk menutupi yang lama, mengalihkan perhatian. Itu belum masalah politik uang, dan sebagainya. Sekarang ini bahkan demonstrasi pun sudah kena politik uang.

T: Itu memang betul. Pernah dikatakan bahwa di Jakarta setiap pagi ada kelompok orang yang siap dijemput untuk dibayar dan disuruh berdemo. Tema demo terserah pada si penyelenggara. Lalu mereka akan diangkut bus untuk berdemo.

J: O, iya to?

T: Iya, begitu. Mereka itu biasanya juga disertai wartawan-wartawan.

J: Dan biasanya itu adalah “wartawan-wartawan amplop”.

T: Jadi sekarang ini ada profesi baru, yakni profesi demonstrasi.

J: Iya, ya. Dan itu terjadi karena tiadanya budaya integritas itu tadi. Sebenarnya suatu profesi yang dituntut tinggi integritasnya itu kan profesi pengacara. Itu harus tinggi sekali integritasnya. Tapi jaman sekarang, banyak pengacara itu bisa dipertanyakan integritasnya. Dalam salah satu kasus sekarang ini dikatakan bahwa seorang pengacara bisa membayar untuk mengubah kesaksian. Waduh. Ini jauh sekali dari kepribadian integritas itu.

Pertanyaannya, bagaimana budaya integritas ini akan ditumbuhkan? Apakah mau disosialisasikan kepada anak-didik lewat pendidikan dan sebagainya itu masih merupakan masalah. Hal-hal demikian ini perlu disampaikan kepada para praktisi politik ketika mereka berkumpul. Berkaitan dengan hal ini, perlu ditunjukkan bahwa sejarah itu tidak hanya berkaitan dengan masa lampau saja, melainkan juga berkaitan dengan hal-hal yang aktual. Sejarah bisa membantu mencari solusi bagi masalah-masalah yang ada sekarang.

Salah satu hal lain yang juga perlu dibahas adalah pertanyaan mengapa sekarang ini timbul masalah separatisme. Mengapa sekarang ini muncul masalah separatisme, seperti yang terjadi di Aceh [dulu], Papua dan sebagainya? Dalam kaitannya dengan globalisasi, sekarang ini sedang terjadi perubahan antara negara yang dulu itu setengahnya tertutup sekarang menjadi terbuka. Nah, sekarang yang banyak dipikirkan oleh ahli-ahli sosial adalah bagaimana kaitan dan saling ketergantungan antara *the nation-state* dengan *the market*. Sementara *market* menuntut keterbukaan, *nation-state* seringkali bersifat terbatas. Tapi ya ada kalanya proses internasional itu memaksa *nation-state* itu juga mulai membuka batas-batasnya. Nah, liberalisme, demokrasi, itu mau tak mau juga mencapai daerah-daerah pinggiran. Yang saya maksud dengan daerah-daerah pinggiran di sini adalah daerah yang dipinggirkan oleh penguasa pada masa Orde Baru. Pada jaman itu daerah-daerah ini hanya diambil sumber-sumbernya, tetapi tidak diberi apa-apa. Nah ini dengan sendirinya menimbulkan kompleks minder. Maka saya melihat gerakan untuk merdeka atau apa itu paling sedikit itu

bisa dipahami sebagai gerakan untuk emansipasi. Melalui gerakan-gerakan itu mereka ingin membebaskan diri dari pembatasan-pembatasan yang di-impose oleh pusat.

Apa yang dilakukan oleh para perintis pergerakan nasional dulu itu kan juga perjuangan emansipasi. Misalnya yang dilakukan oleh Budi Utomo. Nah, kalau kita memandang secara begitu, kita akan bisa mentolerir adanya gerakan-gerakan itu. Pokoknya wajar bahwa mereka yang dulu begitu banyak dikekang dan dibatasi, sekarang ini diberi kebebasan dalam pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, kalau dipandang dengan cara demikian, kita tak perlu memakai istilah separatisme. Kita bisa memakai istilah emansipasi. Nah, jika kemudian masih ada orang yang ngotot mau merdeka, kepadanya bisa diterangkan atau dipertanyakan lebih lanjut: emansipasi ini akan berjalan dengan lebih baik, lebih lancar dalam rangka kesatuan atau secara terpisah? [Pak Sartono lalu memberi contoh Timor Leste yang setelah berpisah dengan Indonesia mengalami banyak kesulitan, *Ed.*]. Beberapa contoh menunjukkan bahwa berada dalam rangka kesatuan itu bisa memperlancar proses emansipasi itu. Tentang bagaimana kemudian bentuk kebebasan dilaksanakan apakah dalam bentuk otonomi seluas-luasnya atau bagaimana itu memang masih merupakan masalah lain....Yang penting proses emansipasi itu harus terjadi. Hanya masalahnya apakah dalam rangka kesatuan atau secara terpisah. Lha, kalau seperti Timor Leste dulu mereka mengadakan plebisit [penetapan pendapat, *Ed.*] dan menghendaki terpisah ya silakan. Persoalannya, banyak masalah yang sekarang ini ada sebenarnya ditimbulkan pada masa Orde Baru.

T: Tapi sekarang ini Orde Baru sudah tidak ada, karena adanya gerakan Reformasi.

J: Berkaitan dengan masalah reformasi, semangat demokrasinya bisa dikaitkan dengan jaman pergerakan nasional, misalnya sebagaimana tercermin dalam Manifesto Politik itu tadi. Masalah liberalisme juga kait-mengkait dengan masalah demokrasi. Terus masalah penegakan hukum. Sebenarnya malah pada jaman Hindia Belanda hukum itu lebih tegak daripada setelahnya, *ha... ha... ha...*

Setelah Reformasi konon ada seorang jaksa yang istrinya mengeluh bahwa sekarang ini “baru sepi”. Waduh, ini menyedihkan. Baginya sepi itu artinya tak banyak perkara. Kalau banyak perkara berarti banyak uang yang masuk.

Hubungan Indonesia-Amerika

T: Bagaimana pandangan Pak Sartono tentang hubungan Indonesia-Amerika, khususnya dalam konteks Perang Dingin?

J: Berkaitan dengan hubungan Indonesia-Amerika itu tentu ada pasang surutnya. Sebenarnya kalau pandangan saya menghadapi politik Amerika terhadap Indonesia secara umum politik Amerika itu tidak konsisten. Misalnya soal *free trade*. Mereka mengharuskan 30 persen import *steel*.

Di Amerika pada masa pemerintahan Presiden [George H.W.] Bush laku sekali sebuah buku tentang *stupid leadership*. Waktu itu Presiden Bush mengatakan bahwa masalah perang melawan terorisme adalah perang agama. Entah *ketrucut* [keceplosan] atau bagaimana pada suatu waktu ia menyebut perang melawan terorisme itu sebagai “*crusade*”. Wah, ini kan malah mengobar-ngobarkan luka lama Abad Pertengahan. Memang tampak agak, maaf, *stupid*. Wah ... Mereka mengkritik kita ber-KKN. Tapi kasus perusahaan Enron di AS waktu itu juga menunjukkan hal yang sama, yakni usaha untuk menutup-nutupi malah melibatkan Wakil Presiden mereka. Setelah itu di Venezuela malah keterlibatan Amerika dalam kup [kudeta] menentang [Presiden Hugo] Chavez jadi ketahuan.

T: Amerika sering mengaitkan Presiden Sukarno dengan komunisme, sebagai justifikasi atas upaya menggesernya dari kekuasaan. Menurut Pak Sartono bagaimana kaitan antara Bung Karno dengan komunisme?

J: Sebenarnya bagi kita apakah Bung Karno itu komunis? Saya kira tidak. Bukan. Dia memang sering pakai istilah-istilah Marxis, tetapi dia sendiri bukan komunis. Tetapi oleh PKI dia digunakan, karena kelemahan beliau adalah suka disanjung-sanjung.

T: Dan mimpi dia akan kesatuan dan persatuan Indonesia...

J: Iya. Waktu terjadi perebutan Irian Barat, William Frederick itu sebagai mahasiswa pernah dikirim oleh sebuah kelompok ke Indonesia. Ia pun datang ke Indonesia, karena ingin tahu situasi Indonesia. Dan untuk itu ia ingin ketemu Bung Karno. Waktu itu sekitar akhir 1962. Berarti masalah Irian Barat masih berlangsung. Lantas akhirnya dikirimlah Robert Kennedy.

Penyerbuan Timor Timur saja dulu kan didukung oleh Amerika, dengan alasan bahwa Fretilin itu kiri.

Saya sekarang ini meragukan kemampuan baik intelijen Amerika maupun intelijen Indonesia. Intelijen CIA¹² saja yang katanya hebat tapi ternyata kok ya bisa kecolongan hingga terjadi peledakan gedung World Trade Center di New York [pada tahun 2001] itu.

T: Tidak hanya itu. Bahkan Pentagon yang sebenarnya adalah pusat pertahanan AS, juga ikut kena sasaran peledakan dengan pesawat.

J: Nah, itu. Tapi sebenarnya di Indonesia itu ya sama saja. Di Timor Timur dulu terjadi penembakan di Santa Cruz. Selalu tahu-tahu sudah terjadi. Bagaimana kerja intelijen? Padahal mereka ini makan uang anggaran besar sekali.

Amerika sering bersikap arogan. Hal ini tampak misalnya ketika Presiden Bush yang senior berkunjung ke Indonesia. Begitu ketat dan arogannya penjagaan, sehingga ketua protokoler yang mau menjemput Bush di pesawat saja hampir ditolak. Demikian juga yang saya dengar tentang kunjungan Presiden AS ke Jerman. Menjelang kunjungan itu para petugas Amerika meminta supaya pohon-pohon di dekat lapangan pendaratan helikopter kepresidenan ditebang. Orang Jerman menolak. Mereka bilang, kami tak akan menebang pohon-pohon itu. Kalau keberatan ya silakan saja mendarat di tempat lain. Waktu Presiden Reagan ke Bali [tahun 1986, Ed.], ya sama saja. Semuanya harus siap.

Peneliti Asing

T: Pada masa pemberontakan PRRI/Permesta itu CIA [Central Intelligence Agency] melompati begitu saja Kedubes AS di Jakarta berikut Atase Militer-nya.

J: Tidak *fair*-nya, kadang-kadang orang Amerika ini ingin mencari informasi dengan selubung-selubung ilmiah. Pernah ada utusan dari pihak Amerika datang ke saya untuk meminta sesuatu. Mereka bahkan menggunakan surat rekomendasi dari sebuah pusat studi di Jakarta. Rupa-rupanya mereka waktu itu ingin menyelidiki keadaan apakah Suharto sudah benar-benar kritis atau belum. Wah, bagaimana ya? Saya tahu sedikit mengenai pribadi Suharto, dan pengetahuan itu saya dapat dari salah seorang anggota keluarga yang kebetulan menjabat sebagai protokol negara. Dari situ ia tahu mengenai kepribadian Suharto. Saya katakan kepada utusan itu bahwa sebenarnya kalau kita kenal secara pribadi dengan Suharto orangnya itu baik, murah hati, dan sebagainya. Lha mau mengatakan apa lagi? *Ha... ha... ha...* Pada suatu kesempatan lain seorang utusan Ford Foundation datang ke sini. Dia tampak baik dan supel sekali. Kami bahkan mendapat bantuan proyek becak bersama Thailand, Filipina, dan sebagainya. Baik orangnya. Nah pada suatu ketika beredar rumor yang mengatakan, wah, dia itu organ CIA. Beberapa orang lalu tak mau menerima dia lagi. Sebentar saja dia di sini, lantas dipindah ke luar Indonesia. Waduh, lha kalau begini ini caranya, lantas bagaimana? Orang Amerika itu *kok* begitu ya? Kita jadi harus mampu membedakan mana yang ilmiah murni dan mana yang terselubung. Dalam situasi demikian saya sendiri ya pura-pura polos saja, *wong* memang tak tahu politik yang begitu kompleks di dalamnya.

T: Wah, *repot* itu Pak Sartono, kalau cara-caranya begitu.

J : Iya, iya.

T: *Caranya bagaimana Pak kalau kita berhadapan dengan upaya-upaya terselubung demikian?*

J : Ya hanya tergantung pada data macam apa yang ingin mereka ketahui. Kalau datanya adalah data murni ilmiah, ya silakan. Dan, sejauh kita sendiri tahu bahwa tak ada masalah dengan data itu. Nah, tapi kalau itu mengenai tafsiran kita dan menyangkut masalah-masalah strategis, dan sebagainya, ya kita perlu hati-hati. Seperti utusan Ford Foundation itu tadi. Ia adalah seorang sosiolog. Apalagi orangnya baik, dan sebagainya. Tapi kita tak tahu bahwa ternyata ia punya peran sampingan. Berkaitan dengan proyek tukang

becak itu tadi mungkin mereka hanya ingin tahu profil orang miskin di Indonesia itu seperti apa, dan sebagainya. Bagi saya ya silakan. Itu terbuka saja. Nah, tapi kalau di samping itu ia juga mencari hal-hal yang strategis, kita ya harus mewaspadai.

Hal ini sama saja dengan sebuah lembaga penelitian di jaman Orde Baru, yakni ... [sebuah lembaga] yang dulu dipimpin oleh Ali Murtopo itu. Ternyata Ali Murtopo sendiri yang bikin sebuah barisan [pro-kekerasan]. *Waduh ...* Tapi ya digunakan untuk suatu kepentingan politik saja. Pernah dua kali dia coba mengejar saya. Yang pertama ia mengajak untuk menghadiri sebuah seminar di Jepang. Untung saya ada alasan untuk tidak pergi. Wah, dia itu pandai caranya untuk mengajak orang untuk menjadi penganutnya. Ya, pokoknya ia suka menarik-narik orang. Kalau yang diundang itu sifatnya pribadi bolehlah. Tapi kalau yang diundang itu punya lembaga, seperti lembaga pedesaan itu, ya tidak bisa. Karena lembaga itu adalah milik publik dan harus tetap bersifat netral dalam hal-hal seperti itu. Tapi kalau ada rombongan tamu dari Uni Soviet atau Vietnam dan saya disuruh menemani, ya bisa saja. Bagi saya nggak masalah. Mau dicurigai ya terserah ...

Waktu Pak Daoed Joesoef menjabat sebagai menteri, ia pernah mengajak saya untuk menggarap sebuah proyek dari lembaga tersebut mengenai hasil evaluasi Pemilihan Umum. *Waduh*, ia pakai alasan bahwa mereka kekurangan tenaga. Malah pakai iming-iming uang dan sebagainya. Kalaupun saya mau, dasarnya adalah pemikiran bahwa para mahasiswa saya akan punya pengalaman untuk mengadakan penelitian. Bukan untuk mendapatkan uangnya. Kalau mahasiswa saya sudah mulai tanya ini tarifnya bagaimana, ya saya persilakan ke universitas lain saja yang mau membayar lebih tinggi. Lembaga di tempat saya ini hanya bisa memberi sekedar imbalan.

Pengaruh Perang Dingin

T: Berdasar penelitian kami, banyak aspek perkembangan sosial, politik, ekonomi yang terjadi di Indonesia setelah kemerdekaan itu dipengaruhi oleh situasi Perang Dingin waktu itu, khususnya oleh kebijakan-kebijakan Amerika. Dan Amerika ini berperan sejak awal, bahkan pada saat diselenggarakan Konferensi Meja Bundar di Den Haag tahun 1949. Hal ini misalnya tampak

dari peran utusan Amerika, Merle Cochran, yang nantinya akan menjadi Duta Besar AS pertama untuk Indonesia. Cochran berperan besar dalam aspek-aspek pokok yang dibahas dalam konferensi itu, misalnya soal hutang Hindia Belanda terhadap Pemerintah Belanda, soal apakah Indonesia kelak akan berada di bawah Persekemakmuran Belanda atau tidak, serta soal Irian Barat. Tiga poin ini hampir membuat konferensi itu macet total, tetapi menjadi jalan lagi karena adanya mediasi dari Cochran ini. Dan ternyata sebenarnya Cochran ini lebih memihak kepada Belanda daripada kepada pihak Indonesia. Untungnya adalah bahwa para diplomat Indonesia yang hadir waktu itu cukup hebat. Mereka bersedia untuk mengalah sementara demi lancarnya konferensi, lantas diteruskan dengan perjuangan berikut. Misalnya, delegasi Indonesia bersedia ketika dikatakan bahwa Indonesia dibebani hutang sekian juta Gulden—meskipun ya nantinya hutang itu tak sepenuhnya dibayar, ha... ha... ha...

J: Pokoknya merdeka dulu.

T: Betul. Pokoknya merdeka dulu. Seperti soal Irian, misalnya. Pihak Belanda, dengan didukung Cochran, menginginkan agar wilayah itu tetap di bawah kekuasaannya. Delegasi Indonesia mengatakan silakan. Baru nanti masalah ini akan diperjuangkan kembali. Yang penting sekarang kemerdekaan Indonesia itu diakui oleh dunia internasional dulu.

J: Dalam hal Irian ini ternyata nantinya Amerika berubah pandangan. Dalam perkembangan Perang Dingin Amerika takut bahwa kalau masalah Irian ini tak diselesaikan bisa-bisa Indonesia memihak Uni Soviet. Kan repot. Lalu Amerika mendukung Indonesia.

T: Benar. Dan dalam hal ini dua tokoh yang banyak main peran adalah Presiden Sukarno dan Menlu Subandrio. Subandrio kan lama tinggal di Uni Soviet, dan lancar berbahasa Rusia. Maka dia bisa ketemu empat mata dengan Premier Soviet waktu itu, yakni Nikita Khrushchev. Dalam buku memoir Khrushchev, yakni Khrushchev Remembers, dikatakan bahwa Subandrio diutus oleh Sukarno kepadanya guna meminta bantuan untuk merebut Irian Barat. Untuk itu Indonesia butuh senjata dan penasehat militer. Nah, kata Khrushchev: karena Subandrio itu orangnya baik dan dia kenal baik dengannya ya permintaan Subandrio dia kabulkan. Tapi sekaligus Khrushchev berpesan

supaya Subandrio tidak mengatakan kepada siapapun mengenai bantuan militer ini, karena ia takut akan berhadapan langsung dengan Amerika.

J: Ternyata Amerika tahu.

T: Ternyata Amerika tahu. Ternyata setelah Subandrio lapor kepada Sukarno, dalam suatu kesempatan Bung Karno membocorkan isi pembicaraan Khrushchev-Subandrio itu, dan akhirnya kedengaran pihak Amerika Serikat. Karena Amerika takut berkonfrontasi dengan pihak Uni Soviet soal Irian, Washington lalu mulai menekan pihak Belanda supaya melepaskan Irian Barat.

J: Wah, hebat juga itu siasatnya pihak Indonesia.

T: Betul, dan itu terutama siasat Bung Karno dan Subandrio ini. Pinter juga mereka ini. Belanda makin ditekan, terutama oleh presiden Amerika waktu itu, yakni Presiden John F. Kennedy. Sebelum jadi presiden, Kennedy pernah datang ke Indonesia. Waktu itu dia menjabat sebagai seorang Congressman. Ia tahu soal Indonesia, dan hatinya sebenarnya lebih condong ke pihak Indonesia. Ia berbeda dengan pendahulunya, Presiden Eisenhower. Eisenhower menolak untuk berkunjung ke Indonesia. Kennedy punya simpati yang cukup besar terhadap Indonesia, sebagaimana ia juga bersimpati terhadap negara-negara lain yang juga baru merdeka. Bahkan beberapa hari sebelum ia ditembak mati sebenarnya ia telah setuju untuk berkunjung ke Indonesia. Dalam arti tertentu mungkin bisa dikatakan bahwa ia berjasa untuk Indonesia dalam hal mendapatkan Irian Barat. Kasus Irian ini merupakan contoh bagaimana peristiwa yang terjadi secara domestik di Indonesia amat ditentukan oleh apa yang terjadi di tingkat internasional.

J: Memang sulit memisahkan antara faktor-faktor domestik dengan faktor-faktor internasional.



Pemuda di tengah Revolusi Kemerdekaan Indonesia.

Bab Dua

Digul Sebagai *Signpost*

Takashi Shiraishi

*Tentang Politik Kolonial Tahun
1920-an dan 1930-an*



¹
*Berpuluh kawan di tiang gantungan, beratus-ratus melayang jiwanya.
Laki dan istri dalam buangan, beribu-ribu di dalam penjara.
Ya! ya! ya! Itulah yang akan mendatangkan dunia kemerdekaan.
Ayo, lawan, kawan kita semua. Hancurkanlah si penjajah durhaka!*

KUTIPAN DI atas merupakan ¹sebagian dari lagu *Duabelas Nopember* yang menceritakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia tahun 1926 terhadap pemerintah Hindia Belanda waktu itu. Pemberontakan itu dipadamkan dan para pemimpinnya dibuang ke Digul, Papua, oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa tahun kemudian nasib serupa menimpa tokoh-tokoh penting dari PARI (Partai Republik Indonesia), PNI (Partai Nasional Indonesia), PARTINDO (Partai Indonesia), PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia), PSII (Partai Sarikat Islam Indonesia) dan lain-lain, yang juga dibuang ke Digul.

Anda jangan dekat-dekat dengan *signpost* ini. Kalau Anda sudah dekat dengan *signpost* ini dan lalu masuk ke dalam, itu berarti Anda ambil risiko. Dan risikonya tentu penjara dan Boven Digul.

Terkait dengan hal itu, pada bagian berikut kami sampaikan hasil wawancara kami dengan Dr. Takashi Shiraisi, yang antara lain menyinggung soal para “laki dan istri dalam buangan, beribu-ribu di dalam penjara” tersebut, serta tentang arti Digul dalam politik kolonial Belanda di sekitar tahun 1930-an. Dr. Shiraisi —yang oleh murid-muridnya biasa dipanggil “Sinsei”, artinya “guru”— adalah dosen Sejarah di Universitas Kyoto, Jepang. Menanggapi pemberontakan yang berhasil dipadamkan itu, Sinsei mengatakan: “Pada tahun 1926 para pejabat tinggi Hindia Belanda menyimpulkan bahwa lebih baik mendirikan satu tempat di Hindia Belanda, di mana lebih dari seribu orang bisa dibuang”. Tentang latar belakang pemilihan Digul sebagai lokasi pembuangan, Sinsei kurang tahu persis alasannya. “Saya sendiri belum jelas kenapa Digul yang dipilih,” katanya. Namun demikian, menurut dia tampaknya bagi pemerintah kolonial “yang paling penting ... tempat pembuangan itu harus terisolasi 100%.” Dan selanjutnya, seturut hasil studinya, “... orang yang diutus mencari tempat pembuangan yang baru itu adalah gubernur propinsi Maluku. Karena Nieuw Guinea juga termasuk dalam provinsi Maluku orang ini mengusulkan Boven Digul yang paling baik. Atas usulan dari gubernur Maluku itu Dewan Hindia lalu menentukan Boven Digul sebagai tempat buangan.” Lebih dari itu, menurut dia: “Digul [adalah] salah satu cara yang sangat efektif untuk menimbulkan ide atau asosiasi bahwa ikut pergerakan atau politik itu berbahaya. Tetapi asosiasinya bukan saja antara pergerakan, komunisme dan Digul. Tetapi juga umpamanya antara Moskow dengan Tan Malaka atau Semaun, dan lain-lain. Dan banyak ‘signpost’ lain yang didirikan.” Wawancara berlangsung tanggal 20 Desember 1996.

Exorbitante Rechten

T (Tanya): Dalam jurnal “Indonesia” [terbitan Cornell University] terbitan April 1996, Sinsei menulis artikel “The Phantom World of Digul”. Isinya tentang kamp tahanan politik Digul di [waktu itu] Irian Barat. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Digul ini. Pertama, apa dasar hukumnya pemerintah kolonial Belanda waktu itu membuang para pemberontak 1926 ke Digul?

J (Jawab): Waktu itu ada hak istimewa dari Gubernur Jenderal yang namanya “Exorbitante Rechten”. Siapa saja yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, atau *rust en orde*, dari pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh tinggal di Hindia Belanda atau ditunjukkan tempat di mana dia harus tinggal. Itu dasar hukumnya Digul didirikan.

T: Sebelum pemberontakan 1926 itu sudah ada beberapa tokoh yang dibuang. Pak Samin Surosentiko, misalnya, dibuang ke Sumatra Barat tahun 1907. Dokter Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Ki Hadjar Dewantara dibuang ke Belanda tahun 1913. Haji Misbach dibuang ke Manokwari tahun 1924. Tokoh-tokoh PKI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dan lain-lain, juga dibuang pada awal tahun 1920-an. Setelah pemberontakan 1926 itu ada begitu banyak orang yang dibuang ke suatu tempat yang sama. Dan ide untuk membuang itu keluarnya begitu cepat. Pemberontakan terjadi tgl 12 November. Tanggal 18 Nopember sidang pertama Dewan Hindia. Tanggal 19 Nopember sidang kedua. Saat itu diputuskan untuk membuat kamp Digul. Jadi cuma seminggu setelah pemberontakan sudah diputuskan untuk membuat kamp Digul. Dari mana munculnya ide Digul itu? Dan mengapa prosesnya bisa begitu cepat?

J: Saya kira ada dua hal yang perlu diperhatikan. Nomor satu, idenya sudah ada sebelum pemberontakan. Saya kira ini ide pertama kali diungkapkan oleh kakaknya Schrieke, yang saya lupa jabatannya. Tapi ada dua Schrieke. Satu, yang menjadi sosiolog yang menulis buku dan juga menulis laporan mengenai pemberontakan di Sumatra Barat. Dan satu lagi itu kakaknya. Seingat saya dia itu orang nomer satu di bidang hukum waktu itu. Dia yang mengusulkan supaya ada satu tempat khusus didirikan sebagai tempat buangan.

Menurut mereka orang-orang macam ini, terutama orang komunis waktu itu, kerjanya keluar dan masuk penjara. Kalau melanggar hukum mereka ditangkap lalu dimasukkan ke dalam penjara selama satu tahun atau satu tahun setengah, lalu dikeluarkan lagi. Aktif selama setengah tahun, lalu dimasukkan lagi ke penjara. Menurut Schrieke ini “kasihan”. Lebih baik ditunjukkan tempat di mana mereka bisa mendapat kehidupan yang tentram, tidak diganggu oleh mimpi-mimpi untuk merdeka atau untuk mendirikan masyarakat komunis. Jadi ide itu sudah ada pada tahun 1925 tapi tetap dipertahankan sebagai ide saja. Sekonyong-konyong, waktu pemberontakan terjadi, ide itu dijalankan. Ini saya kira salah satu penjelasannya.

Tapi dalam konteks yang lebih besar, saya kira perlu diperhatikan satu fakta bahwa Belanda adalah kekuatan kolonial yang minor. Bukan yang nomor satu tetapi nomor tiga, setelah Inggris dan Perancis. Koloni satu-satunya yang mereka punya dan yang berarti adalah Hindia Belanda. Lain dari Inggris. Inggris punya koloni di Afrika, Australia, India, dan di banyak tempat lagi. Kalau umpamanya ada orang di Birma yang jadi nakal dan harus dibuang, mereka bisa ditempatkan umpamanya ke Ceylon atau ke Afrika. Tapi karena di Hindia Belanda *nggak* ada tempat lain, ke mana orang-orang macam ini bisa dibuang? Tak banyak pilihan. Pada tahun 1926 para pejabat tinggi Hindia Belanda menyimpulkan bahwa lebih baik mendirikan satu tempat di Hindia Belanda, di mana lebih dari seribu orang bisa dibuang. Saya kira ini penjelasan lain.

T: Bagaimana pemerintah kolonial waktu itu menjual ide Digul ini kepada masyarakat Hindia Belanda maupun kepada masyarakat Belanda sendiri? Apa alasan yang mereka pakai?

J: Pertama, saya kurang tahu apakah mereka memang perlu menjual ide itu. Karena masyarakat Belanda atau masyarakat orang putih di Hindia Belanda begitu paranoid, begitu takut terhadap gerakan apapun dari Bumi Putera. Jadi barangkali pemerintah tidak perlu menjual ide itu. Masyarakat orang putih senang sekali kalau orang komunis, nasionalis, dan lain-lain, semua dibuang atau dibunuh. Selain itu saya kira Gubernur Jenderal De Graeff waktu itu masih percaya dengan kemungkinan untuk membangun Nieuw Guinea

1 sebagai koloni yang baru. Sebagai koloni yang baru waktu itu Nieuw Guinea atau Irian Barat belum dibangun sama sekali. Jadi De Graeff percaya akan ada kesempatan untuk mendirikan suatu koloni yang baru, yang makmur dan tenteram untuk orang-orang komunis, sekaligus juga akan menjadi koloni yang baik untuk Hindia Belanda.

T: Apa ada pengaruh pemikiran orang-orang intel —misalnya kepala polisi rahasia PID (Dinas Polisi Rahasia Belanda)— waktu itu? Kalau jaman sekarang urusan kayak gini kan pasti kerjanya orang intel.

J: Saya kira kepala polisi rahasia waktu itu, namanya Van Der Lely, tidak terlibat dalam keputusan untuk mendirikan Boven Digul. Karena dia pangkatnya *nggak* begitu tinggi. Saya lupa berapa jumlah orang yang terlibat dalam *decision making* ini. Tapi ini diputuskan oleh Gubernur Jenderal bersama Raad van Indie atau Dewan Hindia yang merupakan semacam Dewan Pertimbangan Agung kepada Gubernur Jenderal.

T: Ada begitu banyak pulau lain di Hindia Belanda, dan pada waktu itu begitu banyak daerah yang belum pernah dibuka untuk koloni baru. Mengapa justru Digul yang dipilih?

J: Ini pertanyaan yang baik. Saya sendiri belum jelas kenapa Digul yang dipilih. Yang paling penting diperhatikan adalah tempat pembuangan itu harus terisolasi 100%. Dan orang yang diutus mencari tempat pembuangan yang baru itu adalah gubernur propinsi Maluku. Karena Nieuw Guinea juga termasuk dalam propinsi Maluku orang ini mengusulkan Boven Digul yang paling baik. Atas usulan dari gubernur Maluku itu Dewan Hindia lalu menentukan Boven Digul sebagai tempat buangan.

Barangkali ada tempat-tempat yang lain. Tapi menurut gubernur propinsi Maluku, Boven Digul itu ideal sebagai tempat buangan karena 100% terisolasi. Jaraknya dari muara sungai Digul itu 455 km ke arah hulu, ke pedalaman. Itu sama dengan jarak Jakarta ke Semarang atau dari Amsterdam ke Paris. Semuanya hutan lebat, rawa-rawa yang banyak nyamuk Malaria dan di sungainya banyak buaya. Banyak penduduk aslinya yang masih *head hunter*, atau masih kanibal, masih suka makan orang.

Residen dan Polisi Rahasia

T: Pemberontakan mulai terjadi pada tanggal 12 Nopember 1926 di Banten dan kemudian bulan Januari 1927 di Sumatra Barat. Secara militer pemberontakan itu dengan mudah ditumpas. Kemudian 13 ribu orang ditangkap dan 4.500 yang dipenjara setelah diadili. Bagaimana pemerintah kolonial memilih siapa yang mesti dibuang dan siapa yang tidak dibuang?

*J: Ini sepenuhnya diserahkan kepada residen dan kepala polisi, terutama polisi rahasia (PID) setempat. Umpamanya di Jawa Tengah, di Karesidenan Surakarta, orang yang dibuang saya kira jumlahnya tidak begitu banyak, sekitar 70 orang. Jumlah ini cukup kecil dibandingkan dengan orang yang aktif di pergerakan nasional, terutama pergerakan rakyat pada tahun 1920-an di Surakarta. Padahal dari Ujung Pandang, dan dari Sumatra Timur dan daerah sekitar Medan, jumlah yang dibuang jauh lebih besar, saya kira lebih dari 100 orang. Padahal aktifitas pergerakan rakyat di Ujung Padang dan Sumatra Timur itu *nggak* sebesar yang di Karesidenan Solo. Jadi saya kira ini tergantung pada Residen yang mengusulkan siapa yang harus dibuang. Kalau orangnya sudah diusulkan oleh Residen, usulannya hampir 100% disahkan oleh Gubernur Jenderal.*

T: Bagaimana prosedur pembuangan ini?

*J: Kalau dibandingkan dengan prosedur pembuangan sebelum itu, pembuangan sesudah pemberontakan ini menjadi sangat rutin. Waktu (dr.) Tjipto Mangoenkoesoemo dibuang pada awal tahun 1920-an, dia tidak boleh tinggal di daerah yang berbahasa Jawa. Jadi dia terpaksa tinggal di Bandung. Untuk itu prosedurnya cukup panjang. Mula-mula dia harus menjawab banyak pertanyaan. Dan semua pertanyaan yang harus dijawab oleh Tjipto itu disusun oleh kepala polisi rahasia. Kemudian residen mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Tjipto. Sesudah itu Dewan Hindia kumpul untuk membicarakan masalah pembuangan Tjipto. Tapi prosedur semacam ini sama sekali tidak diambil sesudah pemberontakan. Pokoknya, kalau orangnya sudah diusulkan residen supaya dibuang, terus dia dibuang *beneran*. Dan pertanyaan itu semuanya sama, tidak disesuaikan dengan kasus perseorangan.*

Membangun Republik 1

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.hamline.edu

Internet Source

12%

2

csf.colorado.edu

Internet Source

1%

3

www.munindo.brd.de

Internet Source

<1%

4

kvk.ubka.uni-karlsruhe.de

Internet Source

<1%

5

Submitted to Universitas Sanata Dharma

Student Paper

<1%

6

ahbabanas.blogspot.com

Internet Source

<1%

7

www.m-amienrais.com

Internet Source

<1%

8

docslide.us

Internet Source

<1%

9

stisipwiduri.ac.id

Internet Source

<1%

10

www.repository.uinjkt.ac.id

Internet Source

<1%

11

galangpress.com

Internet Source

<1%

12

pt.scribd.com

Internet Source

<1%

adibsusilasiraj.blogspot.com

13	Internet Source	<1 %
14	library.unej.ac.id Internet Source	<1 %
15	www.scribd.com Internet Source	<1 %
16	i-lib.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
17	www.controappunto.org Internet Source	<1 %
18	flpamerika.multiply.com Internet Source	<1 %
19	www.library.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
20	mstar.com.my Internet Source	<1 %
21	www.smeru.or.id Internet Source	<1 %
22	suarapemudajogja.ukmsite.com Internet Source	<1 %
23	www.lontar.ui.ac.id Internet Source	<1 %
24	gramediacyberstore.com Internet Source	<1 %
25	bungamasamba.blogspot.com Internet Source	<1 %
26	software-antrian.com Internet Source	<1 %
27	Ghoshal, Baladas. "Democratic transition and political development in post-Soeharto Indonesia.", Contemporary Southeast Asia, Dec	<1 %

2004 Issue

Publication

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		

Membangun Republik 2

by Baskara Tulus Wardaya

Submission date: 27-Sep-2017 02:27PM (UTC+0700)

Submission ID: 853251641

File name: membangun_republik_51-100.pdf (386.22K)

Word count: 14638

Character count: 87248

2

T: Jadi yang sangat menentukan adalah residen.

J: Residen dan polisi rahasia. Karena di setiap karesidenan ada PID. Kepalanya biasanya polisi profesional yang menjadi pembantu residen.

T: Setelah diputuskan, setelah yang mau dibuang sudah ada daftarnya, lalu kan harus dibangun kamp-nya. Siapa yang mendirikan kamp di tengah-tengah hutan rimba itu?

J: Yang diperintah itu Kapten Becking, orang KNIL. Dia yang memimpin pasukan menumpas pemberontakan di Banten. Kurang jelas kenapa dia yang dijadikan komandan untuk membangun Boven Digul. Barangkali dia dipandang sebagai orang yang mengerti pribumi, yang bisa mengambil hati orang pribumi. Saya kira itu alasannya. Dan rupanya dia cukup disukai. Bukan saja disukai oleh para serdadu dari Ambon, tapi juga oleh sebagian dari orang yang dibuang. Itu bisa dilihat dari memoarnya Chalid Salim.

1

Mau atau Tidak Mau Bekerja

T: Tahanan pertama datang bulan Maret 1927. Apa mereka kemudian dipisahkan menurut suku-sukunya? Dalam artikel ini Sinsei bilang ada kampung Sumatra —yang isinya orang Minang, Aceh, Lampung. Ada Kampung Banten yang isinya orang-orang Banten saja, dan sebagainya.

J: Kediaman itu disusun berdasarkan suku. Tapi saya kira ini bukan atas perintah dari pemerintah, tapi secara alamiah. Umpamanya orang Banten suka berkumpul sama orang Banten sebagian karena bahasanya sama.

T: Jadi pemisahan berdasarkan suku-suku itu bukan keputusan pemerintah?

J: Itu bukan keputusan pemerintah. Kalau sudah dimasukkan ke dalam kamp semua orang cukup bebas memilih di mana mereka mau tinggal.

T: Sejak tahun 1927 pimpinan kamp mengeluarkan peraturan apakah mau atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Kalau mau bekerja sama mereka mendapat bayaran selain 72 sen perhari ditambah dengan 40 sen. Yang tidak mau bekerja sama hanya dapat bayaran 72 sen per hari. Apakah sebagai tapol mereka itu dibayar?

J: Ya. Mereka dibayar sedikit, dikasih makan dan juga logistik. Karena idenya mereka bukan orang kriminal, bukan penjahat. Mereka cuma dipandang

sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, *rust en orde*. Jadi begitu dibuang dan sudah dimasukkan ke dalam kamp mereka menjadi orang bebas lagi. Dan sebagai orang bebas, kalau kerja harus dibayar. Itu idenya. Kalau tidak mau kerja tentu mereka tidak dibayar.

T: Dengan adanya pilihan mau bekerja atau tidak mau bekerja ini, apakah menimbulkan perpecahan di kalangan tapol?

J: Ya, memang. Ini saya kira cukup masuk akal. Bekerja atau tidak mau bekerja itu pilihan, terserah orang di kamp. Kalau pendirian pemerintah, ya terserah kepada orang-orang itu. Kalau mereka mau bekerja—pemerintah tentu satu-satunya lembaga yang bisa memberi pekerjaan—ya mereka akan dibayar. Tapi kalau tidak mau bekerja, ya boleh juga.

T: Pada tahun-tahun pertama ini para tapol berusaha berorganisasi dengan membentuk dewan di setiap kampung, lalu ada Dewan Pusat atau Centraal Raad Digoel (CRD). Apa tujuan mereka membentuk CRD itu?

J: Di sini saya kira ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, umpamanya orang A, tidak mau bekerja untuk pemerintah. Hal itu sudah merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Dalam kelompok ini ada ada dua sub-kelompok: yang satu adalah kelompok mereka yang tidak mau kerja tapi dia itu juga tidak berbuat apa-apa untuk melawan pemerintah, ya pokoknya tidak mau kerja saja. Yang satunya adalah kelompok yang *self-employed*. Mereka ini bekerja [untuk] sendiri, bukan untuk pemerintah. Mereka bekerja umpamanya jadi tukang cukur, atau tukang cuci pakaian untuk sesama teman yang dibuang. Mereka mendapat uang dari sesama orang yang dibuang.

Kelompok yang kedua adalah kelompok mereka yang bukan saja tidak mau kerja untuk pemerintah tapi mencoba menyusun perlawanan dalam bentuk yang lain. Saya kira kelompok ini yang mendirikan organisasi untuk pemerintahan sendiri dan mereka tentu dipandang oleh pejabat di Boven Digul sebagai musuh.

T: Selain dengan mengorganisir diri itu —dengan memilih kepala desa sendiri, mendirikan CRD, dan sebagainya— apa lagi usaha perlawanannya?

J: Perlawanannya macam-macam. Salah satu bentuk tentu mencoba mendirikan administrasi sendiri. Ada juga orang yang merusak jembatan

yang didirikan oleh orang-orang yang mau bekerja untuk pemerintah, melakukan pengrusakan atau semacam sabotase. Dan ada juga orang yang tidak mau bicara sama pejabat pemerintah atau orang yang mau bekerja pada pemerintah, semacam boikot. Ya, bentuk perlawanannya macam-macam.

Tanah Merah dan Tanah Tinggi

T: Bagaimana usaha pemerintah untuk mematahkan perlawanan para tapol ini?

J: Pemerintah di Boven Digul memandang orang yang secara aktif mencoba menyusun perlawanan sebagai musuh nomor satu. Pada permulaan mereka dipisahkan, dibuang ke tempat lain yang namanya Gudang Arang. Letaknya dekat dengan kamp Tanah Merah, dekat dengan kali Digul. Sesudah itu mereka dibuang ke kamp Tanah Tinggi. Itu kamp baru yang didirikan.

T: Tahun berapa Tanah Tinggi didirikan?

J: Saya kira sekitar 1928. Kamp Tanah Tinggi ini jauh dari Tanah Merah, masih 55 km ke arah hulu, sekitar 5 jam dengan motorboat.

T: Apa teknik-teknik biasa—seperti memasang mata-mata dan segala macam teknik sejenis itu—dikerjakan oleh pemerintah Digul?

J: Di Tanah Merah, iya. Untuk mengawasi orang-orang di kamp pemerintah daerah merekrut orang yang kerjanya sebagai mata-mata, sebagai polisi, sebagai klerik, dan lain-lain. Orang mengerti kalau mereka kerja sebagai mata-mata atau polisi nanti kemungkinan untuk diperbolehkan pulang bisa lebih besar. Jadi cukup banyak yang mau kerja untuk pemerintah.

T: Bagaimana umumnya mentalitas penghuni Tanah Merah itu? Apa bedanya dengan yang di Tanah Tinggi?

J: Kalau yang di Tanah Tinggi orangnya sudah nekat. Mereka tidak mau membangun jalan, mereka sama sekali tidak mau bicara dengan orang pemerintah, dan lain-lain. Jadi mereka sama sekali nekat. Kalau yang di Tanah Merah ada dua kelompok. Satu kelompok yang sebagaimana saya bilang tadi, orang-orang yang mau kerja untuk pemerintah. Mereka tentu berharap diperbolehkan pulang ke tempat asalnya. Sesudah orang Belanda

yang namanya Hillen datang ke Boven Digul, sebagian memang mulai diperbolehkan pulang. Jadi sesudah itu satu-satunya harapan untuk mereka adalah pulang ke kampung asalnya.

Kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak mau kerja. Mereka tentu tahu tidak bisa berharap pulang ke kampung asalnya. Tapi mereka mencoba mempertahankan kesadaran. Ya, pokoknya berusaha supaya tidak menjadi gila. Misalnya coba konsentrasi mengerjakan sesuatu.

Umpamanya Chalid Salim, dia merupakan penulis buku yang sangat bagus tentang Digul. Setiap hari dia kerjanya cari nyamuk, maksudnya supaya punya kesibukan supaya bisa tetap waras. Setiap hari kesibukannya ya cari nyamuk itu. Pokoknya cari kesibukan supaya tidak memikirkan pulang ke kampung. Dia itu selalu sibuk supaya tidak jadi gila. Ini strateginya. Dan saya kira ini sangat penting karena orang yang dibuang ke Digul sama sekali tidak tahu apakah mereka bisa pulang atau tidak. Dan seandainya bisa, kapan juga tidak tahu. Jadi masa depannya sama sekali tidak jelas, dan ini menambah rasa rindunya. Banyak orang yang hancur mentalnya karena putus asa.

Di tempat pembuangan ini sama sekali tidak ada kekejaman secara fisik. Sama sekali tidak ada. Orangnya bisa bebas, dan pemerintah bilang kepada semua orang kalau mereka mau bekerja untuk pemerintah itu boleh dan dibayar. Kalau tidak mau, ya boleh juga. Orang yang tidak mau bekerja untuk pemerintah punya banyak sekali waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Lalu bisa kurang sehat mentalnya. Banyak sekali orang yang menjadi sangat rindu dan putus asa. Itu semacam siksaan mental. Tentu orang Belanda tahu apa yang sedang terjadi.

T: Tapol bisa bergerak bebas? Apa tidak ada kawat berduri?

J: Seluruh kamp tidak dikelilingi kawat berduri. Sama sekali tidak ada. Yang dikelilingi kawat berduri justru “tangsi” atau kompleks militernya. Alasannya supaya tentara itu tidak bisa dipengaruhi oleh tawanannya.

T: Bagaimana dengan kegiatan keagamaan?

J: Ya, biasa saja. Ada mesjidnya, ada gereja, ada pendeta dan ulamanya, dan sebagainya. Tidak kekurangan ulama. Banyak ulama dari Banten, Sumatra Barat, dan lain-lain.

T: Bagaimana dengan hiburan atau kegiatan kesenian dan olah raga? Apakah mereka diberi kesempatan?

J: Banyak sekali kegiatan, terutama pada awalnya. Menurut Salim yang paling penting itu kelompok musik. Orang Jawa main gamelan, orang dari Batavia main keroncong, dan lain-lain. Dan satu hal yang saya masih ingat adalah Xarim MS, yang nanti menjadi pemimpin dari revolusi sosial di Medan. Dia menjadi pemimpin sebuah *jazz band*. Rupanya dia orang yang sangat menarik. Dia memilih bekerja untuk pemerintah, entah menjadi apa, tapi pokoknya mau kerja sama dengan pemerintah. Tapi dia juga mendirikan kelompok jazz dan rupanya dia sangat aktif pada akhir 1920-an dan awal 1930-an. Lalu ia diperbolehkan pulang pada tahun 1934-35. Ya, banyak kegiatan kebudayaan terutama musik dan teater seperti ketoprak, wayang orang, dan lain-lain. Tapi kesan saya lama-kelamaan banyak orang putus asa, lalu kegiatan itu menjadi jarang.

T: Kelompok yang di Tanah Tinggi menurut Sinsei terbagi atas tiga kelompok lagi: kelompok Ali Archam, kelompoknya Sardjono, dan kemudian orang-orang didikan Moskow. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang memisahkan mereka?

J: Saya kira ada dua alasan. Pertama, yang sangat penting—dan ini memisahkan orang yang dilatih di Moskow dari orang-orang yang lain—adalah mereka sangat yakin bahwa cuma merekalah orang yang paling mengerti Marxisme dan Leninisme. Mereka belajar di Moskow, jadi mereka tahu “bahasa suci”-nya dari Marxisme. Mereka sama sekali tidak percaya pada tulisan-tulisan Marxisme atau Komunisme dalam bahasa Melayu. Mereka jadi sombong dan tidak mau bergaul dengan orang-orang lain kalau orang-orang lain itu tidak patuh pada kepercayaannya.

Kalau perpecahan antara kelompok Sardjono dan kelompok Ali Archam, saya kira ini tergantung pada bagaimana penilaian masing-masing tentang pemberontakan. Tapi ini kurang jelas. Ini cuma dugaan saya, karena bukti-buktinya kurang. Saya menduga orang-orang yang ikut Ali Archam kebanyakan adalah orang yang nanti menjadi orang Murba, yang kemudian ikut Tan Malaka. Kelompok ini orangnya kebanyakan mengalami hari-hari permulaan dari PKI atau ISDV, pada akhir tahun 1910-an dan awal 1920-

an, waktu PKI masih dipimpin oleh Semaun, Tan Malaka, dan lain-lain. Sedangkan orang yang masuk kelompok Sardjono adalah mereka yang datang sesudah itu, sesudah markas besar PKI dipindah dari Semarang ke Batavia. Jadi saya kira perpecahan ini semacam cerminan dari sejarah PKI sendiri. Karena PKI jaman Semarang dan PKI jaman Batavia dan Bandung itu cukup lain.

T: Lain bagaimana?

J: Nomor satu, pemimpin PKI di Semarang secara representatif adalah Semaun dan Tan Malaka. Mereka mengerti pergerakan secara umum dan mereka juga cukup lama dan cukup banyak aktifitasnya di dunia pergerakan. Mereka bukan saja kenal sesama orang komunis tapi juga kenal baik dengan mereka yang menjadi lawan politiknya, umpamanya Tjokroaminoto, Agus Salim, dan lain-lain. Umpamanya Semaun, dia kenal baik dengan Tjokroaminoto, Agus Salim, Surjopranoto, dan lain-lain. Orang-orang yang menjadi pemimpin PKI di Batavia dan Bandung lebih muda.

Nomer dua, mereka mulai aktif di dunia pergerakan pada awal 1920-an, sesudah Serikat Islam pecah. Jadi mereka secara umum memandang Tjokroaminoto dan lain-lain sebagai lawan. Karena nggak mengalami jaman ketika mereka masih berteman. Jadi mereka lebih sektarian daripada orang-orang Semarang atau orang yang ikut Ali Archam, Semaun, Tan Malaka, dan lain-lain, yang masih ingat jaman pergerakan sebelum PKI lahir pada tahun 1920.

T: Tahun berapa PKI Batavia dan Bandung mulai aktif?

J: Mereka mulai sangat aktif sesudah tahun 1922. Terutama sesudah pemogokan VSTP, Serikat Buruh Kereta Api, yang kalah pada tahun 1923. Sebenarnya saya sendiri benar-benar kurang tahu apakah Sardjono ikut di situ. Sardjono saya kira guru dari Surabaya. Ada umpamanya yang menjadi teman Sardjono, yaitu Budi Sutjitro. Dia orang Semarang yang kemudian pindah dari Semarang ke Batavia. Lalu ada Winanta, tokoh buruh kereta api di Bandung. Mereka jadi sangat radikal sesudah pemogokan kalah. Kelompok mereka yang mengambil kepemimpinan dari kelompok Semarang.

T: Apa tiga kelompok itu kemudian bisa bersatu lagi?

J: Nggak juga. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan sesudah mereka kembali ke Jawa dan tulisan mereka pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an, akhirnya mereka tetap jalan sendiri-sendiri.

1

Penelitian Hillen

T: Setelah ribuan orang dibuang ke Digul, bagaimana reaksi Volksraad?

J: Ada anggota Volksraad orang pribumi dari Batavia namanya [Mohamad Husni] Thamrin. Dia sering menanyakan masalah Digul di Volksraad. Tapi informasinya masih kurang. Saya lupa pertanyaan Thamrin di Volksraad, sebagian berasal dari kutipan surat kabar. Pemerintah responnya begitu-begitu saja, *nggak* begitu peduli. Mereka lebih peduli dengan laporan dari satu wartawan Belanda yang tulisannya diterbitkan di salah satu koran di Amsterdam atau Rotterdam, karena itu langsung dibaca oleh orang Belanda di negeri Belanda. Lalu Hillen dikirim ke Digul untuk mengadakan penyelidikan, bagaimana keadaan di sana. Dan juga menyelidiki kemungkinan kalau cukup banyak orang yang tidak begitu salah tapi dibuang ke Digul.

T: Siapa Hillen itu?

J: Dia gubernur Jawa Barat dan anggota Raad Van Indie, atau Dewan Hindia yang mirip seperti DPA sekarang.

T: Pada bulan April tahun 1930 waktu Hillen mengunjungi Digul jumlah tahanan politiknya paling banyak, mencapai 2.000 orang.

J: Kalau tapolnya saja saya kira sekitar 1.300, yang lain itu keluarga mereka.

T: Di Digul Hillen mengadakan 49 hari wawancara. Setiap hari dia bisa wawancara 20-25 orang. Total ada 600 orang lebih yang diwawancara oleh Hillen. Dari 600 orang itu, 400 kemudian dilepaskan. Apa ide di balik penelitian Hillen itu? Apa pemikiran pemerintah Hindia Belanda dengan menugaskan Hillen?

J: Saya sendiri belum membaca lengkap berita yang ditulis wartawan Belanda itu. Saya cuma baca separohnya, yang dikutip dalam laporan dari

pemerintah. Rupanya wartawan Belanda ini menanyakan apakah semua orang yang dibuang ke Digul memang orang yang begitu serius “dosa”-nya. Dia menanyakan, bukankah kebanyakan orang adalah cuma petani dan lain-lain, yang sebenarnya tidak begitu mengerti ideologi komunis, dan lain-lain. Dan Gubernur Jenderal De Graeff adalah orang liberal. Saya kira dia cukup terkesan oleh berita ini dan lalu jadi prihatin. Apakah berita ini atau itu memang betul apa tidak. Dan saya kira dia mengerti, siapa yang dibuang tergantung pada residennya. Dan pasti ada residen yang lebih kejam dibandingkan residen-residen lain.

T: Sebab itu dia mengirim Hillen untuk menyelidiki?

J: Ya. Keprihatinan itu saya kira satu alasan yang penting. Alasan lainnya adalah bahwa Hillen itu orangnya lebih konservatif dibandingkan De Graeff. Hillen tidak sependapat dengan De Graeff, terutama mengenai kebijaksanaan pemerintah terhadap pribumi. Hillen orangnya lebih *tough* [keras] dibandingkan De Graeff. Dan De Graeff mengerti kalau Hillen bilang ternyata memang ada kesalahan, nanti De Graeff merasa aman untuk membenarkan *policy*-nya. Umpamanya memperbolehkan orang-orang di Digul untuk pulang ke kampung.

Bayangkan saja kalau orang yang ditunjuk untuk melakukan penyelidikan adalah orang liberal, bisa-bisa De Graeff nanti akan dikritik lagi oleh masyarakat Belanda. Tapi semua orang tahu Hillen lebih konservatif dan lebih keras. Jadi De Graeff merasa aman menjalankan kebijaksanaannya. De Graeff memberi ampun kepada Sukarno sehari sebelum dia turun sebagai Gubernur Jenderal. Sukarno divonis dua tahun waktu diadili di Bandung. Tapi oleh De Graeff hukuman ini dikurangi jadi satu tahun tiga bulan.

Waktu itu Hillen salah satu orang yang paling vokal kritiknya terhadap De Graeff. Hillen sendiri percaya Sukarno tidak boleh diampuni, dia harus tetap dipenjara. Jadi memang ada perbedaan antara De Graeff dan Hillen. Chalid Salim bilang Hillen adalah seorang *gentleman*. Saya kira dia benar. Kesan saya, Hillen itu orangnya *correct*, walaupun keras. Jadi kalau memang ada kesalahan, dia berani bilang ada kesalahan.

1

Korban Baru de Jonge

T: De Graeff itu turun sebagai Gubernur Jenderal bulan Mei 1931, lalu diganti dengan De Jonge. Siapa dia?

J: De Jonge jauh lebih reaksioner daripada De Graeff. Nanti waktu Perang Dunia Kedua, waktu Belanda diduduki NAZI Jerman, dia menjadi kolaborator NAZI. Saya kira dari semua Gubernur Jenderal di Hindia Belanda pada abad ke-20, dia ini yang paling reaksioner.

T: Setelah De Jonge naik jadi Gubernur Jenderal, September 1931, apa dampaknya untuk orang-orang di Digul itu? Apa ada perubahan kebijakan soal Digul?

J: Dampaknya sangat besar. Di mana saja, kalau pimpinannya berganti, misalnya presiden Amerika ganti, biasanya juga ganti kebijaksanaan. Kalau ada Gubernur Jenderal yang baru datang ke Hindia Belanda satu hal yang dia mau tunjukkan adalah bahwa dia berbeda dari Gubernur Jenderal yang lama. Terutama ini sangat penting untuk De Jonge karena dia sama sekali tidak setuju dengan kebijaksanaan De Graeff terhadap orang pribumi. Banyak hal yang dilakukan oleh De Jonge pada tahun 1931-1932, harus dimengerti dari sudut ini.

Umpamanya De Graeff sebelum diganti sudah mulai memikirkan bahwa keputusannya untuk mendirikan Digul adalah keliru. Karena itu lebih baik menutup kamp dan memindahkan orang tawanan ke tempat lain. Tapi persis karena De Graeff sudah mulai memikirkan begitu, De Jonge justru mau mempertahankan Digul, dan dia tidak mau peduli dengan orang-orang yang ada di sana. De Graeff juga memikirkan supaya cuma orang komunis yang aktivis, atau pemimpin dari PKI, yang dibuang ke Digul. Orang nasionalis yang bukan komunis tidak boleh dibuang ke Digul. Tapi persis karena De Graeff memikirkan begitu, De Jonge justru melakukan sebaliknya. Lalu orang nasionalis juga harus dibuang ke sana. Jadi dampaknya sangat besar.

T: Dalam catatan Sinsei ini, pada tahun 1930 pemimpin SKBI (Serikat Kaum Buruh Indonesia) dibuang. Lalu tahun 1931-34 pemimpin-pemimpin PARI (Partai Republik Indonesia) dibuang. Tahun 1933-34 menyusul kelompok “non-kooperasi” dari PERMI (Perhimpunan Muslimin Indonesia), PSII (Partai

Serikat Islam Indonesia) Sumatra Barat juga dibuang ke Digul. Begitu juga dari PNI-Pendidikan, termasuk Hatta dan Sjahrir. Pemimpin PARTINDO di Sumatra Utara itu juga dibuang ke Digul. Tahun 1936 anggota PARI yang baru, PNI-Baru dan juga beberapa orang anggota PKI-Muso juga dibuang. Semua pembuangan baru ini apakah akibat kebijaksanaan Gubernur Jenderal yang baru itu?

J: Ya. Memang bisa dikatakan De Jonge itu juga orang yang nekad. Dan sebetulnya sangat menarik kalau membaca memoarnya. Dalam memoarnya dia *nggak* bilang begitu, tapi cukup jelas perasaannya bahwa waktu dia datang ke Hindia Belanda dia sudah menentukan nanti kalau ada kesempatan dia akan membuang Sukarno.

T: Itu sebelum dia berangkat?

J: Oh, ya. Karena dia tahu Sukarno sudah merupakan satu simbol dari kebijaksanaan De Graeff terhadap pribumi. Karena De Graeff sudah memberi ampun kepada Sukarno. Jadi kalau De Jonge mau menunjukkan dia beda dari De Graeff, dia lebih keras, maka yang paling gampang ya tentu membuang banyak orang ke Digul, dan sekalian juga membuang Sukarno. Kemudian semua pemimpin kelompok “non-kooperasi” dia buang juga.

T: Memang akhirnya dia yang membuang Sukarno ke Ende.

J: Ya. Memang jadi sedikit lain karena Sukarno tamatan dari Techniesche Hooge School. Sekolah Tinggi Teknik di Bandung yang sekarang jadi ITB. Waktu rapat Dewan Hindia diadakan saya kira sama sekali tidak pernah dibicarakan kemungkinan membuang Sukarno ke Digul, walaupun sudah dimengerti bahwa Sukarno harus diisolasi.

T: Tapi tidak ke Digul?

J: Tidak. Karena Sukarno lulusan THS, dia dianggap intelektual walaupun dia orang pribumi. Sebetulnya sedikit *nggak* jelas apa makna intelektual. Waktu itu, kalau sudah dianggap intelektual berarti sama derajatnya dengan orang kulit putih. Walaupun pribumi, kalau sudah dapat pendidikan universitas, dia menjadi *honorary white*.

T: Tahun 1936 ada dua keputusan penting. Pertama, Digul dianggap tidak sesuai untuk intelektual. Yang kedua, mereka yang diduga akan tetap mengadakan perlawanan, jangan dilepaskan. Apa latar belakang lahirnya keputusan tahun 1936 itu?

J: Wah, saya lupa.

T: Kami kira ini cukup penting. Karena kemudian berdasarkan keputusan ini maka Hatta dan Sjahrir lalu dikeluarkan dari Digul pada awal 1936.

J: Ya, benar. Saya tidak begitu perhatikan kenapa Hatta dan Sjahrir dipindahkan dari Digul ke Bandaneira. Tapi saya kira sesudah mereka dibuang ke Digul barangkali ada pertanyaan—bukan hanya di Hindia Belanda tapi lebih penting lagi yang di Negeri Belanda—kenapa Hatta dan Sjahrir dibuang ke Boven Digul. Karena waktu itu nama Digul sudah cukup terkenal di negara Belanda sebagai “kuburan”. Jadi pemerintah Hindia Belanda terpaksa merumuskan kebijakan yang sebenarnya sudah dijalankan. Karena Sukarno memang sudah dibuang ke Ende, dr. Tjipto dan Iwa Kusumasumantri ke Bandaneira. Maka intelektual semacam Hatta dan Sjahrir juga dipindahkan dari Digul ke Bandaneira.

T: Apa ada hubungannya dengan pergantian Gubernur Jenderal? Karena De Jonge diganti oleh Tjarda Van Starkenborgh tahun 1936.

J: Ya barangkali ada. Tapi saya kurang tahu. Saya tidak melakukan riset mengenai Hatta dan Sjahrir. Tapi ya mungkin juga karena kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20 selalu berubah sesudah gubernur jendral baru datang. Setiap Gubernur Jenderal mau “lain” dari yang digantikan.

1

Mencoba Lari

T: Bagaimana percobaan lari yang pernah dilakukan oleh para Digulis ini? Sinsei cerita di sini tentang Nayoan, Sandjojo, dan lain-lain. Bisa diceritakan tentang Nayoan ini? Siapa orang yang sudah mencoba empat kali lari?

J: Dia memang orang yang luar biasa. Saya sendiri tidak begitu kenal orang ini. Tapi saya tahu dia tokoh pergerakan rakyat sejak tahun belasan. Dia salah

satu pemimpin dari ISDV dan juga serikat buruh kereta api di Semarang. Saya kira dia teman baik Semaun dan peranannya cukup penting dalam sejarah pergerakan partai, pergerakan buruh dan juga pergerakan di Semarang dan Jawa Tengah. Saya sendiri tidak tahu apa yang dilakukan Nayoan di Digul. Tapi karena dia adalah salah satu buangan di Tanah Tinggi, berarti dia sangat nekat dan sama sekali tidak mau berurusan dengan pemerintah.

T: Untuk berani lari dari Digul itu luar biasa. Dan orang ini mencobanya empat kali. Terakhir dia coba tahun 1942, dan dia hilang.

J: Mungkin dia meninggal. Pelariannya yang terakhir terjadi setahun sebelum kampnya ditutup. Tapi dia sendiri tidak tahu bahwa nggak lama setelah dia lari kampnya ditutup. Ini sangat tragis.

T: Lalu ada 16 percobaan lari yang lain. Seluruh orang yang mencoba lari itu 60 orang, 40 di antaranya dari Tanah Tinggi. Tapi yang kemudian berhasil menyeberangi selat Torres dan sampai ke pulau Thursday lalu buka kios cukur, itu kelompoknya Sandjojo. Siapa Sandjojo itu?

J: Saya kira Sandjojo itu orang Solo. Dia adalah salah satu anak buah dr. Tjipto yang pada permulaan jadi aktivis di National Indische Partij yang didirikan di Semarang tahun 1919. Sandjojo ini cukup dekat dengan dr. Tjipto dan juga Haji Misbach. Sesudah dr. Tjipto dibuang ke Bandung. Sesudah itu dia pulang ke Solo dan langsung jadi aktivis di Solo.

Yang paling penting tidak ada orang yang berhasil melarikan diri dari Digul. Paling jauh sampai ke Thursday Island di Australia. Tetapi akhirnya mereka ditangkap lagi karena sudah ada persetujuan antara Australia dan Hindia Belanda bahwa kalau ada orang yang lari ke Australia, termasuk Irian Timur, mereka langsung dipulangkan.

T: Tapi bahwa mereka lari dan bisa sampai ke laut dengan menempuh jarak 455 km, itu luar biasa. Seperti cerita dalam film Pappillon.

J: Ya itu hebat sekali. Ada satu tulisan yang judulnya “Pandu Anak Buangan”. Saya kutip juga dalam artikel saya. Itu tulisannya Xarim MS yang diterbitkan di Medan pada akhir 1930-an. Tulisan ini secara humoris menceritakan pelarian satu kelompok orang buangan dari Tanah Merah. Ini secara lucu menceritakan betapa tidak mungkin melarikan diri dari Digul.

T: Siapa Chalid Salim itu? Tadi Sinsei bilang dia menulis buku yang bagus tentang Digul.

J: Dia adiknya Haji Agus Salim yang menjadi wartawan di Sumatra Utara. Walaupun kakaknya jadi pemimpin Partai Sarikat Islam, dia sendiri masuk PKI. Pada permulaan dia aktif di Sumatra Barat lalu datang ke Jawa, kerja sama dengan Muso. Lalu dikirim ke Sumatra Utara, punya kontak dengan Tan Malaka di Singapura. Tapi akhirnya tertangkap di Medan, lalu dibuang. Sesudah kampnya ditutup dia dikirim ke Australia. Dia tidak pulang ke Indonesia tapi pindah ke negeri Belanda karena dia kawin dengan orang Belanda.

Sesudah bukunya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dia pernah datang ke Jakarta dan sempat ketemu dengan Presiden Soeharto. Bukunya, *Lima Belas Tahun di Boven Digul* diberikan kepada Soeharto. Saya sendiri belum tahu apakah Soeharto baca. Tapi bukunya sangat bagus dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia juga bagus sekali.

T: Menarik bahwa dia adiknya Haji Agus Salim.

J: Itu berarti sebetulnya perbedaan antara orang komunis dan orang non-komunis sangat tipis. Lihat saja kakak-beradik Salim. Barangkali tergantung pada siapa orang yang mereka temui dalam perjalanan hidupnya, orang bisa menjadi komunis atau bukan komunis.

T: Apa Chalid Salim ini masih hidup sekarang?

J: Sekarang saya kurang tahu. Tapi lima tahun yang lalu dia masih di Belanda. Saya sendiri belum pernah bertemu dia. Saya baca bukunya dalam bahasa Belanda, bahasanya sangat bagus.

T: Dari daftar yang Sinsei buat tentang jumlah tahanan ini, kita lihat di bulan Mei 1930 total di Digul ada 1.308 tapol. Di Tanah Tinggi ada 70 orang. Ini adalah orang-orang yang tidak mau kompromi. Kemudian tahun 1931 total ada 1.178 tapol. Di Tanah Tinggi bertambah jadi 82 orang. Tahun 1932 menurun tinggal 793. Di Tanah Tinggi ada 69 orang. Dan sejak itu jumlah tapol menurun terus. Sampai tahun 1937 total tinggal 446. Tapi di Tanah Tinggi jumlahnya tetap 64 orang. Jadi kelompok yang tidak mau kompromi jumlahnya 70 kemudian pernah menjadi 82 dan selanjutnya tetep saja lebih dari 60 orang. Ini bukan main.

J: Ya, saya kira jumlahnya tetap. Kalau jumlahnya berkurang berarti ada orang yang mati. Umpamanya Mas Marko Kartodikromo. Dia juga salah satu orang yang dibuang ke Tanah Tinggi. Dia mati di Tanah Tinggi pada tahun 1933. Berarti berkurang satu. Ali Archam juga mati di Tanah Tinggi.

T: Luar biasa orang yang tidak mau kompromi ini. Betul-betul sampai mati.

J: Ya. Memang.

(Catatan editor: Menurut Soe Hok Gie, “Waktu Ali Archam meninggal semua orang merasa ‘diguyur’ air dingin karena sikap pribadinya yang kuat dan pantang menyerah. Baik PKI maupun Murba menghormatinya sampai sekarang”. Lihat Soe Hoke Gie, *Orang-orang di Persimpangan Kiri Jalan*. Bentang, 1997, catatan kaki 64, h. 40).

Perubahan Politik Dunia

T: Tahun 1937 Jepang menyerang Cina dan pemerintah NAZI naik di Jerman. Apa dampak perubahan politik dunia ini terhadap kebijakan kolonial tentang Digul?

J: Saya kira ada dua dampak yang sangat penting. Pertama, Negeri Belanda sendiri kemudian diduduki NAZI Jerman tahun 1939. Sebelum negeri Belanda diduduki, pemerintah Belanda sudah mulai prihatin terhadap adanya Boven Digul. Karena jelas dunia waktu itu sudah terbagi dua. Satu, blok demokrasi; satu lagi blok fasis atau militeris. Untuk menunjukkan bahwa negeri Belanda adalah salah satu negara yang demokratis, adanya Boven Digul tidak cocok. Itu tidak baik untuk *image* Belanda sebagai negara demokratis. Karena itu Welter, waktu itu Menteri Urusan Koloni, mulai prihatin. Walaupun orangnya sebenarnya cukup reaksioner, Welter mulai mengusulkan supaya kampnya ditutup. Ini saya kira satu dampak yang sangat penting dari perkembangan dunia.

Dan nomor dua, kalau kamp tetap dipertahankan karena keperluan dalam negeri—memang pemerintah Hindia Belanda ingin mempertahankan kamp ini untuk menempatkan orang-orang yang bisa menjadi ancaman—nantinya muncul kemungkinan yang agak jelek. Kalau Jepang membebaskan

orang dari kamp Digul, Jepang bisa kelihatan lebih demokratis daripada Hindia Belanda. Mengingat kemungkinan itu pemerintah Hindia Belanda tidak mau ambil risiko. Jadi mereka memutuskan kampnya harus ditutup. Dan orang tawanan harus dipindahkan ke Australia.

T: Apakah keputusan ini juga dipengaruhi oleh berita buruk tentang kamp-kamp Orang Yahudi yang dibikin oleh NAZI?

J: Saya kira tidak.

T: Apakah pada akhir tahun 1930-an kamp-kamp konsentrasi Yahudi belum ditemukan?

J: Sebetulnya orang sudah tahu. Umpamanya Presiden Amerika, [Franklin Delano] Roosevelt, dan banyak juga orang lain, mereka sudah tahu ada kamp-kamp Orang Yahudi di Eropa. Dan juga mereka tahu banyak Orang Yahudi sudah dibunuh. Memang banyak berita tapi mereka tidak percaya. Beritanya tidak dianggap begitu serius. Saya kira pemerintah Hindia Belanda memang memperhatikan Orang Yahudi. Tapi dalam mentalitas mereka masalah Orang Yahudi itu ada dalam satu “kotak” dan urusan Hindia Belanda dalam “kotak” yang lain. Jadi tidak bisa dikaitkan.

T: Apakah sebelum Digul memang sudah ada semacam kamp konsentrasi tahanan politik sejenis ini di dunia?

J: Kamp konsentrasi yang pertama di dunia saya kira ya Digul ini. Atau barangkali di Rusia sudah mulai muncul tetapi saya tidak tahu persis. Di Indochina Perancis punya Pulau Condore. Pulau ini bisa dikatakan satu kamp konsentrasi, cuma lebih mirip penjara. Tapi tentu kita bisa bilang pemerintah Hindia Belanda adalah pemerintah yang sangat inovatif dalam menangani masalah tahanan politik.

T: Sinsei mengatakan suasana di Digul itu ada miripnya dengan suasana dalam novel One Hundred Years of Solitude. Apa maksudnya?

J: Rasa kesepiannya. Anda sudah baca buku itu?

T: Belum. Tapi buku ini pernah dibaca Presiden Clinton, lalu jadi berita besar.

J: Buku itu dikarang Garcia Marquez, ya macam Pramoedya Ananta Toer

dari Amerika Latin. Tapi karya-karyanya sangat lain. Dalam novel *One Hundred Years of Solitude* ini dia menceritakan sejarah dari satu keluarga sedemikian rupa sampai pembaca bisa merasakan kesepiannya dan juga terisolasinya tempat itu di Amerika Latin. Saya dapat perasaan sepi yang hampir sama dari tulisannya Chalid Salim mengenai Boven Digul. Saya kira Digul itu sangat sepi.

2

Jaman Normal

T: Sinsei membuat semacam analogi antara Digul dengan Hindia Belanda. Di Digul itu ada kamp Tanah Merah untuk tapol yang biasa, ada kamp Tanah Tinggi untuk tapol yang tidak mau kompromi. Di Hindia Belanda ada Hindia Belanda untuk orang yang tidak dibuang, yang hidup “normal,” dan ada Digul untuk orang yang melawan. Lalu Sinsei lihat lagi analogi itu dalam politik jaman akhir Hindia Belanda, ada kelompok “kooperasi” dan ada kelompok “non-kooperasi”. Bisa dijelaskan apa maksudnya analogi ini?

*J: Barangkali lebih baik menjelaskan pertanyaan yang muncul pada saya waktu mulai memikirkan soal Boven Digul. Sudah lama sekali, ya lebih dari sepuluh tahun sebetulnya, saya mau melakukan riset tentang Digul dan menulis satu makalah mengenai Tanah Tinggi dan Tanah Merah. Karena pada awal 1980-an saya pernah ketemu dengan seorang nenek. Dia kerja di salah satu rumah sakit di Bandung pada tahun 1930-an. Sekali waktu kami berdua sedang melihat TV lalu ada berita tentang kematian Jenderal Ali Murtopo. Sekonyong-konyong saja nenek itu menceritakan kehidupannya seolah-olah dia dapat *trigger* dari berita kematiannya Ali Murtopo. Dia bilang di Jaman Belanda, dokter-dokter orang Belanda di rumah sakit itu sangat baik terhadap dia. Dan sesudah orang Jepang *dateng* semuanya menjadi kacau. Waktu saya ketemu sama dia, dia tinggal di Jakarta. Sampai awal Orde Baru dia tinggal di Jawa Barat dan dia pernah sangat takut terhadap DI [Darul Islam, *Ed.*].*

Bagi nenek itu, jaman kemerdekaan adalah *jaman* kacau dan mengerikan, sedangkan Jaman Belanda adalah “Jaman Normal”. Sejak itu saya mulai memikirkan apa maknanya “normal”? Banyak orang Indonesia yang masih ingat Jaman Belanda bilang, “Waktu itu jamannya Jaman

Normal". Orang Indonesia yang tua-tua itu juga suka bilang, "Jaman Normal itu mulainya sesudah pemberontakan". Jadi saya mulai tanya apa maknanya normal? Dan apa maknanya Orde? Karena jelas normal berarti jaman di mana ada orde yang cukup stabil, yang teratur. Dan biasanya kalau ada "order" tentu harus ada "disorder," yaitu ancaman terhadap orde dan kita biasanya tanya apa ancamannya?

Waktu saya mulai melihat masalah Digul, rasanya ancaman untuk Hindia Belanda itu tidak ada. Saya lihat kegiatan PKI sesudah pemberontakan itu sama sekali tidak mengancam pemerintah Hindia Belanda. Umpamanya SKBI, itu salah satu percobaan untuk mendirikan suatu organisasi sentral dari pergerakan serikat buruh. Saya kira sekjen-nya itu mata-mata Belanda. Semua surat-menyurat, semua komunikasi diketahui oleh polisi rahasia, jadi sama sekali tidak merupakan ancaman terhadap pemerintah.

Kelompok Tan Malaka mencoba setengah mati menyusun jaringan PARI untuk melakukan perlawanan terhadap Hindia Belanda. Saya kira orang-orang yang masuk PARI dan bergerak di bawah tanah itu jumlahnya *nggak* sampai 50 orang. Lebih kecil bila dibandingkan dengan LSM-LSM sekarang. Saya lihat sebenarnya ancamannya tidak ada. Tapi apa arti ancaman? Saya pikir ini bukan karena adanya ancaman. Tapi ancaman ada justru karena ada orde. Orang yang mementingkan orde selalu memikirkan ancaman. Jadi supaya ada orde harus ada ancaman. Lalu orang mulai mencari ancamannya.

Seandainya Anda jadi Gubernur Jenderal yang bertanggung jawab untuk mempertahankan orde maka logikanya harus dibalik: supaya ada orde harus ada ancaman. Lalu Anda akan bilang kepada orang-orang pribumi bahwa, "Kalau kamu menjadi ancaman maka kamu tidak boleh tinggal di masyarakat". Jadi harus mendirikan satu tempat khusus untuk orang yang merupakan ancaman. Tujuannya bukan sekedar untuk mengucilkan orang-orang yang dianggap ancaman. Saya kira ini *nggak* begitu penting. Yang jauh lebih penting adalah supaya orang lain, ya pokoknya masyarakat banyak, bisa melihat dan mengerti bahwa kalau mereka menjadi ancaman nanti mereka akan ditempatkan di sana. Kalau orde Hindia Belanda mau dipertahankan maka harus ada tempat untuk orang-orang yang merupakan ancaman.

Tujuannya supaya orang-orang yang tinggal di masyarakat Hindia Belanda merasa aman dan mengerti [bahwa] mereka hidupnya “normal”. Karena itu di sana disediakan tempat yang “abnormal”.

T: Digul jadi semacam batas, begitu?

J: Semacam cermin juga, supaya masyarakat bisa melihat bahwa masyarakatnya “normal”. Yang menarik, begitu Tanah Merah didirikan lalu muncul orang-orang yang nekat, orang-orang yang tetap mau melawan pemerintah. Lalu pemerintah harus mendirikan satu tempat yang lain yang namanya Tanah Tinggi. Tujuannya supaya orang yang tinggal di Tanah Merah merasa hidupnya normal. Karena mereka mengerti ada tempat yang abnormal yang namanya Tanah Tinggi.

Makna normal itu jadinya relatif. Tentu banyak orang di masyarakat Hindia Belanda bisa merasa: “Yah, kami masih untung, karena kalau tidak pasti kami ada di sana”. Saya kira atas pengertian ini didirikan “orde” Hindia Belanda. Dan ini saya kira salah satu hal yang baru karena sebelum pemberontakan PKI ordennya didirikan atas prinsip yang lain.

Pendidikan Politik Kolonial

T: Apa prinsipnya sebelum Pemberontakan 1926 itu?

J: Sebelumnya *nggak* sistematis. Kalau ada orang yang memang merupakan ancaman, mereka lalu dibuang. Tapi setelah pemberontakan, apakah orang itu merupakan ancaman apa tidak, itu menjadi tidak begitu penting. Pentingnya nomor dua. Yang lebih penting orang lain bisa dapat pelajaran. Maknanya Digul itu buat mendidik masyarakat Hindia Belanda.

T: Jadi semacam pendidikan politik versi penjajah?

J: Iya.

T: Sinsei juga mengatakan bahwa surat-surat dari Digul itu memang sengaja disebar melalui koran-koran.

J: Ya. Supaya orang mengerti. Sebetulnya ada satu contoh yang sangat bagus dari Subakat, pemimpin PARI nomor dua setelah Tan Malaka. Waktu

PARI didirikan dan waktu dia berada di Bangkok dia *bikin* bahasa kode. Dalam kode ini “abu” itu artinya polisi, “rumah sakit” itu artinya penjara dan “rumah sakit besar” artinya Boven Digul. Jadi Hindia Belanda dibayangkan seperti kepulauan rumah sakit. Dalam bayangan ini tentu ada asosiasi antara kegiatan politik—terutama kegiatan politik bawah tanah—dengan polisi, penjara dan Boven Digul.

Jadi seandainya saya mulai bergerak di bawah tanah, masuk jadi anggota PARI, tentu saya tahu bahwa saya harus awas, harus hati-hati terhadap polisi. Karena kalau saya ditangkap saya bakal masuk penjara. Kalau sudah diketahui sebagai anggota PARI nanti saya dibuang ke Digul. Hubungan seperti itu sangat penting, dan sudah ada dalam otaknya orang. Jadi kalau orang memang masuk PARI itu artinya mereka sudah nekad. Mereka sudah menentukan mereka nanti melawan pemerintah Hindia Belanda secara mati-matian.

Tapi kalau orang biasa sudah melihat asosiasi ini maka dampaknya sangat negatif. Mereka sudah mengerti kalau mereka ikut PARI nanti mereka akan dibuang ke Digul. Maka kebanyakan orang tentu tidak mau masuk PARI. Saya kira asosiasi ini sengaja disebar sebagai pendidikan politik oleh pemerintah Hindia Belanda.

Surat orang-orang buangan itu diberitakan di koran-koran supaya yang membacanya mengerti bagaimana keadaan di Digul. Supaya mereka tidak mau bergerak. Kalau Anda baca novel-novel atau cerpen pada tahun 1930-an, banyak sekali cerita yang dikaitkan dengan Digul. Banyak umpamanya cerita cinta, di mana lelaki jatuh cinta kepada perempuan, tapi lelaki itu juga idealis dan dia mulai bergerak, lalu dibuang ke Digul. Cerita seperti ini jaman itu sangat biasa.

Tentu di sini yang penting bukan saja Digul. Digul itu saya kira salah satu cara yang sangat efektif untuk menimbulkan ide atau asosiasi bahwa ikut pergerakan atau politik itu berbahaya. Tapi asosiasinya bukan saja antara pergerakan, komunisme dan Digul. Tapi juga umpamanya antara Moskow dengan Tan Malaka atau Semaun, dan lain-lain. Dan banyak “signpost” lain yang didirikan.

T: Apa maksudnya signpost?

J: Tanda untuk peringatan. Seperti tanda “dilarang masuk” atau “awas, anjing galak”. Dalam masyarakat Amerika kalau kita berjalan-jalan, umpamanya di pegunungan, sering ketemu tanda “no trespassing”. Ada banyak signpost macam itu. Kita tahu kalau masuk kita bisa ditembak atau digigit anjing. Jadi kalau sudah masuk daerah no trespassing, kita sudah ambil risiko. Tanda peringatan atau signpost macam ini banyak didirikan dalam alam mentalnya orang-orang di Hindia Belanda pada akhir 1920-an dan 1930-an.

Selain Digul, ada umpamanya signpost yang namanya Tan Malaka. Anda jangan dekat-dekat dengan signpost ini. Kalau Anda sudah dekat dengan signpost ini dan lalu masuk ke dalam, itu berarti Anda ambil risiko. Dan risikonya tentu penjara dan Boven Digul. Ini merupakan suatu strategi dari pemerintah Hindia Belanda. Dan saya kira ini cukup berhasil. Dengan memakai strategi ini jumlah orang yang dibunuh sangat sedikit. Karena pendidikannya berhasil maka orangnya tidak usah dibunuh.

T: Apa alat yang dipakai untuk mengadakan pendidikan politik semacam ini? Dan bagaimana cara kerjanya?

J: Alatnya adalah polisi rahasia. Bayangkan saja kalau Anda mulai aktif di pergerakan jaman itu. Umpamanya PKI bawah tanah, PARI, PNI-Baru atau Partindo, dan lain-lain. Barangkali Anda bisa aktif sebulan atau dua bulan, pergi ke kantor cabang PNI atau ketemu dengan pemimpin cabang PNI di warung. Nggak lama lagi Anda sudah didekati oleh orang PID. Anda sudah mulai mengerti bahwa Anda sedang diawasi. Saya kira begitulah mekanismenya.

T: Apakah para aktivis pergerakan waktu itu memahami cara atau mekanisme kontrol semacam ini?

J: Saya kira mereka mengerti bahayanya dan risikonya dan tentu ada orang yang mengerti mekanismenya. Sjahrir itu mengerti, dan itu dia bilang dalam surat yang dia tulis dari Bandanaiera. Menurut dia ada tiga

pilar yang mendukung sistem penjajahan di Hindia Belanda. Pertama, polisi. Kedua, tentara. Dan ketiga adalah Digul. Jadi tentu dia mengerti. Tapi kebanyakan orang saya kira nggak mengerti karena asosiasinya sangat natural.

T: Apakah Sukarno mengerti?

J: Saya kurang tahu. Pemerintah Hindia Belanda mengerti Sukarno dengan baik sejak tahun 1933, sesudah dia ditangkap lagi. Waktu dia dipenjara di Batavia, Dewan Hindia Belanda mengadakan sidang untuk membicarakan masalah pembuangan Sukarno. Kesimpulannya sangat sederhana. Mereka sepakat bahwa Sukarno itu orangnya begini: apapun yang dia bilang dari penjara, itu sama sekali tidak bisa dipercaya. Karena begitu dia muncul di rapat besar, dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri karena dia menjadi “mabok”. Lalu dia akan mengungkapkan apa yang merupakan suara dari orang yang datang ke rapat, yaitu suaranya rakyat. Jadi apapun dia bilang, apapun dia janji, sama sekali tidak bisa dipercaya. Lebih baik buang saja ke tempat sepi di mana dia sama sekali tidak bisa mengadakan rapat karena tidak ada orang.

Ini saya kira politik pemerintah Hindia Belanda mengenai Sukarno. Dan tentu pemerintah lalu memakai Sukarno sebagai *signpost* yang baru. Tujuannya untuk bisa bilang pada orang banyak bahwa kalau kamu mengikuti Sukarno nanti kamu juga dibuang. Tapi Sukarno sendiri, sejauh saya baca autobiografinya, saya kira dia nggak mengerti dengan jelas mengenai mekanisme ini.

T: Kalau Bung Hatta mengerti apa tidak?

J: Saya kira Bung Hatta mengerti. Tapi yang paling jelas mengerti itu Sjahrir. Dan tentu saja Tan Malaka, Subakat, Djamaludin Tamin dan orang-orang PARI itu. Tapi mengerti itu satu hal. Apakah bisa berbuat apa-apa, itu hal lain lagi.



Lokasi Pengasingan Boven Digul, di pedalaman Papua.

Bab Tiga

Revoloesi Pemoeda

Benedict Anderson

Tentang Perjuangan Kemerdekaan



SEBAGAIMANA KITA ketahui, pada awal tahun 2016 Professor Benedict R.O'G Anderson meninggalkan kita secara tiba-tiba. Terkait kematiannya itu Pak Ben (begitu kami biasa menyapanya) bisa dikatakan “gugur dalam tugas”. Betapa tidak. Ia wafat ketika sedang melakukan perjalanan dan penelitian di Indonesia, negeri yang semasa hidupnya amat ia cintai dan ia jadikan salah satu subjek terpenting dalam berbagai penelitian dan karya-karya akademisnya. Sebagai ilmuwan Pak Ben diakui hampir di seluruh dunia dan sebagai seorang yang sangat kosmopolit ia memiliki perhatian khusus pada Indonesia dan masyarakatnya.

Dalam bukunya yang berjudul *Revoloesi Pemoeda* (1972/1988) Pak Ben bercerita tentang bagaimana peranan pemuda itu sangat sentral dalam revolusi kemerdekaan di Pulau Jawa, khususnya pada periode 1944-1946. Dalam penulisan kembali hasil wawancara dengannya di bawah ini kita akan “mendengar” langsung dari Pak Ben penjelasan dia tentang buku yang

Saya cuma mau *kasih lihat* bahwa Sjahrir tidak jauh dari yang lain-lainnya. Dia juga sempat menangkapi orang.

sekarang sudah menjadi buku klasik dalam studi tentang ke-Indonesiaan itu. Wawancara dengan dosen ilmu politik Universitas Cornell, Ithaca, New York, AS, tersebut kami bagi menjadi empat bagian: Pertama, tentang pengertian mengenai istilah “Pemuda” dalam konteks revolusi; kedua, tentang seluk-

beluk alat-alat perjuangan yang digunakan oleh para Pemuda, khususnya partai-partai politik; ketiga, tentang latar belakang dan dinamika tentara; serta keempat tentang istilah “revolusi” itu sendiri. Pada bagian akhir kami sampaikan kesimpulan singkat atas wawancara yang kami lakukan pada tanggal 13 dan 22 Mei 1995 ini.

I. PEMUDA

Arti Penting Tahun 1944-1946

T (Tanya): Pak Ben mengatakan bahwa tahun 1944-1946 itu penting. Mengapa? Mengapa tidak mengambil kurun waktu 1944-1950 atau 1944-1965, misalnya? Apa pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi waktu itu untuk masa-masa selanjutnya, bahkan sampai sekarang ini?

J (Jawab): Begini. Saya merasa bahwa masa antara 1944 sampai 1946 itu penting karena itu sebenarnya [merupakan] titik-tolak bagi sebuah fase baru dalam sejarah Indonesia. Khususnya soal revolusi. Tidak banyak negara di dunia ini pernah mengalami sesuatu yang namanya revolusi. Kalau seandainya Jepang tidak datang ke Hindia Belanda, kemungkinan besar perkembangan politik di Indonesia akan mirip perkembangan di Malaysia. Seandainya Jepang tidak dikalahkan oleh Sekutu, mungkin nasib Indonesia seperti Taiwan. Jadi banyak hal yang ‘kebetulan’ terjadi pada masa 1944, ’45, ’46. Jadi, ini suatu masa di mana perkembangan yang maha besar di dunia internasional kebetulan sejajar dengan perubahan besar di Indonesia.

Juga, saya kira ini penting karena banyak masalah, banyak aliran politik dan sebagainya, yang sampai sekarang masih ada, mendapat tempat karena

ditanam pada masa itu. Khususnya soal partai-partai di Indonesia. Apalagi tentara. Saya kira ini karena tahun 1944 sampai 1946 boleh dikatakan satu-satunya masa dalam sejarah Indonesia modern di mana hampir tidak ada negara. Negara sangat lemah, dan Presiden tidak bisa menguasai situasi. Jadi pada masa itu masyarakat Indonesia bergerak bebas dengan segala kehebatannya dan segala kegila-gilaannya tanpa di-“bina” oleh apa yang kami suka sebut sebagai “si siluman”. Jadi menarik.

T: Tadi Pak Ben menyebut Malaysia dan Taiwan. Apa persisnya perbedaan Malaysia dan Taiwan dengan Indonesia dalam hal ini?

J: Seandainya Jepang tidak datang, sulit dibayangkan Belanda bisa digulingkan secara fisik oleh orang Indonesia. Jadi kemungkinan besar ada perubahan yang berangsur-angsur, secara damai. Revolusi itu *kan* timbul karena Jepang sempat masuk. Di Malaysia, Inggris mampu mengembalikan kekuasaan kolonialnya setelah 1945, dan bangsa Melayu baru dapat kemerdekaannya 12 tahun belakangan, dengan jalan perundingan. Yang dapat angin, dengan demikian adalah birokrat sipil dan politisi yang berhaluan konservatif priyayi. Taiwan dikuasai oleh Jepang secara otoriter dari 1895-1945, tapi Jepang juga membuat landasan ekonomi modern yang bagus.

T: Tapi mengapa kurun waktunya hanya dua tahun, tidak lima tahun, sampai tahun 1950 atau bahkan dua puluh tahun sampai tahun 1965? Mengapa hanya dua tahun itu? Bagaimana itu berpengaruh pada masa-masa selanjutnya? Apa saja yang jelas-jelas berpengaruh?

J: Saya kira perubahan besar baru selesai pada akhir tahun 1946. Jadi bisa diduga apa yang akan terjadi setelah itu. Perkembangan-perkembangan tahun 1947, '48, '49 timbul secara logis dari apa yang terjadi sebelumnya. Kalau 1945 sampai 1965, saya menulis naskah buku itu pada tahun 1966-67. Sehingga agak repot kalau mencakup periode 1945 sampai 1965. Bahan *nggak* cukup pada waktu itu.

Hubungan Tua-Muda

*T: Menurut bukunya Pak Takashi Shiraishi, *The Age in Motion* (1990), konflik pemuda dengan orang tua, atau pemuda dengan orang muda yang bergaya*

pikir orang tua, sudah ada sejak tahun belasan abad ke-20. Misalnya antara Semaun dkk dengan Tjokroaminoto beserta orang tua lainnya dalam SI (Sarekat Islam), yang berakhir dengan pecahnya SI. Konflik itu terjadi juga dalam masa-masa selanjutnya. Bagaimana kekuatan tua dan muda itu bisa mempunyai perspektif yang bertentangan? Mengapa hal serupa hampir selalu terjadi di masa-masa yang lain? Bagaimana hubungan antara kaum tua dan pemuda yang ideal menurut Pak Ben?

J: Ada perbedaan antara jaman permulaan Pergerakan dengan jaman 1940-an. Pada tahun 1920-an anak muda merasa diri sebagai angkatan pertama yang mendapat pendidikan modern. Itu angkatan pertama di Indonesia yang merasa diri lebih *pinter* dari orang tuanya. Secara tradisional orangtua dianggap lebih tahu dari yang muda. Tapi akibat sistem pendidikan Belanda pada awal abad ke-20, timbul suatu generasi yang unik. Konflik kebudayaan antara tua-muda pada jaman itu hanya bersifat pertentangan orang yang menganggap dirinya modern melawan orang yang dianggap kolot.

Kalau pada tahun 1945 orang tua juga ikut Pergerakan. Jadi perbedaan ini bersifat pertentangan politik antara yang mau radikal-radikalan dan yang mau pakai jalan yang lebih hati-hati. Itu suatu perbedaan yang pokok. Perbedaan lain yang menarik disebabkan oleh peranan Jepang yang dengan sengaja menargetkan angkatan muda, dan melatih dan mendidik anak muda dalam jumlah yang luar biasa besarnya. Apalagi kalau dibandingkan dengan politiknya Belanda. Anak-anak muda pada tahun 1945-an punya pengalaman yang jauh berbeda dibandingkan seniorinya. Mereka dibesarkan dalam situasi Perang Dunia, dalam situasi serba sulit. Inflasi, sistem *romusha*, segala *macem*. Jadi mentalnya jauh berbeda dari yang lebih tua.

Jangan lupa bahwa sampai tahun 1950 Indonesia tidak bebas untuk mendirikan sistem persekolahan yang umum dan belum ada kesempatan untuk memberantas buta huruf. Sebagian besar dari masyarakat Indonesia waktu itu memang buta huruf. Sebagian besar dari anak muda juga tidak masuk sekolah. Nah, karena itu mereka mengalami masa pubernya dan masa mudanya dalam suasana dan dalam kultur yang dalam banyak hal masih tradisional, yang baru berangsur-angsur hilang setelah tahun 1950.

Karena itu tidak ada “kaum remaja” pada waktu itu. Remaja itu produk dari sistem persekolahan modern. Sedangkan orang-orang yang berpen-

didikan pada tahun-tahun terakhir jaman Belanda dan Jepang itu masih merupakan suatu prosentase yang sangat kecil dalam masyarakat. Jadi anak muda pada tahun 1945 masih dekat, berkaitan, dengan masyarakat lama. Anak-anak muda yang ikut aktif sama sekali tidak melakukannya demi karier atau demi ambisi. Mereka penuh dengan semangat patriotisme, semangat berkorban untuk suatu yang besar. Sedangkan yang lebih tua jelas punya ambisi menjadi menteri, menjadi pejabat tinggi dan sebagainya. Ini juga menimbulkan konflik yang mendalam.

T: Kalau kita melihat bahwa biasanya antara yang tua dan muda ada perbedaan kepentingan tadi, bagaimana kekuatan tua dan muda itu bisa didamaikan?

J: Nggak perlu didamaikan. Tetapi kalau dikatakan bahwa selalu ada konflik antara tua dan muda, saya kira itu belum bisa dibuktikan. Kalau kita lihat umpamanya bapak-bapak dan anak-anak dalam masyarakat Jawa pada abad ke-19, sama sekali tidak *nongol* konflik tua-muda. Yang muda jelas patuh pada yang tua. Jadi persoalan konflik angkatan itu baru timbul pada masa modern. Nah, saya lihat hubungan yang baik macam itu mirip hubungan kakak-beradik: terbuka, penuh humor, rileks, dan sebagainya. Tapi itu sulit dicari. Alasannya terutama karena adanya “penyakit” dari kebudayaan Jawa di mana orang begitu sensitif terhadap harga diri sehingga selalu minta dihargai, minta dipuji dan sebagainya. Kalau demikian ya orang sibuk mencari dan memuji diri-sendiri. Itu tidak menimbulkan suatu hubungan yang lancar, terbuka dan sebagainya. Orang-orang cenderung menjadi agak berkulit badak, khususnya orang-tua.

Siapa Itu Pemuda?

T: Dengan mengutip data Pak Widjojo Nitisastro, Pak Ben mengatakan bahwa pada tahun 1940 ada hampir 5 juta pemuda berumur 15-19 tahun di Jawa. Apakah rentang waktu 15-19 tahun itu pula yang dipakai Pak Ben untuk mendiskripsikan pemuda pada tahun 1944-1946? Kalau bukan, siapa yang dimaksud dengan pemuda dalam buku itu? Apa ciri-ciri khasnya?

J: Saya kira [sebutan] *anak muda* harus dibedakan dari [sebutan] *pemuda*. Menurut saya, kalau yang dikatakan anak muda itu berasal dari kelompok

yang biasanya usianya 15-19 tahun. Jadi *cuma* [sebutan] demografis. Pada umumnya di masyarakat Jawa, Sunda, atau Madura, itu anak muda *cowok* yang sudah puber, belum kawin belum tentu mereka itu akan ikut politik atau perang. Kalau pemuda, jelas berarti, pada jaman itu, [yakni] sebagian dari golongan demografis yang merasa diri ikut perjuangan. Maka pada jaman itu sebutan pemuda itu merupakan sebutan yang sangat terhormat. Nota bene pada jaman itu kata “pemudi” belum populer. Jadi sebutan pemuda itu berlaku baik untuk *cowok* maupun untuk *cewek*.

T: Tadi Pak Ben belum menyebut ciri-ciri khas pemuda waktu itu.

J: Ya, kita harus ingat bahwa masyarakat pada umumnya belum tahu politik. Malahan dalam bahasa Jawa tidak ada kata tradisional yang artinya persis politik. Itu harus diambil dari bahasa lain. Jadi khususnya di pelosok, di kota kecil dan sebagainya, pemuda adalah mereka yang merasa diri siap terjun dalam suatu pergerakan yang maha besar untuk merebut kemerdekaan. Mereka menikmati suasana penuh romantisme, penuh utopisme, dan petualangan. Pada masa itu, dengan sengaja mereka berambut gondrong untuk menandakan bahwa mereka manusia istimewa. Pokoknya mereka merasa mendobrak kontinuitas tradisi. Dan ini sesuatu yang baru, yang mungkin tidak terulang lagi, karena saya lihat pemuda-pemuda tahun 1966 sama sekali tidak merasa mendobrak apa-apa, malahan cepat *pingin* jadi menteri. Jadi pemuda-isme mungkin suatu kejadian yang unik pada tahun 1940-an.

Makna Pemuda dan Munculnya Remaja

T: Kata pemuda untuk waktu itu menjadi sebutan untuk kaum muda secara umum. Tetapi saat ini kata pemuda secara semantis lebih dekat ke makna politis, seperti Pemuda Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Kristen, Pemuda Katolik, Pemuda Pancasila. Sementara itu sekarang muncul konsep “kawula muda” dan “remaja”. Mengapa dan bagaimana ini terjadi?

J: Kalau jaman sekarang ada bangsanya tokoh-tokoh Pemuda Pancasila dan sebagainya tetapi yang umurnya 45 tahun dan anaknya sudah banyak. Itu cuma membuktikan bahwa kata pemuda ini lama-lama menjadi beku.

Artinya cuma istilah birokratis yang menggambarkan kelompok seperti wanita, pemuda, intelektual, petani, dan sebagainya. Cuma suatu bagian dari peta masyarakat; tidak punya arti sendiri. Karena itu juga bisa timbul kata remaja yang berarti anak-anak yang tidak berpolitik dan belum masuk birokrasi. Malah sering kali cukup *brengsek* dan harus ditertibkan oleh birokrasi.

Jaman itu, saya kira sebenarnya usia tidak begitu penting. Yang penting itu jiwanya. Orang bisa berumur 30-an, tetapi asal dalam tindakannya, asal dalam spiritnya, dia bisa searus dengan anak-anak muda yang bergerak, dia bisa dianggap tanpa ironi sebagai pemuda. Bisa dikatakan juga, pada jaman itu, mungkin akibat pengaruh dari masyarakat, pemuda berarti orang yang belum kawin. Sering terjadi dalam organisasi pemuda kalau pemimpinnya sudah kawin, secara tidak langsung dia disuruh keluar dari organisasi itu. Karena mereka melihat irama hidupnya sudah lain. Dia tidak bisa mencurahkan semua semangatnya dan energinya kepada perjuangan. Secara tidak langsung, pemuda itu berarti anak muda yang bebas dari tugas dan tanggung jawab keluarga.

T: Atau sekarang pemuda sudah kehilangan arti politis?

J: Untuk sementara. Kita lihat bahwa Pemuda Ansor *yah cuma ekor, cuma ikut-ikutan, cuman onderbouw* sesuatu organisasi yang lebih besar. Pemuda Pancasila, itu bisa dikatakan *onderbouw* Golkar. Jadi tidak terlepas, tidak bisa berdiri sendiri.

T: Apakah ini juga karena pengaruh dari politik “masa mengambang” dulu itu?

J: Itu akibat dari birokratisasi masyarakat dan suasana kultur Indonesia selama Orde Baru. Apa saja ya boleh dikatakan masuk cangkem-nya [mulutnya, *Ed.*] birokrasi.

Militansi Pemuda

T: Dari buku Revoloesi Pemoeda itu terkesan bahwa pada masa 1944-46 itu militansi pemuda untuk berkorban dan menyatakan sikap tidak setuju terhadap kekuatan ‘tua’ atau kehendak dari penguasa merupakan kunci diakuinya eksistensi pemuda di mata senior mereka dan juga musuh-

musuh revolusi pada saat itu. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap terbentuknya militansi para pemuda itu? Bagaimana mereka memperoleh kesadaran politik?

J: Saya kira jawabannya agak gampang. Penderitaan rakyat memang luar biasa pada jaman Jepang. Banyak orang mati di pinggir jalan karena kelaparan, karena wabah penyakit, juga akibat dari inflasi yang luar biasa. Itu menimbulkan suatu suasana yang penuh kegelisahan. Terus lagi dengan suasana peperangan dan kebencian anak-muda kepada kolaborator-kolaborator dengan Jepang, yang dianggap sangat kejam, dengan sistem romushanya, dengan eksekusi-eksekusi yang dijalankan di tempat umum, dengan penganiayaan oleh Kempetai dan sebagainya. Jadi orang-orang yang mengambil untung dengan kolaborasinya dengan Jepang dibenci bukan main. Ini terbukti pada waktu revolusi-revolusi sosial tahun 1945-46. Banyak pejabat-pejabat, lurah-lurah, yang dianggap berkolaborasi dengan Jepang diculik. Ada juga yang dibunuh.

Selain itu ada patriotisme dan ajaran Jepang dalam arti tertentu. Jepang mengajarkan semangat *bushido*, semangat berkorban untuk kaisar. Mereka juga banyak belajar berorganisasi sesuai dengan didikan Jepang. Nah, Jepang merasa bahwa angkatan tua di Indonesia pada umumnya sudah diracuni oleh kebudayaan Belanda, dan sulit mengikuti sistem didikan Jepang. Maka Jepang lebih banyak percaya kepada anak-anak muda yang etika politiknya belum dinodai oleh Belanda. Lalu Jepang *bikin* puluhan organisasi: Keibodan, Seinendan, Peta, dan sebagainya. Untuk pertama kali ratusan ribu anak muda di Indonesia dilatih berpolitik secara militer. Ini ada pengaruh yang luar biasa terhadap kesadaran politik dan kesadaran kebangsaan angkatan muda pada jaman itu.

T: Apakah yang dimaksud patriotisme tadi itu nasionalisme juga?

J: O, iya. Jangan lupa bahwa Jepang *kasih* kesempatan untuk Bung Karno berpidato di radio, yang selama jaman Belanda tidak pernah terjadi. Dan mereka pasang radio kecil-kecilan di kampung, di desa, dan sebagainya. Sehingga untuk pertama kalinya Bung Karno dengan suara sendiri bisa berbicara kepada orang yang pada umumnya *nggak* bisa baca koran.

Sukarno *kan* terkenal sebagai orator yang hebat, dan itu sangat berpengaruh. Walaupun ada juga bongkok-bongkoknya kearah Jepang.

Pengaruh partai-partai politik ya jelas ada. Tapi jangan lupa bahwa pada jaman Belanda partai itu pada umumnya sangat kecil dan ruang geraknya terbatas—khususnya di kota-kota dan daerah perkebunan. Di luar itu, pengaruh mereka masih belum begitu besar dan mereka ini terus dikejar-kejar polisi rahasia, yaitu “BAIS” [dinas intelejen]-nya Belanda. Jadi pada tahun 1945 parta-partai masih lemah.

T: Kalau kita melihat pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, pada waktu itu pemuda dapat mengkonsolidasi diri sehingga mampu melakukan perlawanan besar-besaran. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Bagaimana hubungan mereka dengan sektor masyarakat yang lain, misalnya kaum terdidik, pemimpin agama, dan sebagainya?

J: Ini pertanyaan yang menarik, tetapi harus diingat dulu tanggalnya, 10 November. Itu berarti tiga bulan atau 90 hari setelah proklamasi. Kongres Pemuda yang pertama dimulai pada hari itu juga, yang nota bene mengundang organisasi pemuda yang “resmi”. Dengan kata lain, pemuda yang bertempur di Surabaya adalah pemuda-pemuda yang berada di luar organisasi politik waktu itu. Dalam hal ini adalah penemuan Bung Tomo yang luar biasa karena dia memikirkan kemungkinan pemakaian radio. Dan dia adalah orator yang bukan main. Jadi *saben* hari pada jam tertentu dia teriak di radio, “Allahu Akbar, Allahu Akbar”. Di seluruh kota Surabaya dan sekitarnya orang dengar itu. Mereka tidak perlu masuk organisasi. Dia bilang, “Sekutu datang! Pengkhianat mau begini-begitu! Ayo bung kita sama-sama melawan musuh!”.

Jangan lupa bahwa anak muda di Surabaya belum pernah menghadapi tentara modern. Jadi mereka nekadnya bukan main, dan korbannya juga bukan main banyaknya. Mereka juga dipengaruhi oleh kyai-kyai di sekitar Surabaya. Banyak santri-santri, setelah dikasih restu dan sebagainya, ada yang merasa diri kebal, ada yang mau mati syahid. Jadi tentara Sekutu juga *bengong* melihat bagaimana rakyat bisa bangkit melawan mereka dengan spirit yang tingginya bukan main. *Toh* tidak bisa menang. Setelah [Brigadir] Jenderal Mallaby dibunuh, Inggris membawa senjata berat dan dalam waktu

tidak lama sesudah itu kota Surabaya diduduki. Pemuda-pemuda lalu keluar kota dan *nongkrong* di garis Mojokerto-Sidoarjo.

Kerjasama dengan sektor masyarakat yang lain ada sedikit-sedikit. Tapi ini, seperti yang saya katakan tadi, pada jaman Jepang organisasi yang bukan buatan Jepang itu dilarang. Dan Kempetei cukup kurang-ajar dan kejam. Boleh dikatakan bahwa setelah proklamasi semuanya harus mulai dari bawah. Jadi dalam waktu sembilan puluh hari itu tidak banyak yang bisa dikerjakan secara teratur. Itu akan makan waktu.

Dus, itu *pinter*-nya si Bung Tomo yang merasa bahwa biarpun demikian, dengan teknologi modern, spirit masyarakat tetap bisa diarahkan. Padahal organisasi itu baru tumbuh pada tingkat permulaan. Jadi tidak salah kalau dikatakan bahwa Bung Tomo-lah orang paling penting di Surabaya. Karena selain dia, *nggak* banyak orang-orang pergerakan di Surabaya. Bisa dilihat tokoh politik pada waktu itu, ya bangsanya Ruslan Abdulgani, Dul Arnowo, dan sebagainya. Kelompok yang sedikit sekali anggotanya dan kalibernya juga *nggak* tinggi.

Makna Indonesia

T: Kalau kita melihat revolusi sosial di beberapa daerah, ternyata di beberapa tempat seperti Banten, Sumatra Barat dan Timur atau Aceh, segolongan pemuda memakai simbol-simbol Republik Indonesia dan secara sadar menjadi pendukung Republik. Untuk yang jauh dari Jakarta ini, apa arti Indonesia bagi mereka? Bagaimana mereka bisa ditulari nasionalisme? Lalu apa arti nasionalisme mereka itu? Sebenarnya pula, apa keuntungan mereka, lebih-lebih yang jauh dari Jawa, bergabung dengan Republik Indonesia? Apakah ada intelektual lokal di daerah-daerah itu? Kalau ya, siapa?

J: Yang menjadi pelopor dari nasionalisme di daerah sebagian besar adalah anak-anak yang pada akhir jaman Belanda masuk SD, SMA, SMP. Sebagai contoh umpamanya di Aceh, yang jelas tampak ada jurang antara generasi tua seperti Daud Beureueh yang berjuang atas dasar Islam tulen, dan angkatan muda yang memelopori revolusi di Aceh yang bergabung dalam organisasi yang namanya API, Angkatan Pemuda Indonesia. Angkatan itu penting, pemuda juga penting, Indonesia juga penting. Bukan Islam. Dan mereka

dapat ide tentang Indonesianya dari sistem persekolahan, dari koran, dari organisasi pergerakan, dari peta-peta yang mereka lihat di mana-mana, peta Hindia Belanda dan sebagainya. Seperti saya pernah jelaskan dalam buku *Imagined Communities*. Jadi yang penting itu mereka tidak peduli Islam atau Kristen. Mereka cuma merasa tujuan mereka itu adalah merdeka. Merdeka adalah kata kunci pada jaman itu. Anak muda merasa apa saja bisa diatur kemudian, tapi yang penting sekarang adalah kita harus bebas. Kita harus merdeka. Sedangkan orangtua masih sibuk dengan agama masing-masing. Itu suatu perbedaan yang penting.

Kalau tokoh-tokoh yang menjadi pemimpin, saya lihat pada umumnya adalah guru-guru, guru SD, guru muda, guru SMA, guru Taman Siswa, guru sekolah Islam. Terus, orang yang namanya otodidak: advokat-advokat, wartawan, pimpinan buruh, dan sebagainya. Jangan lupa bahwa pada masa itu hampir semua orang yang ikut bergerak masih muda. Bung Karno pada waktu proklamasi sudah mulai dianggap orang tua, padahal usianya hanya 45. Sedangkan Presiden yang sekarang [Soeharto, *Ed.*] usianya sudah hampir 75. Pada jaman itu, kalau seseorang sudah berusia 75, dia sudah di luar hitungan. Jadi orang tidak akan peduli dengan orang yang umurnya sudah 75. *Ha... ha... ha...* Itu namanya kemajuan.

T: Apakah kesadaran nasionalisme itu juga timbul atas pengaruh Sumpah Pemuda tahun 1928?

J: Seingat saya, selama revolusi Sumpah Pemuda tidak sering disebut. Itu bukan karena orang tidak tahu atau sudah lupa bahwa ada Sumpah Pemuda. Tapi, yaa..., bagaimana pun pemuda-pemuda *nggak* usah sumpah lagi. Tapi bisa bergerak. Bisa berevolusi. Bisa melawan Belanda. Bisa mendongkel bupati. Jadi *nggak* ada sama sekali pikiran ke sana, justru karena mereka sedang dalam arus revolusi. Kalau Sumpah Pemuda itu *kan* diciptakan oleh pemuda-pemuda yang justru karena tidak bisa berbuat apa-apa, lalu bersumpah.

Aceh memang menarik kalau kita melihat dua kelompok yang bikin revolusi besar di situ, yaitu kelompok Daud Beureueh dan kelompok yang menamakan diri API, Angkatan Pemuda Indonesia. Daud Beureueh dan

kelompoknya tidak banyak memikirkan Indonesia. Mereka timbul dari masyarakat pesantren, dari madrasah, dan sebagainya. Mereka anti Belanda dan memandang mereka sebagai kafir. Mereka anti kelompok feodal yang menindas rakyat dan munafik terhadap cita-cita Islam. Mereka yang bergabung dengan kelompok API pada umumnya adalah orang-orang yang lahir dari sistem pendidikan Belanda, dari SD-SDnya, SMP-SMPnya. Dengan demikian mereka sudah biasa dengan suatu sistem yang logikanya adalah logika Hindia Belanda. Mereka tahu dari sekolahan bahwa sekolah mereka itu mirip dengan ratusan sekolah yang lain, dalam bentuk yang sama, kurikulum yang sama, dengan ujian yang sama, dalam hierarki yang akhirnya sampai ke Batavia, Jakarta. Dalam ruangan kelas mereka melihat peta-peta Hindia Belanda dengan warna-warna tertentu. Mereka belajar nama-nama kota, dan daerah Hindia Belanda. Mereka sudah dibiasakan oleh Belanda untuk memikirkan atau membayangkan Indonesia sebagai suatu realitas. Ini tentu bukan maksud penjajah, tapi merupakan akibat dari politik mereka. Pemuda Aceh tidak perlu berpikir panjang, Angkatan Pemuda Indonesia itu normal. Mereka sudah baca di koran bahwa di Jakarta sudah ada Angkatan Pemuda Indonesia. Mereka tidak peduli bahwa API di Jakarta dipimpin oleh Wikana yang berhaluan kekiri-kirian. Di Aceh mereka bikin API yang haluannya lain lagi. Spontan. Justru karena mereka tidak dipaksakan oleh suatu birokrasi di Jakarta, maka mereka bisa bergabung. Artinya, mereka banyak berkorban untuk Republik selama tahun 1945, tapi memberontak terhadap Republik itu setelah kemerdekaan karena mulai merasa dipaksakan oleh pusat.

Penghalauan Pemuda

T: Semangat, kecerdikan, kekuatan, dan kepercayaan diri pemuda dalam memperjuangkan kemerdekaan ternyata dapat dihalau oleh kaum tua. Mengapa kaum tua merasa perlu menghalau para pemuda itu? Bagaimana prosesnya? Dan juga, apa sebenarnya kelemahan-kelemahan pemuda pada saat itu?

J: Nomor satu, mereka takut pada anak muda. Hal tersebut sangat terasa dalam laporan-laporan pemerintah intern pada waktu itu. Terus, dari sumber-sumber arsip Belanda juga bisa diketahui bagaimana pemimpin-

pemimpin Indonesia kalau bertemu pemimpin-pemimpin Belanda selalu mengeluh tentang *wilde jongen*, pemuda liar, yang selalu mengancam mereka. Jangan lupa pada masa mula revolusi banyak orang diculik atau ditahan. Ada juga yang dibunuh oleh anak-anak muda ini sehingga orang angkatan tua sering merasa takut melihat *gali-gali* [preman-preman, *Ed.*] kecil ini.

Di lain pihak mereka memerlukan pemuda, karena generasi tua itu tidak mungkin siap untuk bertempur di front. Juga untuk mencari backing. Jaman itu, kalau tidak ada massa di belakang si pemimpin, dia nggak bisa apa-apa. Tiap pemimpin politik mencari sokongan dari anak-anak muda tertentu dalam pergulatan untuk berkuasa. Juga sebagai motor perjuangan karena plin-plannya si pemimpin terhadap Belanda. Mereka juga mengerti bahwa kalau nggak ada pemuda, kalau nggak ada perjuangan pemuda, maka tidak ada bargaining chip. Kalau lagi diplomasi, tanpa pemuda, mereka harus menyerah pada Belanda. Jadi antara takut dan perlu: pikiran orang tua pada umumnya.

Mengapa pemuda bisa dihalau? Jangan lupa pada umumnya anak-anak muda ini pendidikannya tidak tinggi. Mereka tidak punya konsep politik yang jelas, jarang berideologi. Pengalaman masih terbatas. Pada umumnya mereka *nggak ngerti* bahasa asing. Menghadapi dunia luar mereka kerap merasa minder. Karena itu mereka tertarik pada individu-individu angkatan tua yang di mata mereka mencerminkan hasrat, keinginan, dan harapan mereka sendiri. Tetapi hal ini selalu menjadi hubungan yang tegang. Pemuda *cepat-cepet* bisa merasa bahwa pimpinan itu pengkhianat atau menjadi lunak. Dan memang pada masa revolusi kekuatan-kekuatan yang penting justru [tidak datang dari] partai melainkan dari tentara dan laskar-laskar. Pemuda bersenjata jauh lebih menentukan daripada partai.

II. PARTAI-PARTAI POLITIK

Pemuda dan Partai Politik

T: Munculnya Maklumat Nomor X [baca: nomor eks, Ed.] yang dalam buku Pak Ben dikatakan sebagai kudeta diam-diam terhadap presiden, tidak hanya mengakibatkan pindahnya kekuasaan presiden ke KNI, Komite Nasional Indonesia, tetapi juga mengakibatkan lahirnya partai-partai politik seperti

PS (Partai Sosialis), PBI (Partai Buruh Indonesia), PKI (Partai Komunis Indonesia), Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia), dan PNI (Partai Nasional Indonesia). Bagaimana dampak lahirnya partai-partai tersebut terhadap kekuatan dan peranan serta cita-cita pemuda selanjutnya?

J: Rupanya masih ada salah paham perkara Maklumat No. X yang suka digembar-gemborkan itu. Banyak orang mengira seolah-olah hanya karena Maklumat No X, yang *keblinger* ini, timbul banyak partai-partai dan segala *macem* problem selanjutnya. Tapi kalau membaca buku saya, bisa dilihat bahwa Maklumat No. X itu sebenarnya *cuma* pengakuan terhadap realitas yang sedang terjadi. Jadi partai-partai sudah timbul dengan sendirinya. Tidak peduli sama pemerintah pusat, tidak peduli Sukarno-Hatta. PKI-nya sudah ada, sebentar lagi Partai Sosialis juga ada. Jadi Maklumat No. X itu hanya meng-*oke*-kan partai-partai yang tidak bisa dicegah lagi.

Harus diingat bahwa pada waktu itu pemerintah Indonesia masih amat lemah. Hanya menguasai beberapa daerah tertentu. Korps pegawai loyalitasnya belum bisa dijamin. Mereka harus menghadapi segala *macem* letusan-letusan dalam bentuk pergerakan bebas dari pemuda, dari kelompok kiai, dan sebagainya. Jangan lupa pada waktu itu banyak pegawai negeri sangat dibenci oleh masyarakat karena peranannya pada jaman Jepang. Mereka bisa saja diintimidasi, bisa diculik, bisa *dimacem-macemkan*. Jadi ini bukan karena keputusan pemerintah yang menyebabkan terjadi sesuatu. Justru sebaliknya.

Itu pertama. Selanjutnya partai-partai berkembang. Pada awalnya, partai-partai belum begitu penting karena tidak mudah mengorganisasi partai. Hal tersebut memerlukan waktu, dana, kader-kader, dan sebagainya. Pada bulan-bulan pertama revolusi partai menduduki prioritas kedua. Yang paling mendesak adalah peranan pemuda, yang sebagian sudah masuk laskar dan tentara. Persoalannya, bagaimana pun juga republik ini harus punya kabinet. Dan pada umumnya, anak-anak belasan tahun itu, apalagi yang didikannya sangat rendah, *nggak* bisa jadi menteri. Dan memang tidak ada fantasi mau jadi menteri. Jadi politisi yang menjadi anggota kabinet Sjahrir, [kabinet] Amir Sjarifuddin, sampai [kabinet] Hatta itu, ya tentunya orang-orang Pergerakan.

Harus diingat bahwa Pergerakan memang tidak pernah bersatu. Pada jaman Belanda itu ada PSII-nya, ada PNI-nya, ada Gerindo-nya, ada Partindo-nya, dan sebagainya. Jadi sejak dari Pergerakan memang ada lebih banyak “persatean” daripada persatuan. Selalu ada *unity* dan konflik. Jadi kalau timbul banyak partai tahun 1945, itu cuma lanjutan, dalam bentuk lain, dari situasi tahun 1920-an, dan juga tahun 1930-an.

T: Kalau pada saat itu pemuda dikatakan punya peranan, apakah partai-partai politik ini bukan justru memecah-belah mereka?

J: Bisa dikatakan demikian. *Toh* saya merasa bahwa dalam jangka panjang, umpamanya setelah berhasil merebut senjata dari Jepang, setelah mempersiapkan diri melawan Belanda, pada akhirnya pemuda-pemuda ini akan terpaksa memikirkan haluan jangka panjang. Indonesia merdeka ini akan dibawa ke mana? Dan karena mereka tidak banyak memikirkan hal-hal itu sendiri, maka mereka mau mendengarkan pendapat politikus yang lebih senior, yang memiliki spesialisasi ideologi. Jadi, ya seperti di manapun. Sekarang pun anak-anak muda walaupun penuh semangat, penuh energi, penuh semangat berkorban, *toh* [tetap] datang kepada yang lebih senior. Tanya *gimana* ini pak, *gimana* ini mas, sebaiknya *gimana*? Dalam suasana seperti itu setiap politikus tua yang punya ambisi, yang cari kekuatan, tentu akan mencarinya di kalangan anak muda. Tidak bisa dielakkan, saya kira.

Partai Politik dan Dampaknya

T: Ide perlunya menumbuhkan kembali partai-partai politik sebagai perwujudan demokrasi muncul di tengah usaha merebut kemerdekaan. Pada saat itu pula pemuda bersama rakyat berperang melawan para penjajah dan antek-anteknya. Bagaimana pendapat Pak Ben terhadap keputusan di atas? Apa alasan di balik keputusan itu? Apa dampak tumbuhnya banyak partai ini terhadap konfrontasi dua pilihan mempertahankan kemerdekaan, antara jalan perundingan oleh kaum tua dan jalan perang oleh pemuda?

J: Seperti saya katakan tadi, saya tidak merasa bahwa ini keputusan yang ber-efek langsung. Itu *cuma* pengakuan dari realitas yang ada. Bahwa Bung Karno tidak mau me-*neken* [menandatangani, *Ed.*] Maklumat No. X, sehingga *dikasih* nomor “X,” bukan nomor yang sebenarnya, saya kira Bung Karno

merasa maklumat ini seolah-olah tamparan terhadap kepemimpinan dia sendiri. *Kan* sejak semula dia bercita-cita *bikin* yang dikatakan *staatspartij*, ya semacam, boleh dikatakan agak mirip Golkar [pada masa Orde Baru]. Namun, ternyata itu sama sekali *nggak* jadi. Malah umurnya *nggak* lebih dari sepuluh hari. Jadi mungkin bagi dia ini seperti *sabdo pendhito ratu* [apa yang dikatakan pemimpin harus terjadi, *Ed.*]. *Kan* dia *nggak* mau meralat apa yang pernah dia katakan. Tapi sama sekali tidak ada gejala atau tanda bahwa dia secara prinsipil melawan itu. Dan ternyata setelah itu dia tetap main peranan politik yang penting selama revolusi. Pengaruhnya tetap besar dan saya kira beliau juga tidak rugi. Bagaimana pun juga pada akhirnya revolusi Indonesia dalam arti fisik ya berhasil *kan*, yaitu Belanda keluar, kecuali dari Irian.

T: Apakah partai-partai itu juga membuat semakin tajamnya perjuangan pemuda yang tidak mau kompromi?

J: Saya kira ini perbedaan antara dua angkatan. Anak-anak muda masuk dalam pertarungan ini dengan cukup idealisme. Mereka tidak pikir jauh-jauh. Pokoknya kita mau ber-revolusi. Kita mau mengakhiri penindasan terhadap rakyat. Kita mau mengusir Belanda. Kita mau ini-itu, tanpa banyak memikirkan jalan yang tepat. Di lain pihak, orang-orang yang lebih tua, merasa harus ambil tanggungjawab. Bukan pemuda yang akan berunding dengan Sekutu. Bukan pemuda yang akan berunding dengan Belanda. Itu tugas dari angkatan tua. Jadi mereka juga punya kepentingan lain dari anak-muda.

Pada umumnya, pemuda selalu ingin “Merdeka 100%”. Walaupun mungkin tidak selalu jelas untuk mereka sebenarnya, 100% merdeka itu apa. Sedangkan sebaliknya, angkatan tua yang dari pihak manapun juga, Masyumi, PSI, PKI, PNI, mereka ingin menjadi anggota parlemen, anggota kabinet. Dan siapa saja yang menjadi anggota kabinet *toh* akan menghadapi realitas bahwa dengan tidak ada Angkatan Laut atau Angkatan Udara, dan melihat terbatasnya senjata, kalau Indonesia sebagai bekas Hindia Belanda dari Sabang sampai Merauke mau dibebaskan, ya harus ada perundingan. Karena bagaimana pun juga tentara Republik tidak bisa berjalan di atas air laut.

T: Kalau pembedaan orang tua dan orang muda bisa dikatakan sebagai pembedaan garis membujur, sekarang dengan adanya partai-partai kan ada pemilahan secara melintang sehingga generasi tua dan generasi muda, seperti Pak Ben katakan, bertemu dalam satu partai. Apakah dalam partai masih ada perbedaan? Atau pemuda lalu mempunyai artikulasi lain terhadap pengisian kemerdekaan atau revolusi itu?

J: Itu tergantung tahunnya. Pada umumnya, pada saat awal Hizbullah masih lebih penting dari Masjumi. Pesindo lebih penting dari Partai Sosialis karena jumlahnya jauh lebih besar, karena militansinya, karena senjatanya, dan sebagainya. Pada tahun-tahun pertama bisa dikatakan bahwa Masjumi lebih bersifat ekor dari Hizbullah. Banyak orang yang *pinter-pinter* di sayap kiri malah *nongkrong* di Pesindo, bukan di partai. PNI itu lebih lemah justru karena tidak punya atau tidak berafiliasi dengan suatu organisasi pemuda yang kuat. Mereka cuma punya Barisan Banteng yang daerah operasinya terbatas sekali, sekitar Yogya-Solo. Maka itu, dua partai yang paling kuat di jaman revolusi adalah Partai Sosialis dan Masjumi. Bukan karena ideologinya, bukan karena organisasinya, tetapi karena angkatan mudanya.

Namun lama-kelamaan situasi berubah, sehingga orang-orang tua ini, yang sebenarnya angkatan tua, makin lama makin bisa meyakinkan orang-orang Hizbullah bahwa mereka harus mendengarkan nasihat dan mengikuti garis yang ditunjukkan oleh pimpinan partai. Pada umumnya anak muda tidak punya banyak pengalaman dalam politik, sedangkan orang dari Pergerakan itu sudah bertahun-tahun menulis pamflet, berorganisasi, rapat, dan sebagainya. Mereka lebih banyak pengalaman politiknya.

T: Kalau kita menyimpulkan secara pendek, partai-partai politik ini merugikan atau menguntungkan pemuda?

J: Problemnya bukan partai. Kalau partai saya kira bagus, karena bagaimana pun juga yang bisa masuk organisasi pemuda hanyalah pemuda. Kalau bukan pemuda, tidak ada tempat. Partai adalah wadah yang lebih besar di mana segala macam manusia bisa masuk. Saya kira dalam jangka panjang, partai itu perlu. Pada suatu waktu perjuangan fisik akan selesai, dan setelah itu partai akan tetap ada, tapi angkatan muda yang bersenjata tidak diperlukan lagi.

Problemnya adalah bahwa percekcoakan antar pimpinan partai, permusuhan pribadi, ambisi masing-masing, punya akibat terhadap *onderbouw*-

nya. Jadi, sebagian karena permusuhan antara tokoh-tokoh Masjumi dengan tokoh-tokoh PSI, lama-lama hubungan antara Hizbullah dan Pesindo diperuncing. Seandainya pimpinan ini lebih bijaksana, tidak cepat-cepat mau sepak-menyepak, belum tentu perlu ada perkelahian antar pemuda. Memang persoalan itu sudah ada sejak semula, sejak Pergerakan. selalu ada baku-hantam di antara pimpinan partai yang seharusnya ada [tapi] cuma sedikit-sedikit, dan harus ada batasnya. Memang, pada tahun pertama sampai 1948 ternyata ada konflik, tapi tidak lewat batas. Baru pada tahun 1948 mulai ada perkelahian-perkelahian yang berdarah.

III. TENTARA

Tujuan Pembentukan Tentara

T: Sebagaimana ide pembentukan partai, ide pembentukan tentara resmi muncul di tengah krisis dan perang yang terjadi di banyak tempat. Apa alasan sebenarnya dari pembentukan tentara resmi Indonesia itu?

J: Saya kira ini bukan persoalan. Dengan dibentuknya Republik Indonesia melalui proklamasi, pada suatu waktu pasti akan timbul tentara nasional. Karena pada jaman itu, dan juga jaman sekarang, tentara bisa dianggap lambang kemerdekaan. Setiap negara, biarpun kecil sekali dan tidak punya musuh di luar, toh merasa bahwa bangsa tanpa tentara adalah seperti “*cowok tanpa cawat*”. Ya seolah-olah telanjang. Perlu ada suporter. Tetapi selain itu mereka juga menghadapi realitas bahwa bagaimana pun juga Belanda akan berusaha kembali dan harus dilawan dengan kekuasaan bersenjata.

Pengaruh KNIL dan Peta

T: Dari fakta bahwa banyak mantan perwira KNIL, yang nota bene waktu itu menjadi tentara sebagai mata pencaharian, diangkat sebagai pejabat dalam tubuh tentara Republik, tampak bahwa penguasa yang sedang bimbang itu menitikberatkan pertimbangan administrasi dan ketrampilan organisasi ketentaraan daripada ideologi dan kesetiaan pada perjuangan merebut kemerdekaan. Benarkah kesan ini? Mengapa ini terjadi dan apa pula dampak terhadap jalannya perjuangan merebut kemerdekaan dan perjalanan sejarah bangsa Indonesia selanjutnya?

J: Di sini juga sering ada kesalahpahaman. Tentang tentara KNIL, nota bene itu yang dimaksud adalah *perwira* KNIL, bukan tentara KNIL. Saya tidak lihat bangsanya bintang, prajurit KNIL mau ditarik. Yang mau ditarik oleh Republik adalah golongan yang sebenarnya jumlahnya terbatas sekali. Yaitu orang-orang yang bisa dianggap perwira muda, yang sebagian besar adalah orang-orang yang mendapat pendidikan di Akademi Militer Darurat yang didirikan di Bandung pada tahun 1940 setelah Negeri Belanda jatuh ke tangan Nazi, yaitu ketika Akademi Breda sudah diambil-oper oleh Hitler. Plus beberapa orang seperti Urip [Oerip Soemohardjo, *Ed.*]. Saya tidak yakin bahwa jumlah perwira-perwira KNIL itu lebih dari 100 orang. Sedangkan jumlah orang di Peta itu sudah hampir 70 ribu.

Nah, mengapa mereka itu perlu diambil? Ada dua alasan. Yang pertama, ditariknya perwira-perwira ini ke pihak Republik menunjukkan kepada dunia luar, dan juga kepada Belanda, bahwa biarpun bekas tentara sewaan, mereka pada akhirnya rela mengabdikan pada ide kebangsaan Indonesia. Jadi *mending* ditarik pihak Republik daripada bisa disewa terus. Dari sudut politik propaganda itu bagus. Yang lebih penting adalah faktor kemampuan mereka.

Sementara itu, bagaimana pun juga tentara PETA dibentuk secara aneh sekali. Pimpinan pusatnya, sifatnya, *planning*-nya, semua dipegang oleh Jepang. PETA cuma dimaksudkan sebagai tentara cadangan. Tentara gerilyawan cadangan yang membantu Jepang membela Jawa terhadap serbuan Sekutu. Mereka dididik secara teritorial, secara lokal. Kesatuan yang paling besar adalah batalion, dengan pimpinan yang pangkatnya kira-kira mayor. Dalam PETA tidak ada orang yang ada *training*-nya dalam bidang staf, keuangan, segala macam intelijen dan sebagainya. Jadi memang ada suatu kekurangan di pihak PETA yang bisa diisi oleh perwira KNIL. Mereka ini tidak bisa diterima sebagai komandan di lapangan. Hal ini bisa dilihat dari nasib Didi Kartasmita, satu-satunya orang KNIL lama yang jelas tidak ditaati oleh bawahannya dari PETA. Dia lalu terpaksa ditarik ke markas besar sebagai pelatih, sebagai perencana dan sebagainya. Jadi itu bukan sesuatu yang mengherankan.

T: Apakah perwira-perwira KNIL yang ditarik itu tadi tidak punya pengaruh dalam pembentukan konsep tentang tentara nasional?

J: Kalau yang KNIL pra-Bandung saya kira tidak. Mereka tidak pernah menjadi terkemuka. Malah pada akhirnya kan Didi Kartasasmita menyeberang ke Negara Pasundan karena kecewa, tidak *dikasih* kesempatan lebih banyak. Secara politis orang PETA selalu di atas. Kalau kelompok Bandung itu lain lagi. Seperti [Jendral A. H.] Nasution, [Jendral] Simatupang, Mokoginta, mereka punya peranan, karena konsep mereka tentang tentara diwarisi dari tentara Belanda. Modelnya adalah model tentara Barat yang dipelopori Jerman, Perancis dan sebagainya pada abad 19. Ide mereka tentang tentara adalah ide Barat. Kalau PETA-kan bermodel Jepang.

Tapi kita bisa melihat bahwa lama-kelamaan mereka juga lebih banyak dipengaruhi oleh pengalaman daripada model. Umpamanya rencana-rencana Nasution pada waktu dia menjadi KASAD [Kepala Staff Angkatan Darat]. Itu jauh sekali dari model Belanda pada tahun 1940-an. Dia belajar dari banyak hal. Pertama dia belajar dari kegagalan tentara Indonesia dalam pertempuran frontal terhadap Belanda. Dia lihat pada tahun 1947, waktu Agresi Pertama, Belanda dengan mudah sekali mengikis habis kesatuan-kesatuan TNI yang mau berperang dengan gaya frontal dan gampang sekali mengoper sebagian besar dari Jawa Timur, sebagian besar dari Jawa Barat dan sebagainya. Dia belajar dari situ. Dia merasa bahwa kita ini *nggak* bisa menang lawan Belanda kalau memakai sistem *gitu*, yaitu sistem perang frontal.

Dia mulai berpikir ke arah model PETA, perang gerilya, aktivitas lokal, perang teritorial dan sebagainya. Jadi saya kira yang terjadi pada akhirnya adalah semacam titik-temu antara orang seperti Nasution dan orang-orang PETA. Saya tidak melihat ada perbedaan besar di antara mereka pada akhirnya.

Dengan kata lain, konsep tentara sekarang itu perkawinan antara konsep tentara Jepang, Belanda, Amerika, plus pengalaman. Konsep ketahanan rakyat, soal-soal perang teritorial, dan sebagainya, itu sama sekali bukan konsep-konsep KNIL. Itu konsep-konsep yang timbul dari pengalaman jaman revolusi, di mana kalau berperang dengan cara KNIL selalu kalah.

Jadi Nasution sendiri cukup pintar untuk merasa bahwa perlawanan harus diorganisir atas dasar kedisiplinan, berarti hubungan antara rakyat dan tentara, pemerintahan dan tentara, harus sangat erat.

Terus setelah merdeka, dan setelah dia dicopot dari fungsinya sebagai KASAD, dia dua tahun *nganggur*. Dia banyak baca buku Amerika, buku Mao Tse Tung, lalu dia mulai merumuskan secara teoritis fungsi dan peranan tentara Indonesia, berdasarkan pengalaman maupun bacaan. *Kan* orangnya ambisius dan ingin supaya tentara punya peranan yang penting dalam percaturan politik di Indonesia? Dari situ timbul doktrin Jalan Tengah dan sebagainya. Jangan lupa bahwa Nasution memulai kariernya sebagai guru sekolah jaman Belanda. Dia ditarik ke akademi militer baru beberapa bulan sebelum Jepang datang. Mentalnya bukan mental orang sewaan.

Pemaksaan Laskar-Laskar Rakyat

T: Dengan dibentuknya tentara, terkesan pula bahwa posisi pemuda berubah dari pelopor menjadi pengekor. Selain itu kekompakan pemuda, yang menjadi pilar dari kekuatan mereka, hilang setelah tentara resmi dibentuk, lebih-lebih ketika Nasution sering memaksa laskar rakyat bergabung dengan divisi tentara. Bagaimana pendapat Pak Ben tentang hal ini? Mengapa demikian? Apa pula pengaruh pemaksaan ini untuk masa-masa selanjutnya?

J: Setelah TNI dibentuk, dengan sendirinya sebagai tentara nasional, pemerintah akan mementingkan keperluan finansial TNI di atas kesatuan-kesatuan lainnya. Walaupun budget dari Republik minimal, bagaimana pun juga TNI [tetap] mendapat prioritas. Tapi karena negara *nggak* punya *duit* sama sekali dan pemerintah lemah, yang terjadi adalah setiap organisasi yang bersenjata harus cari makan sendiri, cari senjata sendiri. Harus mendekati rakyat atau menindas rakyat. Karena itu sering timbul cekcok antara laskar dengan laskar, tentara dengan laskar dan sebagainya. Malah tentara dengan tentara sering juga. Karena tentara sendiri pada waktu itu dan selanjutnya tidak pernah menjadi kesatuan yang kompak, yang hirarkis.

Jangan lupa bahwa pada jaman revolusi sebagian besar perwira tinggi tidak ditentukan oleh perwira yang lebih tinggi lagi, tapi justru menjadi pilihan bawahannya. Pak Dirman [Jendral Sudirman, *Ed.*] menjadi Panglima

Besar bukan karena ditetapkan oleh Perdana Menteri ataupun oleh Presiden. Tapi dipilih oleh sekelompok perwira PETA yang dipilih oleh bawahannya. Jadi ini suatu tentara yang aneh, dan justru modelnya *upside down*, dari tentara konvensional. Usaha Nasution untuk memaksa laskar-laskar dari Jawa Barat untuk dilucuti atau dimasukkan dalam divisi Siliwangi itu hanya satu perwujudan dari berbagai masalah. Nasution mungkin lebih berhasil daripada komandan-komandan lainnya, karena dia dapat bantuan dari beberapa tokoh pemuda yang kebetulan teman atau merasa cocok dengan dia. Seperti pemuda Soetoko, yang sebenarnya mulai sebagai pimpinan laskar, tetapi terus ditarik ke dalam Siliwangi dan pada akhirnya menjadi jenderal juga.

T: Apa reaksi laskar-laskar rakyat yang tidak mau bergabung ke TNI?

J: Itu tidak bisa dikatakan secara merata. Ada yang melawan dengan keras. Timbulnya DI mulai dari situ. Hizbullah tidak mau dilucuti dan tidak mau dipaksakan ikut Nasution di Jawa Barat. Ada yang lama-lama berantakan seperti Barisan Pemberontak-nya Bung Tomo. Ada yang di tengah-tengah seperti Pesindo [Pemuda Sosialis Indonesia, didirikan di Yogyakarta tanggal 10 November 1945, *Ed.*]. Pesindo pada umumnya cocok dengan tentara sampai Amir Sjarifuddin jatuh. Setelah Amir jatuh mereka mulai ambil sikap yang agak jauh dari tentara. Jangan lupa bahwa banyak tentara ini punya kakak, punya Oom [paman], punya saudara sepupu dalam laskar. Jadi pimpinannya pada umumnya berasal dari lapisan masyarakat yang sama. Sering pernah menjadi teman di bangku sekolah, dan sebagainya.

T: Tapi mengapa Nasution waktu itu memaksa laskar-laskar bergabung ke tentara?

J: Soalnya begini. Pada masa itu jumlah senjata di Indonesia, Jawa-Sumatera khususnya, amat kurang dibandingkan jumlah orang-orang yang ingin berperang. Sebagian besar dari kesatuan tentara maupun laskar itu kalau ada 100 orang mungkin hanya 30 di antaranya yang mempunyai senjata. Hal ini menimbulkan suatu ketegangan dan persaingan antara hampir setiap kelompok. Siapa yang bisa dapat senjata dari Jepang atau dari sumber lain

ia akan menjadi komandan yang penting dan berpengaruh. Jadi sebagian dari pemaksaan ini didorong oleh situasi. Juga soal *duit* dan makanan yang harus diambil dari masyarakat. Sekian banyak kelompok semuanya harus disokong oleh masyarakat. Dengan demikian timbul persaingan. Jadi tentara pada umumnya *nggak* suka sama laskar, bukan atas dasar politik, tapi karena merasa bahwa laskar punya senjata yang seharusnya mereka miliki. Jadi ini konflik yang mendasar.

Tapi dalam hal ini TNI lebih unggul karena bagaimana pun mereka alat negara merdeka, alat negara Republik Indonesia. Jadi mereka bisa mengklaim lebih banyak dari lain-lainnya. Namun ini tidak berarti peranan laskar tidak penting. Malah saya kira itu sangat penting sampai kira-kira 1948. Ketika itu, dengan timbulnya peristiwa Madiun, laskar yang paling kuat dan paling terlatih, yaitu Pesindo, dihancurkan. Selain itu, pada masa yang kira-kira hampir sama, sebagian besar dari Hizbullah juga masuk atau condong ke DI (Darul Islam). Tidak gampang dimusnahkan oleh TNI, seperti Pesindo. Malahan bisa berjuang terus sampai tahun 1962-63. Sampai Kartosuwiryo ditangkap dan akhirnya dieksekusi. Jangan lupa bahwa DI timbul dari sekolahan yang sama dengan PETA, dengan Pesindo, dan sebagainya. Ini semua anak muda yang bergerak pada masa 1945-46. Cuma pada akhirnya arahnya berbeda. Dari dokumen-dokumen pada tahun 1948-49, kita bisa baca bahwa Belanda jauh lebih takut pada Hizbullah daripada kepada Nasution. Malah di beberapa tempat ada semacam *kongkalikong* antara TNI dan tentara Belanda untuk menghadapi Hizbullah di Jawa Barat.

Sudirman-Nasution-Amir Sjarifuddin

T: Kalau kita melihat pidato Pak Dirman, dia sangat menekankan bahwa tentara itu dari rakyat dan untuk rakyat. Lalu apa perbedaan antara Pak Dirman dengan konsep Tentara Masyarakat dari Amir Sjarifuddin?

J: Sudirman mulai tahun 1947 sudah mulai sakit TBC. Dia akhirnya meninggal kira-kira pada waktu pengakuan kedaulatan. Dalam banyak hal dia tidak bisa secara ketat menguasai situasi. Banyak hal diserahkan kepada Urip, Nasution, Simatupang, dan sebagainya. Dia makin lama makin berfungsi

sebagai simbol dedikasi dan perjuangan ketimbang sebagai pimpinan sehari-hari. Sebab itu dia tidak merasa bahwa laskar harus dilawan.

Sedangkan Nasution dari semula merasa akan tetap di tentara. Dia merasa bahwa lembaga tentara akan menjadi karirnya. Dia melihat ke negara. Sedang Pak Dirman saya kira masuk tentara tidak sebagai karir. Dia mungkin sudah mengetahui bahwa dia tidak akan hidup lama. Jadi lebih terbuka pikirannya daripada Nasution.

Sehubungan dengan Amir Sjarifuddin, saya kira bedanya begini. Pak Dirman itu boleh dikatakan orang *ndeso* [desa, *Ed.*]. Dia guru sekolah Muhammadiyah, orang sederhana. Dia merasa diri timbul dari masyarakat pedalaman. Tidak merasa diri jauh dari masyarakat di sekitarnya. Jadi hubungan antara tentara dan masyarakat adalah hubungan yang alamiah. Jadi tentara jangan sombong, tentara jangan merampas barang rakyat dan sebagainya. Sedangkan Amir Sjarifuddin orang dari Sumatra Utara. Orangnya intelektual, brilian, berpendidikan tinggi. Dan juga punya haluan politik yang kuat. Dia merasa bahwa rakyat diwakili oleh partainya. Jadi tentara arus tunduk kepada program ideologi dari partainya. Ini timbul dari atas. Sedangkan Pak Dirman teorinya timbul dari pengalaman, bukan dari buku.

T: Kemudian kalau kita melihat sejarah selanjutnya, Pak Dirman ada di "Kubu Solo," dalam arti menjadi oposisi pemerintah, dan dia teribat dalam Peristiwa 3 Juli [1946]. Mengapa Pak Dirman ada di pihak oposisi?

J: Saya tidak tahu persis. Saya merasa bahwa dia dipengaruhi politisi tertentu, yang mungkin secara kultural lebih dekat pada dia. Jangan lupa bahwa orang kuat pada waktu itu kedua-duanya adalah orang Sumatra. Sjahrir sebagai Perdana Menteri, dan Amir Sjarifuddin sebagai Menteri Pertahanan. kedua-duanya bagi orang Jawa pada masa itu, apalagi orang yang pendidikannya sederhana, mungkin terasa jauh.

T: Nasution sebagai orang Batak sedang melawan orang Batak juga. Lalu apa perbedaan antara Nasution dan Amir?

J: Nggak ada pada waktu itu. Nasution belum apa-apa. Dia di Bandung. Sama sekali tidak ada hubungan yang penting dengan pergolakan Yogya.

Dia di luar pertarungan politik yang terjadi di Jawa Tengah. Boleh dikatakan bahwa dalam cara yang berbeda, baik Amir Syarifuddin maupun Sjahrir ada penyakit intelektualnya. Artinya menganggap rendah atau agak congkak terhadap orang-orang yang dirasa *niveau*-nya [level-nya, *Ed.*] di bawah mereka. Itu terasa dalam pamfletnya Sjahrir, “Perjuangan Kita”, yang dibuat dengan bahasa yang kadang-kadang sangat kasar, mencaci-maki orang-orang yang katanya dijiwai oleh fasisme Jepang. Mungkin salahnya Sjahrir adalah bahwa serangan itu sangat umum. Jadi walaupun kita bisa menduga bahwa sebenarnya sasarannya orang-orang tertentu, tapi *nggak* ada nama yang disebut, sehingga gampang orang menginterpretasikannya seolah-olah orang PETA itu 100% fasis. Hal ini dianggap sebagai semacam penghinaan terhadap tentara. Bagaimana pun juga ini tentara dididik atas basis perjuangan, bertempur untuk merdeka. Dengan sendirinya ini akan menimbulkan macem-macam konflik dengan pemerintah yang bagaimana pun juga terpaksa berdiplomasi dengan Belanda.

Peran Tentara dan Laskar

T: Tentara resmi yang terbentuk merupakan gabungan dari tiga kelompok (KNIL, PETA dan laskar rakyat) yang mempunyai latar belakang, motivasi dan pengalaman sejarah yang berbeda-beda. Siapa di antara itu yang kemudian lebih berperan? Apa pula pengaruh perbedaan-perbedaan ini dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia?

J: Saya kira pengaruh KNIL tidak banyak. Jumlah KNIL juga tidak banyak. Pada jaman Belanda jumlah total KNIL itu 40 ribu orang. Sebagian itu orang Belanda, yang jelas tidak ikut. Sebagian itu orang Ambon, Manado, yang masih setia pada Belanda, juga tidak ikut. Sebagian lagi sudah tidak ikut waktu KNIL hancur. Mereka tidak bergabung lagi. Jadi saya yakin bahwa jumlah total orang KNIL di TNI tidak lebih dari 2 atau 3 ribu, sedangkan PETA-nya 60 ribu. Jadi jumlahnya kecil, yaitu lulusam KMA Bandung. Saya katakan tadi, Simatupang, Nasution dan sebagainya nota bene dalam banyak hal sangat dekat dan mirip dengan kelompok sipil. Lulusan dari sekolah yang sama, dari SMA yang baik, pintar bahasa Belanda. Sama dengan politisi, mereka adalah orang kota. Jadi antara Nasution dengan Sjahrir sebenarnya

jurangnya tidak banyak, sedangkan antara kedua-duanya dengan bangsanya Pak Dirman atau Bambang Superno, itu jauh sekali.

T: Nah, kalau tadi Pak Ben mengatakan lulusan Bandung dengan kelompok Sjahrir dalam hal ini dekat, lalu apa yang membedakan mereka sehingga mereka kemudian bertentangan?

J: Konflik pertama boleh dikatakan dari perbedaan kebudayaan politik. Sejak awal ada tentara yang berbicara bahasa Belanda dan ada yang berbicara bahasa Jawa. Tetapi setelah kemerdekaan diakui oleh dunia internasional, sumber konflik itu berangsur-angsur berubah. Tentara merasa diri sebagai korps yang punya kepentingan sebagai korps. Sering dikatakan bahwa orang sipil gagal pada tahun 1950-an. Itu tidak seratus persen salah. Tapi harus dilihat betapa tentara sendiri gagal. Artinya, sejarah tahun 1950-an itu penuh dengan pemberontakan di Makasar, Ambon, Manado, Padang, Aceh, Sumatra Utara dan sebagainya. Tokoh-tokoh utamanya semua dari tentara.

Jadi pada tahun 1950-an ada semacam pergulatan yang intens di antara tentara sendiri. Nasution melihat jalan keluarnya hanya memperluas peranan tentara dalam politik Indonesia pada umumnya. Ayo kita bersatu; kalau kalian bersatu saya nanti bisa memimpin kalian ke posisi politik yang jauh lebih penting, jauh lebih terhormat, yang jauh lebih bermanfaat dari sekarang ini. Bisa lihat umpamanya dengan pengambilalihan perkebunan Belanda pada tahun 1957-1958. Hampir semua kekayaan konglomerat Belanda jatuh ke tangan ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]. Dengan demikian, ya, bisa saja dibuat lebih solider.

T: Apakah perbedaan-perbedaan antara PETA, KNIL dan laskar rakyat sesudah pengakuan masih berpengaruh?

J: Kalau KNIL saya kira tidak terasa lagi. Tapi yang lain-lainnya masih jelas. Yang paling penting adalah konflik antara laskar Hizbullah dengan tentara, yang dimulai dengan pemberontakan Batalyon 426. Terus Darul Islam di daerah Bagelen, Tegal dan selanjutnya di Priangan. Itu beratnya bukan main. Ini disusul dengan pemberontakan Kahar Muzakar di Makassar.

Orang-orangnya juga gerilyawan dulu. Laskar-laskar yang memperjuangkan kemerdekaan terhadap Westerling di sana. Ini terjadi juga di Aceh. Jadi harus diingat bahwa basis pemberontakan-pemberontakan ini sebagian adalah bekas laskar dan sebagian juga tentara yang oportunis dan banyak ambisinya. Hanya bedanya, pada umumnya orang PETA memikirkan atau merasa bahwa tentara adalah karir mereka. Jadi pada mereka ada kepentingan korpsnya. Sedangkan orang-orang Hizbullah, orang-orang laskar, angkat senjata bukan untuk karir melainkan untuk tujuan agama atau politik.

T: Amir dan Sjahrir mempunyai konsep bahwa tentara itu berada di bawah pemerintah dan diberi kesadaran politik dengan mendirikan Pepolit [Pendidikan Politik Tentara, didirikan tanggal 19 Februari 1946, Ed.]. Apa reaksi Sudirman dan Nasution waktu itu ?

J: Nasution bukan faktor, seperti saya katakan tadi. Pepolit tidak berfungsi di Jawa Barat, tetapi berfungsi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di mata Pak Dirman akibatnya akan memecah belah tentara. Karena aliran politik, Islam, sosialis, nasionalis akan masuk. Keutuhan yang sebenarnya masih sangat labil, harus dipelihara. Dia merasa tentara itu anak buahnya. Sedangkan di mata Sjahrir dan Amir Sjarifuddin, ada perasaan bahwa tentara ini memang didikan Jepang. Dan dalam banyak hal masih sangat mirip Jepang, sehingga mereka harus dibersihkan dari pikiran-pikiran totaliter fasis dan sebagainya. Itu di mata mereka. Pendidikan politik maksudnya untuk meyakinkan tentara bahwa mereka tidak boleh main *Jepang-jepangan*. Ada gejala bahwa perwira PETA selain berani dan bersemangat tinggi, juga suka kejam dan otoriter.

Latar Belakang Sosial Tentara

T: Kalau kita melihat latar-belakang keluarga para mantan perwira KNIL, mantan perwira PETA dan perwira laskar rakyat, ada perbedaan-perbedaan yang cukup mencolok. Misalnya, mantan perwira KNIL berasal dari golongan priyayi, mantan perwira PETA berasal dari priyayi tetapi relatif lebih rendah dibanding mantan perwira KNIL. Sedangkan yang dari laskar rakyat berasal dari berbagai latar-belakang, yang pada umumnya dari "kelas rakyat" pula.

Mengapa Belanda dan Jepang mempunyai kriteria pemilihan tentara yang demikian itu (dari priyayi)? Apa dampak dari latar-belakang ini dalam keputusan-keputusan yang diambil tentara? Dan, sesudah tentara republik berdiri, apakah kriteria ini hilang dengan sendirinya?

J: Saya kira kalau orang KNIL, seperti saya katakan tadi, ada dua macam. Ada KNIL elit, kelompok kecil yang masuk KMA Bandung pada tahun 1940-an. Banyak yang datang dari Luar Jawa. Mokoginta, Kawilarang, Nasution, Simatupang berasal dari keluarga berada. Kalau dikatakan priyayi, ya bisa juga. Tapi saya rasa Padang tidak punya priyayi, Manado juga tidak memiliki priyayi dalam arti seperti di Jawa. Tapi, jelas dari keluarga yang punya posisi baik dan berpendidikan. Kalau KNIL yang biasa, saya kira justru bukan dari keluarga yang priyayi. Itu dianggap hina. Priyayi-priyayi akan mencari karir di birokrasi sipil, yang jauh lebih dihormati pada masa Belanda daripada tentara. Jadi saya kira sebagian besar mereka, ya seperti Soeharto sendiri kan, orang-tuanya sama sekali bukan priyayi.

Nah untuk PETA, Jepang pada umumnya mencari orang-orang yang dianggap berpengaruh di daerah lokal seperti guru sekolah, kiai muda. Dianggap bisa menarik anak-anak muda di sekitarnya. Seperti orang Belanda, Jepang menghadapi realita bahwa untuk memimpin batalion, biarpun batalion yang jumlahnya mungkin hanya 500 orang, dalam peperangan modern, orangnya harus berpendidikan, tidak bisa buta huruf. Jangan lupa bahwa pada masa itu 90% dari masyarakat Indonesia buta huruf. Jadi dengan sendirinya kedua negara yang superkaya mau tidak mau terpaksa merekrut orang-orang yang terdidik, paling sedikit lulusan SMA, SMP, begitulah. Jadi saya kira sasarannya bukan latar-belakang sosialnya, tapi latar-belakang pendidikan. Walaupun jelas ada kaitannya. Pada masa itu biasanya hanya orang yang lumayan berharta bisa dapat pendidikan.

Kalau pimpinan Pesindo jelas terdidik. Seperti Wikana, Sudisman, Tjugito. Kalau pimpinan Hizbullah itu lulusan dari pesantren. Tapi kalau pengikutnya, rakyat Hizbullah dan rakyat Pesindo itu hampir semua orang desa. Biarpun ada priyayi, priyayi itu adalah kalau boleh pakai istilah Pram [Pramoedya Ananta Toer, *Ed.*], “priyayi *udik*”. Orang-orang pedalaman yang

Membangun Republik 2

ORIGINALITY REPORT

40%

SIMILARITY INDEX

40%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.munindo.brd.de

Internet Source

28%

2

www.hamline.edu

Internet Source

12%

3

www.scribd.com

Internet Source

<1%

4

docs.com

Internet Source

<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Membangun Republik 3

by Baskara Tulus Wardaya

Submission date: 27-Sep-2017 02:28PM (UTC+0700)

Submission ID: 853251796

File name: membangun_republik_101-200.pdf (590.77K)

Word count: 30847

Character count: 178462

berpretensi priyayi. Bukan priyayi yang merasa diri cocok menjadi bupati dan sebagainya.

Saya masih ingat waktu saya di Indonesia, semula saya kenal dengan keluarga yang berpangkat. Bapak itu anggota Mahkamah Agung. Salah seorang putrinya ingin menikah dengan seorang mayor Angkatan Darat. Bapak itu marahnya bukan main, melarang anaknya bertemu lagi dengan si Mayor. Saya tanya, kenapa kok begitu? Dia bilang bagaimana pun juga ini ada perbedaan status. Tentara itu dianggapnya orang *udik* sedangkan anaknya anak elite. Terasa sekali bahwa ada jurang antara tingkat sosial perwira-perwira dengan tingkat sosial pejabat-pejabat priyayi tinggi.

T: Sekarang, melihat pimpinan tentara yang seperti itu, apakah ada pengaruhnya dalam keputusan-keputusan yang diambil tentara pada waktu itu?

J: Bisa juga. Artinya, mengapa mereka anti Hizbullah pada umumnya. Saya kira mereka juga produk sekolahan Belanda atau dari keluarga yang merasa bahwa Islam mungkin bisa berbahaya. Kita harus ingat bahwa yang paling anti PKI di antara semua tentara adalah perwira-perwira Siliwangi yang juga pakai bahasa Belanda dan berasal dari keluarga yang baik-baik. Jadi mungkin ada faktor status atau latar-belakang sosial yang mempengaruhi sebagian dari tentara. Tapi pada masa itu tentara tidak homogen. Ada segala macam orang di dalamnya. Melalui proses yang lama dan berangsur-angsur orang ini itu dikeluarkan dari korps dan tentara menjadi homogen seperti sekarang ini. Itu makan waktu mungkin 30 tahun.

T: Apakah boleh dikatakan bahwa tentara yang dari priyayi udik ini semacam kelas menengah yang mempunyai kesempatan untuk mobilisasi ke atas ?

J : Pada mulanya tidak. Pada tahun 1945, pikir mereka, kalau Sekutu akan datang, mereka akan disuruh perang dengan Sekutu dengan kemungkinan besar mereka akan mati. Terus jaman Revolusi, mereka pun tidak tahu bagaimana nanti selesainya revolusi ini, dan apakah mereka akan menang dengan Belanda atau tidak. Dan jangan lupa bahwa pada akhir tahun 1948 seluruh Jawa diduduki oleh Belanda. Semua kota-kota dikuasai oleh Belanda.

Sebagian Sumatera juga. Jadi mereka sama sekali tidak bisa terlalu “*karieris*” dalam mentalnya. Malah juga bisa mati dan banyak dari mereka memang mati. Jadi, sifat “*karierisme*” itu baru timbul secara nyata setelah tahun 1950 ketika Indonesia sudah diakui sebagai negara merdeka di PBB, dan bahaya-bahaya yang ada hanya timbul dari dalam. Musuh dari luar tidak ada yang riil pada masa itu.

Sejak itu tugas tentara adalah menumpas gerakan-gerakan di daerah, yang timbul dari masyarakat Indonesia sendiri. Dari tentara revolusioner mereka berubah menjadi tentara kontra-revolusioner. Pikiran mereka berubah setelah mereka mulai lebih tua, sudah menikah, mulai memikirkan pensiun, memikirkan nafkah, rezeki dan sebagainya. Ini membuat perubahan. Pada jaman revolusi ada tentara yang korupsi tapi tidak banyak. Sepuluh tahun setelah itu tentara yang korupsi sudah banyak.

T : Apakah kriteria pemilihan tentara dari priyayi udik ini sudah hilang sesudah tahun 1950 itu? Apakah ada perubahan kriteia?

J : Saya kira tidak. Setelah merdeka, Indonesia menghadapi problem yaitu orang yang ikut kesatuan militer jauh lebih banyak dari yang diperlukan dan jauh lebih banyak dari yang bisa dibiayai dari anggaran belanja yang sangat minimal pada waktu itu. Jadi mereka sama sekali tidak mau cari orang baru. Mereka justru ingin demobilisasi, ingin suruh sebagian besar dari tentara kembali ke sipil. Akademi militer baru didirikan tahun 1958 dan baru meluluskan angkatan pertama pada tahun 1960. Sepuluh tahun setelah penyerahan kemerdekaan. Itu memperlihatkan betapa *rekruting* berhenti pada tahun 1950-an. Tidak hanya banyak sekali jumlah tentaranya, tetapi usianya hampir sama. Jadi dari si jenderal, si mayor, sampai kepada si kapten tidak lebih dari 6-7 tahun bedanya. Sedang dalam tentara normal, si kapten biasanya ya [berusia] 25, si jendral ini [berusia] 55. Waktu itu Nasution menjadi pimpinan tentara pada usia 37. Itu sangat tidak normal, maka menimbulkan banyak friksi di antara tentara sendiri. Karena tidak ada yang sudah sampai ke usia pensiun yang normal, mereka tidak bisa naik. Jadinya berontak.

Tentara Versus Laskar

*T : Selain itu, pada jaman itu tentara yang bergabung dalam TKR hanya sekitar 200 ribu orang. Sementara itu di luar TKR masih banyak laskar rakyat yang juga bersenjata, yang jumlahnya jauh lebih besar (Ulf Sundhussen, *The Road to Power: Indonesian Military Politics*, h.25). Pak George Kahin dalam buku *Nationalism and Revolution in Indonesia* menyebut banyaknya laskar di luar TKR ini. Misalnya Hizbullah saja mempunyai laskar antara 20.000 - 25.000 orang. Di bawah para mantan perwira KNIL dan PETA, TKR tidak jarang berkonfrontasi dengan laskar rakyat ini. Mengapa mereka tidak akur? Apa perbedaan pandangan mereka tentang tentara dan pandangan mereka tentang perjuangan kemerdekaan?*

*J : Problemnya tidak akur ya simpel. Yang pertama itu soal senjata, soal makanan, soal duit dan sebagainya. Karena anggaran belanja Republik pada waktu itu sangat minim. Sulit sekali untuk mengambil pajak dari rakyat. Sumber kekayaan dari perkebunan sebagian besar sudah hilang setelah Agresi Pertama. Jadi tentara dan laskar harus cari makanan dari masyarakat. Dalam hal dana juga bersaing. Juga timbul persoalan, siapa yang akan bertempur di *front*? Siapa yang akan menjadi *reserve* [tentara cadangan, *Ed.*]? Sering mereka *tengkar* tentang siapa yang paling banyak berkorban; siapa akan meletakkan strategi; apakah laskar harus mengikuti strategi tentara atau strategi harus diatur bersama-sama; dan sebagainya. Jadi ada banyak persoalan. Di samping itu, faktor karir [dan] non-karir juga ada. Laskar sering merasa bahwa *tindak-tanduk* [tingkah laku, *Ed.*] komandan-komandan tentara ini kurang radikal, kurang revolusioner. Sebaliknya tentara merasa bahwa laskar-laskar ini gila-gilaan. Begitulah kira-kira.*

T : Jadi tidak banyak perbedaan secara konseptual sebenarnya ?

J : Tidak. Saya kira tidak.

T : Atau karena memang laskar rakyat ini tidak punya banyak konsep, sebenarnya. Mereka pokoknya ingin berjuang. Begitu?

J : Ya, tapi mereka juga sangat heterogen. Ada yang sebenarnya tidak jauh dari Pemuda Pancasila kemudian... sampai laskar yang teratur dan berideologi tinggi. Dan ada segala macam manusia di antara kedua contoh itu. Ada yang

punya politik yang jelas, ada yang *bajingan*, ada yang setengah *bajingan*, ada yang setengah punya ideologi dan sebagainya. Tidak bisa ditentukan. Jumlahnya bukan main banyaknya.

T : Bagaimana laskar rakyat yang bukan main banyaknya ini kok pada akhirnya bisa dikuasai oleh negara?

J : Saya kira justru karena mereka tidak masuk tentara untuk karir. Jadi setelah merdeka, mereka tidak merasa perlu menjadi laskar lagi. Mereka kembali pada dunia normal. Kita lihat banyak sekali orang-orang Muslim umpamanya merasa ya kembali menjadi *mubaliq*, kembali menjadi pedagang, kembali menjadi lain-lainnya. Mereka merasa sudah berkorban untuk negara, negara sudah merdeka, jadi mereka *nggak* usah terus-menerus di situ. Itu sebagian. Sebagian merasa tidak puas, mendirikan barisan sakit hati, membikin Hizbullah dan sebagainya, dan ber-revolusi atau beraksi terus. Kalau dikatakan gampang dikuasai, saya kira sama sekali tidak gampang. Dari tahun 1950 sampai 1964 tidak pernah ada tahun di mana tidak ada pemberontakan di Indonesia. Yang paling lama tentu dari Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo. Bertahun-tahun, 14 sampai 15 tahun. PRRI dibandingkan mereka itu melempem *kan*? Cuma beberapa bulan saja sudah angkat tangan. Karena PRRI tidak timbul dari laskar. Tetapi kalau Kahar Muzakar dan Kartosuwiryo memang timbul dari laskar. Yang melempem itu seperti Dahlan Djambek, [Ahmad] Husein, [J.F.] Warouw dan sebagainya.

T : Bagaimana mereka laskar yang mendapat dukungan rakyat ini akhirnya toh dapat dikalahkan?

J : Mereka sulit mencari senjata baru. Mereka tidak punya relasi yang kuat ke luar negeri, padahal mulai tahun 1953 sampai tahun 1965 tentara resmi mendapat banyak tunjangan dari Amerika, AURI-nya dari Russia. Lama-lama kekuatan pusat dibandingkan laskar menjadi besar. Hingga akhirnya, Kartosuwiryo tidak memiliki tank, tidak memiliki pesawat, tidak punya apa-apa. Lama-lama ya akan kalah. Tapi tidak gampang.

Dinamika Sipil-Militer

T : Sering dikatakan bahwa tampilnya tentara di panggung politik nasional itu disebabkan oleh kegagalan sipil memimpin negara. Apakah pada saat awal kemerdekaan itu pihak tentara mempunyai alternatif atau sumbangan pemikiran untuk kepemimpinan nasional? Apakah sejak masa lahirnya tentara juga sudah ikut terlibat dalam politik dan ekonomi nasional?

J : Saya kira, pertama kita harus ingat bahwa selama revolusi tidak pernah ada kelompok yang betul-betul mempertanyakan kepemimpinan Sukarno-Hatta kecuali kelompok Kartosuwiryo. PKI juga baru pada tahun 1948. Semula mereka mutlak setuju bahwa Sukarno-Hatta menjadi lambang kesatuan negara. Jadi pertarungan politik terjadi di bawah tingkat mereka. Jangan lupa bahwa tentara pada umumnya pada waktu itu masih sangat muda. Soeharto lahir pada tahun 1921, pada tahun 1945 dia masih berumur 24. [Ketika] revolusi selesai tahun 1949, dia *cuma* [berusia] 28 [tahun]. Padahal dia termasuk yang senior karena sebelum perang sudah masuk KNIL.

Orang yang masih berusia 20-an merasa diri terlalu muda untuk menjadi kepala negara. [Maka] tidak ada pikiran untuk mendongkel kedudukan Sukarno-Hatta. Memang dalam banyak hal secara politik mereka naif. Mereka tidak punya pengalaman di luar negeri. Tidak tahu dunia luar. Jadi saya kira tidak ada ide bahwa mereka akan mengesampingkan pemerintah sipil. Bahkan banyak di antara mereka yang adiknya menikah dengan tokoh sipil dan sebagainya. *Kan* hubungan keluarga antara Simatupang dan Sjahrir itu terkenal. Tapi ada lain-lainnya juga.

Konsep adanya jurang antara militer dan sipil sebenarnya baru timbul setelah tahun 1950, sebagian karena pendidikan dari Amerika Serikat. Faktor lainnya adalah UUD tahun 1950 yang coraknya lebih sipil daripada UUD'45, di mana kekuatan jelas [berada] di parlemen, dan presiden hanya lambang negara. Pemerintahan harus dari orang-orang yang sudah di parlemen. Artinya tentara tidak punya tempat yang cukup, tidak punya anggota di parlemen, tidak bisa menjadi perdana menteri dan sebagainya. Menteri pertahanan harus orang sipil dan tentara suka tak suka harus tunduk. Yang pertama memaksa kembali ke UUD'45 sebenarnya Nasution dan teman-temannya. Bung Karno nomor dua. Dengan dikembalikannya UUD'45

samasekali tidak ada halangan untuk tentara menjadi perdana menteri dan sebagainya. Tidak ada halangan untuk masuk parlemen dan mendirikan fraksi.

T : Jadi dengan demikian bisa dikatakan bahwa sebelum tahun 1950 itu, tentara praktis tidak mempunyai alternatif pemikiran politik?

J : Saya kira memang tidak ada pikiran ke sana. Walaupun Pak Dirman ikut di belakang layar dalam Peristiwa 3 Juli untuk menghajar Sjahrir, sama sekali tidak ada tanda bahwa dia sendiri merasa bisa jadi presiden. Kedudukan Bung Karno tidak pernah diganggu gugat. Bung Hatta juga tidak.

T : Pengiriman tentara ke AS itu tahun berapa?

J : Kalau tidak salah, polisi sudah mulai tahun 1950. Tapi kalau tentara, saya kira tahun 1954. Saya lupa persisnya, lebih banyak untuk segala macam dinas teknis seperti resimen para intelijen dan sebagainya. Ada *training program* yang luar biasa besarnya. Bisa dibuktikan dengan fakta bahwa waktu [Presien Amerika Serikat Bill] Clinton dan [Presiden Amerika George] Bush *mangkel* [jengkel, *Ed.*] sama [Presien] Soeharto perkara Timtim [Timor Leste, *Ed.*], mereka bisa menghentikan pembiayaan untuk tentara-tentara yang dilatih di AS...

T : Kalau kita melihat perkembangan dari BKR ke TKR, dari TKR ke TRI, dan akhirnya TRI ke TNI, kata rakyat dalam BKR, TKR, dan TRI masih ada. Kemudian dalam TNI sudah hilang kata “rakyat”-nya. Apakah ini menunjukkan juga bahwa tentara sudah menjadi tentaranya “state” bukan sebuah tentara “society”, terutama kalau kita sadar akan perbedaan antara state dan society?

J : Oh iya, jelas. Jelas sekali. Dan jangan lupa bahwa rakyat adalah kata yang sering dipakai oleh laskar. Setelah tahun 1946 tentara menamakan diri kepunyaan negara. Tidak lagi menggarisbawahi kata rakyat.

T : Jadi pada waktu menjadi TNI tentara sungguh-sungguh sudah menjadi tentara state?

J : Pendapat itu mengandaikan sebagai tentara sudah menjadi “siluman”, jadi di atas rakyat, daripada bagian dari rakyat. Pendapat itu ada benarnya.

Harus diingat bahwa pada jaman itu dalam persaingan antara tentara dengan laskar-laskar, banyak dipakai istilah rakyat dalam judulnya. Timbul ide laskar sebagai emanasi, sebagai ciptaan rakyat, langsung spontan di satu pihak dan tentara sebagai perwujudan negara. Itu saya kira paling penting.

IV. REVOLUSI

Makna Revolusi

T : Sampai tahun 1965 di Indonesia istilah revolusi beberapa kali dipakai, misalnya Revolusi Pemuda 1944-1946, Revolusi Kemerdekaan 1945-1950, dan Revolusinya Bung Karno 1945-1965. Sampai pertengahan 1960 itu Bung Karno masih mengatakan bahwa revolusi belum selesai. Bahkan, waktu jatuhnya Sukarno dan munculnya Soeharto, dikatakan pula bahwa itu revolusi. Apa perbedaan prinsip maaing-masing? Apa dan bagaimana peran pemuda di dalamnya?

J: Adanya istilah revolusi pemuda, revolusi kemerdekaan, revolusinya Bung Karno dan pada suatu waktu ada pula revolusi yang dipimpin Presiden Soeharto, saya kira ini membuktikan betapa saktinya kata *revolusi* itu. Paling sedikit selama tahun 1940-an, 1950-an, 1960-an, malah sampai permulaan tahun 1970-an. Sekarang ini tidak sering didengar bahwa Soeharto itu memimpin revolusi. Tetapi selama lebih dari 30 tahun [saat dia berkuasa] kata ini kata yang mujarab. Kalau “revolusi Pemuda” itu ciptaan saya sendiri. Jadi bukan sesuatu yang populer di Indonesia. Revolusinya Bung Karno itu sebenarnya justru diciptakan sebagai slogan, sebagai semboyan pada saat pemerintahan Sukarno sebenarnya makin tidak bersifat revolusioner. Jadi saya merasa bahwa istilah yang murni, yang benar-benar populer, adalah istilah *revolusi kemerdekaan* yang [memang] timbul secara spontan pada hari-hari pertama dari jaman merdeka, seperti timbul dari tanah bumi Indonesia sendiri.

Revolusi ini untuk apa? Untuk kemerdekaan. *Nggak* ada perbedaan prinsip antara istilah-istilah ini. Revolusinya Bung Karno baru timbul pada tahun 1960-an, revolusinya Soeharto tahun 1970an. Sedangkan “Revolusi Pemuda” itu cuma *bikinan* seorang *bule* [kulit putih]. Yang penting *cuma* revolusi kemerdekaan. Dan peranan pemuda di dalamnya itu sentral! Jadi

justru pemuda yang membawa semangat revolusioner, yang mau mendobrak segala apa yang menghambat masa depan bangsa. Dan betul-betul mau mengubah secara fundamental, biarpun mereka sering tidak begitu tahu caranya.

T: Bagaimana dengan revolusi sosial, apakah pemuda juga berperan besar?

J: O, besar. Besar. Boleh dikatakan orang-orang yang bergerak pada waktu itu adalah orang yang tidak begitu memikirkan anak istrinya, merasa bahwa mereka *nggak* tahan lagi diuber-uber oleh priyayi, oleh orang-orang yang berkolaborasi dengan Belanda dan Jepang. Mereka berdarah muda.

T: Kalau melihat pengalaman, kata revolusi lahir dari bumi Indonesia dan kemudian nasionalisme adalah daya dorongnya juga. Melihat bahwa Pak Ben mengkaitkan nasionalisme pemuda dengan situasi sosial jaman itu, bisa dikatakan bahwa ini adalah nasionalisme dari bawah. Sedang nasionalisme yang lahir di antara para aktivis pergerakan kemerdekaan di Belanda adalah nasionalisme dari atas. Bagaimana dengan pembedaan ini?

J: Saya kira ini agak sulit. Kita lihat bahwa di antara organisasi yang pakai nama “Indonesia” di dalamnya, yang pertama justru tidak timbul di Indonesia, tetapi di Belanda, yaitu Perhimpunan Indoensia. Dan itu timbul dari isolasi orang-orang kulit berwarna pada masa itu. Walaupun mereka datang dari latar belakang yang bermacam-macam, setelah ketemu di negeri Belanda dalam jumlahnya yang mungkin pada suatu waktu tidak lebih dari 70-80 orang, mereka terpaksa merasa kompak melawan atau menghadapi masyarakat *bule* ini. Di situ mereka merasa bahwa orang Belanda pada umumnya tidak peduli apakah mereka Batak atau Jawa. Tidak peduli apakah mereka Kristen atau Islam.

Ya sepeti sekarang ini. Kalau umpamanya seorang Amerika ditanya seorang Eropa, kamu dari mana? Dan kalau pertanyaan itu disodorkan [saat ia sedang berada] di Roma atau di Berlin, jelas dia tidak akan jawab, “O, saya dari Ithaca [sebuah kota kecil di negara-bagian New York, AS]”. Dia akan bilang, “Saya dari Amerika”. Kalau dikatakan itu nasionalisme dari atas, harus dingat bahwa mereka sangat muda, juga [mereka itu] minoritas

kecil di Negeri Belanda; terus mahasiswa selalu di bawah pengawasan dari guru-guru *bule*. Walaupun memang mereka berasal dari golongan elit pada umumnya, haluannya sebagian besar kekiri-kekirian.

T: Yang dimaksud nasionalisme dari atas itu nasionalisme yang lebih konseptual, dari pengalaman konseptual pertemuan mereka itu dengan konsep-konsep yang waktu itu beredar.

J: Kalau itu, memang iya.

Pengaruh Nasionalisme Dari Atas

T: Dari bukunya Pak John Ingle³⁹, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan, diketahui bahwa para mahasiswa Indonesia di Belanda yang tergabung dalam PI, yang nota bene nantinya menjadi “kaum tua” dalam masa revolusi pemuda ini, mempunyai banyak kontak dengan organisasi-organisasi internasional serta ide-ide universal. Bisa dikatakan bahwa dari sanalah nasionalisme mereka tumbuh.

Bagaimana pengaruh kegiatan mereka itu selanjutnya, yaitu pengaruh nasionalisme dari atas itu? Pada waktu 1944-46 mereka masuk dalam golongan tua, yang berhadapan dengan pemuda, dan menjadi pemimpin politik.

Bagaimana pengalaman kontak mereka dengan dunia internasional itu mempengaruhi strategi mereka dalam berkonfrontasi dengan strategi pemuda yang maunya perjuangan antara yang tidak mau kompromi, yakni yang mau merdeka 100%, dengan kaum tua yang mau berkompromi?

*J: Harus diingat bahwa orang-orang ini punya pengalaman yang untuk orang Indonesia pada masa itu sangat unik. Mereka hidup dan belajar dalam suatu negara demokrasi, dengan pemilihan umum yang secara teratur dan bebas, dengan negara hukum yang normal dan koran yang bermacam-macam. Itu sesuatu yang untuk mereka luar biasa. Ada juga adegan pacaran dengan cewek *bule*, dan pergaulan dengan orang Belanda. Mereka bisa dapat sokongan dari Serikat Buruh Belanda. Jadi untuk mereka, Belanda yang di birokrasi Hindia Belanda itu tidak mewakili masyarakat Belanda pada umumnya. Mereka juga bisa berfoya-foya, ke Berlin, ke London, atau kadang-kadang ke Moskow. Mereka punya pengalaman yang luas. Ada di antara mereka*

yang pada waktu Nazi menduduki Belanda langsung masuk ke gerakan bawah tanah bersama-sama *temen-temen* Belandanya, memperjuangkan pembebasan Belanda dari cengkeraman Hitler. Mereka tidak merasa itu aneh, melainkan pengalaman yang unik.

Untuk orang-orang yang selama itu tetap di pulau Jawa atau di Sumatra yang dijajah terus tanpa kebebasan pers, tanpa pemilu yang *beneran*, tanpa hukum yang tidak berpihak, hal-hal itu hampir tidak bisa dibayangkan. Orang Indonesia yang punya teman Belanda pada waktu itu sangat sedikit. Orang yang kawin dengan orang Belanda lebih sedikit lagi. Jadi ada jurang pengalaman antara dua kelompok ini.

Waktu mereka kembali ke Indonesia, setelah Perang Dunia selesai, mereka tidak merasa bahwa secara otomatis pemerintah di Belanda itu musuh mereka. Malahan Prof, Schermerhon, Perdana Menteri Belanda yang pertama setelah Perang Dunia kedua, adalah seorang kiri yang pernah ikut gerakan bawah tanah. Itu seperti teman. Schermerhorn malah pernah menjadi guru dari sebagian dari mereka. Bisa dibayangkan umpamanya saya jadi presiden di Amerika dan teman-teman [yang kuliah] di Wisconsin kembali [ke Indonesia dan] menjadi menteri-menteri di Indonesia. Akan butuh waktu lama bagi kita untuk bisa menjadi lawan... Mereka merasa bahwa Belanda bisa diajak bicara.

Sering orang-orang seperti ini dituduh sebagai orang kebarat-baratan dan sebagainya. Tapi saya kira mereka juga mulai merubah pikirannya setelah *temen-temen* mereka jatuh dari kekuasaan di Belanda, mulai tahun 1946, ketika partai-partai konservatif dan kanan mulai menjadi kuat di Belanda. Dengan demikian mereka kurang merasa berteman dengan orang-orang penting di Belanda, apalagi dengan mulainya Perang Dingin.

T: Pengalaman itu mempengaruhi strategi mereka?

J: Ya. Seandainya mereka menghadapi diktator di Belanda atau ada jenderal yang menjadi presiden di sana, dan di negeri Belanda sendiri penuh teror dan sebagainya, jelas reaksinya bakal lain lagi.

Revolusi Nasional dan Revolusi Sosial

T: Ada pula perbedaan antara revolusi nasional dengan revolusi sosial. Bisa dikatakan bahwa yang pertama diwakili oleh mereka yang condong berkompromi dengan jalan diplomasi, sedang yang kedua diwakili oleh mereka yang menginginkan kemerdekaan 100% dengan jalan perang. Selain itu ada pula revolusi sosial di daerah-daerah yang ³⁷ sama sekali dari revolusi nasional dan sangat radikal, seperti dalam buku Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan*, atau seperti yang terjadi di pinggiran kota Jakarta seperti di Bekasi, Tangerang, Banten.

Apakah perbedaannya sesederhana itu? Apa logika masing-masing revolusi itu? Apa kaitan ketiga model revolusi itu? Dengan kata lain, apa hubungan masing-masing kejadian di pusat pemerintahan Jakarta, dan kemudian Yogya, dengan peristiwa Surabaya, Bandung, dan juga peristiwa-peristiwa di daerah seperti yang terjadi di Aceh, Banten, Tiga Daerah, dan sebagainya itu? Apa akibatnya bagi pemuda? Selain itu, dalam revolusi itu apa peran para intelektual jaman itu?

J: Saya kira ada banyak persoalan di sini. Yang paling pokok bagi orang-orang yang duduk di pemerintah pusat adalah mengeluarkan Belanda dari Indonesia dan mendapat posisi negara berdaulat penuh di mata dunia internasional. Untuk itu mereka harus memperhitungkan faktor-faktor internasional. Apakah Amerika bisa tertarik dari sisi Belanda? Bagaimana hubungannya dengan negara-negara Eropa? Bagaimana taktik terhadap Rusia atau Uni Soviet? Banyak persoalan yang menjadi penting untuk mereka justru karena tujuan terakhir.

Sedangkan anak-anak yang di Banten, di Pekalongan, di Solo, mereka peduli amat! Mereka mungkin seumur hidup nggak pernah lihat orang-orang bule seperti orang Rusia atau Portugal, dan sebagainya. Mereka berevolusi dalam kondisi lokal, di mana mereka merasa bahwa si bajingan ini bertahun-tahun memeras kita. Bajingan satu lagi ini kok tega menjual bangsanya begini-begitu. Jadi mereka ingin membikin atau menunjukkan masyarakat yang baru. Diakui atau tidak oleh Portugal, Brazil, Turki, peduli amat. Jelas penjajah harus keluar. Tapi kalau kebetulan orang-orang ini bergerak di daerah, di mana nggak ada lagi penjajah, ya mereka jalan terus dengan acara masing-masing.

Orang di pusat merasa bahwa gerakan seperti ini bisa membahayakan hubungan internasional. Jangan-jangan kekacauan teroris ini-itu bisa membuat Amerika membantu Belanda kalau pemerintah Belanda mengatakan bahwa Indonesia dikuasai oleh orang-orang teroris, gali [gabungan anak-anak liar atau preman, *Ed.*], perampok, orang sadis dan sebagainya. Jadi mereka berusaha meyakinkan dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang baik-baik. Akibatnya ya sering terjadi bentrok. Nah, yang menarik adalah bahwa revolusi sosial-revolusi sosial kalau ditumpas justru ditumpas oleh pemerintahan yang di dalamnya terdapat partai-partai kiri dominan, yakni pada tahun 1945-1946, saat pemerintah ada di tangan Sjahrir, Amir Syarifuddin, yang di dalam kabinetnya ada juga orang-orang PKI. Ini justru memperlihatkan bahwa persoalan ini bukan soal pemerintah itu kanan dan revolusi sosial itu kiri atau sebaliknya. Tapi bahwa kepentingan pusat dan kepentingan daerah itu berbeda.

T: Lalu bagaimana kaitannya? Apakah yang di daerah memang nggak peduli dengan yang di atas sehingga tidak ada hubungan? Atau sebenarnya yang di bawah, di daerah, ini adalah dampak dari peristiwa yang di atas?

J: Mereka merasa dalam bahaya karena tentara Belanda ada di mana-mana. Terus, banyak orang Indonesia *diem-diem* mau kolaborasi dengan Belanda. Mereka tidak ingin dijajah lagi. Dan mereka tidak bisa lihat situasi dari sudut pandang orang-orang pusat di mana Indonesia harus diakui oleh Perancis, Jerman, dan sebagainya. Buat mereka itu bukan persoalan. Nah, kalau di daerah tertentu, umpamanya di Sumatra yang jauh dari pusat, pemerintah pusat memang tidak punya kuasa apa-apa. Mereka terpaksa menerima dengan *senyum asem* hasil-hasil dari revolusi radikal seperti yang terjadi di Aceh dan di Sumatra Utara. Sedangkan di daerah yang lebih dekat dengan pusat, umpamanya Pekalongan, bisa ditumpas. Banten sebagian juga bisa ditumpas. Solo lebih kompleks. Terasa sekali bahwa setiap pemerintah pusat merasa berada dalam percaturan internasional. Sebab itu mereka harus bertindak hati-hati, konservatif, dan baik-baik.

Sedangkan anak-anak muda di daerah tidak mempunyai tanggung jawab pada tingkat itu. Mereka bergerak dengan pikiran mereka sendiri.

Ironinya adalah bahwa orang-orang yang ingin supaya negara Indonesia menjadi negara berdaulat justru membangun struktur-struktur yang lama kelamaan akan membelenggu rakyat. Di mata pemerintah pusat selalu orang-orang ini dinggap anarkis, tidak mau taat kepada perintah dari atas dan sebagainya. Mereka *kok* main sendiri? *Kok* menculik pejabat dan sebagainya? Ini terasa sekali kalau membaca pamfletnya Sjahrir yang ditulis pada bulan November 1945. Di situ dia caci-maki segala macam birokrat yang menjadi budaknya Jepang dan sebagainya. Tetapi setelah menjadi Perdana Menteri dia cepat-cepat kumpulkan birokrat-birokrat, dan mengatakan bahwa kami tidak akan peduli sama yang sudah-sudah. Kami memerlukan bantuanmu untuk mendirikan negara. Orang-orang di sini diserang habis-habisan pada bulan November, lalu dirangkul pada bulan Januari dan Februari. Dalam kasus rakyat melawan birokrasi biasanya pemerintah pusat merasa lebih memerlukan birokrasi itu untuk menjalankan *policy*-nya.

T: Pada waktu itu toh ada kelompok intelektual. Apakah memang mereka mempunyai peran?

J: Kata intelektual timbul pada tahun 1960-70an. Nggak ada intelektual pada masa sebelum itu. Pertama-tama orang-orang yang punya pendidikan pada tahun 1930-an dan 1940-an itu sangat kecil. Ingat bahwa hal seperti itu dibuktikan dalam bukunya Pak Kahin. Di seluruh Indonesia pada tahun 1940 jumlah penduduknya sudah 70 juta orang... Pada umumnya waktu itu Indonesia tidak memiliki cukup SDM [Sumber Daya Manusia] dan sekolah, dan merekapun ini tidak merasa diri sebagai teknokrat. Tidak merasa diri sebagai profesor. Nggak ada profesor Indonesia pada waktu itu, nggak ada teknokrat Indonesia. Paling-paling orang bisa baca koran, bisa bikin kursus, bisa menjadi aktivis, bisa berorganisasi.

Gejala-gejala kecongkakan kaum cendekiawan belum begitu ada karena jumlahnya sangat minim. Bisa dilihat di foto-foto dari jaman itu. Perdana menteri masih pakai celana pendek dan orang tidak merasa itu aneh. Kalau melihat baju orang pemerintah, menteri-menteri pada jaman revolusi itu seperti orang biasa di jalan-jalan. Nggak ada segala macam *safari-suit*, seragam, dan *tetek-bengek kayak gitu*. Jurang [pemisah] antara

pemimpin dan masyarakat itu jauh lebih kecil daripada sekarang, baik dari sudut pendidikan maupun dari sudut ekonomi.

T: Tapi mereka yang memimpin Indonesia pada waktu itu kan lulusan-lulusan universitas di Belanda?

J: Sebagian kecil. Kalau melihat jumlah total menteri selama revolusi, ya mungkin ada 10-20 orang. Jangan lupa mereka paling-paling, ya doktorandus, lah. Dan sebagian besar sebenarnya bukan dari sekolahan di Belanda tapi *kweekschool-kweekschool* di Batavia, *technische hoogeschool* di Bandung. Universitas dalam arti modern sama sekali tidak ada pada jaman Belanda. Politik Belanda memang luar biasa reaksioner dibandingkan dengan Amerika, Perancis, Inggris, dan sebagainya. Setelah Belanda 350 tahun di Indonesia, masak sampai tahun 1942 satu universitas pun dalam arti modern tidak ada. Cuma ada satu dua fakultas. Fakultas hukum berdiri sendiri di Jakarta, fakultas teknik berdiri sendiri di Bandung. Itu bukan universitas.

Jadi persoalan intelektual sebagai kelompok yang memerlukan penguasaan atas pendidikan, memerlukan majalah-majalah akademis, memerlukan lembaga-lembaga teknologi dan sebagainya, itu sama sekali *nggak* ada pada waktu itu. Bisa dilihat bahwa orang-orang yang dianggap tokoh intelektual pada waktu itu tidak punya *degree* [gelar akademik, *Ed.*]. Sudjatmoko sama sekali tidak punya *degree*. Rosihan Anwar tidak punya *degree*. Mochtar tidak punya *degree*. Takdir juga *nggak* punya *degree*. Sebagian besar mereka itu otodidak.

Minimum Program dan Kepentingan Nasional

T: Krisis bulan Maret yang ditandai dengan penangkapan dan penahanan para pendukung Minimum Program hanya terjadi setelah penguasa—yang tidak setuju dengan program tersebut—saat itu mempunyai tentara yang cukup kuat, yakni Pesindo, untuk melakukan penangkapan dan penahanan, dilengkapi dengan mencap lawan politik sebagai membahayakan kepentingan nasional. Bagaimana komentar Pak Ben tentang hal ini, dan bagaimana kita belajar dari peristiwa ini?

J: Ya, saya *nggak* banyak komentar tentang hal ini. Harus diingat bahwa pada waktu bukunya Pak Kahin ditulis, versi revolusi yang paling dibaca orang,

yang menjadi semacam klasik, adalah [versi revolusi menurut] bukunya Pak Kahin [*Nationalism and Revolution in Indonesia*]. Dan terasa sekali dalam buku itu bahwa teman-teman Pak Kahin sebagai besar dari kelompok PSI dan golongan Masjumi yang dekat dengan Natsir. Mereka ini menjadi *hero*. Ketika saya mulai bikin riset, saya merasa bahwa seolah-olah hanya mereka itu demokrat tulen, menjadi satu-satunya kelompok di Indonesia yang betul-betul yakin akan perlunya negara hukum dan sebagainya. Nah, setelah itu saya lihat bahwa dalam prakteknya pada waktu mereka berkuasa, ya mereka sama saja dengan yang lain-lain. Menangkap musuh atau yang dianggap musuh, persis seperti lawan-lawannya. Itu juga sebagian timbul dari kontroversi tentang Manikebu [Manifesto Kebudayaan] dan Lekra [Lembaga Kebudayaan Rakyat] pada tahun 1964, ketika anak-anak muda yang bergabung dalam Manikebu didewa-dewakan. Sjahrir dan kawan-kawan dianggap sebagai demokrat sejati dan sebagainya.

Saya cuma mau *kasih lihat* bahwa Sjahrir tidak jauh dari yang lain-lainnya. Dia juga sempat menangkap orang. Mereka marah karena Bung Karno menangkap Sjahrir pada tahun 1962. Saya tentu tidak setuju bahwa Sjahrir ditangkap Bung Karno, tapi anak-anak muda tidak tahu bahwa pada suatu ketika Sjahrir juga menangkap Tan Malaka tanpa alasan, dan Tan Malaka lalu ditahan beberapa tahun. Jadi ini hanya supaya *fair*. Di Indonesia, orang-orang yang berkuasa dari dulu sampai sekarang suka seenaknya. Kalau merasa ada musuh, ada oposisi, mereka cepat-cepat mengatakan bahwa musuh itu membahayakan kepentingan nasional. Seperti Soeharto merasa bahwa stabilitas nasional diancam di Dresden [demonstrasi anti Soeharto di kota Dresden, Jerman, tahun 1995, *Ed.*]. Dulu Sjahrir bilang bahwa Tan Malaka membahayakan kepentingan nasional.

Peristiwa 3 Juli 1946

T: Sebaliknya dalam Peristiwa 3 Juli [1946] terjadi penangkapan dan penahanan atas Perdana Menteri dan stafnya oleh tentara yang pro Minimum Program dan Jendral Sudirman termasuk di dalamnya. Meskipun sama-sama dilakukan oleh tentara yang cukup kuat, tetapi karena bukan merupakan perintah dari penguasa tertinggi, maka kata penangkapan menjadi “penculikan”. Lebih

lanjut, penguasa mampu menentukan siapa yang paling bersalah (Tan Malaka) dan siapa yang meskipun termasuk kelompok yang salah tetapi kemudian dapat dilupakan (Sudirman). Bagaimana penjelasannya?

J: Pertanyaan selanjutnya juga sama. Apa tindakan tertentu, seperti penangkapan, atau penculikan, atau penyanderaan, ya tergantung siapa yang ngomong. Jadi kalau orang yang ngomong itu berkuasa dia akan menyebut tindakan diri sendiri sebagai penangkapan atau penahanan. Tindakan musuhnya jelas sebagai penculikan, penyanderaan, dan sebagainya. Itu bahasa politik saja. Menurut saya itu tidak banyak berarti.

T: Apakah ini khas Indonesia?

J: O, sama sekali *nggak*. Ambil contoh Amerika. Si [Timothy] McVeigh ini dianggap teroris karena membunuh 180 orang dengan pemboman [sebuah gedung pemerintah di Oklahoma City, AS, tahun 1995]. Sedangkan Henry Kissinger dan Presiden Johnson yang menjadi *actor intellectual* dari matinya sampai 60 ribu orang Amerika di Vietnam, apalagi 3 juta masyarakat Vietnam, masih dianggap orang yang terhormat. Dalam soal siapa yang punya lebih banyak darah di tangannya, ya jelas orang-orang “terhormat” ini. Itu tergantung orangnya duduk di mana, di tahta kekuasaan atau di bawahnya.

Kekalahan Minimum Program

T: Pak Ben mengatakan bahwa dengan kekalahan Minimum Program beserta hilangnya “truk” pengangkut dan “sopir”-nya, cita-cita “Merdeka 100%” tidak akan terwujud selamanya. Bagaimana hal ini bisa diterangkan?

J: Ya, kalimat ini saya tulis dalam suasana tertentu. Disertasi saya selesai awal tahun 1967. Ketika itu saya merasa bahwa suatu tragedi baru saja terjadi di Indonesia. Dan segala macam cita-cita Bung Karno sudah *nggak* mungkin terwujud. Saya mulai berpikir, “Ini mulainya kapan? Apa ini sudah ditakdirkan demikian atau tidak?” Saya mencoba mencarikan posisi memisalkan Indonesia ambil jalan ini, dan bukan jalan itu, penyelesaian akan lebih baik. Itu mungkin ditulis dalam suasana yang emosional pada waktu itu.

Tapi yang jelas saya merasa bahwa perundingan itu punya logika sendiri. Kalau yang dipentingkan [adalah] pengakuan dunia luar terhadap Indonesia, kalau yang dipentingkan [adalah] penyelesaian diplomatis dengan Belanda, kalau [yang] dipentingkan [adalah] menunjukkan diri kepada dunia luar bahwa Indonesia itu negara yang baik-baik, lengkap dengan birokrasinya yang taat dan sebagainya, ya mau tidak mau ya harus membuat “belalai-belalai”. Jadi pamong-praja harus diperkuat, revolusi harus *dikemplangin* [dikompromikan, *Ed.*], dan sebagainya.

Jadi diplomasi tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada kebijaksanaan lain, yang menurut saya justru mengembalikan struktur-struktur feodal dan reaksioner. Cita-cita Indonesia merdeka, artinya masyarakat baru, susunan masyarakat yang lebih sama rasa sama rata, itu tidak bertentangan dengan cita-cita Indoneisa 100% merdeka. *Toh* bagaimana pun banyak yang teriak Indonesia 100% merdeka ketika di luar pemerintah, setelah masuk pemerintah lalu berubah. Jadi yang prinsipil “100% merdeka” *nggak* banyak di kalangan tua. Harus diingat bahwa semua orang PKI, itu harus digarisbawahi, menyokong perundingan. Kecuali orang PNI dan Masjumi menyokong perundingan setelah itu atau orang-orang yang masuk Hizbullah. Satu-satunya kelompok, mungkin karena tidak dikasih kesempatan masuk pemerintah yang konsisten dengan 100% merdeka, ya kelompoknya Tan Malaka.

V. KESIMPULAN

T: Sebagai kesimpulan, kalau kita melihat seluruh gerak dan kiprah pemuda pada waktu itu, orang-orang muda jaman ini bisa belajar apa dari mereka?

J: Ini agak sulit karena setiap jaman punya tuntutan sendiri. Tapi, pertama, dari sudut etika, bisa dikatakan bahwa orang-orang Indonesia sekarang bisa belajar dari dinamisme, dari jiwa berkorban pada waktu itu. Semangat mereka betul-betul dibentuk oleh situasi yang dirasakan sebagai krisis besar yang menentukan masa depan bangsanya. Mereka berani *macem-macem*. Khususnya mereka berani terhadap orang tua. Harus diingat bahwa salah satu ciptaan yang bagus sekali pada jaman revolusi adalah kata “Bung”. Pada

waktu itu Bung Karno tidak pernah menamakan diri “pemimpin besar revolusi”. Tidak pernah pula memaksa orang untuk menyebut dirinya “Yang Mulia Presiden”. Bahkan kalau diucapkan kata “Pak Karno” masih terasa lucu. Tapi: Bung Karno, Bung Tomo, Bung Hatta, Bung Sjahrir. Seolah-olah kata “Bung” menjadi titel yang paling tinggi. Itu cukup menunjukkan peranan dari anak muda.

Kedua, mereka tidak mau terima sistem bapak-bapakan, apalagi *eyang* [kakek, *Ed.*]. Ini cukup menunjukkan bahwa anak muda tidak usah terlalu menghormati orang tua. Orang tua itu ya orang tua, titik! Kalau orang tua punya jasa, itu baru *oke*. Itu semacam pemberontakan terhadap sisa-sisa masyarakat feodal. Kalau [sekarang ini] orang berani menyebut Soeharto sebagai Bung Harto rasanya janggal. Jaman itu beda. Jaman itu lebih egaliter, [meskipun] belum tentu demokratis. Bagusnya kalau bisa bersama-sama.

Yang ketiga saya kira anak-anak muda harus melihat bahwa, ya, ini terus terang saja, waktu saya ketemu di Lisbon [Portugal] dengan anak-anak yang [sebelumnya] sempat menduduki kedutaan AS di Jakarta pada waktu ada konferensi APEC [*Asia-Pacific Economic Cooperation*, tahun 1994] dan melihat gaya mereka, melihat alam-pikiran mereka, melihat nekad dan nyali mereka, saya bilang pada diri saya sendiri, “Wah persis [tahun] ’45 *nih*”. Mereka berani dibuang, berani masuk *bui*, berani dibunuh, dan sebagainya, untuk sesuatu yang mereka rasa itu mutlak perlu, tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Nah, bagi anak-anak Indonesia sekarang tentunya situasinya lain. Tapi paling sedikit mereka bisa mengakui bahwa anak-anak yang sekarang membela atau mempertahankan bangsa Timtim [Timor Leste] adalah mirip dengan Angkatan-45 dalam arti yang baik. Dengan demikian perjuangan mereka harus dipahami dan didukung. Persis seperti dulu orang-orang Belanda yang progresif berani memprotes tindakan pemerintah Belanda yang keras terhadap Republik Indonesia. Yang keempat, mungkin anak muda jangan terlalu percaya kepada orang-tua. *Haha...*

Bab Empat

Equitable Distribution

George McT. Kahin

On the Indonesian Revolution



DOKTOR ³⁶GEORGE McTurnan Kahin adalah pendiri Modern Indonesia Project di Cornell University, Ithaca, New York, AS. Pada tahun 1999 ia wafat, namun karya-karya dan pemikiran-pemikirannya tetap hidup dan tetap banyak didiskusikan di ruang-ruang akademik, baik di Indonesia, di beberapa Negara Asia Tenggara yang lain, serta di Amerika Serikat sendiri. Tentang mana yang lebih berperan dalam Revolusi Kemerdekaan—apakah “perjuangan” atau “diplomasi”—dalam wawancara berikut dia justru menggarisbawahi pentingnya kebangkitan nasional yang kuat sebagai prasyarat bagi keduanya. Tentang tokoh-tokoh Revolusi Kemerdekaan ia mengatakan, “*One of the things I have noted in the years after the revolution is that people couldn’t understand how it was that almost the whole spectrum of leadership was socialist*”. Sedang tentang semangat Revolusi, penulis buku *Nationalism and Revolution in Indonesia* (Ithaca, NY: 1952) ini mengacu pada

Most of the revolution's leaders supported some variant of socialism. Many leaders of the Masjumi, such as Natsir and Sjafrudin Prawiranegara and Mohammad Roem regarded themselves as "religious socialists".

Pasal 33 UUD '45. Pasal tersebut menurutnya berarti, "*economic system should be based on joint-effort of the entire community with the objective of raising the level of the living of the community to increase per capita incomes and provide for the equitable distribution of the returns derived from these joint efforts*". Saat Revolusi Kemerdekaan Indonesia sedang berlangsung ia hadir secara fisik dan dalam arti tertentu bahkan "terlibat" di dalamnya. Mengacu pada pasal 33 UUD '45, sebagai saksi mata Revolusi ia menyayangkan bahwa "*Indonesia's present leaders have apparently completely ignored this central message of Indonesia's revolution*". Wawancara dengan

Pak Kahin, begitu kami biasa menyebutnya, berikut ini kami adakan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 1996.

Catatan: Atas beberapa pertimbangan, naskah wawancara dengan Pak Kahin kami terbitkan dalam bahasa aslinya, yakni bahasa Inggris.

The Renville Agreement

Q (Question): In 1948 Prime Minister Amir Sjarifuddin represented the Republic of Indonesia in signing the Renville Agreement. Why did he eventually denounce the agreement and join Muso and the PKI (Partai Komunis Indonesia, the Indonesian Communist Party) in The Madiun Affair? Was he truly a communist?

A (Answer): I think Amir Sjarifuddin is very much underrated by Indonesian historians and very misunderstood. And I guess that having met him, talked with Indonesians who knew him well, and with Frank Graham afterwards, who was the American negotiator at Renville [Agreement] and who was quite close to Amir Sjarifuddin, it's clear that historians have badly misinterpreted him. In 1962 Graham was willing to talk to me quite extensively in a number of sessions about Renville and about his impressions of Sjarifuddin. I should

say with regard to the question which is always asked: was he a communist? I don't think he was. I asked that same question to Hatta, Sukarno, Sjahrir and many other Indonesians. They all said: "No". Some of them would say well he was politically opportunistic. Others would say, he was badly shaken by the experience of Renville. Whatever the case, in extensive talks with Graham as well these Indonesian leaders, none of them would support the idea that Amir was actually a communist. They were very special circumstances which pushed him into the position whereby he did join with Muso in the Madiun Rebellion.

The Madiun Rebellion was not something that Muso or Sjarifuddin envisaged, though they certainly sought power and would like to have headed the government. They were pushed by second echelon Communist leaders who were afraid that they were going to lose power because of the rationalization program in the Army. That was a program to reduce and make the Army much more effective and was to ensure that each soldier had a weapon, rather than two, three or four soldiers to a weapon, which was the existing situation. And the idea of Nasution and Sudirman was to make the Army much more streamlined, much more efficient. In their view that meant some people would have to be turned out of the Army. And the people who supported the Communist rebellion in Madiun, the second echelon people who actually initiated it, were some of those who were most vulnerable in that process.

Now, to Renville itself, I remember one of the things that Graham said to me with some bitterness. It was that both he and Sjarifuddin had been "betrayed". He said: "Sjarifuddin was betrayed and I feel some responsibility, because I had assured him that the United States would support Renville, would ensure that the Dutch lived up to their part of that agreement". And Graham said, "I felt betrayed because I had the assurances ³⁴ from the Department of State that it would indeed support a fair execution of the Renville agreement; that it would insist, for instance, that there would be a plebiscite in the areas from which the ⁴⁷ Siliwangi Division and other Republican units had withdrawn". Remember ⁴⁹ one of the terms of the Renville agreement was that the Republican forces would have to withdraw from the

pockets that the Dutch armored units had by-passed. Some of these pockets were nearly a thousand square miles in West Java; and there were also smaller ones in East Java and in Central Java. The biggest withdrawal area was in West Java where the Siliwangi was engaged. These soldiers were withdrawn.

Dutch records show—those records were by the way the records in General Spoor's archives recently opened up in the Hague—that about thirty five thousand Republican troops mostly Siliwangi, probably two-thirds, were withdrawn from these pockets, coming back behind the status quo line, marking the furthest advance of Dutch tanks, into what was left to the Republic. This was agreed to by the Republic on condition of the specific assurance that there would be a U.N. monitoring of the plebiscite—not just any kind of a plebiscite—to ascertain the views of the people in these areas from which the Republic's troops had withdrawn. For anyone who knew the situations it was pretty clear that a plebiscite would strongly favor the Republic, that the people would rather vote for the Republic rather than becoming a members of ⁴⁶one of the puppet states the Dutch were setting up to operate under their auspices.

So that was the fundamental betrayal: *the promised plebiscite never took place*, nor were even the preparations for one permitted by the Dutch. Graham in good faith had negotiated with understanding of the State Department's backing for a plebiscite. And Amir Sjarifuddin had understood that there would be this consequence of American backing and assurance that a plebiscite would be held, but the Dutch refused even to permit the political freedom in the areas they had forcibly occupied that was necessary condition for holding one.

You have to understand the ambivalence of American policy at this time. There was a strong anti-colonial sentiment in the U.S. But there was also at the top of the American policy making establishment men who believed that American priorities lay in Europe. Their overriding concern even that far back was with the potential power of the Soviet Union in Western Europe. Western Europe ⁴⁵was regarded as the vital area as far as American policy was concerned. And there was a genuine belief on the part of [Dean] Acheson, and [Robert A.] Lovett, and other top American officials—General Marshall

was somewhat broader minded, I think—that the end game was in Europe that you had to support the French and the Dutch in their colonies if you wanted to ensure that they would be staunch allies in Europe *vis-a-vis* the potential of Soviet power there.

You have to remember this was a period in Europe when the potential of local Communists was very strong. Local Communist had played a strong role against the NAZI's in underground operations, quite courageous, and had gained great respectability. Moreover, the expectation was that French nationalism and Dutch nationalism, which were very strong, would be affronted if the United States put pressure on those countries to give up their colonies. Furthermore there was an economic rationale. These countries had been devastated by the Nazi occupation, particularly Holland. Destruction was much greater in the Netherlands, but it was bad enough in France. And the belief was that the internal political balance, quite apart from influence from the Soviet Union, was regarded as so precarious in those countries, that it was necessary to ensure at all cost that non-Communist governments prevailed.

Remember at this time France's Deputy Prime Minister was a Communist, Maurice Thorez, and three other cabinet ministers were members of the French Communist Party. The expectation was in that the next election the Communists, who had been strongest in the election of 1946 in France, might become strong enough to form the government.

The situation wasn't politically as polarized in Holland, but the Dutch economy was more badly damaged. It was calculated by some in the State Department that 20% of the Dutch national income was dependent upon maintaining the colonial relationship with East Indies, Indonesia. So those were calculations that were ascendant and that's a major reason why Frank Graham was overruled. His successor, Coert Dubois was also eventually overruled. Dubois was brought in by the State Department because he was considered to be quite strongly pro-Dutch. By the time he had been in Indonesia three or four months, he had become rather anti-Dutch because of the Dutch and French insistence of any kind of a negotiating settlements.

It was this context in which Amir Sjarifuddin and Frank Graham had to operate. Now, Amir was very sensitive with regard to American politics when I went to see him at the urging of friends in the socialist party, the PSI, because they saw him—this was in August of 1948—then as making up his mind as to whether or not he would amalgamate his socialist party with the PKI. Hatta was now Prime Minister, and Sjarifuddin had been out of office since the end of January. By this time Sjahrir had withdrawn his elements from the Indonesian Socialist Party—as the major party of the two was that headed by Sjarifuddin. So Amir was seen to be in the process of making up his mind. The thing I found when I went to talk with him was that he was keenly interested in the upcoming American Presidential election which was about to take place that November. The general expectation was that Governor Dewey of New York, the Republican candidate was going to win. So that was the conventional wisdom in of the United States when I had left, a couple of months before, and still was, that Dewey would defeat Truman.

What Amir wanted to talk about was American politics. Finally he said: “Now what can we expect from Dewey if elected president. Are things are going to be getting better?” I actually thought things would be worse. “Well,” he said, “can we expect to have a better understanding of the Dutch-Indonesian dispute on the part of the American President?” I said, “It would take another four years; you have to wait for the elections after this in order to get any more progressive forces. Truman was probably not getting better because he was pretty much dominated by Acheson as far as Indonesian policy was concerned”. Finally he said, mentioning that he was an admirer of Franklin Roosevelt, “When can we expect to have the same progressive American forces as we associate with Franklin Roosevelt back in power”. And I said, “Well, again, it will be at least another four years before that happens”. And he said, and I still remember the looks on his face, quite ashen and drawn, “It will simply be too late”.

So it was extremely important to Amir, how American policy was going to emerge during the next period administration. He had already begun to conclude, I am afraid, that it would be another four years before any shift of American policy, and I simply reinforced that conclusion. To understand

the shift in American policy that finally did occur ³³ we have to keep in mind the context, and remember ⁴⁴ that U.S. policy toward Vietnam and Indonesia was almost identical for four years after World War II. ¹⁰ United States covertly supported both the French and the Dutch, ¹⁰ not only with weapons, but also financially, and very heavily. As far as the Dutch were concerned, their campaign in Indonesia was costing about a million dollars a day, almost exactly the amount of the Marshall Plan aid being pumped into Holland. And roughly the same situations existed as far as France in Indochina was concerned.

The French, of course, had a veto in the U.N., for they are member of the Security Council, as permanent member. But the Dutch did not have that advantage. And that helped Indonesia. Why? Because that meant that the dispute between Indonesia and the Netherlands could be taken up by the U.N. The Viet Minh under Ho Chi Minh did not have that good fortune. The French would veto any possibility of U.N. involvement. So that was one difference. Remember that the Dutch had been able to influence American policymakers to believe that the leadership of the Republic—Sukarno, Hatta, Sjahrir, Amir—was all very far on the left, and that they would welcome a major communist presence in the government.

As I mentioned that earlier it was really the second echelon, in the Muso-Sjarifuddin organization, that triggered the Madiun Rebellion. Once it was started, it was clear to Muso apparently that if they did not go along with these second echelon people, they would lose the major part of their military muscle. And so, quite reluctantly on Amir's part, they joined with the second echelon elements in a common anti-Jogjakarta front.

Q: Why did Hatta support Renville conditions?

³² A: Well, Hatta was a pragmatist, and I think a very effective leader. ³² It was clear to him ³¹ that the United States and Britain's power in Indonesia had to be dealt with pragmatically. And if he had he been a prime minister at the time of Renville he would probably have done exactly the same as Sjarifuddin did. ³¹ But when it was clear ³¹ that the Renville terms ³¹ were not going to be met by the Dutch, what was the alternative? Well, to try and persuade the United

States particularly, but other Western powers too, through the U.N., to put pressure on the Dutch. It was certainly the centerpiece of Hatta's policy. But he didn't think that the government had the military muscle, simply to take on the Dutch without trying at least to come to some kind of a compromise settlement. He was prepared to go some distance. I suppose one indication of this fervent desire to secure the United States' support was the fact that he acquiesced in a plan that was brought to him by the first CIA agent to go to Indonesia, a fellow named Arturo Campbell, who was very close to H. Merle Cochran. And that plan was of course done after the Madiun Rebellion: that the United States should set up an arrangement with the Republic's military police and its intelligence operatives going to the United States for special training. I don't think Hatta was pleased with this, but he wanted to be sure that he didn't alienate the United States at this point to help, when its support what he thought was crucial. So there were people from the Police Mobile Brigade, and the intelligence operations that were sent to American installation for special training, being flown out through the Dutch blockade.

But that is not really the central thing, I think, that Hatta was looking at the balance of power in the world that Indonesia had to deal with, and his worldview was very similar to Sjahrir's at the time. As they was it, there was no other course but to go the extra mile in meeting the Dutch demands, as not to antagonize the United States.

Q: When Amir gave the mandate back to Bung Karno, he was very sure that Bung Karno would give him a second chance to form a government. But it was a surprise that Bung Karno gave it to Hatta. Why did Bung Karno choose Hatta instead of Amir? Was it Bung Karno's idea, or was it Bung Hatta's suggestion or proposal? What factors made Bung Karno choose Bung Hatta instead of Amir?

A: There was an initial step before Sukarno gave the mandate to Hatta. He did try to give Amir a second chance to form a new cabinet. And Amir kept trying very hard. But he couldn't get Masjumi and PNI to go along on his terms. He particularly had trouble with Masjumi. Probably he could have struck a deal with PNI but he couldn't do it with Masjumi. And finally in Sukarno's point of view it became clear that there was no political leader who would be able to form a coalition cabinet that would be viable. That's why

then he formed the Hatta cabinet. It was regarded as a business cabinet, a non-party cabinet. Hatta's cabinet included a number of parties, but it was not a cabinet which depended upon parliamentary support. It did not depend upon the continuing political support of a party majority.

Q: Yes but for the key positions, Hatta went to the "sayap kiri" [left wing] for the key positions. And why did he keep the Defense Ministry position for himself?

A: I don't think he went to the *sayap kiri*. The position of the Minister of Interior was held by the very powerful Sukiman, from the Masjumi. Haji Agus Salim who was regarded as non-party—although he was close to Masjumi—was Foreign Minister. Ali Sastroamidjojo of the PNI was Education Minister. Mohammad Natsir of the Majsumi was Minister of Information and there were several other ministers from the PNI, and Leimena from the Christian Party. But I can't remember all of them. But Hatta, as you say, held the Defense portfolio himself. So, Sukarno couldn't find sufficient support for the idea of the parliamentary cabinet, such as Amir had headed, and Sjahrir before him.

By the way, in talking about Amir I did not suggest that he was a saint. He was much interested in political power as anybody else. This is essential to understanding the decisions that he made.

Siliwangi and Solo

Q: During the First Aggression, the Dutch took over the areas which was occupied by Indonesians, such as the Bandung area. This forced the Siliwangi Division to move to Central Java. Why did the Siliwangi Division move as far as Surakarta, and not only along the demarcation area?

A: I'll try to recall the best I can. After the First Aggression Siliwangi maintained itself in West Java. It was the Renville Agreement in which one of the central conditions brought it to evacuate West Java and go to the truncated areas of the Republic. Now, I can recall that one day in Yogya [Yogyakarta or Jogjakarta] on the streets, I suddenly saw soldiers with tiger patches of Siliwangi, and it was unexpected. This would have been right before the time of the Madiun Rebellion. For several months before Madiun the situation in Solo [also known as Surakarta, *Ed.*] had been very unstable. And it was

in order to ensure that the government's position became dominant in Solo that part of Siliwangi was sent there to support those elements in Solo that the government felt it could rely on.

I don't think anybody I know who writes in English at least has understood fully this very tricky situation which existed in Solo, which was very complex. Part of it had partly to do with a long feud between Pesindo [Pemuda Sosialis Indonesia, Indonesian Socialist Youth] and the forces that looked to Tan Malaka for leadership.

The best thing that was produced in the U.S. on Madiun and its Solo background is the book by Ann Swift on Madiun, published by Cornell's Modern Indonesia Project about 8 or 9 years ago. She was later one of the U.S. Foreign Service officers who was in the American Embassy in Teheran when it was surrounded for a year. But before that, she came to Cornell for a year to do her M.A. thesis, which was on Madiun. She had previously served as political officer in the U.S. Embassy in Jakarta where she showed a very good knowledge of politics. She used all the materials that she could gather in her thesis.

Q: Do you think that the move to Surakarta was part of a military adventure to centralize power in that area?

A: Sudirman supported the dispatch of the Siliwangi troops to Solo to keep order. But Sudirman wanted more than anything else to keep the military united, in facing the Dutch. And he saw some justice on both sides in these disputes. So he was pretty non-partisan, I think, trying to be as objective as he could. But I never heard that he had his headquarters moved from Yogya to Solo.

Q: Was he aware of the differences between Siliwangi and troops in Solo?

A: Maybe not sufficiently.

Q: In relation to this, why was there a conflict between the Siliwangi and the Senopati Divisions in Solo?

A: I have written a little bit about that, but since my memory is poor ³⁰ and I don't think I had any definitive understanding. Probably Ann Swift, whom I mentioned earlier, had a better grasp of this.

Q: Ann Swift mentioned something about connection between Moscow and Muso, even though she did not offer any definitive conclusion on this.

A: I think more specifically, if I can recall correctly, ¹⁰ this refers to the arrival of Muso. And whether there was an expectation on the part of the Soviet Union that by sending him there, it could exert an important influence in Indonesian politics. This is something impossible to evaluate.

The [more immediate] problem was that there was too rapid a rationalization policy in the Army. And that this gave unnecessary concern to members who were not in a strong position—whether because of lack of experience, too few weapons, or lack of training—to resist the rationalization. At the same time internal politics may also have been a factor. Somebody had to be the first in this process. And the way it was moving, as I recall, with Hatta supporting Nasution, that the troops that were most vulnerable in this process were those who took the initiative in Madiun. They felt threatened that they would be dismissed in the rationalization process. So, being threatened, they did make a political military move in Madiun to take power.

Q: But the Commander, Sutarto, was killed in the Solo Affair.

T: I can't remember that, but I think my book [*Nationalism and Revolution in Indonesia*, (1952), Ed.] does touch on that. I know I must have made some mistakes in my coverage of the Solo affair. Actually, when we had the launching of the Indonesian language edition of the book in Jakarta in 1995, I think I mentioned that one of its [the book's] weaknesses is its coverage of the Solo affair. I am not a good person to ask about very specific details about this. I was in Yogya then, and not in Solo. People I was relying on for information at that time were I think somewhat biased concerning this. But I am not so sure.

The Second Military Action

Q: We also would like to ask you about the Second Military Action by the Dutch against the Republican areas in 1948. The impression was that it was so easy to occupy Yogyakarta. And it was as if there was no real people's struggle against the Second Military Action, such as what happened when the Allied forces landed in Semarang and in Surabaya three years earlier, in 1945. What's your take on this? Was it because there was no real strategy to fight against the Dutch occupying forces in 1948 during the Second Military Action, or was it really that there was no longer spontaneous people's action? So, what do you think about this difference between 1945 in Surabaya and Semarang, and 1948 in Yogya?

A: Well, for sure there was a difference; you are right! I think, first, you have to consider important question of why in December 1948 the Republic's intelligence apparatus was so terrible. Maybe it was as good as you could expect in such a situation, but the Dutch had very sophisticated intelligence operations. They had cracked the Indonesian secret code a long time before, and the Indonesian army didn't know this. The Army didn't know that the Dutch, at least a year before, I think, knew where practically every Indonesian unit was being ordered to. I went through General Spoor's archives recently, which are open now, and it's really remarkable how much the Dutch knew about the location of TNI units through intercepted radio contacts which they could immediately decode. What was supposed to happen was that the Republican Army was to go on maneuvers on December 19. The Dutch knew this and that was why they chose that date to attack. There was no doubt the Dutch knew that the Republican Army would be on maneuvers, and that therefore this was a great time to catch the TNI off guard. So that has to do with the Dutch timing. So Nasution, commander of the Republic's ground forces, where was he? He went on a tour in East Java, this top officer, when the Dutch attacked. This was because Nasution didn't know that the Dutch had cracked the Republic's secret communications code and knew precisely where he was. So I mean this was a good reason for the Republic's army being caught off guard. But one would hope that the TNI had some compensating intelligence on the ground—through its support by the population and through couriers—that permitted it to know the disposition of the Dutch Forces. The Dutch had been massing their forces for at least a couple of

days before hand, before this attack. ¹¹ As a matter of fact I found ¹³ the Dutch had arranged for a press conference three days before the attack, and for the afternoon of the attack, ¹³ so that they would be ready to brief journalists, giving those they could rely on questions to ask at the press conference. They were that well-prepared.

Well, to go back more specifically to your questions, when I woke up at 5:30 that morning I heard some very convincing bombing. I thought, boy, the Republic was having a pretty sophisticated and realistic practice maneuver. I saw some planes up there, but I assumed there must have been the three former Japanese Zeros that made up the Republic Air Force rather than the B-51's, Mitchell bombers that were actually there, and it was very clear suddenly that it was a real attack. I kept a close contact with events because I lived on Jalan Terbantaman, in Yogya, and just down the street was Air Force headquarters, and a military headquarters was close by too. And I found that the Dutch dropped dummies from Maguwo airfield, [in order] to draw fire from the Republican forces to disclose where they were and then their planes fired to wipe them out.

But I have also found out later, in talking to the Republican officers, that there were very, very poor defenses ²⁹ at the airport. They didn't have heavy machine guns, except one or two. But suffice it to say that there was almost no defense at the airport. But one would have thought, since it's five and a half miles from the airport, to the outskirts of Yogya, that there would have been plans, for snipers, at least to slow up the advance of the Dutch. But they went quickly right through, hardly any trouble at all. The Republican Army removed itself from Yogya. That was according to plan. I mean there was no plan to make a major effort to defend the city itself. Perhaps because that would have created too many civilian casualties. So that the Army's major units were to be withdrawn. But no one I talked to could give me any kind of answer as why at least no small units were left behind, which would be the normal course of operations, to slow up the Dutch advance, so that most of those who wanted to leave Yogya could have the opportunity to leave. The Dutch would then have some casualties on the way. But they didn't lose a [single] man.

As I [was taking] pictures of the attacking Dutch planes, [I could see that] the Dutch were not too discriminate about these plane attacks. They rocketed and machine gunned some areas in an indiscriminate way. They knocked out the radio stations very early, and that was very important because Sukarno's, Hatta's, and Natsir's major speeches were ready to be broadcast. But they couldn't be broadcast. But when after an attack I went outside the home I lived in, there was a lot of shrapnel around in the yard. There were four or five snipers in our street to slow up the Dutch because this was an important street, because of the military headquarters. I didn't see anybody advancing toward the Dutch except for five or six peasants with bamboo spears [popularly known as *bambu runcing*, *Ed.*]. I thought: 'What a damn fool ordered these brave men into battle?' They moved along the street with bamboo spears, and would get down into the ditch as the planes went by, and then they kept going. That was the only actual defense I saw except for the few snipers, who soon departed.

Now I mention this because I think it is important in understanding why Sukarno and Hatta took the decision they did. They have been badly criticized by the military for not leaving the city with the Army. Now put yourself in their position. Hatta had just come down from Kaliurang that morning, to attend a cabinet meeting at 10:00 AM. On the way down his car was attacked by a Dutch plane. The car was hit but nobody was killed. But the car was put out of commission. So the Sultan had to take his own car to pick him up and take him on to Yogya. I imagine that was a very traumatic experience, but he held the cabinet meeting. Could you imagine sitting there hearing the bombing and all that was now going on outside? The Dutch were advancing closer while rocketing and bombing. There were reports the Dutch were encircling the city, which in fact they were. I remember as I was trying to understand what was going on, going back and forth to Air Force headquarters and my house. In the midst of this I saw one lone peasant walking up the street. I mention this because a lot of people have given him a bad press. This was Ali Budiardjo. And he had guts enough, by himself, to walk up the street, to the outskirts, and to try to join the unit of Simatupang.

When Hatta came to cabinet meeting at 10:00 A.M. on the morning of December 19, there was no full battalion left in Yogya. He had previously said that if he and Sukarno escaped from Yogya, it would require at least a full battalion to protect them from the Dutch—for they would be a priority target for Dutch troops and planes. So why don't you be a little bit charitable before joining those critics who try to paint Sukarno and Hatta as cowards, for not fleeing Yogya with the Army? It surely was understandable why they wouldn't want to trust themselves to an Army which was in such bad shape—one that had permitted the Dutch troops to walk right in, with no resistance.

Q: In Surabaya there was a spontaneous resistance, a real struggle against the Dutch. But why not in Yogya?

A: Surabaya had a long build up. There was a several phases of battle in Surabaya. In Yogya, I think the population had not been prepared for an attack. Once the Dutch occupied the city, popular resistance was actually very impressive. Partly this had to do with the Sultan, who provided an effective example and leadership for the population. After the Dutch had forced me to leave Yogya on December 19, I went back there on the 6th of January about two and a half weeks after the Dutch occupation. ²¹ I was the only correspondent who had been able to get there. I remember talking to the Dutch economist who was in charge of civil administration in Yogya, a very honest guy. He said, the situation was hopeless because of the Sultan and because of the very strong speeches, of Sukarno, Hatta, and Natsir. Although it had been impossible for these to be broadcast, carbon copies were circulating among the population.

Q: What do you mean by "very strong speeches"?

A: Natsir, Hatta, and Sukarno had short speeches: no cooperation with the enemy, and resist. Natsir went into a lot of detail as to how people could resist and not be co-opted. This Dutch economist who was in charge of the civil administration in Yogya who had struck me as one who had great sympathy for the plight of the population: he said that because of the orders of the Sultan, only approximately one hundred and fifty civil servants remained on

their jobs, only those he regarded as vital to the population's welfare—only those who were from the hospital, waterworks, and power station could be permitted to go to work, nobody else. And yet the Dutch had a lot of pressure to put on, because Yogyakarta had already been an undernourished city. The population had tripled because of so many refugees from outside, and it had already been very hard to feed them all. And the Dutch now controlled all the food that was coming in. So there was a lot of pressure for people to work in order to get food. So I found their refusal to work for the Dutch very impressive, a popular resistance that seriously worried the Dutch.

Q: How was it possible that 50,000 well-armed, mobile Army in Nasution's thinking could possibly win over 100,000 well-armed, well-funded, well-led, and well-trained Army with a lot of logistic, money and intelligence. How was it possible that they even thought that 50,000 soldiers would be enough to get lucky and win?

A: That is a good question. Why don't you ask Nasution? (...Laughter)

Q: We tried to ask Pak [Major General, (Ret.)] Sayidiman [Suryo²⁰ diprojo]. But according to him there was no clear-cut answer. And he said that we did not have enough money to pay their salary. He also said that we did not have enough arms.

A: Those are reasons for the Army having concluded that a very large force was not efficient, especially with rifles in the ration of one to three. Salary, of course, was a factor. They printed money, so I don't know how far they could go in inflation.

Q: Professor Marsetyo, who was a former Pesindo Laskar, said that Pesindo had a lot of arms. But Nasution said that we should have the rationalization.

A: But I don't think Nasution was really pro-Pesindo, was he? But I do think it was possible that rationalization was sometimes for political reasons as well as military.

Q: Did the Republic think of any possibility of physical threat imposed by the Dutch on the Republican leaders?

A: The Republic had a plan for the top leadership, Sukarno-Hatta, to be flown out on the same day that the Dutch chose to attack Yogya. The plane was provided by Nehru, and Hatta was to be flown only as far as Bukitinggi. But what most concerned the Dutch at this time was that they knew that Sukarno was meant to go all the way to New Delhi, to set up a government-in-exile there, with the support of Nehru of India in case an attack did take place. So that the Indian government was well clued in as to what Republican intentions were at this time. I am sure that in terms of public relations it would have been pretty awkward for the Dutch if they would try to shoot down Nehru's plane. Of course you have to consider this as one of the reasons why Sukarno and Hatta were not well-prepared to go to the mountain. Even Nasution acknowledges in his book and said that Sukarno's staff were busy deep into the night before the Dutch attack, preparing for his departure that morning in Nehru's plane. So their carefully laid plans suddenly got upset, just as the plans of the military did by this sudden attack. But with Sukarno outside of the country, and being such a good English speaker he would have been a force that the Dutch would have worried about. Sjahrir had talked at the U.N. but nothing like Sukarno could have done there.

U.S. Interests

Q: What were the chief reasons for U.S. involvement in Indonesia? Were they political, economic, or a combination of the two?

A: I don't think economic reason was a major factor. But I think, especially with regard to Sumatra, America's economic interests were considered to be substantial. But I don't regard that as the central motivating factor. It was a contributing factor. The Dulles brothers and Eisenhower strongly felt that any country that followed a neutralist foreign policy would be, maybe innocently, but effectively a tacit supporter of the Communist side, the Soviet side. That belief was very simplistic, but it was very strongly held. It was a Manichaeian view of the world, black and white, there wasn't any gray. So, the political factor was certainly the strongest, with no doubt. I do think that

you're right in suggesting that there were some economic motivation, but it was overshadowed by the political and ideological.

It wasn't just troops from the Republic's Army that attacked Yogya after the Dutch occupied it. I was an eyewitness on January 9, 1949, during the second Republican attack against the Dutch-held Yogyakarta—previously there had been a smaller one in December 29, 1948. But in the big attack of January 9, 1949, to which I was witness, the Army was not involved. It was a police Mobile Brigade Battalion, maybe two or three of them together with a large unit of KRIS [Kebaktian Rakyat Sulawesi, *Ed.*] that carried it out, and the attack had very strong effect. They penetrated right to the center of Yogya. In the March attack, the Army was the force involved. When you are speaking of the military, you have to realize that they were several elements involved. Some of them I don't think got the credit they deserved.

Socialist Inclination

Q: At the end of your book [Nationalism and Revolution in Indonesia, *Ed.*] there is a very touching paragraph ²⁷ at the end of it.

A: Is that the only touching paragraph? (*Laughter*)

Q: We'll quote your end paragraph which goes something like this, "Whatever the case if in attempting to meet their great post-revolutionary problems the Indonesian people were able to demonstrate the same qualities which they had shown in their struggle for independence, their chances of success would be good".

A: I was younger and more idealistic [when I wrote that] than I am now, but I think it's hard now in retrospect to recall how during the Revolution people were really committed to humanitarian goals of social justice. Very widespread was the ideal of a better society, with greater equality, not just getting rid of the Dutch. But the objective of transforming the Indonesian society was profoundly felt by a lot of people; not everybody but a great many I think people nowadays find it very hard to understand that at all. The people who led the Revolution did not have a vested interest in capitalism. They had been largely excluded from that sphere under the Dutch. They saw

capitalism as something dirty. They saw it as Dutch. And they felt that the other side of the coin was socialism. Capitalism was associated with Dutch exploitation, Western exploitation.

Most of the revolution's leaders supported some variant of socialism. Many leaders of the Masjumi, such as Natsir and Sjafrudin Prawiranegara and Mohammad Roem regarded themselves as "religious socialists". When I talked to Sukarno about socialism he made clear that he regarded himself as a socialist but not a communist; for he regarded the idea of the dictatorship of the proletariat and class struggle as alien to and unsuitable for Indonesia. One of the things which impressed me most in talking with Sukarno was his knowledge of and attraction to Jean Jaurès, the brilliant socialist leader who on the eve of World War I was shot. Like Jaurès, Sukarno felt that socialism in just a political sense was inefficient. "Socialism doesn't mean anything," he said, "unless there is economic justice attached to it". But like many other socialists—Hatta, Sjahrir, Nehru and U Nu of Burma—Sukarno saw some elements of Marxism as useful in trying to build up ex-colonial societies, and felt it hopeful to draw on it selectively.

Q: Some people said that you underestimate Tan Malaka. Could you tell us the role, the position of Tan Malaka and his followers?

A: I think in the paperback edition of my book which I gave a new preface I acknowledged that I did not give due attention to Tan Malaka. It was really not my fault. I tried very hard when I knew when he was sent to jail. He was not released until the end of my stay in Yogyakarta. I did try to see him then, and saw one of his major assistants in the hope a meeting could be arranged. But Tan Malaka refused. This was just after Tan Malaka was released from prison. I think Tan Malaka, I guess for good reasons, would not trust an American in Yogyakarta.

Q: How did you come to know Arturo Campbell, or how did he come to know you?

A: I had never met, or even heard of him before. But I came back one day, and he was there in the house. The Dutch had permitted him to come through the status quo line. He didn't have to provide his own transportation. And he

was there. He wanted me to assist him. I said, “No way”. I had spent so much time trying to persuade people ¹⁹ that I had nothing to do with the American government. And I wanted nothing to do with him. And he was quite angry ... He denounced me, he told the Indonesians that I must be pro-Communist, and he ¹⁸ denounced me later in Washington. He was there for about five days. ¹⁷ The first time I saw him, I was returning to the house one night, not knowing that the Republic’s government had given him a room there, and I saw in line, a queue, of Mobile Brigade officers being interviewed by him. His object was to see which he considered to be most suitable to be sent to the United States for special training.

Kahin and Indonesia

Q: When you were in Yogya, you were there as a graduate student in political science. But your book suggests that you were taking side with the Indonesian side in the Dutch-Indonesian conflict. Why did you take the Indonesian side, and how could you maintain your objectivity as a scientist by taking side?

A: I have never claimed to be objective... [Laughter] No, I think you have to realize that in the United States there were broadly-based anti-colonial feelings among people, but that the government’s actions did not give this priority over its European considerations.

Well, it’s probably not very scholarly to say so, but I think I was already predisposed, being pro-Republican before I left the U.S. in 1948 to go to Indonesia. I had done all the reading I could about Dutch colonial rule and the current situation in Indonesia. But all I can say is that my pro-Republican prejudices were reinforced the more I saw of the Dutch in Indonesia.

I met Sjahrir when he was in New York lobbying at the U.N. with Soedjatmoko who assisted him. Sjahrir gave me a letter to Haji Agus Salim, which was helpful once I got into the Republic.

Q: What motivated you to do research in Indonesia and even to take side in support for the Indonesian Republicans?

A: Well, I think anybody under the age of 30 could be idealistic. I think a lot of people are concerned about societies beyond their own. My first

assignment, just before the war, I was going to Peru. Eleanor Roosevelt, the American President's wife, was fed up with the lack of knowledge of people who visited the White House and purported to be Latin American specialists. So she set up an institute to train ten young Americans to go to different Latin American countries so that through research, there they could learn more in depth about social and political conditions in these countries. I was one of those people who was selected, and I was to go to Peru. Actually I had my visa, steamship ticket, my inoculations and was all set to start research there. But my draft board refused to let me go. Remember, even though in early 1941 the U.S. wasn't yet at war, it was necessary to get permission from one's draft board to work abroad. In Peru, there was political movement headed by Haya de la Torre, dedicated to helping the badly abused Indian population, called Aprismo, and that was going to be a major focus of my research, but I never had the chance to carry it out.

Q: What was the focus of your study on Indonesia?

A: I was interested in how long it took after the Indonesian revolution for an egalitarian society to be lost. One of the things I have noted in the years after the revolution is that people couldn't understand how it was that almost the whole spectrum of leadership was socialist. There is still a vestige of this socio-economic philosophy of the revolution embedded in the 1945 Constitution. And in that constitution, which is today merely theoretically operative as in Article 33 (that same article having been taken over in the 1950 Constitution) that the socio-economic bases of society should be one that supports all members of the Indonesian community on an egalitarian basis. Even in 1955, six years after the revolution, there was a famous debate with regard to the meaning of Article 33. And the debate was between Wilopo and Widjojo Nitisastro. In a famous debate Widjojo was very clear in emphasizing what Article 33 of the Constitution meant.

He quite accurately said: "It means the economy is to be a joint-effort by the members of the members of the family of the Indonesian people, for the common good, of the entire family, with the distribution of the acquired advantages among the individual members according to the needs of each

7 member. And an equitable distribution among all members of the benefits derive from these joint efforts. And not by distribution which benefits certain individuals or groups”. Widjojo then went on to explain that this article embedded in the Constitution means that economic system should be based on joint-effort of the entire community with the objective of raising the level of the living of the community to increase per capita incomes and provide for the equitable distribution of the returns derived from these joint efforts. That is the equitable distribution of income, in which the state plays an active role in guiding and implementing economic development. Now these are almost his exact words. You can check to get the wording precisely right from the printed record. Maybe you are surprised [that] this was Widjojo Nitisastro. But he was interpreting the Constitution appropriately—as the leaders of the revolution meant it to be. Indonesia’s present leaders have apparently completely ignored this central message of Indonesia’s revolution.

Military Struggle, Diplomacy, National Awakening

Q: Which one do you think played more important role in the Indonesian revolution: the military struggle or the diplomacy?

A: There is just one comment if I may, as to your question as whether it was the fighting or the diplomacy which was essential in the Indonesian revolution. I think you have to see that both were central. But I think that is a simplistic way of posing the question. It loses sight of something of the third major factor, one that is even more fundamental. You had to have a strong nationalist movement beforehand, a nationalist movement which had sunk deep roots down into the population, sufficient to have aroused its political consciousness. And we need to be fair about it because if it had not been for Sukarno, Hatta, Sjahrir, Tan Malaka, and the Islamic national leaders’ efforts in preparing the ground for the revolution, neither the military struggle nor *diplomasi* could have been successful. This third factor of national awakening was an absolutely precondition for the other two to be effective.

Bab Lima

Awas Buaya!

Clifford Geertz

*Tentang Dinamika Sosial-Politik
Tahun 1950-an dan 1990-an*



DALAM WAWANCARA berikut Pak Cliff, begitu Dr. Clifford Geertz biasanya kami panggil, menekankan kenyataan bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang bersifat majemuk. Menurutnya setiap upaya untuk mengurung kemajemukan itu ke dalam kerangka apa pun yang ketat—entah ideologi tinggi seperti yang dilakukan oleh Presiden Soeharto, atau nasionalisme seperti yang dilakukan oleh Presiden Sukarno, atau komunisme oleh Partai Komunis Indonesia, atau Negara Islam oleh kelompok-kelompok Islam—akan membawa ke bencana. Alasannya, menurut Pak Cliff, karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

Saat ditanya mengenai bagaimana mulai belajar tentang Indonesia, ia menjawab: “Ketika datang di Pare [Jawa Timur] saya tidak tahu apa pun tentang daerah itu. Baru kemudian setelah mulai memahami apa yang terjadi di sana, saya mulai melihat ke belakang, menelusuri sejarahnya,

Yang bisa dipelajari, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Usaha apa pun untuk mengurungnya ke kerangka apa pun yang ketat ... akan membawa ke bencana. Karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

untuk mencari penjelasan mengapa begitu. Saya ingin mulai dengan segar dan bebas, tanpa pra-konsepsi apa pun". Siapa yang menurut Pak Cliff telah menjadi pelopor Revolusi Kemerdekaan Indonesia? "Bukan pemuda!" sergahnya. Menurut dia: "Kaum muda memang mulai memegang peranan penting. Tetapi mereka yang tampil kebanyakan datang dari kalangan intelektual. Saya juga tidak setuju dengan pandangan tentang revolusi sosial". Meskipun demikian, ia mengakui: "Tentu saja massa rakyat terlibat". Tentang berbagai studi mengenai revolusi, ia berpendapat:

"Tidak ada penjelasan sejarah yang tunggal". Menurutnya: "Untuk jangka waktu yang pendek revolusi memang mengaburkan kemajemukan". Selanjutnya, ia percaya bahwa segera setelah revolusi perpecahan akan terjadi: "Di balik rasa kesatuan yang mungkin tampak dari luar terdapat aneka macam kekuatan yang sudah bermain dan sulit didamaikan. Perpecahan menjadi semakin tampak pada masa pemerintahan multi-partai". Menurut pengamatannya: "Sama sekali tidak ada kerjasama antar-organisasi untuk mencapai tujuan bersama". Mengenai pengaruh kebudayaan ia mengatakan: "Saya tidak pernah melihat kebudayaan sebagai penyebab apa pun. Kebudayaan bukanlah semacam ultimate explanation untuk segala sesuatu yang terjadi".

Pak Cliff adalah peneliti tentang Indonesia yang pertama kali bicara soal ikatan primordial, yaitu ikatan berdasar hubungan darah, ras, bahasa, kedaerahan, agama dan adat. Apakah ikatan primordial itu merupakan "nasib"? Menurut Pak Cliff: "Sifat-sifat primordial merupakan hasil proses sejarah. Ikatan primordial bukan urusan instink, bukan nasib. Ia terbentuk dalam proses waktu, seperti halnya dengan kesetiaan dalam persahabatan, keanggotaan politik, dan sebagainya". Oleh karena itu, pesan Pak Cliff: "Kalian

harus menempatkan peristiwa yang terjadi di dalam konteks historis dan sosio-budaya”.

Wawancara yang laporannya akan segera Anda baca ini berlangsung di kampus Universitas Princeton, di New Jersey, Amerika Serikat, tempat dia mengajar, pada tanggal 14-15 April 1997. Aslinya wawancara berlangsung dalam bahasa Inggris, lalu kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Setelah diperiksa oleh Pak Cliff, hasil terjemahan itu dikembalikan lagi ke kami untuk kami proses selanjutnya.

Mengapa Tertarik Indonesia

T (Tanya): Mengapa Pak Cliff tertarik pada Indonesia? Dan mengapa ke Pare?

J (Jawab): He... he... he... Ini cerita awal dari karir saya sebagai antropolog. Ketika lulus college [perguruan tinggi] bidang utama saya bukan antropologi tetapi filsafat. Saya tidak tahu banyak tentang ilmu sosial. Kemudian saya ke [Universitas] Harvard, masuk ke “Social Relations Department”. Di sana saya mulai belajar sosiologi, psikologi klinis, psikologi sosial, antropologi dan sebagainya. Ketika saya harus menentukan tempat penelitian, pernah terpikir untuk pergi ke Brasilia.

Waktu itu saya juga bekerja pada proyek penelitian “American South-West”, mengolah data lapangan tentang suku-suku Indian Hopi, Zuni, serta “Spanish American”. Hasilnya belum pernah diterbitkan. Ketika saya sedang duduk di kantor, Professor Doug Oliver datang dan berkata: “Apakah kamu mau pergi ke Indonesia? Kami punya proyek penelitian di sana”. Tawaran itu saya bicarakan dengan Hilly [Hildred Geertz, istri Clifford Geertz, Ed.] dan akhirnya kami sanggupi.

Kami mulai belajar Bahasa Indonesia. Setiap akhir pekan, dari pagi sampai malam, kami mendapat pelajaran Bahasa Indonesia dari ahli linguistik dan beberapa orang Indonesia. Selain itu kami juga belajar Bahasa Belanda. Karena saya belum tahu apa pun tentang Indonesia, maka sedapat mungkin saya juga mulai membaca buku-buku tentang Indonesia. Waktu itu Indonesia belum banyak dikenal di Amerika. Kemudian saya pergi ke Leiden. Di sana saya bertemu dan berbicara dengan para Indonesianist. Kalau

kalian mau tahu lebih rinci tentang persiapan saya ke Indonesia ini, silahkan baca buku *After the Fact* [Geertz, 1995].

Pada tahun 1951 kami tinggal di Yogya [Yogyakarta] selama 8 bulan untuk belajar Bahasa Jawa. Rencananya kami harus menetap di Wonosobo. Tetapi kami berpendapat bahwa Wonosobo bukan tempat yang tepat untuk penelitian. Di sana tidak ada nasi. Kami pergi berkeliling ke Kertosono, Magelang, Jombang, Pare dan sebagainya. Akhirnya kami memutuskan untuk melakukan riset di Pare.

T: Setelah lebih dari 40 tahun mengenal Indonesia, bagaimana Pak Cliff merasakan hubungan Anda sebagai antropolog Amerika dengan orang-orang Indonesia?

J: Sekarang saya kenal banyak orang Indonesia dan mereka juga kenal saya. Situasinya sangat berbeda dengan ketika pertama kali saya datang ke sana, waktu saya masih harus belajar dari nol. Beberapa buku saya sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, ditanggapi, dikritik, diserang dan sebagainya. Ini baik. Sebab untuk itulah saya menulis. Dengan begitu saya memperoleh umpan-balik. Saya masih ingat ketika saya kembali lagi ke Pare pada tahun 1986. Waktu itu terjemahan *The Social History of an Indonesian Town* [Geertz, 1965] baru saja terbit. Dalam buku itu saya mengubah nama-nama orang di sana. Seorang yang dulu menjadi informan membaca buku tersebut, mengganti nama samaran ke nama sebenarnya, memfotokopi dan menyebarkannya ke teman-teman yang lain. Mereka semua saling memberi komentar satu sama lain. Tidak ada yang marah. Mereka senang.

Saya juga sempat bertemu dengan beberapa wartawan dari pers lokal maupun nasional. Mereka mempunyai pandangan kritis terhadap Pancasila serta terhadap pemerintah [Orde Baru, *Ed.*]. Tetapi para wartawan itu tidak berani memuat kritik mereka di koran mereka sendiri. Mereka ingin agar saya mau menyuarakan pandangan dan kritik mereka tersebut. Tentu saja saya hanya mau mengatakan apa yang memang ingin saya katakan, bukan apa yang mereka harapkan agar saya mengatakannya walaupun saya setuju dengan pendapat mereka. Seandainya waktu itu mereka mau untuk sedikit lebih terus terang, tidak terpaku pada agenda mereka sendiri, serta bersedia

menyajikan tulisan lebih dalam bentuk laporan dan bukan polemik, saya pasti tidak keberatan untuk menyampaikan pandangan saya.

T: Dalam tahun-tahun terakhir ini kami berusaha melihat kembali sejarah, politik, ekonomi dan kebudayaan Indonesia dengan mengadakan wawancara dengan para narasumber yang pernah mengadakan penelitian tentang sejarah, politik, serta politik ekonomi. Sekarang kami datang ke Pak Cliff dengan sejumlah pertanyaan tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Pak Cliff bisa saja tidak setuju dengan pertanyaan yang sebelumnya sudah kami ajukan secara tertulis.

J: Soalnya bukan soal setuju atau tidak setuju. Pertanyaan-pertanyaan itu baik. Soalnya, saya bukan ahli sejarah. Pengetahuan saya tentang sejarah Indonesia ya dari buku-buku seperti yang kalian baca itu juga. Selain itu, tulisan saya tentang Indonesia hanya berkisar antara tahun 1951 dan 1986. Tahun 1996 saya pergi ke Indonesia, tetapi hanya sebentar. Karena itu saya tidak akan berbicara tentang hal yang saya sendiri tidak mengetahuinya. Saya tidak bisa mengoreksi hal yang tidak saya ketahui.

Masa Pra-Revolusi

T: Yang terutama ingin kami tanyakan kepada Pak Cliff adalah bagaimana kami bisa memahami perubahan sosial-budaya dalam sejarah Indonesia secara lebih baik. Misalnya saja tentang tokoh Kartini. Jika melihat pikiran-pikiran Kartini, apakah Pak Cliff melihat dia sebagai pelaku perubahan sosial-budaya yang cukup penting pada jamannya?

J: Tentang Kartini, persoalannya adalah sampai sejauh mana Kartini berperan penting dalam masyarakat pada jamannya. Kartini hanya terkenal dalam sumber-sumber Belanda. Pengaruhnya dalam masyarakat tidak begitu jelas. Saya belum pernah bertemu seorang pun di Indonesia yang tahu banyak tentang Kartini. Pada tahun 1950an memang ada sedikit acuan ke Kartini dalam gerakan wanita. Tetapi orang yang membaca buku tentang Kartini saya kira tidak banyak.

T: Pada awal abad ke-20 muncul banyak organisasi kemasyarakatan dan partai politik—Budi Utomo, Muhammadiyah, Sarikat Islam, Indische Partij,

dan sebagainya. Kesadaran akan pentingnya pendidikan berkembang terutama di kalangan priyayi Jawa. Berbagai kelompok masyarakat mengungkapkan pandangan dan sikap mereka dengan teknik-teknik modern. Mereka menggunakan rapat umum (rally), pemogokan, boikot, demonstrasi, surat kabar, serikat buruh, dan sebagainya untuk memobilisasi masa. Bagaimana situasinya pada waktu itu, sehingga kesadaran berorganisasi dan berpartai bisa tumbuh pesat?

J: Pendidikan pribumi sebenarnya belum tersebar luas, meskipun ada beberapa figur kritis dan terdidik yang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Waktu itu banyak pengaruh luar yang masuk. Banyak misionaris yang didatangkan. Terjadi pula peristiwa penting di dunia internasional. Tahun 1905 Jepang mengalahkan Rusia. Tahun 1911 pemerintahan nasionalis Tiongkok berdiri. Hampir di seluruh dunia terjadi revolusi. Peristiwa-peristiwa itu tidak hanya berpengaruh di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain seperti India. Semacam tekanan dunia internasional mulai terbentuk untuk pertama kalinya.

Kegiatan dari berbagai organisasi dan partai pada tahun 1920an sebenarnya tidak terlalu hebat. Mereka semua organisasi yang legal. Mereka bukan gerakan massa rakyat. Sarikat Islam [SI] pernah menjadi populer untuk sementara waktu, [tetapi] kemudian cepat pecah. Sekurang-kurangnya di Jawa, SI pernah benar-benar menjadi organisasi massa, tetapi tidak lama. Sedangkan PKI pada waktu itu merupakan partai elite.

T: Mengapa SI berhasil menjadi partai massa, meskipun hanya sebentar?

J: Karena SI mendapatkan akar pada komunitas-komunitas dagang di Jawa Tengah, dan SI juga punya jaringan dengan pedagang-pedagang kecil. Pemerintah kolonial Belanda kadang-kadang bersikap lunak dan sering kali bersikap keras. Maka keberhasilan SI itu tidaklah besar dan juga tidak lama.

T: Tentang Pemberontakan PKI, apa yang terjadi pada tahun 1926?

J: Saya tidak tahu banyak tentang apa yang terjadi pada tahun 1926. Sewaktu tinggal di Indonesia saya tidak mendengar apa-apa tentang peristiwa itu. Saya punya pengertian umum tentang apa yang terjadi pada masa kolonial.

Tetapi, seperti telah saya katakan, pengetahuan itu tidak berdasarkan penelitian khusus yang saya lakukan sendiri. Maka saya tidak bisa bicara banyak tentang masa kolonial.

T: Mungkin kita bisa bertolak dari pengertian umum Pak Cliff itu. Jika Pak Cliff meringkas apa yang Pak Cliff baca tentang masa kolonial dan kemudian memproyeksikannya ke hasil penelitian Pak Cliff pada tahun 1950an, apa komentar Pak Cliff tentang masa kolonial?

J: Itu sangat sulit. Ketika saya datang ke Indonesia pada tahun 1951, pengetahuan saya tentang Indonesia amat sedikit. Saya masuk ke dalam *Indonesian Studies* secara tiba-tiba. Di Belanda saya membaca beberapa buku sejarah, tetapi tidak menemukan hal-hal yang bermanfaat untuk tujuan penelitian saya. Saya tidak berusaha menggunakan bahan-bahan sejarah sebagai latar belakang penelitian. Saya ingin mulai dengan segar dan bebas, tanpa pra-konsepsi apa pun. Itulah salah satu keuntungan yang saya peroleh.

Ketika datang di Pare saya tidak tahu apa pun tentang daerah itu. Baru kemudian setelah mulai memahami apa yang terjadi di sana, saya mulai melihat ke belakang, menelusuri sejarahnya, untuk mencari penjelasan mengapa begitu. Jadi saya tidak mulai dengan Kartini atau peristiwa tahun 1926 atau apa yang terjadi pada jaman Politik Etis. Saya mengawali dengan mengamati „kota“ dan melihat kehidupan beragama di sana. Kemudian mencoba memahami fenomena yang saya amati, misalnya, mengapa terjadi perpecahan, bagaimana asal mulanya. Ringkasnya, saya melihat sejarah secara terbalik. Dari masa kini saya mencoba menelusuri apa yang terjadi sebelumnya.

T: Apakah pada tahun 1950an itu orang, khususnya pegawai negeri, berbicara tentang „Jaman Normal“? Adakah nostalgia tentang jaman itu? Apakah mereka juga berbicara tentang Digul?

J: Tidak. Di antara beberapa orang memang ada yang berbicara tentang Jaman Normal. Tetapi saya tidak melihat adanya nostalgia tentang jaman itu. Mereka juga tidak berbicara tentang Digul.

1

Revolusi Kemerdekaan

*T: Pak Cliff berbicara tentang Paijan dan Permai dalam tulisan „Ritual and Social Change: A Javanese Example” [Bab 6 dalam buku *The Interpretation of Cultures*, selanjutnya disingkat IOC, Ed.]. Pada tahun 1950-an bagaimana orang-orang di tempat tertentu, yang terpilah menurut aliran ideologis dan organisasi tertentu, melihat sejarah?*

J: Waktu itu ada macam-macam sumber pokok sejarah, dan semuanya tentang revolusi. Cerita-cerita tentang revolusi itu mulai berkembang tidak lama sebelum saya datang. Sebenarnya belum bisa disebut “sejarah” karena baru saja terjadi dan terasa sangat nyata. Interpretasi tentang apa yang baru saja terjadi pun kurang lebih masih sama. Perbedaan-perbedaan interpretasi muncul beberapa waktu kemudian. Masjumi dan PNI mulai memiliki penjelasan yang berbeda tentang apa yang terjadi pada masa lampau. Periode itu merupakan masa yang hebat. Orang bicara hal-hal yang besar dan tahu segalanya. Semua orang mengalami secara langsung perubahan-perubahan radikal. Gaya bicara Sukarno pun sangat radikal.

Orang berpikir bahwa mereka bukan saja telah tetapi juga akan mengalami perubahan besar yang terjadi dengan amat cepat. Muncul harapan bahwa anak-anak mereka tidak akan terbelakang. Ketika saya di sana pada tahun 1952-1953, terdapat banyak pendapat, aliran, partai. Periode menjelang Pemilu pertama tahun 1955 diwarnai dengan banyak debat yang sangat tajam. Yang terjadi adalah perpecahan internal di antara mereka sendiri. Pemahaman sejarah benar-benar memandang ke depan, tentang siapa yang akan membuat Indonesia mewujudkan mimpi-mimpi yang berkembang selama masa revolusi. Banyak ketegangan terjadi.

*T: Dalam studi tentang Revolusi Kemerdekaan, George Kahin [Nationalism and Revolution in Indonesia, 1952] memberi penekanan pada pentingnya peranan kaum intelektual seperti Sukarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifuddin, dan lain-lain. Sedangkan Ben Anderson [dalam buku *Revolusi Pemoeda*, 1972, Ed.] menekankan pentingnya peranan pemuda. Beberapa studi tentang revolusi sosial di daerah-daerah pada awal kemerdekaan—yang disunting oleh Audrey Kahin [Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan, 1985]—melihat revolusi kemerdekaan sebagai serangkaian revolusi sosial untuk mengganti*

elite yang sudah menjadi kaki-tangan pemerintahan kolonial selama jaman Belanda maupun jaman Jepang. Bagaimana Anda memahami Revolusi Kemerdekaan Indonesia?

J: Bukan pemuda! Kaum muda memang mulai memegang peranan penting. Tetapi *toh* mereka yang tampil kebanyakan juga dari kalangan intelektual. Saya juga tidak setuju dengan pandangan tentang revolusi sosial. Memang terjadi aksi-aksi atau pergolakan karena perasaan tidak puas, tetapi bukan revolusi sosial. Kalian harus ingat bahwa sebelum Revolusi Kemerdekaan, Jepang menduduki Indonesia selama tiga tahun. Selama waktu itu para intelektual Indonesia tampil ke muka, seperti juga terjadi sebelumnya. Saya tidak melihat bahwa pada waktu itu terjadi transformasi sosial. Saya setuju dengan George [Kahin], bahwa di sana peranan kaum intelektual penting.

T: Jika peranan kaum intelektual memang penting, mengapa mereka harus menunggu sampai tahun 1945? Bukankah kelompok-kelompok intelektual sudah muncul sekitar tahun 1930an?

J: Karena perang yang terjadi pada tahun 1945 menimbulkan kekosongan pemerintahan, dan para intelektual Indonesia mengisinya. Pada masa revolusi PSI [Partai Sosialis Indonesia] masih amat kecil. Tetapi pusat pemikiran politik Indonesia ada di PSI yang [memiliki cabang] di banyak tempat. Sebelum pendudukan Jepang, pemerintah kolonial Belanda mengontrol situasi dengan ketat. Dan setelah Jepang menyerah, aliran-aliran mencoba untuk muncul kembali. Pada periode seperti itu para intelektual memiliki pengaruh yang sangat besar, yang sebelumnya tidak mereka punyai. Sukarno dan Hatta sendiri *kan* termasuk intelektual?!

T: Bagaimana Pak Cliff melihat revolusi sebagai gerakan, jika tidak terjadi pengorganisasian secara massal?

J: Pada masa pendudukan Jepang, baik Sukarno maupun Masjumi mendapat dukungan untuk mengorganisasi massa. Pada waktu itu banyak organisasi massa muncul. Tetapi saya tidak melihat organisasi-organisasi itu sebagai “keturunan” dari macam-macam organisasi yang lahir sebelumnya. Pada masa perang dan sesudahnya organisasi-organisasi tersebut muncul sebagai kekuatan-kekuatan aktual. Apakah kalian berpendapat bahwa revolusi

kemerdekaan itu menampilkan kembali organisasi-organisasi massa yang lahir pada tahun 1920an?

T: Jika selama revolusi itu kaum elit memegang peranan penting, sejauh mana massa rakyat terlibat?

J: Tentu saja massa rakyat terlibat. Di sini saya hanya bereaksi melawan pemahaman bahwa ada revolusi rakyat bawah, dan revolusi itu merupakan kelanjutan dari gerakan rakyat tahun 1920an. Saya pikir, belakangan ini di Amerika pada khususnya, dan juga di Australia, berkembang pemahaman tentang sejarah dan politik Indonesia yang agak monoton dan sederhana. Ada satu versi tentang sejarah Indonesia. Kalian harus mempertanyakan secara kritis apa yang demi mudahnya akan saya sebut “Versi Cornell”. Saya tidak menganggap bahwa pandangan mereka salah. Tetapi jangan menelannya mentah-mentah.

T: Ha... ha... ha! Pada awal tahun 1950an revolusi baru saja terjadi dan, seperti Pak Cliff katakan, revolusi belum menjadi “fakta sejarah”. Di satu pihak semangat revolusi masih hidup dan di lain pihak, pada saat yang sama, orang sudah merasa kecewa dan tidak puas terhadap perkembangan keadaan. Bagaimana pada tahun 1950-an itu orang melihat revolusi?

J: Pada awal masa revolusi saya kira mereka berpikir semata-mata [tentang bagaimana bisa] bebas dari Belanda. Selain itu pada tahun-tahun pertama janji-janji revolusi begitu berlebihan. Terdapat rasa kesatuan. Tetapi ini tidak berlangsung lama. Tujuan untuk “bebas dari Belanda” tidak cukup untuk menggalang kesatuan. Untuk dapat bersatu, tidak cukup dengan hanya berkata “tidak menjadi Belanda”. Revolusi memang perjuangan melawan Belanda. Tetapi segera tampak bahwa rasa anti-kolonialisme saja tidak mencukupi untuk “menjadi Indonesia”. Penduduk Indonesia sangat majemuk. Ini baik, tetapi merupakan masalah.

Ini salah satu alasan mengapa saya menolak penjelasan “gerakan massa”. Indonesia memiliki kemajemukan sosial, ekonomi, budaya, agama, wilayah dan sebagainya. Ketika orang memutuskan mau menjadi Indonesia, muncul masalah kelas, agama dan sebagainya. Jadi apa yang terjadi selama

1

revolusi tidak bisa begitu saja dibingkai dalam kerangka gerakan massa. Tanpa bicara tentang daerah-daerah, kelompok-kelompok, sukubangsa dan sebagainya pada masa tahun 1920an, pada masa saya di sana, dan pada masa kini kalian tidak bisa memahami Indonesia.

Perbedaan dan Perpecahan

T: Menurut Anda, apakah dampak revolusi begitu kuat dan telah mengaburkan perbedaan-perbedaan?

J: Ya. Untuk jangka waktu yang pendek revolusi memang mengaburkan kemajemukan. Tetapi ini hanya terjadi di Jawa, terutama di Jakarta dan Yogya. Saya tidak tahu bagaimana di Luar Jawa. Begitu negara dibentuk, kemajemukan muncul kembali. Hampir semua negara mengalami itu. Di Indonesia masalahnya lebih rumit karena Indonesia merupakan negara kepulauan, di mana terdapat banyak suku bangsa, bahasa, agama dan sebagainya yang masing-masing mempunyai sejarahnya sendiri. Pada masa lalu Indonesia juga didatangi dan diduduki oleh orang-orang dari berbagai bangsa, seperti Belanda, Spanyol, Portugis, Amerika, Cina, [Arab] dan Jepang.

Begitu kompleksnya sehingga cerita sederhana apa pun tentang kebangkitan semangat nasional pada massa rakyat tidak bisa memberi penjelasan yang mencukupi. Tidak ada penjelasan sejarah yang tunggal. Saya bukan ahli sejarah. Saya juga tidak bisa memproduksi sejarah. Saya bisa bercerita tentang apa yang terjadi pada tahun 1950-an, dan sedikit tentang tahun 1960an, 1970-an, dan 1980-an. Cerita saya itu pun mungkin berbeda dari cerita-cerita yang pernah kalian dengar.

T: Kira-kira kapan perpecahan mulai muncul?

J: Segera sesudah mereka menentukan pilihan mengenai bentuk negara, waktu parlemen dibentuk. Atau bahkan perpecahan sudah terjadi selama revolusi. Tan Malaka dan kelompoknya menyerang kepemimpinan Sjahrir. Di tengah masa revolusi Sukarno diculik. Jadi di balik rasa kesatuan yang mungkin tampak dari luar terdapat aneka macam kekuatan yang sudah

bermain dan sulit didamaikan. Perpecahan menjadi semakin tampak pada masa pemerintahan multi-partai. Terjadi beberapa kali pergantian kabinet dan pada tahun 1958 muncul gerakan separatis. Itu semua terjadi begitu saja.

T: Jika yang terjadi pada waktu itu adalah perpecahan yang menegangkan, apa yang menjadi sumber konflik?

J: Bagi orang Kristen, sumbernya antara lain adalah agama. Meskipun itu bukan sumber yang besar. Mereka takut kalau Masjumi akan memperoleh mayoritas suara dalam Pemilu-1955 dan mengambil alih pemerintahan. Pada waktu itu semua orang mengira bahwa Masjumi akan menang.

T: Mengapa?

J: Antara lain karena Masjumi telah menjadi organisasi besar sejak jaman Jepang. Waktu itu PKI [Partai Komunis Indonesia] belum menjadi organisasi besar dan diduga tak akan berkembang menjadi besar. PNI [Partai Nasional Indonesia] diperkirakan tidak akan menjadi partai priyayi yang punya pengaruh dan bisa mendapatkan banyak suara. Sebab pada dasarnya PNI adalah partai kelas. Jadi, hanya Masjumilah yang waktu itu dikira akan meluas ke seluruh kepulauan Indonesia. Masjumi sudah kuat di Jawa. Ternyata Masjumi tidak mendapatkan mayoritas suara dalam Pemilu-1955. Banyak orang heran pada hasil Pemilu. Mereka heran karena besarnya persentase suara yang diperoleh PKI (16%), dan kenyataan bahwa Masjumi hanya mendapatkan 21% suara. Sedangkan PNI memperoleh 22% dan NU mendapatkan 18%. Harapan bahwa Pemilu-1955 akan menghasilkan konsensus ternyata tidak terwujud. Bahkan Pemilu malahan semakin memperdalam perpecahan. Di tingkat lokal tidak ada mayoritas yang mencolok bagi siapa pun.

Ketika orang mulai melihat bahwa PKI itu sebenarnya kuat, muncullah kepanikan. Pada waktu itu pengaruh Perang Dingin yang melibatkan AS, Uni-Soviet, dan Cina juga terasa di Indonesia. Tetapi yang terutama menimbulkan ketegangan adalah perpecahan dari dalam, perbedaan pandangan tentang arah yang hendaknya diambil oleh Indonesia. Setiap kelompok atau aliran berpikir bahwa masing-masing mendapatkan peluang untuk memperoleh

kekuasaan. Sama sekali tidak ada kerjasama antar-organisasi untuk mencapai tujuan bersama

Tahun 1950-an

T: Mengapa saat itu orang memilih partai tertentu dan tidak memilih partai yang lain?

*J: Itu pertanyaan yang bagus. Di Jawa dan Bali pilihan atas suatu partai sejalan dengan pengelompokan dalam masyarakat yang sudah ada sebelumnya. Saya menguraikan itu dalam *The Social History of an Indonesian Town*. Di sana saya mencoba menunjukkan perpecahan yang tampak jelas antara kelompok “modern” dan “kolot”, antara santri dan priyayi, antar-kelas, antar-agama dan sebagainya. Saya tunjukkan pula bahwa dalam hal ini pemilihan yang berlangsung pada tingkat lokal menjadi contoh kasus yang amat bagus. Situasinya amat kompleks.*

Sekurang-kurangnya saya mendiskusikan perpecahan itu di suatu tempat yang konkret, bagaimana orang mengambil keputusan memilih partai. Secara umum pilihan diambil menurut pengelompokan yang sudah ada sebelumnya. Kadang-kadang memang ada yang memilih suatu partai karena memiliki semacam hubungan historis dengan pemimpin-pemimpinnya. Misalnya ada banyak pengikut setia Sukarno yang masuk PNI. Mereka masuk PNI karena Sukarno, bukan karena alasan ideologis. Di Bali pengelompokan yang muncul setelah revolusi dan pada tahun 1965 sama dengan pengelompokan yang terjadi pada tahun 1906 ketika Bali ditaklukkan Belanda. Perpecahan di Bali sudah berlangsung lama, lebih lama daripada yang muncul di Jawa. Saya masih ingat, suatu kali saya bertanya kepada induk-semang saya, mengapa dia menjadi anggota Partai Sosialis. Dia menjawab dengan memberi alasan ideologis sekitar perikemanusiaan. Kemudian saya mengemukakan fakta bahwa semua kerabatnya juga menjadi anggota Partai Sosialis. Di Partai Sosialis tidak ada orang yang bukan kerabatnya. Mendengar perkataan saya itu, dia hanya tersenyum. Ringkasnya, menjadi anggota dari suatu partai merupakan urusan kelompok. Ketika saya kembali lagi ke Bali setelah pembunuhan massal 1965, semua pembunuhan

terungkap sebagai perselisihan antar-kelompok, bukan dalam kelompok. Dan perselisihan itu sudah berlangsung sejak lama.

T: Apakah pada waktu itu negara samasekali tidak berperan dalam mempengaruhi atau memaksa orang untuk memilih salah satu partai?

J: Tidak. Saya kira pada waktu itu tak seorang pun dipaksa masuk ke suatu partai, terutama oleh negara. Sukarno sendiri tidak pernah benar-benar berdiri di belakang PNI. Pada tahun 1950-an negara tidak memaksa orang untuk memilih partai tertentu karena, untuk sebagian, Sukarno tidak menghendaknya. Secara sosial, pada waktu itu kelompok-kelompok yang besar mempunyai ikatan ke dalam yang amat kuat. Muhammadiyah sangat penting sebagai bagian dari Masjumi dan anggotanya sudah lama tinggal di sana. NU memiliki jaringan pesantren yang amat luas, dengan para kyai dan santri-santrinya. Orang tidak dipaksa oleh negara, tetapi oleh tekanan lokal atau tekanan kelompok sebaya. Pada waktu itu negara tidak memiliki identifikasi partai. Setiap orang bisa mengungkapkan pikiran secara terbuka.

T: Bagaimana dengan peranan militer?

J: Mereka memang ada di tingkat lokal, seperti sekarang ini, tetapi tidak mengambil peran politik yang jelas. Polisi berperan penting terutama dalam menjaga keamanan. Politik lokal benar-benar penuh gairah. Pada waktu itu orang Indonesia belajar bagaimana berpolitik dan menjadi politisi. Ada kebebasan pers. Ada multi-partai. Setiap aliran atau sub-aliran memiliki surat kabar. Dan orang-orang di kota membacanya.

Orang-orang yang menduduki jabatan Camat atau Wedana merupakan figur yang sangat populer. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dan mempunyai kontak yang akrab dengan rakyat. Mereka berkunjung ke desa-desa, berbicara dengan kyai, berbicara dengan lawan politik, seperti politisi Amerika berkaliber dunia. Meskipun ada ketegangan dan konflik, untuk beberapa lama politik tingkat lokal sangat hidup. Para pemimpin lokal membangun demokrasi—dalam arti penuh—yang terbuka dan fleksibel. Saya kenal seorang Wedana, seorang warga setempat yang menjadi pengikut setia Sukarno. Dia mengenal setiap penduduk di wilayahnya. Dia benar-benar

mengenai situasi. Rata-rata pemimpin pada waktu itu memang seperti dia. Secara keseluruhan, pada waktu itu dinamika politik lokal di sana lebih tinggi daripada di sini [di Amerika, *Ed.*]. Saya sangat terkesan.

T: Apa cita-cita yang ingin mereka capai dalam berpolitik?

J: Mereka punya pandangan yang berbeda-beda. Secara umum, mereka ingin Indonesia menjadi negara modern seperti negara Barat, mempunyai sistem pendidikan yang lebih baik, ada kesempatan kerja. Tetapi di dalamnya ada macam-macam pandangan. Akhirnya persoalan-persoalan tidak bisa dipecahkan oleh politik lokal. Skalanya menjadi besar, tak bisa diatasi secara lokal lagi.

T: Menurut Anda apakah kebudayaan mempunyai peranan tertentu?

J: He... he... he! Saya baru saja baca komentar Dan [Daniel] Lev dalam wawancara tentang Demokrasi Terpimpin. Omong kosong, katanya, kalau kesalahan atau kelemahan dalam Demokrasi Terpimpin itu terjadi karena pengaruh kebudayaan. [Menurut saya] kebudayaan memang bukan penyebab. Tetapi peristiwa-peristiwa pada tahun 1950an itu terjadi dalam kerangka kebudayaan. Memang benar, seperti dia katakan, itu semua terjadi melulu karena orang memilih dan membuat keputusan tertentu.

Namun ada sesuatu yang khas "Jawa" dalam politik Jawa, khas "Perancis" dalam politik Perancis, dan khas "Amerika" dalam politik Amerika. Pilihan itu bukanlah semata-mata pilihan acak dari orang-orang tertentu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi tak bisa dijelaskan dengan cara seperti itu. Ini tidak berarti bahwa kekuatan sosial-ekonomi tidak menjadi masalah atau tidak berperan. Tetapi semua yang terjadi itu berlangsung dalam suatu kerangka kebudayaan tertentu. Selama ini saya tidak pernah melihat kebudayaan sebagai penyebab apa pun. Tetapi saya tak bisa mengerti bagaimana bisa memahami politik Jawa tanpa memahami kebudayaan Jawa, politik Indonesia tanpa mengerti Indonesia, politik Amerika tanpa memahami Amerika.

Untuk memahami apa yang terjadi, apa saja yang dilakukan orang di sana, dan mengapa mereka melakukan ini atau itu, kalian harus memahami

apa makna yang mereka lakukan itu bagi diri mereka sendiri. Apa kerangka makna yang mereka gunakan. Jika seseorang mengatakan, “Saya tidak suka padanya karena alasan-alasan politik”, kalian harus menemukan penjelasan tentang apa yang menjadi alasan politik tersebut. Kalian tidak bisa mengatakan bahwa dia semata-mata memutuskan untuk tidak suka atau itu semata-mata pandangan pribadinya sendiri. Apalagi di Bali, di mana kelas terpecah menurut struktur sosial. Orang mengelompok menurut hubungan kekerabatan. Pengelompokan itu bukanlah melulu hasil pilihan bebas.

Kalian tidak bisa memahami politik di Indonesia tanpa melihat perbedaan-perbedaan agama, etnik, ras, dan sebagainya. Konflik-konflik sudah ada di sana. Jika kalian hendak memahami suatu peristiwa tertentu, misalnya Pemilu, kalian harus menempatkan peristiwa Pemilu itu dalam kerangka makna yang digunakan oleh para pelakunya untuk mengkonsepsi, melihat dan memahami peristiwa itu. Kalian juga harus melihat bagaimana para pelaku itu memahami diri mereka sendiri. Itulah cara bagaimana saya menggunakan konsep kebudayaan. Kebudayaan bukanlah semacam “*ultimate explanation*” untuk segala sesuatu yang terjadi.

T: Bagaimana Pak Cliff memahami Pemilu tahun 1955, tahun 1957, dan dibatalkannya Pemilu tahun 1959?

J: Saya tidak tahu banyak tentang tahun 1959. Pada tahun 1958 saya memang di Minangkabau, tetapi pada tahun 1959 saya sudah kembali ke Amerika. Tentang tahun 1955 sudah banyak saya ceritakan di muka. Saya kira setelah tahun 1955 itu Orde Lama sebenarnya sudah berakhir. Antara tahun 1955 dan tahun 1965 terjadi banyak peristiwa yang menimbulkan rasa panik, dan ini memuncak pada tahun 1965. Pada tahun 1957 jumlah pemilih PSI di Bali merosot. Secara umum, setelah tahun 1955 orang berpikir bahwa bencana akan terjadi. Pada tahun 1960an ketegangan muncul dalam bentuk rapat umum, kerusuhan, dan sebagainya.

T: Bagaimana kelompok-kelompok besar seperti PNI, Masjumi dan PKI memainkan peranannya dan bagaimana orang di pedesaan memahami atau memecahkan masalah politik yang mereka hadapi?

J: Ada empat kelompok besar di Pare, yaitu PNI, Masjumi, NU dan PKI. Pada mulanya politik di tingkat lokal berjalan dengan baik. Ketika ketegangan memuncak, politik lokal semakin sulit dikendalikan. Hampir setiap orang condong ke partai dan terpolitisir.

T: Bagaimana Pak Cliff menjelaskan kaitan antara politik lokal dan politik nasional?

J: Ketika Pemilu 1955 semakin dekat, semakin banyak pula politisi nasional datang ke Pare, berpidato, dan mengadakan rapat umum. Banyak pemimpin partai yang berkampanye. Sekitar 50 organisasi, yang satu sama lain saling berhubungan —entah erat atau tidak— bergiat aktif dalam politik. Pers sangat bebas. Orang tahu benar apa yang sedang terjadi. Mereka membaca koran. Ketegangan meningkat. Para pemimpin lokal tidak lagi bisa mengontrol situasi. Tidak berarti bahwa mereka tersingkir. Tetapi mereka berada di bawah bayang-bayang pemimpin tingkat nasional. Situasinya “me-nasional”.

T: Bagaimana partai-partai dan organisasi-organisasi itu membiayai kegiatan mereka?

J: Secara nasional saya tidak tahu. Di tingkat lokal, ada orang setempat yang menjadi penyandang dana. Masjumi dibiayai oleh pedagang besar yang punya toko atau bekerja di pasar. NU dibiayai oleh petani kaya, meskipun tidak ada yang benar-benar kaya. Mereka punya tanah luas dan memberi dana pada pondok-pondok pesantren. Yang memberi dana pada PKI, saya tidak tahu. Kebanyakan anggota PKI miskin, tetapi mereka punya serikat buruh. Sedangkan kebanyakan anggota PNI adalah pegawai. Saya tak tahu secara rinci. Tetapi mereka punya sumber dana untuk membiayai jalannya organisasi. Pada waktu itu dana yang diperlukan untuk kegiatan organisasi sebenarnya tak begitu banyak.

T: Pak Cliff berkata bahwa pilihan ke suatu partai sejalan dengan perpecahan yang sebelumnya sudah ada dalam masyarakat. Kami ingin minta penjelasan yang lebih rinci mengenai pengelompokan sosial itu.

J: Saya sudah menjelaskan itu dalam *The Religion of Java* [Geertz, 1960]. Sangat kompleks, tidak bisa disederhanakan begitu saja. Tetapi di Jawa pada

umumnya Masjumi adalah partainya para wiraswasta kecil dan beberapa petani kaya, khususnya yang sudah banyak mendapat pengaruh kota. NU, seperti telah saya katakan, punya basis di pondok pesantren, di jaringan masjid, pengajian dan sebagainya. Pendukung PKI biasanya orang yang bekerja di jawatan kereta api, buruh pabrik gula. Sedangkan PNI terdiri dari para birokrat dan para [penganut] kejawen.

T: Bagaimana Pak Cliff melihat perubahan dari Demokrasi Parlemen ke Demokrasi Terpimpin?

J: Menjelang perubahan itu terjadi, seperti telah saya katakan, setiap orang, termasuk Sukarno, khawatir dan takut bila bangsa terpecah. Sukarno berusaha keras, dengan susah payah dan frustrasi, untuk menstabilkan pemerintahan, mengatasi pertentangan antar-partai, antar-etnik, dan sebagainya. Tetapi setelah Pemilu tahun 1955 usaha itu pada dasarnya tidak efektif lagi. Pilihan yang tersedia baginya adalah membubarkan partai-partai atau melakukan sentralisasi kekuasaan untuk dapat mengontrol partai. Itulah situasi yang membawa ke pilihan Demokrasi Terpimpin. Hal ini dengan mudah dapat dimengerti.

Keputusan memilih Demokrasi Terpimpin tidak diambil karena melihat kenyataan bahwa Pemilu-1955 tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi pilihan tersebut memperjelas perpecahan yang ditimbulkan oleh Pemilu. Ketika kabinet yang stabil tak dapat tercipta, Sukarno mencoba bekerjasama dengan orang yang tak berpartai. Harapannya, konflik antar-partai bisa diredakan. Ternyata tidak bisa jalan juga.

T: Selama tahun 1956-1959 anggota Konstituante hasil Pemilu-1955 mengadakan sidang selama 3 tahun, berusaha merumuskan UUD. Perdebatan selama 3 tahun itu dikenal dengan nama "Debat Konstituante". Menurut Pak Cliff, "By the time of the Constitutional Convention of 1957, the Pantjasila had changed from a language of consensus to a vocabulary of abuse, as each faction used it more to express its irreconcilable opposition to other factions than its underlying rules-of-the-game agreement with them, and the Convention, ideological pluralism, and constitutional democracy collapsed in a single heap" [IOC, h 226]. Tetapi menurut studi Adnan Buyung Nasution, "Debat Konstituante" itu justru menunjukkan kesungguhan untuk menciptakan

1 negara yang berdasarkan hukum. Debat itu juga menunjukkan kesungguhan untuk menghormati hak-hak asasi manusia.

J: Tentu saja ada orang-orang dalam Konstituante —yang berhaluan PSI, Masjumi, PNI, dan lain-lain— yang punya keprihatinan pada hukum dan berusaha untuk kembali ke *civil society* lagi. Tetapi debat itu sendiri malahan mengkristalkan perpecahan yang pada tahun 1955 sudah tampak. Ada berbagai macam pandangan tentang Pancasila yang tak terdamaikan. Ketegangan antara berbagai macam kelompok ideologis, aliran, sudah begitu tinggi dan tak bisa ditawar-tawar lagi. Debat Konstituante merupakan kesempatan terakhir untuk saling berunding, dan ternyata gagal. Betul-betul gagal. Itulah yang saya maksud dengan pernyataan tersebut.

T: Berulang-ulang Pak Cliff menekankan pentingnya tahun 1955. Pak Cliff juga melihat periode akhir dari tahun 1950-an sebagai pra-kondisi peristiwa tahun 1965. Di sini kami melihat adanya paradoks. Pemilu merupakan salah satu manifestasi demokrasi dalam negara modern. Tetapi Pemilu juga menjadi saat-saat di mana orang semakin menyadari adanya perpecahan dalam masyarakat. Bagaimana Pak Cliff menjelaskan hal ini.

J: He... he... he! Kalau saya banyak bicara sekitar 1955, itu karena [periode] itulah yang paling banyak saya ketahui. Persoalannya menjadi lebih umum. Ada paradoks, ada masalah, dan saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lihat saja apa yang baru saja terjadi di Algeria. Sebelum Pemilu mereka tidak pernah benar-benar mengalami malapetaka. Sebelumnya mereka [berada] di bawah pemerintahan otoriter. Ketika mereka mulai melakukan liberalisasi dalam Pemilu, situasinya menjadi tidak dapat diatur lagi.

Pada suatu saat dalam sejarah Pemilu dapat membuat keadaan semakin bertambah buruk. Bukannya saya anti-demokrasi atau anti-Pemilu. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa salah satu hal yang diakibatkan oleh Pemilu adalah munculnya perbedaan-perbedaan. Jika perbedaan-perbedaan itu tak tertampung dalam struktur pemerintahan dan struktur sosial budaya, maka kekacauan akan terjadi. Di Algeria, jika mereka membiarkan pemerintahan sebelumnya tetap berlangsung, yang terjadi mungkin lain. Saya tidak tahu. Pemilu menggoyahkan tatanan, baik dari kiri mau pun kanan.

Itulah mengapa pemerintah Indonesia sekarang melakukan kontrol ketat. Mereka tidak mau terlalu banyak hal terjadi. Ini juga terjadi di Maroko. Sejarah Pemilu di Dunia Ketiga memang demikian. Tentu saja ada beberapa kekecualian. Masalahnya, bagaimana dapat menyelenggarakan Pemilu yang bebas dan sementara itu masih dapat menampung ketegangan luar biasa yang terjadi dalam masyarakat. Inilah yang harus dicari pemecahannya bila mau mengembangkan demokrasi. Pemilu di Amerika pun menimbulkan ketegangan. Tetapi setidaknya-tidaknya sampai sekarang masih ada semacam kerangka untuk menampungnya.

Pemilu bukan sekedar alat politik dalam arti sempit untuk memilih siapa yang akan memegang pemerintahan. Pemilu juga dapat menjelaskan tentang apa yang sedang dan mungkin terjadi. Di Indonesia Pemilu-1955 merupakan Pemilu yang pertama, Pemilu nasional yang bebas, dengan partai yang bebas dan orang-orang yang bebas untuk mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Sukarno selalu menunjuk liberalisme dan demokrasi konstitusional sebagai ancaman terhadap sistem pemerintahan yang baru. Demikian pula Soeharto, meskipun untuk sebagian menggunakan alasan filosofis.

Pembunuhan Massal 1965

3
T: Ketika menyadari semakin dalamnya perpecahan akibat Pemilu, bagaimana orang di tingkat lokal melihat perbedaan-perbedaan dan mengatasi akibatnya?

J: Segera sesudah Pemilu selesai, banyak orang merasa takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Pemilu tidak menghasilkan stabilitas sebagaimana diharapkan oleh setiap orang. Orang kemudian berpikir tentang siapa yang nantinya akan berkuasa. Apakah tentara? PKI? Kelompok Islam? Dan sebagainya. Waktu itu kekuatan mereka masih kurang lebih seimbang. Perselisihan antara kekuatan-kekuatan yang ada semakin tajam sampai menjelang tahun 1965. Rasa takut, marah, benci terungkap di mana-mana.

T: Jadi ketakutan yang muncul waktu itu bukan karena kuatir kalau PKI menjadi mayoritas tetapi karena perpecahan yang memang sudah ada dalam masyarakat?

J: Bagi sejumlah orang, terutama bagi santri atau orang Masjumi, ketakutannya memang kemudian menjadi ketakutan terhadap PKI. Tetapi pada mulanya tidak demikian. Ketakutan pada PKI muncul kemudian. Pada awal tahun 1960an PKI berkembang sangat pesat, terutama di Jawa. Jika ada Pemilu lagi, banyak orang khawatir bahwa PKI akan menang. Bahkan Sukarno pun takut pada PKI, karena tidak bisa mengendalikannya lagi. Demokrasi Terpimpin merupakan salah satu cara untuk mengontrol PKI.

T: Akhirnya pembunuhan massal terjadi pada tahun 1965. Bagaimana Pak Cliff memahami apa yang terjadi pada tahun 1965?

J: Saya kira kalian dapat mengambil 1965 sebagai ledakan dari konflik dan ketegangan. Tetapi sekurang-kurangnya sejak dua tahun sebelumnya, seperti yang saya dengar dari banyak orang, sudah terjadi banyak teror di tingkat lokal. Sudah terjadi banyak kekerasan, poster-poster, serangan antar-kelompok. Ketika Gerakan 30 September terjadi situasi tegang sudah siap meledak. Jadi tahun 1965 menjadi klimaks.

T: Menurut Pak Cliff, ledakan itu terjadi semata-mata akibat ketakutan yang sudah ada di antara macam-macam kelompok, atau di antara elite, atau kombinasi antara keduanya?

J: Saya kira akibat ketakutan yang mencekam massa rakyat. Di Jawa Timur, ketakutan sudah tersebar luas dalam masyarakat. Tentu saja ada ketakutan di kalangan elite juga. Hampir setiap orang terlibat. Banyak kerusuhan. Di desa terjadi *popular killing*.

T: Dalam pembunuhan massal, menurut Pak Cliff, apakah yang terjadi pada waktu itu perkelahian antara dua kelompok yang kekuatannya seimbang, atautkah untuk sementara PKI mungkin berusaha melawan dan kemudian mereka menjadi korban?

J: Suasana pada waktu itu penuh ketakutan dan panik. Hampir di setiap tempat orang tidak tahu siapa yang akan menang. Meskipun akhirnya di mana-mana yang menang selalu pihak tentara. Pada waktu itu ada banyak orang dalam organisasi-organisasi aliran yang condong ke PKI. [Tapi] tidak berarti bahwa mereka itu komunis.

Dalam pembunuhan massal tidak jelas siapa saja yang terlibat. Tahu-tahu orang saling membunuh. Itulah yang terjadi. Jika kalian mengamati masing-masing kejadian itu, sangat sulit untuk melihat bahwa mereka itu dikoordinir. Tentu saja mereka dihasut.

T: Di Jawa Tengah pembunuhan massal terjadi pada minggu ketiga bulan Oktober 1965, tiga minggu kemudian baru meluas ke Jawa Timur, dan bulan Desember baru terjadi di Bali. Pembunuhan besar-besaran hanya terjadi setelah kehadiran RPKAD di tempat-tempat itu.

J: Yang terjadi di Pare orang saling bunuh-bunuhan. Sangat mengerikan. Selama beberapa waktu tentara membiarkan. Baru kemudian mereka menghentikannya. Tetapi sejauh mana peranan tentara itu, saya tidak tahu.

T: Mengapa pembunuhan yang terjadi di Jawa Barat tidak meluas?

J: Mungkin karena perpecahan di sana tidak begitu tajam. Tetapi saya tidak tahu persis bagaimana keadaannya.

T: Bagaimana orang memilih sasaran pembantaian dan pembenaran apa yang mereka gunakan untuk menjelaskan tindakan mereka sebagai sesuatu yang dapat terjadi pada waktu itu?

J: Mereka memilih berdasarkan perbedaan latar belakang yang memang sudah ada. Ini tidak hanya terjadi dalam semalam. Di Pare perpecahan tajam sudah berkembang sekurang-kurangnya lima atau enam tahun [sebelumnya]. Maka masing-masing pihak sudah tahu musuh mereka. Pembenaran utama yang mereka gunakan, seperti dikatakan kepada saya, “Jika saya tak membunuhnya maka dialah yang akan membunuh saya”. Situasinya sangat kacau. Saya berbicara dengan banyak orang di sana. Kata mereka, pada waktu itu emosi orang sudah begitu tinggi dan mereka kalut. Seorang eks-Masjumi bercerita bahwa beberapa orang malahan membunuh teman sendiri. Jadi kebencian memang sudah ada di sana setelah revolusi, dan memuncak setelah tahun 1955.

T: Bolehkah kami minta penjelasan lagi mengenai bagaimana para pemimpin atau organisasi-organisasi di Indonesia berusaha mengatasi perpecahan yang dirasakan jelas sejak tahun 1955? Jika perpecahan itu bukan karena kegagalan

mereka, di mana letak akar masalahnya? Selanjutnya, apa yang dapat kami pelajari dari periode itu?

J: Yang bisa dipelajari, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang majemuk. Usaha apa pun untuk mengurungnya ke kerangka apa pun yang ketat—entah ideologi tinggi seperti dilakukan Soeharto, atau nasionalisme seperti dilakukan oleh Sukarno, atau Partai Komunis, atau Negara Islam atau lainnya—akan membawa ke bencana. Karena Indonesia terdiri dari begitu banyak macam orang.

Yang mungkin didapat dari pengalaman Orde Lama dan juga Orde Baru, kalian dapat mempersatukan Indonesia dengan cara seperti yang digunakan Jepang. Macam-macam orang harus diterima, diakui dan dihargai. Yang harus dihargai bukan hanya perbedaan etnik, tetapi juga perbedaan kelas dan sejarah. Saya tidak mau berkotbah. Karena semuanya merupakan usaha. Demokrasi merupakan usaha, Pancasila merupakan usaha. Tetapi satu hal yang harus tidak dilakukan atau dikurangi [menjadi] sesedikit mungkin adalah usaha menyeragamkan. Setiap daerah punya kekhasannya sendiri-sendiri.

Tahun 1950-an merupakan masa yang menjanjikan. Ada kreativitas di sana. Saya telah bicara tentang perkembangan politik lokal yang sangat mengesankan, perkembangan budaya yang luar biasa, dan daya hidup Indonesia pada tahun 1950-an dan 1960-an. Dan semua itu masih ada di sana sekarang, walau pun muncul dalam bentuk lain. Misalnya, bagaimana kelompok-kelompok seni di sekolah menampilkan semacam „politik kuasa”. Jadi masih banyak vitalitas dan kemampuan yang ada di sana.

1

Nasionalisme Radikal

T: Kami masih ingin bertanya sekitar periode 1950-an. Ada loncatan pertambahan jumlah suara yang diperoleh PKI dalam Pemilu. Di Jawa persentase suara PKI dalam Pemilu-1957 naik 37% lebih tinggi dari yang didapat dalam Pemilu-1955. Apakah kenaikan persentase ini masih dapat dijelaskan dengan mengacu pada perpecahan antar-aliran? Selanjutnya, pada tgl 5 Juli 1959 Konstituante dibubarkan dan rencana Pemilu-1959 dibatalkan.

Jika Pemilu-1959 diadakan dan Konstituante tidak dibubarkan, apakah Peristiwa 1965 akan tetap terjadi juga?

J: Oh, saya tidak tahu, saya tidak dapat mengatakannya. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalian akan dapat menjawab pengandaian seperti itu. Saya kira banyak hal perlu diperhitungkan untuk dapat mencegah terjadinya Peristiwa '65. Kesalahan yang dilakukan PKI pada tahun 1957-58 dan seterusnya tidaklah spektakuler. Dan konsep tentang "aliran" tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa apa pun. Konsep itu semata-mata merupakan usaha untuk menggolongkan kekuatan-kekuatan aktual yang hidup dan bermain dalam masyarakat.

Yang muncul setelah Pemilu 1955 di Jawa adalah semacam nasionalisme radikal yang romantis. Para nasionalis radikal itu mengaitkan diri dengan Sukarno. Mereka membentuk kekuatan lokal untuk mendapatkan kekuasaan. Orang-orang yang sebelumnya memilih PNI waktu itu beralih ke PKI. Dengan perkataan lain, PNI "kiri" berpindah ke PKI. Mereka lebih sebagai nasionalis radikal daripada sebagai komunis. Nasionalisme radikal menjadi sumber gairah politik yang sudah meluas ke mana-mana.

Pertumbuhan nasionalisme radikal itu dipersubur oleh runtuhnya ekonomi, situasi Perang Dingin yang semakin menekan, perjuangan merebut Irian, ketegangan dengan Amerika dan sebagainya. Jadi untuk memahami Peristiwa '65 harus mengetahui situasi yang mendahuluinya. Sebab suatu reaksi massa yang luar biasa telah terjadi. Reaksi massa itu tidak hanya terjadi selama September-Desember 1965 dan Januari 1966, tetapi telah mulai sekurang-kurangnya dua atau tiga tahun sebelumnya. Ada Aksi Sepihak, ada kerusuhan, perpecahan dan radikalisasi dalam PNI. Posisi Sukarno pun semakin tidak pasti. Semuanya bercampur-baur.

Saya kira kalian harus melihatnya lebih dalam kerangka tumbuhnya nasionalisme radikal itu daripada mencari akar penyebabnya pada PKI. Kalau banyak orang kemudian condong ke PKI, maka yang berkembang bukanlah Marxisme ilmiah, tetapi Marxisme romantis. Jadi sistem aliran sudah berada dan berakar di sana. Itulah yang telah saya coba untuk melukiskannya. Ada

aliran-aliran. Bahwa aliran-aliran itu berubah, itu memang benar. Bahkan berubah dengan amat cepat.

T: Lalu bagaimana kekacauan itu masih dapat dijelaskan dengan mengacu pada latar belakang struktur sosial yang sudah terbentuk lama sebelumnya?

J: Pada waktu itu organisasi-organisasi massa sudah mengambil peran. Misalnya, peran SOBSI [Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia] amat penting. Banyak organisasi baru muncul, dan peranan surat kabar juga penting. Meskipun demikian saya tidak melihat perubahan struktural yang luas, yang penting. Memang ada perubahan. Tetapi kebanyakan hanyalah perubahan perimbangan kekuatan antara kelompok-kelompok yang bertikai. Perubahan terjadi, tetapi pola umum tidak berubah banyak. Masjumi sudah pudar, meskipun masih kuat di luar Jawa.

T: PKI memperoleh penambahan jumlah suara. Pertanyaannya, mengapa pada waktu itu orang memilih PKI? Ini masih berkaitan dengan pertanyaan mengapa orang memilih partai.

J: Banyak orang memilih PKI. Tetapi sebenarnya orang tidak ingin mengarah ke sana. Waktu itu PNI sangat lemah dan terpecah. Sukarno tidak pernah jelas posisinya, apakah dia mendukung PNI atau tidak. Kecondongan ke PKI itu merupakan cerminan sayap kiri nasionalisme Indonesia. Saya kira tidak terlalu sulit untuk memahaminya. Kemiskinan di Jawa Tengah dan Jawa Timur amat parah.

Pada tahun 1957 saya tiba di Jakarta dari Padang, waktu itu saya datang dari Pantai Barat. Ketika mau berangkat ke Bali saya tidak mendapatkan tempat duduk di pesawat karena pesawatnya digunakan untuk mengangkut lembaran-lembaran uang rupiah. Ini salah satu pertanda bahwa situasinya memang sudah buruk. Untuk pertama kalinya banyak petani tampil ke muka, walaupun belum begitu termobilisasi. Pada waktu itu mungkin mereka sudah bergabung ke PKI. Namun demikian mereka bergabung ke PKI bukan karena pilihan bebas. Ada kekuatan yang menekan orang-orang di pedesaan. Tidak berarti bahwa mereka tidak memiliki pilihan apa pun. Tetapi mereka tidak membuat pertimbangan untuk menentukan pilihan yang rasional.

Sangat sulit melukiskan kembali kepahitan yang terjadi setelah tahun 1956 sampai awal tahun 1960-an. Di Bali PSI, yang sebelumnya amat populer, ditinggalkan oleh para pendukungnya dan tidak punya kekuatan lagi. Sebaliknya, nasionalis radikal, yaitu PNI “kiri”, semakin mendapat banyak pengikut. PKI dan organisasi-organisasi yang bukan partai juga menarik banyak massa. Kelompok-kelompok itu semuanya muncul dari aliran yang kemudian berkembang cepat.

Awal Orde Baru

T: Setelah pembunuhan massal 1965 masyarakat Indonesia sangat ketakutan untuk berpolitik. Ketakutan dilembagakan dengan screening bersih lingkungan, bersih diri, litsus alias penelitian khusus, wajib lapor untuk bekas tapol, kartu penduduk yang dicap ET, dan sebagainya. Sekitar satu juta orang menjadi tahanan politik selama belasan tahun. Untuk masyarakat dilaksanakan politik “Massa Mengambang”. Dwi Fungsi ABRI menjadi sangat dominan dalam bidang politik. Kegiatan politik hanya terjadi di lapisan sangat elite. Misalnya dalam Peristiwa 15 Januari pada tahun 1974 dan aksi-aksi mahasiswa pada tahun 1974 dan 1978. Aksi-aksi itu pun dihentikan dengan politik NKK/BKK sejak tahun 1978.

Tampak ada kemiripan antara masa sesudah Revolusi 1945 dan masa sesudah tahun 1965. Pada kedua masa itu ada “sesuatu” yang dapat mengaburkan perbedaan-perbedaan. Setelah Revolusi ‘45, “sesuatu” itu adalah “harapan”, sedangkan setelah tahun 1965 “ketakutan”.

J: Yang muncul setelah tahun 1965 tidak hanya ketakutan tetapi juga harapan. Terutama di kalangan elit di Jakarta dan di kota-kota besar lainnya ada harapan untuk dapat memperoleh kehidupan ekonomi yang lebih baik.

T: Apakah ada kesamaan harapan antara sesudah Revolusi ‘45 dan sesudah tahun 1965?

J: Pada fase-fase pertama sesudah tahun 1965 situasi ekonomi setidaknya dapat terkontrol. Nilai rupiah mulai stabil. Hal ini membuat orang merasa bahwa pemerintahan telah dijalankan dengan benar. Stabilisasi ekonomi mendapat pengutamaan dan sistem politik yang berjalan mendukung terciptanya perkembangan ekonomi. Tingkat kemiskinan

menurun. Ada cerita sukses di sana. Jadi tidak benar kalau dikatakan bahwa rejim tidak mendapat dukungan rakyat. Pada waktu itu tingkat korupsi juga lebih rendah daripada sebelumnya, walaupun kemudian naik lagi. Kekerasan telah berlalu. Situasi menjadi lebih tenang. Jadi dalam hal ini, seperti setelah Revolusi '45, ada harapan bahwa situasi akan menjadi lebih baik.

T: Pemerintah Orde Baru telah berperan dalam melembagakan baik harapan baru maupun ketakutan akan screening bersih lingkungan, litsus, tapol, dan bertambahnya peranan tentara. Bagaimana menurut pendapat Anda?

J: Setelah beberapa lama mungkin muncul ketidakpuasan yang semakin besar dan meluas. Ini normal. Sebab korupsi semakin merajalela, pemerintah semakin otoriter, campur tangan militer dalam politik dan ekonomi semakin besar, ada masalah tapol [tahanan politik, *Ed.*] di Buru dan sebagainya. Ini semua menjadi semakin muncul ke permukaan.

Tetapi sejauh mana ketidakpuasan itu benar-benar telah meluas di Jawa, saya tidak tahu... Saya tidak merasa bahwa orang-orang di Jawa, khususnya rakyat kebanyakan —bukan intelektual— peduli dengan itu semua. Mereka tidak tahu banyak tentang apa yang sedang terjadi. Saya kira kalian lebih tahu tentang hal ini daripada saya.

Pada tahun 1986 saya kembali ke Pare. Waktu itu saya tidak mendengar apa pun tentang Timor Timur [Timor Leste, *Ed.*] dan tapol. Orang tidak bicara lagi tentang pembunuhan massal 1965. Dan saya juga tidak merasakan adanya perasaan tidak puas yang meluas. Dari segi ekonomi Pare benar-benar telah banyak berubah. Kehidupan ekonominya lebih dinamis. Orang tidak begitu berpikir tentang politik. Mereka berpikir tentang masalah jual-beli di pasar, dagang kecil-kecilan dan sebagainya. Meskipun masih banyak hal-hal politik yang dibicarakan, saya tidak merasakan adanya ketidakpuasan yang benar-benar mengganggu.

T: Apakah Pak Cliff tidak merasa aneh bahwa dalam waktu singkat orang tiba-tiba lupa akan pembunuhan massal?

J: Mereka sama sekali tidak lupa! Persoalannya, pembunuhan massal 1965 membuat mereka tidak menyukai politik terbuka. Mereka tidak ingin berpolitik lagi. Mereka tidak menginginkan segala sesuatu yang dapat

menimbulkan kekacauan dan kekerasan. Reaksi kebanyakan orang terhadap pembunuhan massal 1965 menjadi sangat berlebihan. Kegiatan-kegiatan politik dan partai dilihat sebagai pembawa kehancuran. Jadi seperti mereka katakan, “Di masa lalu kami telah mengalami semua emosi kampanye yang meledak-ledak, unjuk rasa dan pemogokan, kebangkitan komunis dan sebagainya yang akhirnya bermuara pada pembunuhan massal 1965. Kami tidak menginginkan itu lagi”. Baik Sukarno maupun Soeharto melihat partai-partai politik, debat politik terbuka, dan konflik-konflik sebagai pembawa malapetaka.

1

Upaya Penyeragaman

1

T: Sejak tahun 1996 mulai banyak terjadi aksi-aksi berbaur SARA. Bulan Oktober 1996 terjadi Peristiwa Situbondo, bulan Desember Peristiwa Tasikmalaya. Pada bulan Januari 1997 terjadi bentrokan besar antara Suku Dayak dan Madura di Kalimantan Barat, bulan Februari terjadi Peristiwa Rengasdengklok. Jika Pak Cliff membaca berita-berita internet, Pak Cliff akan mengamati wacana (discourse) tentang serangan kepada pihak etnis lain dan agama lain. Apakah Pak Cliff melihat munculnya wacana seperti itu pada tahun 1950-an?

J: Pada tahun 1950-an memang ada kelompok Islam yang melakukan serangan semacam itu. Ada banyak ungkapan anti-Cina yang amat kuat. Mengenai wacana anti-Kristen/Katolik pada waktu itu, saya tidak ingat lagi. Seperti saya katakan, orang Kristen/Katolik kuatir akan dominasi Masjumi. Tetapi seingat saya tidak ada konflik yang benar-benar buruk antara orang Kristen/Katolik di satu pihak dan orang Islam di lain pihak, seperti yang terjadi [tahun 1996] di Situbondo dan Tasikmalaya. Tentang yang terjadi di Situbondo dan Tasikmalaya sendiri saya tidak tahu secara rinci. Sejauh saya ingat, sebelumnya belum pernah terjadi konflik antar-umat beragama yang berskala nasional seperti itu. Sedangkan perpecahan yang terjadi pada tahun 1950an lebih karena respons pada kondisi-kondisi lokal.

T: Jika dibandingkan antara situasi tahun 1950-an dan pertengahan 1990-an ada perbedaan tentang bagaimana orang menafsirkan apa yang terjadi di sekitar mereka. Pada pertengahan 1990an meskipun peristiwanya terjadi

di Situbondo atau Tasikmalaya, orang menafsirkan adanya campur tangan dari pemerintah. Ada sesuatu yang datang dari pusat, dan peristiwa-peristiwa itu lebih merupakan bagian dari politik nasional daripada respons terhadap dinamika lokal.

J: Tentang itu saya tidak tahu banyak dari tangan pertama. Ketika saya datang lagi ke Pare pada tahun 1986 itu, hal demikian tidak tampak. Sebab waktu itu memang tidak terjadi kerusuhan. Memang posisi-posisi penting dalam pemerintahan lokal telah ditempati oleh militer. Masyarakat mengeluh soal korupsi dan pengelolaan jalur beras di Bulog. Dan di situ bisa dilihat tangan-tangan militer dan pemerintah pusat. Tetapi pada waktu itu di Pare tidak ada ekspresi politik yang terang-terangan, walaupun mungkin banyak ketidakpuasan. Tidak ada oposisi politik. Polisi yang ada di Pare pun masih polisi lokal.

¹ *Salah satu hal yang kami lihat dalam tulisan Pak Cliff yang berjudul “Popular art and the Javanese tradition” (Indonesia, No. 50, Th. 1990) adalah cara yang ditempuh negara untuk dapat benar-benar memainkan peranan penting pada tingkat lokal. Kami melihat bagaimana negara mendominasi macam-macam acara di tingkat lokal.*

J: Saya tidak menolak pendapat itu. Tetapi dalam tulisan itu saya juga menunjukkan bahwa dominasi negara tidaklah tanpa perlawanan. Unsur-unsur tradisional ada dalam acara kesenian, pengajian, pidato, kotbah, perpisahan di sekolah dan sebagainya. Di sana terdapat pula ungkapan perlawanan. Saya mencoba memberi beberapa contoh bagaimana politik lokal tampil dalam bentuk seni. Itu muncul dalam acara perpisahan di SMA, acara pemerintah dengan wejangan Pancasila, dan sebagainya. Saya tidak menyangkal bahwa kehadiran pemerintah sangat sentral. Tetapi saya mencoba menunjukkan bahwa dalam lingkungan yang tampaknya secara politik amat homogen, dalam kenyataannya tidak demikian. Bahwa pemerintah dan militer menghendaki Jawa dan Indonesia homogen, itu masalah lain. Tetapi apakah itu tercapai? Saya tidak yakin.

Di Pare saya merasakan adanya perlawanan dan kemerdekaan yang ingin diungkapkan. Saya mencoba menyingkap makna politik lokal NU yang disampaikan lewat kotbah, pidato, pengajian, pondok. Di sekolah juga

muncul budaya kaum muda, seperti yang ditampilkan dalam kaset, radio, televisi dan sebagainya. Sekali lagi, kehadiran negara yang dikuasai militer memang kelihatan jelas. Hal ini tampak dalam spanduk-spanduk penuh slogan yang dipasang di sepanjang jalan, penentuan hari libur umum, serta kontrol nasional. Tetapi salah satu bagian dari tulisan itu ingin mengatakan bahwa apa pun yang dikehendaki negara agar dilaksanakan, dan sejauh mana itu telah dapat dilaksanakan, masih mengundang perlawanan. Dan perlawanan itu masih akan terjadi di masa yang akan datang.

T: Bagaimana Pak Cliff menafsirkan perlawanan tersebut? Apakah itu melawan birokrasi, atau kebijakan politik, atau hegemoni negara?

J: Untuk sebagian memang perlawanan terhadap hegemoni. Tetapi perlawanan itu lebih mengacu pada masih hidupnya keyakinan akan nilai-nilai yang mereka miliki sebelumnya. Jadi apakah itu nilai-nilai yang diyakini NU, eks-Masjumi, Muhammadiyah, priyayi, dan sebagainya? Masing-masing dari mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana keindonesiaan hendaknya diwujudkan. Di sini muncul kembali persoalan bahwa masyarakat Indonesia itu majemuk. Pemerintah pusat tetap tidak berhasil dalam melaksanakan homogenisasi. Dan situasi yang homogen memang tidak akan terjadi.

T: Menurut Pak Cliff apakah gerakan LSM [Lembaga Swadaya Masyarakat] selama ini merupakan bagian dari perlawanan semacam itu?

J: Sejauh menyangkut Indonesia, saya tidak tahu. Saya kira LSM merupakan bagian dari gerakan yang jauh lebih besar, akibat perubahan politik dunia pada akhir abad-20 dan awal abad-21. Meskipun kemunculan LSM itu merupakan gejala yang penting untuk dicermati, tetapi itu bukan satu-satunya. Banyak hal lain yang terjadi. Misalnya, konflik nasional dan pertikaian antar-etnik yang timbul sebagai bagian dari paradoks ketegangan globalisasi. Ini terjadi di Kanada, Yugoslavia, Srilanka, dan sebagainya.

Saya mempunyai rencana untuk menulis apa yang terjadi di Jerman dan Austria. Tahun depan saya akan ke Jerman. Saya akan berusaha mengamati apa yang sedang terjadi pada negara, kebudayaan, dan nasionalisme di dunia sekarang.

T: Menurut Pak Cliff apakah LSM itu menjadi gerakan berbasis massa?

J: Beberapa LSM memang tampaknya begitu. Saya tidak tahu.

T: Keputusan pemerintah untuk membredel majalah Tempo, Editor, dan Detik pada tahun 1994 dilawan dengan aksi-aksi jalanan. Bagaimana Pak Cliff menafsirkan perlawanan terhadap pembredelan dan penekanan beberapa media massa waktu itu?

J: Tentu saja saya tidak tahu apa yang terjadi ketika Tempo dibredel. Saya tidak tahu bagaimana reaksi massa pada waktu itu. Saya yakin bahwa di Jakarta dan di beberapa kota seperti Yogya dan Solo reaksinya amat keras. Tetapi saya tidak tahu.

T: Apakah pada tahun 1950an pemerintah, baik pusat maupun daerah, banyak bercampur tangan dalam media massa?

J: Ya, tetapi tidak banyak. Ada serangan-serangan kepada pers pada tahun 1950-an. Abadi dilarang oleh Sukarno, saya kira. Beberapa surat kabar PSI setidak-tidaknya di bawah tekanan. Tetapi sejauh saya ingat semuanya itu tidak dilakukan secara sistematis. Larangan biasanya hanya berlaku sementara, 2-3 bulan.

T: Usaha "nation building" dan proyek kebudayaan nasional banyak didominasi oleh kebudayaan Jawa. Bagaimanakah dampak kebudayaan Jawa pada politik Indonesia?

J: Bahwa sekarang ini orang Jawa berperan besar dalam masyarakat nasional Indonesia, itu karena faktor latar belakang sejarah. Sejak jamannya J. P. Coen sampai sekarang segalanya terpusat di sana. Pemerintahan kolonial didirikan di sana. Nasionalisme untuk sebagian besar muncul di Jawa, meskipun muncul juga di Sumatra Barat dan tempat-tempat lain. Proporsi jumlah penduduk Jawa yang lebih besar dari proporsi di pulau-pulau lain juga mempunyai sejarahnya yang panjang. Jadi ini bukan hasil dari konspirasi dari beberapa orang. Oleh sebab itu persoalannya adalah apa yang perlu dilakukan berkenaan dengan hal ini.

Sekarang ini tersebar pendapat bahwa Soeharto akan men-Jawa-kan seluruh bangsa. Kekhawatiran akan dominasi orang Jawa di Indonesia

semakin bertambah. Selain itu masalah internal juga memunculkan tuduhan akan adanya kebijakan neo-kolonial “*devide et impera*”. Perpecahan terasa sangat nyata, jauh lebih besar daripada sebelumnya. Terjadi semakin banyak ketegangan karena Indonesia lebih terpilah-pilah daripada sebelumnya. Pada periode awal kemerdekaan, ketika saya di sana, tidak banyak hal yang terjadi di luar Jawa—terutama dibagian timur Indonesia. Sekarang banyak peristiwa terjadi di sana.

Namun demikian sekarang ini orang membicarakan masalah „Jawanisasi“ secara lebih terbuka. Terjadi banyak diskusi tentang hal itu. Ini dapat menjadi gejala yang sehat, tergantung bagaimana menangannya.

Federalisme

T: Bagaimana orang pada tahun 1950-an memahami nasionalisme?

J: Mereka semua sangat antusias. Pemerintahan federal—Republik Indonesia Serikat—bentukan Belanda dibubarkan. Mereka melihat RIS sebagai usaha Belanda untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Saya tidak tahu, apakah bentuk negara federal sebenarnya merupakan pola yang lebih baik untuk Indonesia. Tetapi orang pada waktu itu baru saja lepas dari penjajahan Belanda, sehingga yang berkembang adalah nasionalisme radikal. Tidak ada kemungkinan sedikit pun untuk mendiskusikan sistem federal sebagai bentuk negara karena sistem itu telah digunakan oleh Belanda. Jadi reaksi terhadap Belanda pada waktu itu tidak memungkinkan orang untuk memilih bentuk federal. Saya tidak tahu sekarang!

T: Apakah sistem federal merupakan bentuk yang paling tepat untuk Indonesia?

J: Saya tidak mengatakan itu. Saya tidak tahu apakah itu yang paling tepat. Saya bukan filsuf. Yang saya katakan, bentuk federal itu tidak mungkin diperdebatkan pada waktu itu. Kalian tidak bisa menjadi sekaligus seorang federalis dan nasionalis pada saat yang bersamaan. Tidak ada yang membela sistem federal. Semua bercita-cita membentuk sistem kesatuan republik. Saya sebenarnya tidak menemukan sesuatu yang salah pada sistem federal. Mungkin Indonesia dapat mempertimbangkan itu lagi. Hanya saja pada

tahun 1950an sistem federal ini tidak mungkin didiskusikan. Sebab bergabung dengan Republik merupakan satu-satunya cara untuk menjadi patriotik. Mungkin saja sekarang ini orang bisa berbicara secara lebih terbuka tentang kemungkinan sistem federal di Indonesia.

Awais Buaya!

T: Dalam tulisan berjudul *"The politics of meaning"*, bab 11 buku *The Interpretation of Cultures (IOC)*, tentang Pembunuhan '65 Pak Cliff menulis, *"The crocodile is quick to sink, they say, 'but slow to come up.'"* (hlm 324). Walaupun airnya kelihatan tenang tetapi ada buayanya. Dan Pak Cliff juga mengatakan *"As the consequences of the last decade appear in the next..."*. (hlm 326). Akibat pembunuhan massal '65 ini mungkin akan muncul kembali di kemudian hari. Sementara itu, *"we can only wait for the crocodile..."*. (hlm 326). Apa yang Pak Cliff maksud dengan "buaya" pada tahun 1965 dan apa yang Pak Cliff maksud dengan "buaya" sekarang ini?

J: Itu usaha saya untuk melukiskan adanya banyak hal yang sedang terjadi. Lebih banyak daripada yang kalian pikirkan. Banyak persoalan politik yang masih ada di sana dan belum terpecahkan. Pemerintah pusat masih harus menekan sesuatu yang tidak bisa terus-menerus ditekan. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam suksesi. „Buaya“ masih di sana, mencoba memberi makna pada perasaan orang. Seperti telah saya katakan, di sana terdapat kemajemukan, perpecahan dan ketegangan. Tidak peduli pada usaha apa pun yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk menyelubunginya. Saya pikir sangat aneh kalau ilmuwan politik Barat melihat Orde Baru sebagai hasil konstruksi internal yang terpisah dari Orde Lama, sehingga ada pemilahan yang tajam antara keduanya. Memang ada perbedaan antara Orde Baru dan Orde Lama, tetapi ada lebih banyak kesinambungan.

T: Dapatkah Pak Cliff menyebutkan unsur-unsur yang menunjukkan kesinambungan itu?

J: Saya kira Soeharto telah melanjutkan apa yang sebenarnya diinginkan Sukarno. Sukarno menginginkan rejim seperti [yang diciptakan oleh Soeharto]. Dia ingin agar partai-partai tidak berperan. Dia ingin kesatuan

seperti [jaman Orde Baru]. Dia menginginkan bentuk pemerintahan Jawa. Saya tidak melihat adanya perbedaan yang benar-benar mencolok antara keduanya. Proyek-proyek yang dilakukan pemerintahan Soeharto tidak menandai keterpisahan antara Orla dan Orba. Tidak ada konstruksi ideologis internal yang khas ciptaan pemerintah Orde Baru.

Memang pemerintahan Orde Baru lebih birokratis. Jadi ada perbedaan. Tetapi pada hakikatnya tidak terjadi pemisahan pada titik tertentu. Jika kalian melihat sejarah, sesuatu berubah lebih cepat atau lebih lambat daripada yang lain. Saya menemukan adanya beberapa kemiripan antara Pare tahun 1980-an dan Pare pada tahun 1950an. Tidak berarti bahwa tidak ada perubahan di sana. Saya kira kalian harus mulai tidak saja dengan mengkritik ideologi Orde Baru melulu, yang relatif lebih mudah dilakukan, tetapi juga berusaha mendiskusikan beberapa alternatifnya. Kalian harus terbuka pada alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan.

T: Apakah juga masih ada kemiripan antara periode Orde Baru dan periode pemerintah kolonial Belanda?

J: Saya tidak tahu secara persis. Tentu saja ada kemiripan. Birokratisasi sudah ada sebelumnya. Tetapi tidak mudah untuk menafsirkannya sebagai semata-mata regresi dari masa lalu. Kemiripan muncul karena kondisi yang serupa pula. Tetapi terlalu sederhana kalau kalian berpikir bahwa Orde Baru hanyalah semata-mata reinkarnasi dari masa kolonial.

Ikatan Primordial

T: Pak Cliff peneliti Indonesia yang pertama kali bicara tentang primordialisme. Dalam makalah “The integrative revolution: primordial sentiments and civil politics in the New States”, bab 10 buku IOC, Pak Cliff membahas sentimen primordial, yaitu hubungan darah, ras, bahasa, kedaerahan, agama, adat. Menurut Pak Cliff, unsur-unsur primordial itulah yang melatarbelakangi pemberontakan DI, PRRI/Permesta, dan juga pembunuhan massal 1965. Lalu Pak Cliff berpendapat bahwa ikatan primordial ⁸ tetap ada—bahkan semakin mendalam—cuma sekarang itu tersembunyi: “At the moment, though tension between primordially defined groups, religious, regional, and ethnic,

remain intense, and in fact may have been deepened by the events of 1965, open expression of it is largely absent. That it will long remain so seems—to me at least—unlikely. (hlm. 283).

Diskusi tentang primordialisme ini sangat relevan dengan keresahan, kerusuhan dan kekerasan sekarang ini. Pertanyaan umumnya: „Apakah sifat-sifat primordial itu memang sudah “nasib“, atau hasil dari proses sejarah?“ Kalau sudah nasib, tidak banyak yang bisa dilakukan. Tetapi kalau hasil proses sejarah, itu bisa diubah.

J: Ledakan akibat benturan sentimen primordial memang lebih lambat daripada yang saya perkirakan. Tetapi primordialisme itu masih ada di sana, masih dalam, dan ekspresinya cukup terbuka. Tentu saja, seperti saya jelaskan dalam makalah itu, sifat-sifat primordial tersebut merupakan hasil proses sejarah. Ikatan primordial bukan urusan instink, bukan nasib. Tetapi terbentuk dalam proses waktu, seperti halnya dengan kesetiaan dalam persahabatan, keanggotaan politik dan sebagainya. Itu saya katakan secara eksplisit dalam tulisan saya.

Saya juga berbicara tentang modernisasi primordialisme, tentang revolusi di India dan di tempat-tempat lain. Yang dimaksud dengan “primordial” di sini adalah apa yang bagi orang yang bersangkutan sendiri merupakan hal yang penting. Sehingga mereka dapat berkata, “Sangat penting bagi saya bahwa saya seorang Islam, atau saya orang Jawa”. Itulah kesetiaan primordial yang terbentuk dalam proses waktu.

Sekarang ini banyak orang yang berpendapat bahwa kesetiaan primordial itu semata-mata masalah “contextual political circumstances”. Untuk menyanggah anggapan ini, apa yang terjadi di Srilanka, Yugoslavia, dan Burundi merupakan contoh kasus yang bagus. Di sana ada tribalisme yang sungguh-sungguh nyata, yang terbentuk sejak akhir masa kolonial. Kesetiaan primordial memiliki arti penting bagi mereka.

Dalam pembahasan mengenai primordialisme ini saya tidak begitu mempermasalahkan istilah. Yang penting idenya. Saya tidak mau menggunakan istilah “kesetiaan etnik” atau “kesetiaan linguistik”. Sebab kadang-kadang yang menonjol adalah ikatan agama, kadang-kadang kesukuan, kedaerahan, bahasa, dan kadang-kadang campuran dari semua itu. Maka yang saya

gunakan adalah istilah umum yang dapat mencakup semua kesetiaan tersebut.

T: Dengan pemahaman itu, bagaimana Pak Cliff memahami pemberontakan PRRI/Permesta pada akhir tahun 1950-an?

J: Ketika itu saya merencanakan untuk membandingkan tiga daerah, yaitu Minangkabau yang mayoritas penduduknya Islam, Minahasa yang mayoritas penduduknya Kristen, dan Bali yang mayoritas penduduknya Hindu. Pada waktu pemberontakan PRRI meletus saya berada di tempat kejadian, yaitu di Padang. Berkenaan dengan pemberontakan itu, menurut pendapat saya ada dua hal yang mengherankan.

Pertama, di satu pihak mereka menggunakan cara ekstrem, tetapi di lain pihak tuntutan yang mereka ajukan samasekali tidak radikal. Mereka hanya menginginkan pergantian kabinet, yaitu pergantian perdana menteri dan orang-orang yang duduk dalam kabinet. Biasanya, jika orang ingin memisahkan diri dari negara, yang diinginkan lebih dari itu. Dengan tuntutan pergantian kabinet tersebut mereka tidak menjabarkan visi apa pun tentang Indonesia. Mereka hanya menginginkan perubahan kebijakan. Mereka tidak ingin merubah seluruh struktur rejim.

Kedua, reaksi keras dari Sukarno. Pada waktu itu Sukarno baru saja kembali dari Tokyo. Saya masih ingat dia berkata, "Di sini saya berdiri. Jika kamu menginginkan perang, silakan!" Reaksi keras dari Sukarno ini sungguh-sungguh di luar dugaan.

Analisa pemberontakan PRRI/Permesta selama ini biasanya terlalu menekankan peranan campur tangan pihak luar. Saya sendiri melihat pemberontakan itu lebih karena masalah internal. Mereka yang melihat pemberontakan tersebut sebagai akibat campur tangan dari luar, menurut pendapat saya, terlalu mengabaikan dinamika internal dalam konteks Indonesia pada waktu itu. Segala sesuatu yang buruk di Indonesia dilihat sebagai akibat pengaruh luar. Saya kira tidak begitu. Meski pun saya setuju bahwa Amerika kerap kali membuat hal yang sudah buruk menjadi semakin buruk.

Ada juga kecenderungan untuk melihat Indonesia sebagai bentukan kolonial Belanda. Padahal kita harus melihat Indonesia sebagai pelaku. Mereka sendirilah yang membuat sejarah. Benar, bahwa Indonesia telah dijajah dan mendapat pengaruh luar. Waktu itu memang ada ketegangan internasional, dalam suasana Perang Dingin. Dalam buku George Kahin saya mendapat kesan bahwa hal-hal yang menimbulkan bahaya kehancuran itu merupakan hasil konspirasi dengan Amerika. Saya mengagumi George. Tetapi saya tidak setuju dengan pendapatnya yang terlalu menekankan peranan Amerika dalam pemberontakan PRRI/Permesta. Sebab banyak masalah internal yang terjadi.

T: Mengingat pemberontakan itu terjadi di luar Jawa atau dilakukan terutama oleh orang luar Jawa, faktor-faktor internal apa saja yang berpengaruh di situ?

J: Tadi kalian bertanya tentang pembredelan [pencabutan ijin terbit, *Ed.*] surat kabar. Waktu itu sebuah surat kabar dilarang terbit hanya karena memuat tanpa komentar di halaman muka sumber penghasilan ekspor Indonesia dan konsumsinya. Tentu saja orang Jawa lah yang paling banyak mengkonsumsi. Perasaan semacam itu pada waktu itu amat sangat kuat. Ada perasaan anti-Jawa. Masjumi sedang berjuang melawan kelompok kiri, yaitu nasionalisme radikal, karena program-program mereka yang mendapat dukungan luas. Ekonomi negara pada waktu itu sedang kacau. Banyak terjadi polarisasi. Hatta berperan penting dalam perlawanan terhadap dominasi Jawa, terhadap kelompok kiri, dan terhadap Sukarno. Apakah Hatta sendiri menyadari hal ini atau tidak, itu masalah lain. Tetapi dia menjadi simbol untuk perlawanan itu.

T: Apakah pemerintah Orde Baru menyangkal dinamika internal ini?

J: Ada ketakutan kalau menjurus ke disintegrasi dan meruntuhkan otoritas serta kekuasaan. Saya kira pemerintahan apa pun di Indonesia harus menghadapi dinamika internal. Cara menghadapinya memang tidak harus seperti model Orde Baru, yaitu dengan menyangkalnya atau menyelubunginya. Mengapa mereka melakukan itu? Karena kekuasaan

mereka berbasis pada fakta bahwa mereka harus melakukan itu. Akibatnya kekuasaan terpusat pada negara.

T: Di samping penjelasan politik apakah ada penjelasan budaya?

J: Masalahnya bukan menemukan kebudayaan pada pusatnya, seperti gotong royong dan sebagainya. Yang perlu dilihat adalah cara berpikir kebudayaan Jawa, kebudayaan suku bangsa lain, dan kebudayaan Indonesia. Bagaimana kebudayaan-kebudayaan itu bekerja, berinteraksi, dan pada tingkat mana itu semua berlaku. Pada fase-fase awal revolusi Minangkabau dan Sumatera pada umumnya sangat penting. Mereka kurang-lebih tersingkirkan pada masa Sukarno. Hatta dan orang-orang yang sejalan dengan dia tersingkir, kehilangan kekuasaan. Jadi kalian harus melihat ini semua kalau mau ²⁵ tahu apa yang terjadi pada waktu itu. Ada hal budaya yang perlu kalian perhatikan.

Saya ingat ketika di sana saya berbicara dengan dua koresponden Amerika, salah satunya dari majalah *Time*. Saya mencoba memberi sedikit penjelasan tentang masyarakat Minangkabau, masalah yang mereka hadapi, dan apa saja yang terjadi di sana. Tetapi kedua koresponden itu tidak menginginkan penjelasan tentang apa yang terjadi di sana. Mereka hanya ingin tahu tentang Hatta. Ini karena mereka hanya berkepentingan untuk memberi pelayanan politis.

Pada waktu itu amat sulit menemukan orang yang tidak membatasi diri pada pelayanan politis belaka, yaitu yang tertarik pada anatomi sosial-budaya dari masyarakat Minangkabau atau masyarakat lain. Saya kira kalian tidak bisa memahami apa yang kita bicarakan ini tanpa mengerti sejarah, kebudayaan dan sosiologi. Kalian harus menempatkan peristiwa yang terjadi di dalam konteks historis dan sosio-budaya. Cara untuk melakukan itu ada bermacam-macam. Saya memanfaatkan hampir seluruh hidup saya untuk mencoba melakukan itu.

³ Keterkaitan

T: Bagaimana Pak Cliff menjelaskan politik-kebudayaan-ideologi yang saling berhubungan itu dalam usaha “Membangun Bangsa”?

1

J: Dalam menganalisa suatu peristiwa saya tidak membuat pemilahan ke dalam faktor politik, kebudayaan, ideologi dan sebagainya. Saya cenderung melihat segala sesuatu sebagai sekaligus hal politik dan budaya pada saat yang bersamaan. Banyak peristiwa politik di Indonesia yang sekaligus juga merupakan persoalan budaya. Termasuk juga di sini masalah agama dan konflik antara suku bangsa. Ada kesatuan tak terpisahkan antara hal-hal politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Apa yang terjadi di Indonesia tidak bisa dipahami dari segi ekonomi saja.

Mengenai “Membangun Bangsa”, saya kira istilah itu sekarang sudah menjadi semacam slogan yang memiliki banyak isi tentang apa itu Indonesia, apa itu proyek bangsa dan negara Indonesia dan sebagainya. Masalahnya tidak lagi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai kesatuan yang berfungsi.

T: John Pemberton mencoba menjelaskan bagaimana kebudayaan Jawa dipakai oleh pemerintah Orde Baru sebagai semacam politik kebudayaan untuk mengaburkan sifat-sifat otoriter dan kekerasannya. Bagaimana pendapat Pak Cliff mengenai hal ini?

J: Menurut saya penjelasan itu berat sebelah. Orde Lama dipisahkan secara tajam dari Orde Baru. Saya kira tidak begitu. Itu tidak salah, tetapi terlalu dangkal. Karena membuat politik kebudayaan begitu sederhana, membuat politik kebudayaan semata-mata sebagai alat. Seolah-olah pemerintah kolonial menyebabkan munculnya segala sesuatu di Indonesia dan kemudian itu dikembangkan selama Orde Baru. Seakan-akan kebudayaan politik Orde Baru hanyalah kebudayaan kolonial yang dihidupkan kembali. Ini penjelasan deterministik yang terlalu sederhana.

Penjelasan mengenai persoalan seperti ini tidak bisa diperoleh hanya berdasarkan semacam spekulasi abstrak. Untuk sampai pada kesimpulan yang memadai, kalian harus melakukan penelitian intensif, dalam periode yang lama, baik pada tingkat lokal maupun nasional. Harus benar-benar kerja, tidak hanya sekedar menyusun cerita-cerita berdasarkan bahan yang sudah ada. Sayang, sekarang ini penelitian empiris di tingkat lokal sangat merosot. Memang ada kekecualan pada sejumlah sarjana Amerika. Karya-karya tentang Bali dan Solo sangat bagus.

T: Pak Cliff menyatakan bahwa sekarang ini ide-ide kreatif masih terus muncul. Di samping versi-versi yang diciptakan negara, ideologi besar, atau hal lain, apa lagi yang sungguh-sungguh berusaha melakukan penyeragaman atau memaksakan diri pada masyarakat Indonesia? Dan bagaimana ide-ide itu disebarkan?

J: Saya sendiri tidak tahu persis tentang apa yang terjadi sekarang. Belum lama ini saya di Yogya. Saya melihat banyak macam sintesa antara Islam dan tradisi kecil Jawa yang masih berlangsung. Ini dapat dilihat di dalam lingkungan keagamaan, kebudayaan, sekolah-sekolah, dan aneka macam kelompok studi Javanologi. Masih terdapat banyak diskusi di sana. Ada juga ide-ide modern yang penting. Dalam pameran KIAS beberapa tahun yang lalu ada banyak ekspresi tentang apa yang terjadi sekarang. Kreativitas para pelukis dan penulis di Jakarta dan juga di tempat lain semakin berkembang. Saya kira orang tidak begitu saja menelan segala-sesuatu secara mentah-mentah. Mereka berpikir dan berdiskusi.

Dalam konteks religius, banyak kesempatan berdiskusi di kalangan Islam. Di dalam acara pengajian, yang tentu saja sangat sukar untuk dikontrol, orang dapat berbicara dan mengatakan apa yang ingin mereka katakan. Kesempatan semacam itu sekarang semakin banyak. Jadi banyak hal yang sekarang ini terjadi di luar apa yang direkayasa pemerintah pusat. Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi di tingkat lokal, kita memerlukan semakin banyak orang yang melakukan penelitian lapangan. Saya menemukan adanya banyak kreativitas di sana. Tetapi saya sendiri tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi.

T: Sebagai akhir wawancara, kami ingin tahu pertanyaan-pertanyaan macam apakah yang sebaiknya kami ajukan kepada Pak Cliff.

J: Saya kira, sebaiknya kalian mengajukan pertanyaan tentang masalah-masalah budaya dalam masyarakat Indonesia. Tetapi saya telah banyak menulis tentang hal itu. Saya pikir tidak ada yang baru. Kalian dapat bertanya sekitar peristiwa yang terjadi pada tahun 1950-an, waktu saya sendiri menjadi salah seorang pengamat di sana.

Sebetulnya saya sendiri ingin mengetahui lebih banyak tentang apa saja, termasuk masalah-masalah politik, yang akhir-akhir ini terjadi. Misalnya, saya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di Situbondo secara lebih dalam. Tidak hanya apakah militer berdiri di balik peristiwa itu atau tidak. Mungkin militer memang berada di balik itu. Tetapi saya ingin tahu orang-orang yang terlibat di dalamnya, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, pandangan-pandangan mereka sendiri tentang apa yang mereka lakukan dsb. Ketegangan hubungan antara orang Islam dan orang Kristen atau Katolik tampaknya semakin hebat. Pada masa lalu tidak begitu. Sekarang tiba waktunya untuk melakukan apa yang telah kami lakukan pada tahun 1950an, untuk mengetahui apa yang berkembang dan bagaimana perkembangan itu berlangsung.

WE GREW UP TOGETHER

Usai mengedit transkripsi wawancara ini, Pak Cliff menyampaikan surat berikut untuk kita sekalian. Pesan yang hangat dari seorang ilmuwan tersohor:

I, too, much enjoyed the discussion we had. I am much less in touch with younger Indonesians, those whom I hope and trust will make their country's future, than I once was. It was good to sit around and "ngobrol" again. Whatever the value or validity of my views might or might not be, I hope I communicated my continuing deep concern for the welfare of Indonesia and of the Indonesian people. We "grew up together", myself and your country, and Indonesia is thus rather more than a mere object of knowledge for me.

The transcript, which I have read through, is very good, and I have only a very few minor comments.

That's it. You did a remarkably efficient and speedy job, and I wish I could still speak 'bahasa' as fluently as you make me sound, another reason I thought to go back to Indonesia for awhile.

Dengan segala hormat,

Clifford Geertz



Nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing tahun 1957.

Bab Enam

Lembaga, Elite, dan Kontrol

Daniel S. Lev

*Tentang Demokrasi Tahun
1950-an dan 1990-an*



DALAM SEBUAH kesempatan wawancara dengan kami pada akhir tahun 1993 Dr. Daniel S. Lev sempat mengungkapkan bahwa ia tidak tertarik untuk berbicara tentang demokrasi. Alasannya, karena seringkali yang dimaksud orang dengan “demokrasi” hanyalah soal pemilihan pemimpin saja. Oleh karena itu ia lebih tertarik untuk memikirkan bagaimana membangun sebuah republik, di mana demokrasi menjadi standar atau tujuannya. Bagi Daniel Lev —yang semasa hidupnya bekerja sebagai dosen Ilmu Politik di Universitas Washington, A.S., dan banyak melakukan penelitian tentang Indonesia— yang penting adalah bagaimana “mengembangkan lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat yang sebagian tugasnya [adalah] mengontrol kekuatan negara”.

Setidaknya ada enam pokok gagasan yang di mata Daniel Lev perlu disadari dalam setiap upaya membangun republik. Satu, ⁶ dalam setiap negara modern sistem politik demokrasi dalam arti semua orang turut dalam mengambil keputusan tidak akan mungkin terwujud. Demokrasi hanya mungkin sebagai standar dan sekaligus sebagai tujuan.

Yang terjadi tahun 1965 itu memang suatu malapetaka. Bukan hanya untuk ukuran Indonesia. Kalau dilihat dalam abad ke-20 ini, yang begitu penuh dengan tragedi, maka Tragedi '65 di Indonesia itu harus dianggap cukup besar.

Dua, sebuah republik adalah suatu lembaga yang terdiri atas lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Lembaga-lembaga pemerintah itu misalnya birokrasi, militer, serta badan-badan legislatif seperti parlemen dan pengadilan. Lembaga-lembaga contohnya adalah partai-partai politik, lembaga-lembaga agama, lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya. Baik lembaga-lembaga pemerintah maupun masyarakat keduanya penting dalam hidup sehari-hari. Hampir setiap hari orang harus berurusan dengan lembaga-lembaga tersebut.

Tiga, meskipun sistem demokrasi dalam suatu negara modern itu tidak mungkin terwujud, dalam lembaga-lembaga masyarakat —misalnya partai politik dan LSM— demokrasi itu mungkin diwujudkan. Terkait dengan hal ini membangun republik berarti membangun lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga masyarakat. Dalam sebuah republik yang baik lembaga-lembaga pemerintah harus bisa dikontrol oleh lembaga-lembaga dalam masyarakat. Empat, sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwa dalam setiap lembaga —lembaga apapun juga— selalu akan ada elitnya. Sementara itu kelompok elite ini akan selalu berusaha untuk memperkokoh posisi yang menguntungkan dirinya.

Lima, dalam sebuah republik yang baik elite ini harus bisa dikontrol oleh lembaga-lembaga masyarakat yang demokratis itu. Enam, keberadaan modal/kapital tidak bisa dielakkan. Oleh karena itu yang bisa dilakukan adalah bagaimana mengontrol modal. Solusi-solusi yang sudah dicoba, misalnya sistem politik-ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis, ternyata tidak berhasil mengontrol modal ini. Oleh karena itu perlu ada semacam kompromi, yakni melibatkan masyarakat dalam setiap upaya untuk menjaga modal.

Pokok-pokok gagasan itu sejalan dengan apa yang ia uraikan dalam disertasi tentang dinamika politik Indonesia tahun 1957-1959 yang ia tulis di Universitas Cornell, Amerika Serikat. Dalam wawancara berikut Pak Dan, begitu kami biasa menyapanya, bicara tentang upaya-upaya dilakukan dalam rangka membangun republik itu, khususnya pada dasawarsa 1950-an dan 1990-an. Wawancara ini merupakan hasil dari percakapan yang kami adakan pada tanggal 22 Agustus 1995 dan pernah dimuat di apakabar@clark.net tanggal 2 April 1998.

2

Peristiwa 17 Oktober 1952

T (Tanya): Studi Pak Dan, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* [selanjutnya kami sebut *Transition*, Ed.] membahas detail sekali dua tahun yang sangat menentukan dalam sejarah Republik Indonesia pasca-Proklamasi itu. Pada saat yang sama banyak peristiwa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya yang juga Pak Dan pelajari karena sangat mempengaruhi apa yang kemudian terjadi pada tahun 1957-1959. Kami ingin melihat selintas rangkaian peristiwa itu, sejak tahun 1952.

Kami ingin mulai dengan lembaga militer. Apa arti Peristiwa 17 Oktober 1952 [ketika Angkatan Darat di bawah A.H. Nasution mengarahkan moncong tank ke Istana Presiden] dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia? Apakah itu bisa dianggap peristiwa sepele, di mana Nasution muda ingin gagah-gagahan? Ataukah peristiwa itu memiliki arti dan dampak yang mendalam bagi perjalanan sejarah Indonesia selanjutnya?

J (Jawab): Sesudah tahun 1950 memang tentara cukup sibuk karena terjadi macam-macam pemberontakan yang sangat berpengaruh pada pikiran politik dan ideologi pimpinan tentara. Sejak tahun 1950 juga mulai ada usaha pimpinan tentara untuk mempengaruhi beberapa surat kabar. Sudah ada semacam intelijen untuk itu. Pada bulan Oktober 1952 itu untuk pertama kalinya tentara secara blak-blakan kasih tahu ke pemerintah bahwa mereka tidak senang. Tidak senang dengan campur tangan pemerintah, tidak senang dengan kekacauan yang terjadi, dengan korupsi, dan lain-lain. Pada waktu itu Pak Nas [A.H. Nasution] memberi tahu pemerintah bahwa dia bukan hanya tidak senang tetapi juga bisa bertindak.

Yang penting bukan hanya tindakan itu, dan juga bukan hanya perpecahan yang ada dalam tentara, karena banyak juga yang tidak setuju dengan Nasution. Yang penting adalah bahwa ada perwira yang sudah menganggap tentara pada waktu itu sebagai organisasi yang bukan hanya berfungsi militer tetapi juga punya kepentingan politik, punya perasaan politik dan pikiran politik.

Waktu Pak Nas ingin memaksa Bung Karno untuk kembali memimpin negara, banyak orang mengira dia seolah-olah mau kembali ke tahun 1945, ke persatuan bangsa, dan sebagainya. Menurut saya tidak. Menurut saya waktu itu Pak Nas sudah punya pikiran bahwa kalau perlu tentara mesti bertindak untuk memimpin negara. Bisa memaksa pimpinan sipil seperti Bung Karno sendiri untuk melakukan hal-hal yang menurut tentara, atau paling sedikit menurut Pak Nas dan kawan-kawan, harus dilakukan untuk memperkuat Indonesia. Nah, hal itu tentu dilandasi pikiran politik dan kepentingan politik. Banyak pimpinan tentara pada waktu itu yang merasa bukan hanya mereka lebih mampu dari pada orang sipil, tetapi juga merasa disingkirkan oleh suatu elite lama. Ini pernah juga terjadi dalam negara manapun saja, ya.

Pimpinan sipil sendiri pada waktu itu memang satu kelompok yang agak luar biasa. Mereka berpendidikan tinggi, sikapnya sangat terbuka, punya ide-ide. Kebanyakan dari mereka itu intelektual yang sudah biasa omong satu sama lain, dan mereka berkemanusiaan. Selama lebih dari 20 tahun mereka satu sama lain sudah biasa bertarung dengan ide. Mereka bisa tidak setuju satu sama lain, tetapi tidak mau saling membunuh. Mereka sudah biasa dengan permainan politik yang terbuka. Mereka juga sangat realistis. Sedangkan pimpinan tentara waktu itu merupakan kelompok yang jauh lebih muda. Dibandingkan pimpinan sipil seperti Bung Karno, Bung Hatta, pimpinan PNI [Partai Nasional Indonesia], [Partai] Masyumi [Majelis Syuro Muslimin Indonesia],² Partai Kristen, Partai Katolik, NU [Nahdlatul Ulama], dan lain-lain, mereka kurang berpendidikan. Atau pendidikan mereka sangat sempit. Tapi pimpinan tentara ini merasa yang berpendidikan tinggi itu tidak bisa apa-apa. Atau paling sedikit tidak bisa memimpin dengan disiplin dan tegas. Lantas ada semacam kompetisi antara kedua elite itu, antara dua generasi yang berlainan sekali

2

Kesepakatan Jogja

T: Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952, ada beberapa peristiwa penting di kalangan militer. Pertama, Kesepakatan Jogja tanggal 17 Februari 1955, di depan makam Jendral Sudirman, untuk mendamaikan dua kelompok yang pro dan yang kontra Peristiwa 17 Oktober. Apa inti kesepakatan Jogja yang dirumuskan oleh 250 perwira Angkatan Darat ini? Ketidakpuasan militer ini ternyata tidak selesai dengan membuat ikrar di Jogja. Setelah kesepakatan Jogja terjadi Peristiwa Juni 1955. Pimpinan Angkatan Darat tidak menerima pengangkatan Bambang Utoyo sebagai KASAD baru. Disambung dengan percobaan kudeta oleh Zulkifli Lubis dan perwira-perwira Jawa Barat pada bulan November 1956. Apa artinya rangkaian peristiwa ini?

J: Memang kesepakatan di bulan Februari 1955 itu sangat penting. Mereka mau coba menghilangkan perpecahan yang ada dalam tubuh tentara, yang memang sangat berbahaya. Tapi menurut saya yang lebih penting dari peristiwa itu adalah bahwa ketika mereka ke Jogja, ke makam Pak Dirman, para perwira itu seolah-olah bicara atas nama tentara sebagai suatu organisasi yang berdiri sendiri. Mereka tidak mengizinkan campur tangan dari luar. Mereka punya ide sendiri. Kalau ada kesulitan intern, mereka sendiri yang akan mengatasi.

Akibatnya terlihat pada bulan Juni 1955. Waktu Bambang Utoyo mau diangkat oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo, pimpinan tentara menolak. Ini suatu petunjuk yang luar biasa pentingnya. Tentara bisa bertindak sebagai organisasi politik. Tentunya pada waktu itu Pak Ali sangat terkejut. Saya kira dia mengerti betul bahwa ini berarti pemerintah tidak bisa mengontrol tentara, tidak bisa menyuruh tentara begitu saja. Tentara tidak akan tunduk pada pemerintah sipil. Menurut saya itu adalah permulaan dari krisis yang akan menuju ke Demokrasi Terpimpin. Apalagi setelah Pak Nas diangkat lagi sebagai KASAD. Terbukti, dua tahun kemudian sistem parlementer sudah bubar.

Hubungan Sipil-Militer

T: Ada beberapa alasan mengapa militer tidak puas selama dekade 50-an. Beberapa di antaranya: (1) Tentara menolak campur tangan sipil dalam soal

militer; (2) Tentara merasa lebih berjasa dari pada sipil, karena sipil sudah menyerah dalam Agresi Kedua, sedangkan tentara terus melawan; (3) Para pemimpin sipil tidak becus, kabinet jatuh-bangun terus; (4) Sipil korup. Itu antara lain terlihat dalam tuduhan Alex Kawilarang terhadap Menteri Luar Negeri Roeslan Abdulgani. Bisakah Pak Dan mendiskusikan satu demi satu alasan itu?

J: Kalau dipikirkan dari satu sudut saja, ya semua tuduhan itu memang betul. Keadaan yang sulit sekali memang tidak bisa diatasi oleh sipil saja. Lantas memang bisa dibilang tidak becus. Pada waktu Revolusi memang ada perbedaan antara pimpinan sipil dan pimpinan tentara. Keduanya punya keahlian sendiri, punya fungsi sendiri. Dengan sendirinya pimpinan sipil akan menekankan diplomasi karena memang itu keahliannya. Tentara dengan sendirinya juga akan menekankan perjuangan bersenjata karena itu keahliannya. Kalau pimpinan tentara bilang sipil korup, ya memang betul. Apakah tuduhan Alex Kawilarang pada Roeslan itu betul? Memang belum jelas. Tapi tuduhan itu menunjukkan perasaan para perwira terhadap orang sipil.

Sejak Revolusi banyak perwira yang menganggap rendah orang sipil. Mereka menganggap dirinya jauh lebih mampu. Memang sering orang militer, di manapun saja ya, menekankan keahlian mereka yang bisa mengatasi kesulitan militer, lalu merasa diri lebih mampu dari orang sipil. Sedangkan dalam suatu sistem parlementer, dengan sendirinya politik akan didasarkan atas debat, kompromi, debat lagi. Tapi dari pandangan militer itu dianggap agak *sloppy*, tidak becus, dan sebagainya. Bukan karena militer tidak senang dengan sipil, walaupun itu juga biasa di manapun juga. Tetapi karena mereka menganggap diri berhak berbuat sesuatu karena itu.

Para perwira mengatakan mereka bertindak untuk menyelamatkan negara, dan sebagainya. Tapi kalau melihat bukti-bukti yang ada, saya tidak melihat kebenaran di situ. Biasanya kalau suatu kelompok pimpinan bertindak, itu bukan hanya untuk tujuan yang luhur, yang sangat bagus. Tetapi menurut pandangan dan kepentingan sendiri. Dan menurut saya sesudah itu memang terlihat banyak perwira yang menunjukkan bahwa mereka memang punya pandangan dan kepentingan sendiri. Mereka bukan

² hanya mau memainkan peranan sebagai militer tetapi juga sebagai pemimpin dalam pemerintahan.

Perasaan dan kemauan itu sangat menonjol pada tahun 1955, 1956 dan 1957. Dan itu kelihatan bukan hanya di pusat, dengan orang seperti Pak Nas, Gatot Subroto, dan lain-lain. Di daerah lebih kelihatan lagi. Perwira-perwira daerah menganggap diri sangat kompeten, dan mereka punya macam-macam alat. Lalu mereka makin sering diminta bantuan oleh orang-orang sipil. Itu terjadi di Sumatra, di Sulawesi, bahkan juga di Jawa Timur. Perwira-perwira daerah merasa diri sangat penting karena mereka [merasa] bisa menolong daerahnya. Mereka juga ikut marah ke pusat karena tidak banyak uang yang mengalir dari Jakarta ke daerah. Semua itu mendorong semacam aktivitas politik para perwira daerah. Pak Nas khawatir, takut sekali dengan keadaan itu. Karena itu berarti para perwira daerah makin lama makin tidak mau menerima perintah dari pusat. Lantas Pak Nas mau mempersatukan tentara. Bukan hanya karena persatuan tentara itu perlu, tetapi karena persatuan itu dibutuhkan untuk tujuan politik tentara. Tahun 1956 perkembangannya jelas menuju ke arah itu.

T: Ketika Nasution diangkat kembali² menjadi KASAD [Kepala Staff Angkatan Darat] pada bulan November 1955 dia bekerjasama dengan Kabinet Ali Ke-2 untuk memperkokoh posisi pimpinan tentara di pusat. Beberapa panglima daerah dia geser. Keputusan ini menimbulkan ketidakpuasan para panglima daerah, khususnya di Sumatra dan di Sulawesi, yang kemudian mencari dukungan di luar tentara. Mereka lalu didukung oleh Masyumi dan PSI [Crouch 1978: 32-33]. Seberapa jauh keputusan Nasution ini mempengaruhi timbulnya krisis Pusat-Daerah waktu itu?

J: Ini masalahnya sangat kompleks. Tidak bisa dikatakan Pak Nas sendiri yang menyebabkan krisis itu. Ada beberapa kejadian yang saling berhubungan. Di daerah memang ada dorongan dari orang-orang sipil yang memikirkan nasib daerahnya sendiri. Mereka menganggap tentara setempat itu bagian dari institusi lokal, bukan hanya institusi nasional. Pak Nas mau mencegah itu dengan memindahkan beberapa perwira dan dengan memperkuat organisasi tentara. Kabinet Ali mau menolong karena melihat ada bahaya [bahwa] Indonesia bisa pecah.

Dan kita harus ingat tahun 1956 itu hanya enam tahun setelah pengakuan kedaulatan. Pimpinan nasional waktu itu, termasuk Bung Karno, tidak merasa begitu pasti bahwa mereka betul-betul bisa mempersatukan Indonesia. Ada ketakutan yang luar biasa. Sebagian karena campur tangan dari luar akibat Perang Dingin. Sesudah Revolusi ada usaha untuk mempersatukan, dan ada harapan untuk cepat-cepat ada perbaikan. Tapi kemudian orang-orang merasa kurang puas, kurang senang, kurang sabar, karena harus menunggu pembangunan, dan sebagainya. Menurut saya harapan itu memang tidak realitis. Tapi saya bisa mengerti kalau pimpinan waktu itu takut sekali kalau Sumatra akan keluar, Sulawesi akan berdiri sendiri. Itu sebabnya Pak Ali menyokong usaha Pak Nas untuk mempersatukan tentara.

Tapi ada satu akibat sampingan dari itu. Karena kemudian Pak Nas dan para perwiranya mulai menganggap tentara sebagai lembaga yang sangat kunci. Mereka merasa yang paling menentukan, merasa paling penting. Nah, kalau perasaan itu dicampur dengan perasaan kesal pada orang sipil, dengan kepentingan tentara sebagai kelompok politik, dengan perasaan kurang dihormati, tidak diberi anggaran belanja yang cukup, dan seterusnya, dengan sendirinya bisa dimengerti mengapa mereka kemudian mendorong keras untuk memainkan peranan yang jauh lebih besar dari pada sebelumnya PRRI/Permesta.

T: Ketidakpuasan panglima-panglima daerah, terutama di Sumatra dan Sulawesi, berkembang ketika pemerintah [dalam hal ini Kabinet Ali Ke-2], mengecam penyelundupan dan barter yang dilakukan oleh para panglima itu. Apakah ada usaha untuk memeriksa sejauh mana kecaman atau tuduhan pemerintah itu bisa dibuktikan? Ketidakpuasan ini berakibat jauh. Bertolak dari ketidakpuasan itu kemudian para panglima Sumatra dan Sulawesi mengumumkan "keadaan perang" dan pemerintahan sipil berada di bawah komando militer. Mengapa?

J: Memang benar penyelundupan itu ada. Seperti dengan Hong Kong, Singapura, dan lain-lain. Ini karena Daerah merasa kekurangan anggaran belanja dari Pusat, dan juga karena ada ketegangan akibat pertentangan Jawa dan Luar Jawa. Tetapi bukan hanya karena alasan-alasan itu. Dan harus diingat bukan hanya tentara yang memainkan peranan di situ, tetapi juga

orang sipil setempat, di Sumatra dan di Sulawesi. Jadi ada banyak kepentingan di situ. Ada kepentingan ekonomi, ada semacam patriotisme daerah, dan lain-lain. Faktor lain yang sangat penting ialah campur tangan Amerika. Dan ini sering dilupakan. Baru kira-kira beberapa tahun yang lalu, dalam buku *Democracy in Indonesia*, permainan Amerika waktu itu dijelaskan dalam hasil studinya Pak Kahin. Dan juga dalam bukunya yang baru, yakni *Subversion as Foreign Policy* [New York: The New Press, 1995].

Dilihat dari Pusat, memang Pusat merasa tidak bisa lagi mengontrol daerah. Bukan hanya karena ada tentara yang membandel, walaupun itu faktor terpenting, tetapi [juga] karena kepentingan Daerah memang berbeda dengan kepentingan Pusat. Kedua, Pusat takut pengaruh Amerika di situ [di Daerah] akan sangat memperlemah Indonesia. Tentunya keadaan yang sangat kompleks itu menimbulkan kekacauan. Lalu muncul perasaan kehilangan harapan dalam diri orang-orang di Pusat. Lalu siapa yang bisa bertindak? Ada orang-orang sipil yang menganggap: ya hanya tentara yang bisa menyelesaikan semua ini. Di Daerah, baik yang sipil maupun yang tentara sama-sama ada main, tetapi yang punya senjata itu cuma tentara.

Undang-Undang Darurat

T: Bagaimana situasi tahun 1956-1957 itu? Yang membuat Kabinet Ali ke-2 akhirnya menandatangani Undang-undang Darurat Perang, 14 Maret 1957. Dan apa akibat Undang-undang ini dalam politik selanjutnya.

J: Pada akhir tahun 1956 ada krisis yang luar biasa. Macam-macam hal terjadi. Bukan hanya karena daerah mulai main sendiri, tetapi juga karena ada pertentangan antara Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu bulan Desember Bung Hatta meletakkan jabatan [sebagai] Wapres [Wakil Presiden], dan seolah-olah itu membenarkan Luar Jawa. Selain itu, sesudah Nasution diangkat lagi menjadi KASAD, peranan tentara semakin naik. Pimpinan tentara menganggap orang sipil yang membuat keadaan kacau kemudian tidak bisa menyelesaikan kekacauan itu.

Selain itu, ada satu kejadian lagi yang sangat penting dan sering dilupakan orang. Tahun 1956 dan 1957 ada perdebatan dalam parlemen

tentang desentralisasi. Dari debat itu kemudian lahir Undang-undang nomor 1 tahun 1957. Undang-undang itu memperlemah kedudukan pamong praja dan memberi kekuatan yang nyata pada DPR Daerah. Ini membawa perubahan yang sangat mendalam dan sangat penting. Latar belakangnya begini. Pada waktu itu diakui bahwa pamong praja itu sebenarnya merupakan lembaga kolonial yang dibuat untuk mengumpulkan kekayaan alam Indonesia dan untuk mengontrol rakyat Indonesia. Partai-partai tidak akan bisa kuat, terutama di desa-desa, kalau kekuasaan pamong praja tidak diperlemah. UU 1/1957 itu merupakan semacam desentralisasi yang memperkuat posisi DPR Daerah. Kedudukan pamong praja dirubah, hanya menjadi semacam alat bagi DPRD. Nah, Pak Nas dan umumnya pimpinan tentara menganggap keputusan itu akan memperlemah pemerintah pusat, dan akan memperlemah negara pada umumnya. Lalu Pak Nas mulai mendorong agak keras supaya partai-partai itu jangan membuat lemah negara.

Pada tahun 1957 atau 1958 Pak Nas memberi pidato, saya kira di Sumatra Selatan, tentang soal ini. Di situ dia memuji-muji pamong praja dan menjelekkan UU-1/57 itu. Malahan dia mengatakan bahwa pamong praja itu harus dipertahankan. Ini berarti dalam pikiran Pak Nas, dan mungkin para perwira lain juga, pemerintahan kolonial itu lebih efisien, lebih baik. Dan ini ada bahayanya sendiri. Mungkin pikiran ini juga yang memberi ilham dalam politik Orde Baru nantinya.

Ketika tahun 1957 itu dinyatakan Keadaan Perang, berarti tentara diberi tempat yang istimewa. Dengan pernyataan itu tentara dimasukkan dalam pemerintahan lokal di mana-mana dan juga dalam pemerintahan nasional. Tentara diberi hak istimewa untuk membredel koran, hak untuk campur tangan dalam politik lokal. Mulai tahun 1950, di beberapa daerah memang sudah dinyatakan Keadaan Perang lokal. Jadi tentara sudah punya pengalaman. Tetapi pada tahun 1957 itu diberi legitimasi secara nasional. Dan sesudah itu, di manapun juga tentara memainkan peranan yang penting sekali. Lantas itu jadi semacam konstitusi, semacam Undang-undang Dasar untuk peranan politik tentara.

Korupsi

T: Setelah kampanye Sita Modal Asing yang dimulai pada bulan Desember 1957, pimpinan tentara mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda yang disita. Sebagian² menyalurkan uangnya ke pasukannya, bukan ke pemerintah [Crouch, 1978: 38, 39, 40]. Korupsi, penyelundupan, dan juga percukongan mulai berkembang. Tahun 1958, Nasution menggeser beberapa perwira, seperti Kol. Ibnu Sutowo dan Kol. Suharto, waktu itu panglima Jateng. Apakah kampanye anti korupsi ini berhasil?

J: Tentu tidak. Sesudah perusahaan-perusahaan Belanda diambil alih tahun 1957, pada tahun 1958 dinasionalisasi. Ada tujuh perusahaan Belanda yang besar lalu dibagi-bagikan, dan kebanyakan jatuh di bawah kontrol tentara. Kalau Undang-undang Keadaan Perang tahun 1957 menjadi semacam konstitusi politik buat tentara, maka nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1958 itu memberi landasan ekonomi bagi tentara. Sepertinya tentara jadi punya anggaran belanja sendiri, punya sumber uangnya sendiri.

Dalam membersihkan tentara Nasution sama sekali tidak berhasil. Beberapa orang memang disingkirkan. Tapi orang-orang itu digeser karena alasan-alasan lain. Antara lain karena mereka kadang-kadang menentang Pak Nas. Orang lain seperti Sukendro yang terlibat dalam penyelundupan yang waktu itu dikenal dengan nama “Barter Tanjung Priok”, tidak digeser begitu saja. Pak Nas sangat mengerti politik. Dia paham betul bahwa kalau diberi kesempatan, maka para perwira itu akan memakai kesempatan itu untuk curi uang juga.

Soal korupsi di kalangan tentara, saya kira Pak Nas sendiri tahu betul bahwa itu tidak mungkin bisa dia bersihkan. Malahan para perwira itu sudah menunggu agak lama untuk dapat kesempatan. Waktu kesempatannya terbuka, banyak yang masuk dengan senang hati dan banyak cari untung untuk dirinya sendiri.

Kampanye anti korupsi di kalangan tentara pada waktu itu sama sekali tidak berhasil. Ini bukan mau mengatakan bahwa semua perwira itu korup. Bukan itu. Waktu itu memang dikalangan perwira ada isu baru. Perwira yang biasa di medan perang kurang senang dengan perwira yang main politik dan makin kaya.

Jalan Tengah

T: Setelah berhasil menumpas pemberontakan PRRI/Permesta, pimpinan pusat militer menjadi utuh. Pada tanggal 12 Nopember 1958 Nasution berpidato di Magelang tentang Konsep Jalan Tengah. Isinya, antara lain: "Tentara adalah kekuatan hankam [pertahanan dan keamanan] sekaligus kekuatan sospol [sosial politik]." Untuk menjalankan "Doktrin Perang Wilayah," tentara perlu "Kekuasaan Teritorial" [Salim Said, 1987: 135-137]. Delapan bulan kemudian Sukarno mengumumkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kembali ke UUD '45. Apakah ada kaitan antara Jalan Tengah dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959?

J: Ini agak kompleks tapi sangat penting. Selama tahun 1958, Pak Nas meminta nasehat beberapa orang di dalam maupun di luar tentara untuk merumuskan landasan politik tentara. Antara lain dia bicara dengan Pak Djokosutono yang waktu itu dekan Fakultas Hukum UI [Universitas Indonesia, Jakarta]. Pak Djokosutono yang menciptakan ide Jalan Tengah itu. Dalam Bahasa Belanda itu dia sebut 'De Legers Middel Weg.'

Yang dicari Pak Nas pada waktu itu adalah semacam program politik yang bisa memuaskan ambisi para perwira yang ada, dan sekaligus memberi hak tentara, untuk selama-lamanya turut aktif dalam masyarakat dan politik Indonesia. Sesudah itu, bahkan sebelum itu, Pak Nas dan perwira lainnya mulai mendesak supaya UUD Tahun 1950 itu dihapuskan, dan kembali ke UUD '45. Ini sekarang sering dianggap ide Bung Karno. Padahal sama sekali tidak. Sama sekali tidak betul. Dalam otobiografi Pak Hardi, tokoh PNI, beliau mengatakan bahwa itu ide PNI. Tapi saya tidak melihat ada bukti-buktinya. Yang terang waktu itu, malahan sejak 17 Oktober 1952, Pak Nas merasa bahwa UUD '45 itu yang paling pantas.

Kalau kita kembali lagi, waktu Oktober 1952, Pak Nas minta apa pada Bung Karno? Supaya parlemen disingkirkan dan Bung Karno sendiri menjadi Pemimpin Besar. Itu berarti UUD '45. Menurut Hardi, tahun 1957 itu Bung Karno tidak mau memainkan peranan yang terlalu penting, peranan yang bertanggung-jawab. Dia mau menjadi pencetus ide. Tapi kalau harus mempertanggung-jawabkan suatu politik ekonomi, misalnya, dia tidak mau. Pada Hardi dia mengakui terus terang bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang ekonomi. Malahan takut kalau dia akan membuat kacau. Dan memang betul

itu yang kemudian terjadi. Tapi ada kemungkinan lain juga. Bung Karno mungkin agak khawatir dengan keadaan politik waktu itu. Karena pada akhirnya Bung Karno memang tidak punya partai, tidak punya organisasi sendiri. Menurut saya, dia tidak begitu senang dengan UUD '45 itu. Itu programnya tentara.

Tahun 1958 itu, ada beberapa kejadian penting di luar Indonesia, yang dari sudut tentara itu sangat menguntungkan. Di mana-mana banyak tentara lain yang main kudeta. Bulan Juli Jendral Kassim kudeta di Iraq. Bulan Oktober jendral Ayub Khan di Pakistan dan Ne Win di Birma. Ada kup baru juga di Thailand. Berita kup datang juga dari Pilipina. Lalu bulan November tentara kudeta di Sudan. Semua itu terjadi pada tahun 1958. Dan waktu itu Pak Nas mulai memberi ceramah. Kira-kira dia mau bilang, "Ya, ini ada yang bikin kup di luar negeri dan bisa saja itu juga terjadi di sini." Akibatnya, Bung Karno dan pimpinan politik lain yang sudah agak lemah karena sudah bukan sistem parlementer lagi, menjadi takut sekali. Kalau kita baca, koran tahun 1958 sampai awal 1959 itu penuh dengan berita tentang kup di luar negeri, dan ketakutan dalam negeri akan kemungkinan kup.

Pada akhirnya Pak Nas berhasil dengan desakannya supaya UUD '45 dipertimbangkan kembali. Bulan Februari isu itu *dikasih* pada Konstituante supaya diputuskan. Nah, di situ ada permainan yang luar biasa juga. Akhir April, Bung Karno berangkat ke luar negeri untuk perjalanan dua bulan. Yang diserahkan mengurus keadaan di dalam negeri adalah Pak Nas. Harapan Pak Nas adalah pada akhirnya Konstituante akan menyetujui UUD '45. Tetapi ternyata tidak. Masyumi berhasil memaksa NU untuk ikut menolak, setelah kekalahan dalam isu Piagam Jakarta, kekalahan dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Setelah diambil suara dalam Konstituante, tanggal 2 Juni, cuma 264 suara mendukung, 204 menolak dan 2 abstain. Padahal butuh 2/3 suara. Pak Nas tahu dia kalah. Besoknya dia mencekal semua orang. Semua aktivitas politik dilarang. Orang tidak boleh lagi *ngomong* di koran, tidak boleh apa-apa, menunggu sampai Bung Karno pulang. Sementara itu Pak Nas kirimkan seorang atase untuk bicara dengan Bung Karno. Saya kira dia juga kirim surat, mendesak Bung Karno supaya ada dekrit untuk kembali ke UUD '45.

Waktu Bung Karno pulang, tanggal 29 Juni, dia merasa terjepit. Di lapangan terbang Kemayoran dia membuat jumpa pers. Yang aneh, di situ dia malah memarahi Nasution. Dia mengatakan: "Saya tidak akan tunduk pada tentara." Jadi bukan UUD '45 yang dibicarakan, malahan dia bicara [tentang] kekuatan tentara. Ini menunjukkan bahwa Bung Karno mengerti betul apa yang sedang terjadi. Dia sudah terdesak, terjepit, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang akhirnya menang adalah tentara. Sesudah itu, dalam Demokrasi Terpimpin, dari sudut Bung Karno yang paling sulit adalah bagaimana mengontrol tentara. Pada akhirnya, terbukti tidak bisa.

Pemilu 1955

T: Apa makna paling penting dari Pemilu 1955? Mengapa para peneliti Indonesia menganggap Pemilu 1955 adalah Pemilu yang paling bebas dan paling menunjukkan aspirasi rakyat Indonesia? [Lihat misalnya tulisan-tulisan Feith, McVey, Anderson, Mackie, Buyung Nasution, dan lain-lain dalam David Bourchier dan John Legge (editor), 1994, "Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s," Selanjutnya kami sebut Democracy, Ed.].

J: Pemilu 1955 itu luar biasa. Itu pemilihan pertama dalam suatu negara baru. Yang kalau dihitung dari pengakuan kedaulatan, selesainya Revolusi, umurnya baru 5 tahun. Yang mengherankan adalah efektifitas dari organisasi partai-partai. Yang lebih mengherankan lagi adalah begitu banyaknya orang yang turut. Lebih dari 91% untuk memilih anggota parlemen (DPR) pada bulan September, dan 89% waktu memilih anggota Konstituante pada bulan Desember. Itu luar biasa. Ini memang Pemilu yang paling bebas.

Yang ditunjukkan dari Pemilu 1955 itu adalah bahwa rakyat Indonesia menerima sistem parlementer itu dengan semangat yang luar biasa. Setelah jatuhnya sistem parlementer, semua orang baik di luar negeri maupun di dalam negeri, mengatakan bahwa kebudayaan Indonesia tidak bisa menyokong suatu sistem pemilihan, suatu republik atau demokrasi. Pemilu 1955 membuktikan pikiran tadi itu omong kosong! Kalau kebudayaan Indonesia tidak bisa menjadi landasan untuk demokrasi, kenapa begitu banyak orang yang ikut memilih? Dan kelihatan betul mereka tahu apa yang akan dipilih. Mereka masuk partai dan mendukung partai itu. Mereka tidak

lebih atau tidak kurang kalau dibandingkan rakyat di negara-negara lain. Dikatakan banyak orang yang milih PNI karena mereka biasa ikut dengan para priyayi. Tapi mengapa ada jutaan orang yang tidak ikut priyayi itu?

Mereka ikut PKI atau Masyumi atau NU atau yang lain. Persis seperti di negara manapun juga. Dan antusiasme itu kelihatan bukan hanya dalam pemilihan buat parlemen, bulan September. Tetapi juga waktu Pemilu untuk anggota Konstituante, bulan Desember. Dan kelihatan lagi waktu begitu banyak orang yang turun waktu pemilihan anggota DPRD tahun 1957. Buat saya itu makna penting Pemilu 1955.

Konsepsi Bung Karno

*T: Tanggal 21 Februari 1957 Bung Karno mulai menawarkan Konsepsinya. Dia mengusulkan: (1) Kabinet Gotong Royong yang dipimpin oleh Empat Besar hasil Pemilu 1955 [PNI, Masyumi, NU dan PKI]; dan (2) Dibentuknya Dewan Nasional di mana duduk semua wakil-wakil golongan dalam masyarakat untuk mendampingi kabinet [Lev, *Transition*, 1966: hlm 16 dan 17]. Apa reaksi atas Konsepsi Bung Karno ini?*

J: Sebenarnya ini mulai tahun 1956. Bung Karno mulai memberi ceramah dan pidato yang kritis terhadap sistem kepartaian. Sudah sejak tahun 1930 Bung Karno memimpikan persatuan. Dia memang tidak senang kalau semua golongan itu terus konflik. Dia ingin mempersatukan semuanya. Tahun 1957 dia kembali pada ide itu. Dia ingin supaya semua partai bisa bekerjasama. Lalu muncul ide Dewan Nasional, dan sebagainya. Tapi itu menunjukkan bahwa Bung Karno bertindak secara *ad hoc*. Dia tidak ada ide tentang Demokrasi Terpimpin. Dia tidak tahu lembaga apa yang akan dipakai. Dia hanya mau memaksa semua partai untuk bekerjasama. Hanya itu. Dan dia memang mau bertindak sebagai semacam pemimpin besar yang berada diatas semuanya, walaupun tidak bertanggungjawab pada semua itu.

Pada tahun 1957 itu memang banyak sekali orang yang mengharap dari Bung Karno sesuatu yang lebih baik dari yang sudah ada. Memang sulit untuk menentukan siapa yang kecewa, siapa yang tidak puas waktu itu. Tapi memang banyak yang mempercayai Bung Karno, menganggap dia sebagai semacam “Bapak Negara”. Mengharapkan dari dia suatu pimpinan yang

bersih dengan arah yang jelas. Termasuk kaum intelektual, dan lain-lain yang menganggap konflik partai itu sudah keterlaluan.

Tapi ada unsur lain. Tidak semua partai menerima apa yang diinginkan Bung Karno dengan Konsepsi itu. Dari sudut PNI, Masyumi, NU, bahkan dari Partai Katolik, Partai Kristen, dan lain-lain, banyak yang tidak mau bekerjasama dengan PKI. Dari sudut mereka, mereka mulai takut betul pada PKI yang makin besar dan makin kuat. Ini akan menjadi ancaman yang sangat fundamental. Dan untuk mengerti ketakutan itu harus dipahami elite Indonesia waktu itu. Yaitu elite yang ada di dalam PNI, Masyumi, PSI, NU. Ini kelompok elite yang sebagian, tidak semua tentunya, berasal dari aristokrasi dulu, kaum priyayi dulu, atau aristokrasi di luar Jawa. Mereka kuat pada waktu kolonial, dan masih kuat pada waktu Revolusi dan sesudahnya. Mereka mulai melihat PKI sebagai semacam partai yang tidak bermain menurut aturan yang ada. Dari satu sudut, PKI itu terlalu serius. Pimpinan PKI waktu itu jauh lebih muda daripada pimpinan PNI, Masyumi, NU, Partai Kristen, Partai Katolik, dan lain-lain. Lebih muda, lebih cakap berorganisasi, dan sangat bersih. Mereka menekankan kepentingan buruh, tani, dan lain-lain.

Lalu timbul ketakutan dari elite PNI dan lain-lain itu, melihat kemungkinan PKI akan menang. Setelah Pemilu 1957 mereka mendekati Bung Karno, dan mulai juga mendekati tentara. Tidak semua tentunya. Sesudah tahun 1957-1958, mereka melihat tentara sebagai semacam *savior*, semacam benteng terhadap PKI. Atau ada yang melihat Bung Karno semacam benteng juga terhadap PKI. Lantas ada semacam kekuatan yang berkumpul di sekitar Bung Karno waktu itu. Tapi itu memang tidak terlihat dari luar. Sedangkan tentara, Pak Nas dan kawan-kawan itu, juga tidak tahu apa yang akan dilakukan Bung Karno. Dari sudut tentara, sudah ada kemajuan besar. Mereka sudah punya Undang-undang Keadaan Perang itu. Tahun 1958 mereka sudah dapat perusahaan-perusahaan yang dinasionalisasi, dan lain-lain. Ide-ide Pak Nas sudah diterima. Para perwira sangat diperhatikan. Lantas, dari sudut mereka, Bung Karno boleh berbuat apa saja. Asal saja tujuan tentara dikabulkan.

2

T: Bagaimana Pak Dan menjelaskan meningkatnya kekuatan PKI dalam waktu singkat ini? Padahal pimpinan mereka jauh lebih muda dari pimpinan partai-partai lain. Bagaimana anak-anak muda ini bisa mendapat jutaan pengikut?

J: Ada dua-tiga sebab. Yang sangat ditekankan oleh grup PKI adalah bahwa cara-cara PKI dianggap sangat modern, semacam arus pada jaman itu. Selain itu PKI dianggap partai yang bersih. Waktu itu saya kenal satu orang dokter, dia orang Masyumi. Orang ini sangat jujur, sangat *streng*, malah agak kaku. Nah, dia mengatakan: "Satu-satunya partai yang bersih disini memang PKI." Dan banyak sekali orang yang merasa begitu. Setuju atau tidak setuju, orang menganggap PKI waktu itu sebagai partai yang bersih. Partai yang serius, yang betul-betul mau berjuang untuk sesuatu yang di luar sakunya sendiri.

Sebetulnya itu tidak betul juga, ya? Orang komunis juga bisa korup kalau diberi kesempatan. Tapi mereka tidak pernah punya kesempatan itu. Tapi pandangan orang itu jadi satu keuntungan yang luar biasa buat PKI.

Selain bersihnya PKI itu, mereka memang dianggap punya ide. Ini memang penting sekali, pada akhirnya PKI memang tergantung pada suatu pendirian yang berpihak pada petani. Dan mereka rela ambil resiko. Banyak *pokrol bambu* [pengacara] dari PKI yang keluar, menolong orang di pengadilan dalam perkara tanah. Kalau soal buruh, pada akhirnya yang waktu itu betul-betul memperjuangkan kaum buruh itu siapa? Terutama ya PKI. Akibatnya banyak buruh yang masuk dalam SOBSI [Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia].

2

Dari sudut politik luar negeri, banyak orang waktu itu juga marah pada Amerika karena desakan Amerika yang kadang-kadang memang sangat kasar. Amerika menyokong PRRI/Permesta, termasuk pemboman di Indonesia. Orang marah pada permainan CIA [Central Intelligence Agency], pada kecongkakan pendirian [Presiden] Eisenhower dan selanjutnya, [Presiden] Kennedy. Politik luar negeri Bung Karno yang memakai simbol *Non-Alignment*, tahun 1955 ada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Lalu ada politik anti Nekolim [Neo-Kolonialisme], dan sebagainya, memang sangat meyakinkan buat banyak orang. Nah, PKI juga dapat semacam keuntungan dari keadaan itu.

2

Pemilu Daerah Tahun 1957

T: Bulan Juni dan Juli 1957 diadakan pemilihan umum daerah untuk memilih anggota DPRD. PKI muncul sebagai pemenang. Di Pulau Jawa dan Sumatera Selatan, PNI mendapat 25%; Masyumi mendapat 19%; NU mendapat 25%; dan PKI mendapat 31%. [Angka-angka ini dibulatkan dari buku Lev, Transition, 1966: 97]. Apa dampak Pemilu 1957 dalam politik selanjutnya?

J: Pemilu 1957 menunjukkan pada pimpinan PNI, Masyumi, NU, dan lain-lain, bahwa mungkin sebaiknya sistem parlementer dihapuskan saja. Ini suatu keputusan yang sangat kritis. Kalau sistem parlementer mau diselamatkan, sistem itu harus dapat sokongan dari partai. Tapi di situ kelihatan bahwa kepentingan dari suatu elite sosial-politik dianggap lebih penting dari pada sistem politik yang ada. Kemudian, tahun 1958, waktu Perdana Menteri Juanda mengusulkan supaya Pemilu tahun 1959 dibatalkan, dia dapat sokongan. Ini ironis sekali.

Karena yang menyokong dia itu PNI, Masyumi, PSI, Partai Katolik, Kristen. Yang menentang, menekankan perlunya pemilihan ialah PKI. Nah, ini aneh kan? Karena terang ya bahwa PKI bukan suatu partai yang demokratis, artinya akan dengan senang hati menerima partai-partai lain. Tapi justru mereka yang membela sistem parlementer. Nah, harus ditanyakan, apa sebabnya pimpinan PNI dan lain-lain itu mendukung dibatalkannya Pemilu? Pimpinan PNI dan lain-lain itu belum menjawab pertanyaan ini. Tapi saya tahu akhirnya jawabannya bagaimana. Mereka takut PKI. Itu berarti, tahun 1958 sistem demokrasi yang ada memang dibunuh oleh partai-partai sendiri. Dengan bantuan luar biasa dari tentara dan juga Bung Karno.

Serikat Buruh

T: Tadi Pak Dan menyinggung soal buruh. Dari wawancara dengan Pak Takashi Shiraishi, perlawanan terhadap kolonialisme pada tahun 20-an itu dipelopori oleh serikat-serikat buruh. Tahun 1930-an dan 1940-an kaum buruh sudah tidak punya kekuatan lagi. Dalam dasawarsa 1950-an ini, serikat buruh tumbuh subur lagi. Tetapi hampir semua serikat buruh bergabung dengan partai politik besar pada waktu itu. Dalam wawancara sebelumnya Pak Dan mengatakan: "Ada kelemahan dalam gerakan buruh dulu. Mereka terikat

Membangun Republik 3

ORIGINALITY REPORT

49%

SIMILARITY INDEX

48%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.hamline.edu Internet Source	28%
2	arus.kerjabudaya.org Internet Source	12%
3	hypergeertz.jku.at Internet Source	3%
4	www.munindo.brd.de Internet Source	2%
5	arusbawah20.wordpress.com Internet Source	1%
6	nurrohmahsigit.blogspot.com Internet Source	<1%
7	www.howardri.org Internet Source	<1%
8	faculty.washington.edu Internet Source	<1%
9	historia.id Internet Source	<1%
10	Carlisle. Encyclopedia of Politics Publication	<1%
11	Albrecht. Encyclopedia of Disability Publication	<1%
12	mek.oszk.hu Internet Source	<1%

Asante. Encyclopedia of Black Studies

13	Publication	<1 %
14	budidab.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	Anderson. Encyclopedia of Activism and Social Justice Publication	<1 %
16	bandungfe.net Internet Source	<1 %
17	siba-ese.unile.it Internet Source	<1 %
18	www.ifublog.com Internet Source	<1 %
19	bookz.ru Internet Source	<1 %
20	bbs.5432.net Internet Source	<1 %
21	Mansfeldt, Stefan. "Nuyoricans", Technische Universität Berlin, 2001. Publication	<1 %
22	passent.blog.polityka.pl Internet Source	<1 %
23	www.governmentexecutive.com Internet Source	<1 %
24	etan.org Internet Source	<1 %
25	www.cahayapengharapan.org Internet Source	<1 %
26	paper-and-pencils.co.jp Internet Source	<1 %

27	Europäisches und Internationales Medizinrecht Gesundheitsrecht und Bioethik der Universitäten Heidelberg und Mannheim, 2000. Publication	<1 %
28	www.hrw.org Internet Source	<1 %
29	www.despegar.com.ec Internet Source	<1 %
30	www.dadalos-iizdvv.org Internet Source	<1 %
31	Herrick. Encyclopedia of Social Welfare History in North America Publication	<1 %
32	Goethals. Encyclopedia of Leadership Publication	<1 %
33	Wankel. 21st Century Management Publication	<1 %
34	csasc.org Internet Source	<1 %
35	Andreas Ufen. "Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand", The Pacific Review, 07/2008 Publication	<1 %
36	www.pemilu.asia Internet Source	<1 %
37	www.ejournal-unisma.net Internet Source	<1 %
38	eprints.undip.ac.id Internet Source	<1 %
39	www.goodreads.com Internet Source	<1 %

		<1 %
40	www.wartanews.com Internet Source	<1 %
41	viewer?sid=1f4a0eef-oclc.org Internet Source	<1 %
42	Kolb. Encyclopedia of Business Ethics and Society Publication	<1 %
43	Hickey. Encyclopedia of Murder and Violent Crime Publication	<1 %
44	Karsten. Encyclopedia of War and American Society Publication	<1 %
45	Odekon. Encyclopedia of World Poverty Publication	<1 %
46	Annuaire Européen / European Yearbook, 1961. Publication	<1 %
47	Bryant. 21st Century Sociology A Reference Handbook Publication	<1 %
48	Annuaire Européen / European Yearbook, 1970. Publication	<1 %
49	Warren. Encyclopedia of U.S. Campaigns, Elections, and Electoral Behavior Publication	<1 %

Membangun Republik 4

by Baskara Tulus Wardaya

Submission date: 27-Sep-2017 02:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 853251964

File name: membangun_republik_201-296.pdf (1.01M)

Word count: 28142

Character count: 163996

1 kepada partai.” Apakah pada waktu itu memang ada pilihan lain bagi buruh selain bergabung dengan partai?

J: Saya tidak mengatakan supaya buruh jangan menyokong partai, atau jangan masuk dalam partai. Ada dua soal. Pertama, waktu itu buruh di Indonesia, walaupun jumlahnya banyak, masih merupakan unsur yang belum begitu kuat. Belum jadi kekuatan yang besar. Yang penting cuma buruh dalam perminyakan, beberapa pabrik kecil, buruh kereta api, persatuan guru, dan lain-lain. Kedua, waktu organisasi buruh itu mulai, mereka langsung saja dimasukkan kedalam PNI, PKI, Masyumi, NU, yang semua punya organisasi buruhnya sendiri. Akibatnya tujuan jangka panjang kaum buruh sering dikorbankan untuk tujuan jangka pendek partai. Dan karena buruh itu sudah terbagi-bagi dalam partai, mereka sering tidak bisa omong *blak-blakan* tentang tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Sering mereka tidak diperhatikan oleh pimpinan partai.

Menurut saya memang ada pilihan lain waktu itu. Beberapa serikat buruh itu mulai bisa omong satu sama lain untuk mempersatukan gerakan buruh. Dan pada waktu itu, menurut saya persatuan itu yang akan lebih menguntungkan. Tapi itu semacam fantasi juga, ya. Pada akhirnya mereka terpengaruh oleh partai. Kemudian memang ada konflik dengan partainya. Dalam PKI ada konflik, bukan hanya dengan SOBSI tetapi juga dengan BTI, Barisan Tani Indonesia. Makin lama makin ada ketegangan dengan pimpinan partai. Dalam partai-partai lain saya kira juga begitu. Tapi sudah terlambat.

Masalah SARA

T: Dalam dekade 1950-an ada dua peristiwa penting yang menyangkut soal SARA [Suku, Agama, Ras dan Antar-golongan]. **1** Berdirinya Baperki [Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia] tahun 1954 untuk mencegah SARA, dan keluarnya PP-10 [Peraturan Pemerintah Nomor 10] tahun 1959 yang justru menghidupkan SARA. Pertanyaan pertama, mengapa Baperki berdiri tahun 1954?

J: Mereka takut. Ini memang cerita sendiri. Baperki itu agak tragis dan banyak orang tidak paham sejarah ini. Untuk bisa paham, seperti yang lain juga termasuk tentara, orang harus mengerti sejak jaman kolonial. Orang

Tionghoa itu minoritas yang dipakai sebagai perantara supaya tidak lahir suatu kelas menengah pribumi Indonesia yang tentunya lebih sulit dipegang. Dan mereka sangat terikat pada Belanda. Mereka itu berguna sekali bukan hanya sebagai perantara tetapi juga juga sebagai kambing hitam. Tahun 1920-an dan 1930-an orang Tionghoa sudah mulai pecah. Bukan hanya antara peranakan dan totok tetapi juga antara kiri dan kanan. Ada yang merasa dekat sekali dengan Belanda, atau paling sedikit merasa takut kalau tidak mendapat proteksi dari Belanda. Dan yang lain sudah menganggap diri sebagai orang Indonesia lalu masuk dalam gerakan nasionalis, walaupun sebagian ditolak.

Waktu Revolusi, sama. Ada yang berpihak pada Belanda. Yang lain, seperti di Jogja, ikut berjuang dalam Revolusi. Lainnya tidak berbuat apa-apa kecuali takut sekali pada siapa pun saja. Memang pada waktu Revolusi, bulan Juni 1946, ada kejadian yang sangat kejam di Tangerang. Banyak orang Tionghoa dibunuh begitu saja. Karena takut sekali, ada dua hal yang terjadi. Satu, didirikannya suatu organisasi, *Sin Ming Hui*, yaitu organisasi untuk menolong orang, bukan hanya orang Tionghoa, tetapi siapapun saja. Terutama orang Tionghoa yang sama sekali tidak punya perlindungan lain. Kedua, setelah peristiwa Tangerang itu, didirikan suatu organisasi keamanan, *Pao An Tui*, untuk perlindungan secara fisik kalau perlu.

Pada akhir Revolusi didirikan suatu organisasi politik namanya Partai Demokrat Tionghoa Indonesia. Pimpinan orang Tionghoa waktu itu sadar betul bahwa untuk bisa berbuat sesuatu mereka harus punya organisasi. Tapi mereka terbentur, karena kebanyakan orang Tionghoa sama sekali menjauhkan diri dari politik, takut sekali pada politik. Sesudah tahun 1950, *wah*, keadaan jadi sulit lagi buat orang Tionghoa. Karena kewarganegaraannya ditolak, atau tidak menentu, dan ada banyak insiden. Lalu ada yang mulai masuk macam-macam partai. Ada yang mendekat pada PNI karena memang sudah ada hubungan lama sejak abad-19 antara priyayi Jawa dengan Orang Tionghoa. Banyak kawin campur, dan sebagainya. Yang intelektual masuk PSI. Banyak yang masuk Partai Kristen, Partai Katolik, bahkan ada yang masuk Masyumi, NU, dan lain-lain.

Orang-orang Tionghoa yang ada di parlemen tidak selalu bisa memperhatikan persoalan Tionghoa. Padahal waktu itu keadaan mereka dipersulit. Dan banyak orang Tionghoa mulai khawatir betul dengan nasib mereka. Antara lain karena ketidakpastian tentang kewarganegaraan. Mereka diperas, kadang-kadang diancam, dihantam, dan lain-lain. Tahun 1954 mulai agak gawat. Karena itu semua pimpinan Tionghoa dari macam-macam organisasi berkumpul di Jakarta untuk mendirikan suatu organisasi baru yang bisa mempersatukan. Lahir Baperki. Terutama untuk menangani soal kewarganegaraan yang hangat sekali waktu itu. Tetapi juga untuk mencari semacam jalan keluar bagi minoritas ini. Banyak orang dari berbagai kalangan masuk ke Baperki.

Yang dipilih menjadi pimpinan itu Siauw Giok Tjhan. Ini menarik. Karena kalau kita ingat lagi sejak jaman kolonial, masyarakat Tionghoa seperti minoritas di manapun juga di dunia, selalu mencari pimpinan yang bisa cocok dengan kekuasaan yang ada. Pada jaman kolonial, pimpinan Tionghoa yang kuat adalah yang dekat dengan Belanda. Pada tahun 1950-an, mengapa Pak Siauw yang dipilih? Karena dia kenal baik dengan Bung Karno. Dia juga teman karibnya Pak Sartono, tokoh PNI yang memimpin parlemen waktu itu. Lantas yang konservatif tidak lagi jadi pemimpin.

T: Para pendiri Baperki sangat beragam latar belakangnya dan juga pandangan politiknya. Misalnya Yap Thiam Hien, intelektual Kristen; Oey Tjoe Tat, intelektual nasionalis; Siauw Giok Tjhan, aktivis kemerdekaan yang ideologinya condong ke PKI; Auwyong Peng Koen [P.K. Oyong], tokoh pers yang dekat dengan kelompok Katolik. Sedangkan Inyo Beng Goat dan Tan Po Gwan adalah intelektual yang dekat dengan PSI [Oei Tjoe Tat, 1995: 73-85]. Pertanyaan kedua, pemikiran apa yang bisa menyatukan mereka?

J: Baperki itu memang campur aduk. Ada macam-macam aliran politik, aliran sosial, aliran agama. Tapi semua pimpinan itu orang yang bertanggungjawab, mau menolong minoritas ini. Siauw itu dituduh orang komunis. Memang betul dia komunis. Dan bukan hanya dia, ada beberapa orang lagi. Tapi sebetulnya Siauw itu bukan orang PKI. Malah dia agak marah pada PKI. Kenapa? Karena waktu kelompok Aidit memimpin PKI, mereka juga pikir soal Tionghoa ini. PKI tidak rasialis, pada umumnya, tapi mereka khawatir

kalau ada pemimpinnya yang Tionghoa maka itu tidak akan disenangi masyarakat. Lantas seorang pimpinan PKI lama, Tan Ling Dji, itu dikeluarkan dari pimpinan. Saya pikir Siau w marah. Walaupun Siau w dituduh PKI, dan memang dia kadang-kadang setuju dengan PKI karena politik PKI yang tidak rasialis, tapi buat Siau w yang penting bukan komunismenya. Tapi kesetiaan pada Bung Karno. Dia melihat Bung Karno sebagai harapan untuk minoritas.

Selama Demokrasi Terpimpin, dalam Baperki ada macam-macam konflik. Auwyong Peng Koen keluar. Dia marah karena tidak diberi kedudukan pimpinan yang baik. Dia memang Katolik yang tidak percaya pada Siau w. Tapi Katolik-Katolik yang lain terus. Pak Yap terus juga. Walaupun dia seorang Protestan yang tidak pernah setuju dengan Siau w, tetapi dia sangat menghormati Siau w. Pak Yap dan Pak Siau w itu, memang berlainan pandangan politiknya tapi banyak kesamaan dalam sikap hidupnya. Mereka sama-sama sangat sederhana, bukan orang yang punya ego besar. Dua-duanya betul-betul orang yang bertanggungjawab, dan sangat teguh dengan pendiriannya, karena itu mereka sering bertengkar. Pak Yap tidak setuju dengan komunis, bahkan sangat anti komunis. Dia kritis sekali pada Siau w karena program yang dianggap terlalu kiri pada tahun 1960 itu. Tapi sebetulnya, yang Pak Yap sangat khawatirkan dari Pak Siau w itu bukan komunismenya. Tetapi kesetiaannya pada Bung Karno.

Tahun 1959, di Konstituante, Siau w Giok Tjhan dan semua orang Baperki mendukung ide untuk kembali ke UUD '45, karena itu akan memperkuat Bung Karno. Walaupun dalam UUD '45 itu ada satu dua ayat yang sebetulnya rasialis juga. Seorang Tionghoa tidak bisa jadi presiden, umpamanya. Yang menyerang UUD '45 adalah Pak Yap. Dia menyerang atas dasar prinsip. Nah, sesudah itu, ya sulit. Baperki terus terikat pada Bung Karno dan akhirnya dihancurkan. Tentu tidak semua orang Tionghoa ikut Baperki, malahan cuma minoritas saja. Lalu makin lama Baperki makin kacau-balau, seperti partai-partai lain juga. Karena pengaruhnya di daerah, di luar Jakarta, hampir tidak ada. Kecuali di Jawa Timur. Karena Siau w dari Jawa Timur dan ketua Baperki Jawa Timur adalah adiknya Siau w. Dari satu sudut, Baperki itu memang partai Jawa Timur.

Kalau tentang PP-10, itu sulit juga. Pada umumnya, orang seperti Bung Karno dan elite lama yang terdidik itu sama sekali bukan rasialis. Dan harus diingat, pada umumnya di Indonesia tidak ada rasialisme yang mendalam. Saya tidak setuju dengan pendapat Jamie Mackie, misalnya. Dia berpendapat sejak tahun 1950 banyak kerusuhan dalam masyarakat yang menyebabkan serangan ke orang Tionghoa. Setiap ada kerusuhan anti-Tionghoa yang serius, biasanya itu diorganisasikan dari atas. Seperti Gerakan Asaad itu umpamanya. Begitu juga dengan PP-10, atau rasialisme bulan Mei tahun 1963.

PP-10 itu disokong Masyumi, dan lain-lain, tapi diorganisir oleh tentara. Ada macam-macam tujuan di situ. Memang ada sebagian orang, bukan hanya di tentara, yang menganggap orang Tionghoa itu kaya, harus dibatasi, harus dikirim pulang, dan sebagainya. Bung Karno tidak menyetujui, tetapi terpaksa ikut. Pramoedya Ananta Toer menulis satu buku waktu itu, *'Hoakio di Indonesia'*, tentang orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dan karena itu dia dipenjara. Bukan atas kemauan Bung Karno, tetapi atas kemauan tentara. Selain itu ada tujuan lain. Kalau orang Tionghoa ditakut-takuti, diancam, dipukul, dengan sendirinya akan jauh lebih mudah memeras mereka. Itu taktik biasa.

T: Apa alasan utama tentara mendukung PP-10/59? Peraturan ini melarang orang-orang asing, Cina, India, Arab, dan lain-lain, berdagang di daerah pedesaan. Ini jelas sangat rasialis. Mengapa di Jawa Barat dilaksanakan dengan kejam?

J: Di Jawa Barat perasaan anti Tionghoa memang ada. Waktu itu pimpinan tentara sudah merasa diri bukan hanya sebagai pemain politik, atau pimpinan politik, tetapi juga semacam pembuat politik. Mereka akan membela masyarakat, mau memperbaiki ekonomi. Di Jawa Barat mereka memutuskan untuk memperbaiki ekonomi maka orang Tionghoa harus dikeluarkan. Itu suatu kesalahan yang bukan main. Saya sendiri melihat di desa-desa waktu itu, bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di Jawa Timur yang keadaannya berbeda. Di Jawa Barat orang desa tidak setuju kalau Tionghoa dipindahkan. Karena itu malah merugikan buat orang desa itu. Tentara lalu ambil oper isu itu karena menganggap ini akan mendapat sokongan rakyat. Padahal tidak.

Birokrasi

T: Dalam tulisan Evers di buku *Democracy*, disertakan tabel jumlah pegawai negeri (Bourchier and Legge, 1994: 266). Ditunjukkan di situ ada dua kali kenaikan jumlah pegawai negeri yang sangat mencolok. Pertama dari 82 ribu pada tahun 1940 menjadi 303 ribu pada tahun 1950. Dan kedua dari 515 ribu pada tahun 1970 menjadi 2 juta tahun 1980. Tolong Pak Dan jelaskan mengapa selama dekade 1940-an jumlah pegawai negeri itu melonjak hampir 4 kali lipat. Sedangkan selama jaman Demokrasi Liberal, dekade 1950-an, kenaikan jumlah pegawai negeri hanya 90 ribu orang. Apa arti data ini untuk memahami politik tahun 1950-an?

J: Saya juga sudah melihat statistik itu. Tapi belum begitu terang buat saya apakah data untuk tahun 1940 dan 1950 itu termasuk juga tentara. Kalau tahun 1980 memang sudah termasuk tentara. Sesudah tahun 1950 banyak orang yang masuk pegawai negeri. Karena memang ada pekerjaan di situ dan karena pegawai negeri dianggap statusnya tinggi. Selain itu, partai-partai, seperti partai di manapun saja, memakai tempat di birokrasi itu sebagai patronase. Anggota partai ditempatkan di situ supaya mereka senang dan dari situ juga bisa membantu partainya. Tahun 1950-an, seperti di negara lain juga, di Indonesia semua partai ingin mendapat sebagian dari birokrasi. Misalnya PNI dapat penerangan, NU dan Masyumi dapat departemen agama, dan seterusnya.

Kenaikan jumlah birokrasi itu menunjukkan beberapa hal yang penting. Satu, karena pemerintah memperluas fungsinya dengan sendirinya akan mengangkat lebih banyak pegawai. Tapi dari sudut politik, orang-orang yang masuk dalam birokrasi itu kemudian menganggap diri berkepentingan dengan birokrasi itu. Artinya birokrasi jadi semacam partai politik. Dan di Indonesia ada tendensi dari pimpinan negara untuk menganggap birokrasi sebagai pendukung utamanya. Itu berarti kepentingan birokrasi harus dilayani terus. Nah, ini ada pengaruh yang agak berbahaya. Karena kemudian semua pegawai negeri memandang hubungan dengan pimpinan politik atau dengan pimpinan negara sebagai hubungan yang paling utama. Akibatnya mereka tidak merasa bertanggung-jawab kepada hukum atau kepada fungsinya, tetapi kepada pemimpin.

Di Indonesia, sistem politiknya jadi didasarkan sebagian yang menentukan birokrasi. Semacam sistem politik-birokrasi, *bureaucratic-politics*. Dari sudut reform nanti, akan sulit sekali untuk meyakinkan para pegawai negeri bahwa mereka terikat pada undang-undang atau pada hukum dan bertanggungjawab pada masyarakat, bukan pada pimpinan politik. Besarnya birokrasi itu memang agak penting. Tapi kalau birokrasi dianggap bagian terbesar dari kelas menengah di Indonesia, dari sudut analisis pembaharuan politik ini saya tidak setuju.

Menurut saya, ciri yang terpenting dari kelas menengah adalah mereka bukan bagian dari birokrasi, bukan bagian dari negara. Jumlah birokrasi di Indonesia memang terlalu banyak. Tapi saya tidak melihat hal ini terlalu luar biasa.

Yang dapat ditanyakan adalah tentang kualitas birokrasi itu. Yang menarik di Indonesia, dulu yang menjadi birokrat berasal dari kelas yang terdidik, kelas atas, aristokrasi. Sekarang mereka tidak masuk lagi dalam birokrasi. Mereka masuk ekonomi swasta. Yang sekarang jadi birokrat itu orang macam lain. Dari satu sudut ini penting juga, karena orang yang tidak berasal dari aristokrasi itu harus mencari landasan lain. Dan seringkali landasan lain itu adalah kecakapan. Sayang sekali riset yang betul-betul baik tentang birokrasi belum ada. Padahal ini sangat, sangat penting. Hans Dieter Evers dan lain-lain yang mau omong tentang birokrasi di Indonesia, harus mencari data dulu. Kalau statistik dan jumlah, itu gampang saja. Tapi bagaimana keinginan orang dalam birokrasi, pandangannya terhadap kerja, keterikatan pada pemimpin, atau pada hukum, frustrasinya, dan sebagainya. Tentang itu kita tidak tahu apa-apa.

Dekrit Presiden 5 Juli 1959

T: Tgl 5 Juli 1959 Bung Karno mengeluarkan Dekrit kembali ke UUD '45. Konstituante dibubarkan. Mulailah jaman Demokrasi Terpimpin. Sekarang seringkali Demokrasi Terpimpin itu dianggap ciptaan Bung Karno. Kami ingin mendengar penjelasan dari Pak Dan, mengapa Konstituante dibubarkan? Dan siapa yang paling berkepentingan, atau siapa yang paling diuntungkan, dengan pembubaran Konstituante itu?

J: Ini memang pertanyaan menarik. Sebetulnya Demokrasi Terpimpin sebagian besar diciptakan oleh tentara. Waktu itu mereka yang paling kuat, yang paling bisa mendesak. Dalam hal dekrit, menurut saya Bung Karno tidak mau, tetapi terpaksa. Lalu dia harus memperjuangkan pendiriannya sendiri. Bung Karno tahu betul bahwa dia tidak bisa seluruhnya mengontrol tentara. Lantas dia harus cari kekuatan lain yang bisa mengimbangi tentara. Yang dapat dipakai hanya PKI. Walaupun menurut saya Bung Karno tidak terlalu senang dengan PKI. Tapi partai-partai lain agak lemah. Masyumi sudah dibubarkan pertengahan tahun 1960. PSI juga, tapi PSI tidak begitu kuat. NU dan partai-partai Islam yang kecil itu sulit dipakai. Tahun 1958 dia coba menghidupkan kembali partainya sendiri, yaitu Partindo. Tapi Partindo belum pernah mendapat dukungan yang luas. Maka dia terpaksa pakai PKI.

Lalu ada konflik terus menerus antara tentara dan Bung Karno. Kepentingan tentara sebagian memang sudah dilayani. Para perwira dapat tempat yang baik. Jumlah perwira di kabinet terus naik. Pada akhirnya tentara tahu bahwa mereka bisa mengontrol keadaan karena mereka yang punya senjata. Ini juga bukan sesuatu yang luar biasa.

Saya kira, sudah tiba waktunya kita memikirkan kembali peranan Bung Karno. Semua yang mempelajari sejarah politik Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat terpengaruh oleh keadaan waktu itu. Semua menganggap Bung Karno sangat besar. Betul dia punya pengaruh, itu tidak dapat disangkal. Tapi semakin lama, saya semakin berpikir bahwa Bung Karno agak menderita waktu itu. Karena pada akhirnya dia tidak bisa banyak mempengaruhi keadaan. Pertama, karena dia tidak mempunyai organisasi yang baik, yang efektif, yang selalu bisa dikerahkan. Kedua, saya tidak yakin Bung Karno punya suatu imajinasi politik yang sangat jauh. Seperti orang lain juga, dia sangat terikat pada ide-ide yang berasal dari jaman kolonial tahun 1920-1930an. Idenya tidak banyak berubah. Ketiga, dia memang terlalu banyak dipengaruhi oleh para penjiat disekitarnya. Terlihat sekali dalam memoarnya Oei Tjoe Tat. Orang-orang takut untuk mengatakan terus terang kepada Bung Karno bahwa dia berbuat salah. Akhirnya Bung Karno

mulai merasa diri menjadi orang yang sangat penting, sangat besar, sangat sangat. Karena setiap hari dia ketemu dengan penjilat.

Lantas bisa ditanyakan bagaimana imajinasi politiknya? Keadaan ekonomi pada Demokrasi Terpimpin jadi jelek sekali. Banyak orang sekarang yang menganggap Demokrasi Terpimpin itu periode yang baik, yang menarik. Tapi waktu itu keadaan memang kacau sekali. Banyak orang yang betul menderita. Lembaga- lembaga negara tidak diperkuat, malah dikorup. Waktu itu mulai korupsi di pengadilan, yang sekarang menjadi menonjol sekali. Sudah banyak hakim yang menyerah saja pada Bung Karno. Memang ada satu dua yang menentang, coba otonom, tapi akhirnya lembaga pengadilan jadi rusak. Kejaksaan jadi korup sekali. Polisi juga. Dari sudut pemerintah, okelah kalau hakim-hakim, jaksa-jaksa, polisi, itu korup. Asal saja mereka setia pada negara. Dan Pak Nas sendiri waktu itu setuju. Kalau kalau pegawai negeri tidak dapat gaji cukup terpaksa mengijinkan mereka memeras. Tapi yang diperas itu siapa? Ya, rakyat biasa. Sebetulnya itulah warisan Demokrasi Terpimpin yang belum pernah dikoreksi. Karena Orde Baru ini persis sama dengan Demokrasi Terpimpin dalam bentuk politiknya. Yang jelas beruntung dalam Demokrasi Terpimpin adalah tentara. Karena tentara sendiri yang menciptakannya.

Konstituante

T: Dalam studinya, Adnan Buyung Nasution [1992/1995] berpendapat bahwa sebenarnya Konstituante nyaris berhasil. Hal paling mendasar, yaitu komitmen terhadap demokrasi, penghargaan terhadap hak asasi manusia, dan dibatasinya kekuasaan pemerintah, itu sudah disepakati. Apakah Pak Dan sepakat bahwa penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia adalah hal paling penting yang harus dicantumkan dalam UUD?

J: Kalau dikatakan yang paling penting, saya ndak tahu ya. Tapi menurut saya memang penting kalau di dalam suatu konstitusi ada hak-hak asasi manusia. Bukan karena itu akan menjamin hak-hak asasi, tetapi paling sedikit secara simbolis itu akan memberikan semacam pegangan yang bisa dipakai orang untuk membela diri. Kalau dalam konstitusi dicantumkan hak-hak asasi

atau *civil rights*, itu berarti orang paling sedikit bisa mengejar hak-haknya, bisa membela diri.

Ide Marsilam Simanjuntak tentang UUD '45 dan pengaruh Supomo itu juga penting. Konstitusi itu, di manapun saja, pengaruhnya sangat terbatas. Selalu bisa disingkirkan oleh kepentingan politik, bisa dibohongi, dan seterusnya. Tapi *toh* di situ ada nilai-nilai yang seharusnya bisa jadi pegangan orang. Tahun 1945, profesor Supomo itu memang tidak menginginkan hak-hak asasi manusia. Di situ dia mengatakan blak-blakan bahwa hak asasi manusia itu hak individu yang bisa dipakai untuk melawan pemerintah. Ya, dengan sendirinya. Karena pemerintah, di manapun saja, itu bahaya yang paling besar untuk orang. Supomo tidak menginginkan itu karena dia menganggap bahwa pemerintah akan dipimpin oleh orang-orang yang baik. Yaitu kalangannya dia sendiri. Sulitnya, dalam setiap pemerintahan para pemimpin menganggap dirinya baik. Tapi pemerintah, di manapun saja, bisa sangat merugikan orang. Dengan senjata dia bisa membunuh orang, bisa apa saja. Dalam konstitusi, sebagai ideal, kalau ada hak asasi manusia seperti yang ada di dalam UUD tahun 1950, itu akan memberi sedikit harapan.

Tentang analisa Buyung, saya setuju. Paling tidak studinya Buyung itu meyakinkan buat saya. Konstituante memang setuju tentang hak asasi manusia. Mereka juga sudah setuju tentang banyak hal lain lagi. Tetapi karena pertentangan politik, yang memang biasa di antara partai-partai di manapun juga, maka proses itu lama. Kita tidak tahu apakah kalau diberikan banyak waktu mereka akan bisa mengadakan kompromi atau tidak. Tapi yang jelas mereka tidak diberi waktu lagi.

Politik Luar Negeri

T: Sejak awal tahun 1950-an Perang Dingin sudah mulai. Apa dampak utama Perang Dingin dalam politik Indonesia?

J: Wah, ini betul mengacaukan! Pada tahun 1950-1951 dubes Amerika sudah mendesak Indonesia untuk ikut dalam suatu persetujuan yang akan mengikat Indonesia pada Amerika. Akibatnya Kabinet Sukiman jatuh. Tapi pemerintah AS mendesak terus. Terutama setelah pemilihan Eisenhower

tahun 1952. Walaupun ahli-ahli di pemerintahan Amerika tidak tahu banyak tentang Indonesia, Perang Dingin itu sudah menggambarkan dunia dibagi dua. Sebelah sana ada komunisme, Uni Soviet. Sebelah sini ada free world. Siapa saja yang tidak masuk yang satu dengan sendirinya masuk yang lain. Banyak pemimpin Indonesia yang setuju dengan Amerika, ada juga yang setuju dengan Soviet. Dan itu mempengaruhi kedua *great powers* ini untuk mempermainkan sebagian politik luar negeri maupun dalam negeri Indonesia. Ada semacam korupsi internasional. Baik Moskow maupun Washington mencurahkan banyak sekali uang, kasih apa saja yang diminta, terutama senjata. Pengaruh luar ini harus selalu dipikirkan, bukan hanya pada tahun 1950-an tetapi juga sesudahnya.

Politik Masyumi Dan NU Tahun 1950-an

T: Ini pertanyaan susulan Pak Dan, yang belum ada dalam daftar pertanyaan yang kami kirim. Tentang politik dua partai Islam yang kuat setelah Pemilu 1955, Masyumi dan NU. Mengapa mereka berbeda pendapat dalam soal DI-TII dan dalam krisis Pusat-Daerah pada tahun 1957-1958? Sedangkan dalam Konstituante mereka bisa bersatu. Apakah ini menunjukkan bahwa dalam politik praktis, walaupun memakai simbol agama, kepentingan praktis juga yang akhirnya menentukan? Selama dekade 1950-an posisi Masyumi dan NU dalam parlemen maupun dalam pemerintahan sangat kuat. Apakah ada agenda besar yang disusun bersama oleh Masyumi dan NU?

J: NU dan Masyumi itu berlainan. Sebagian karena NU, seperti juga PNI dan PKI, adalah partai yang terpusat di Jawa. Dari satu sudut, Masyumi dulu adalah partai nasional yang 50% pemilihnya dari Jawa dan 50% lagi dari luar Jawa. Ini mengikuti penyebaran penduduk Indonesia. Orang-orang yang menyokong ide-ide Masyumi berasal dari daerah pantai, dari kalangan pedagang, orang-orang Muhamadiyah yang terdidik dan agak agresif. Sedangkan NU itu kekuatannya di Jawa Timur dan di dalam birokrasi agama.

Dan sebetulnya NU merupakan suatu partai yang agak defensif, yang dimaksudkan untuk membela agama dari campur tangan luar. Nah pengaruh pemilih di Jawa dan luar Jawa ini sangat penting. Itu terjadi di manapun saja.

Kalau di Konstituante ini agak lain. Walaupun NU dan Masyumi akhirnya setuju menolak UUD '45, tapi pada mulanya tidak begitu keadaannya. Mulanya pimpinan NU sudah mau menyokong UUD '45 karena desakan keras dari tentara dan Bung Karno. Dan tahun 1959 itu mereka diancam. Beberapa pimpinan NU diberitahu kalau mereka tidak menyokong UUD '45, maka mereka akan dituntut ke pengadilan karena ada sedikit korupsi. Lantas mereka setuju. Tapi kemudian orang-orang Masyumi mendekati anggota-anggota NU dan meyakinkan mereka bahwa ini perjuangan agama. Lalu ada semacam pemberontakan di dalam NU, dan pimpinan NU terpaksa ikut anggotanya.

NU ini partai yang menarik. Ini partai yang berdasarkan pandangan dan kepentingan yang jelas. Sebetulnya NU tidak terlalu banyak menghiraukan negara yang harus berdasarkan Islam, walaupun itu dijadikan sebagai simbolnya. Mereka defensif. Pokoknya mereka ingin bisa *survive* dalam pemerintah untuk membela kepentingan mereka itu. Masyumi juga menarik tapi dari sudut lain. Sebetulnya dalam Masyumi, dari dulu tidak pernah ada perdebatan tentang apa arti Islam dalam negara. Banyak pemimpin Masyumi, seperti Pak Roem dan Burhanudin Harahap, yang menganggap Masyumi itu agak seperti Partai Kristen Demokrat di Eropa. Yang tidak memaksakan agama, tetapi mau memperjuangkan semacam ide etika Islam. Ini memang persoalan yang sangat sulit, ruwet sekali, ya. Jadi tidak pernah dibicarakan di dalam partai, apalagi di luar partai. Mereka takut kalau dibicarakan terus terang akan terlihat perbedaan di dalam Islam. Lalu mereka mengelak terus. Akibatnya ide itu jadi agak kabur.

Dalam ceramah saya di Yayasan Soedjatmoko bulan Maret 1994 saya bilang, buat suatu republik atau demokrasi yang sehat, agama itu sangat diperlukan. Karena pada akhirnya dalam agama ada semacam standard etika. Dan mau tidak mau pimpinan agama terpaksa memikirkan hal itu. Memang harus dipikirkan kembali, bagaimana bentuk pengaruhnya.

Interpretasi Tentang Tahun 1950-an

T: Ini kami mengutip data dari tulisan Anthony Reid dalam buku Democracy. Dalam tahun 1945-49 ada 4 perdana menteri, kabinet ganti setiap 10

bulan. Dari tahun 1950 sampai 1957, ada 6 Perdana Menteri, kabinet ganti setiap 12 bulan [Bourchier and Legge, 1994: 314]. Data itu, menurut Reid, menunjukkan “How effective, indeed virtually indispensable, multiple parties, electoral processes and representative assemblies can be in moderating and channeling dangerous primordial conflicts and bringing them into a national forum where they can be debated”. Masih menurut Reid: “Democratic pluralism proved the only practical means for government to govern”. Tetapi menurut versi sejarah Indonesia sekarang, tahun 1950-an itu dianggap masa anarki. Bagaimana Pak Dan memahami dua interpretasi yang sangat berbeda ini?

J: Saya tidak setuju dengan kedua-duanya. Setiap pemerintah, di mana saja, bisa memakai kekerasan. Dari sudut kekuatan pemerintah, bisa dikatakan pemerintahan Pak Harto itu sangat efektif. Kalau mau pakai senjata, pakai kekerasan supaya orang takut, itu metoda pemerintahan yang sangat efektif. Yang harus dipikirkan bagaimana dari sudut orang kebanyakan dalam masyarakat, sistem mana yang lebih memuaskan kepentingan yang ada, perasaan yang ada, tujuan yang ada.

Saya mengerti perasaan Anthony Reid. Malah dari satu sudut saya setuju. Tapi dia agak terlalu jauh. Menurut saya, yang sudah dibuktikan oleh sistem parlementer Indonesia adalah bahwa orang memang bisa saja setuju dengan sistem itu. Dan waktu itu sistem parlementer bisa jalan dengan baik. Dapat dibandingkan, umpamanya dengan Perancis, Italia, atau negara-negara lain.

1 Yang mau saya tekankan, seperti sudah saya bilang tadi, ini suatu sistem yang bisa jalan dengan baik hanya lima tahun setelah Revolusi, sesudah ada 10 tahun kekacauan. Terbukti ada partisipasi yang luas. Orang-orang bisa memperjuangkan ide-ide mereka. Dan yang penting sekali, dari tahun 1950 sampai 1958, tidak banyak orang yang mati. Orang bisa main politik tanpa saling memukul, tanpa membunuh orang lain. Sesudah tahun 1959, dengan Demokrasi Terpimpin, keadaan makin kacau. Timbul semacam *street violence*. Saya masih ingat waktu tahun 1964, di Jawa dan Bali orang mulai lempar granat segala macam. Lantas mulai bunuh-membunuh. Sesudah Orde Baru, kita semua tahu, ratusan ribu orang yang mati, banyak yang masuk penjara, dan seterusnya.

Dari sudut efektifitas, tergantung dari perspektif mana. Kalau dilihat dari atas, Orde Baru ini sangat efisien, sangat efektif. Kalau dilihat dari bawah, ya agak kurang memuaskan. Kelihatan di Indonesia banyak yang kurang senang. Pada waktu Demokrasi Parlementer, memang banyak orang yang *ngomel* terus, ya. Tapi mereka juga ikut partisipasi, bisa bertukar pikiran. Itu lain. Apakah waktu itu ada anarki? Menurut orang-orang yang senang dengan efisiensi, dengan aturan, dan sebagainya, ya mungkin kelihatan *chaotic*. Padahal tidak. Yang *chaos* itu adalah Demokrasi Terpimpin. Karena di situ semua orang terpaksa cari nafkahnya sendiri. Ini tidak untuk mengatakan bahwa sistem parlementer itu sempurna. Karena memang tidak ada kesempurnaan dalam sistem politik apapun juga, di manapun juga. Tapi paling sedikit di Indonesia itu bisa jalan dengan baik. Kalau sering ganti pemerintah, ya itu *kan* soal biasa dalam sistem parlementer. Seperti juga di Perancis, misalnya.

Harus diakui, dari segi politik-sosial-kebudayaan, Indonesia itu merupakan salah satu negara dan masyarakat yang paling kompleks di seluruh dunia. Kalau di situ ada banyak partai, memang dapat dimengerti. Kalau diijinkan, dengan sendirinya di Indonesia akan ada banyak partai. Menurut saya, itu malah sehat.

Di Amerika ini banyak orang, termasuk saya sendiri, yang sangat menginginkan ada satu dua partai lagi. Karena dua partai yang sudah ada tidak cukup. Menurut saya, tiga partai yang di Indonesia [selama Orde Baru] itu juga tidak cukup.

Kesimpulan

T: Kalau ingin disimpulkan, apa pelajaran yang dapat ditarik dari perjuangan untuk membangun republik dalam dasawarsa 1950-an? Di mana macetnya usaha membangun Republik Indonesia yang masih muda itu? Dan bagaimana kesimpulan Pak Dan itu bisa menjelaskan peristiwa-peristiwa besar yang kemudian terjadi di tahun 1960-an. Seperti pembunuhan pada tahun 1965-1966, jatuhnya Bung Karno, munculnya Orde Baru, Dwi-Fungsi ABRI, banjirnya modal luar negeri, dan sebagainya.

J: Ini pertanyaan yang agak luar biasa dan sulit menjawabnya. Ada dua hal dari tahun 1950-an. Satu, bahwa sistem parlementer itu bisa berhasil

dengan baik kalau tidak dihalangi. Rakyat Indonesia cukup senang dengan sistem parlementer. Mereka bisa membiasakan diri dengan partai-partai dan cukup bertanggungjawab. Dua, saya kira yang penting dalam politik, dalam masyarakat di manapun saja, itu bukan kebudayaan. Pertanyaan yang paling penting tentang runtuhnya sistem parlementer bukanlah: “Apakah ada landasan budaya yang cukup untuk demokrasi?” Itu jelas ada. Yang harus ditanyakan adalah: “Siapa yang menyebabkan sistem parlementer itu gagal?” Pertanyaan itu akan memaksa kita untuk memikirkan sebab-sebab keruntuhan sistem parlementer itu. Dan menurut saya, faktor yang terbesar itu tentara. Yang punya kepentingan politik, ekonomi dan lain-lain juga.

Yang terjadi tahun 1965 itu memang suatu malapetaka. Bukan hanya untuk ukuran Indonesia. Kalau dilihat dalam abad ke-20 ini, yang begitu penuh dengan tragedi, maka Tragedi ‘65 di Indonesia itu harus dianggap cukup besar. Pertama, harus ditanyakan “Kenapa itu bisa terjadi?” Menurut saya, itu terjadi karena sistem politik Indonesia waktu Demokrasi Terpimpin itu kekurangan kontrol. Tidak bisa mencukupi keperluan di Indonesia. Antara lain keperluan supaya orang tidak bisa dibunuh begitu saja. Kedua, pengalaman ini menunjukkan bahwa kalau tentara, di manapun saja, memainkan peranan dalam politik, dengan sendirinya tentara itu akan memakai keahliannya. Keahlian tentara adalah membunuh orang. Keahlian pimpinan politik sipil ialah membuat kompromi.

Ketiga, menurut saya pengalaman ini menunjukkan masyarakat memerlukan lembaga-lembaga yang dapat melayani kepentingan masyarakat. Termasuk melayani kepentingan keamanan mereka. Lembaga-lembaga yang bisa disesuaikan, dan kalau perlu dapat diubah, walaupun sulit. Supaya mereka tidak bisa diperlakukan secara sewenang-wenang. Supaya mereka bisa merasa cukup bebas. Lembaga-lembaga itu harus bisa mengontrol pimpinan, dari manapun saja, supaya mereka tidak main gila. Ini argumen konservatif, bukan radikal. Argumen ini didasarkan atas keinginan manusia biasa untuk bisa berdamai, bisa cari makan, tidak ketakutan. Untuk itu butuh lembaga-lembaga yang *safe* betul.

Menurut saya, lembaga-lembaga seperti itu bisa dijalankan oleh pimpinan sipil yang dipilih oleh rakyat, bertanggungjawab pada rakyat.

Kalau pimpinan tentara, ya agak sulit. Karena mereka tidak tergantung pada siapapun saja, kecuali dirinya sendiri dan senjata. Dan ini bukan untuk menyalahkan ABRI, walaupun sebetulnya bisa disalahkan. Karena tentara, di manapun saja, kalau sudah ada dalam kedudukan kekuasaan, mereka akan merasa terdorong untuk memakai keahliannya. Di mana saja tentara masuk, kalau ada kesulitan apa saja, mereka akan cepat angkat senjata. Seorang sipil tidak selalu akan berbuat begitu. Ini biasanya, ya. Kecuali ada tentara di belakangnya. Menurut saya, republik yang baik itu sangat tergantung pada adanya tentara yang betul-betul bisa dikontrol. Kalau tentara tidak diperlukan untuk perang dengan luar negeri, ya tidak perlu ada tentara yang besar. Tidak perlu ada anggaran pertahanan yang besar. Ini berlaku bukan hanya untuk Indonesia. Tetapi juga untuk Amerika dan negara manapun saja. Yang lebih penting dari pada tentara adalah rakyat.

Masih ada pelajaran yang lain. Dalam [hidup bermasyarakat] kita harus selalu memikirkan: apa tujuan negara itu? Siapa yang bakal mendapat untung dari negara itu? Untuk apa masyarakat berkumpul membuat negara itu? Sekarang di Indonesia memang ada jaman pembangunan, ada banyak uang. Ada elite yang makin kaya. Memang harus diakui pada umumnya sekarang rakyat makan lebih banyak dari pada waktu Demokrasi Terpimpin. Tapi kelihatan ada semacam kekosongan di antara orang banyak di Indonesia. Kekosongan tujuan, kekosongan etika, timbulnya pesimisme, sinisme yang luar biasa. Harus dipikirkan, apa sebabnya. Saya pikir jawabannya agak jelas. Karena dalam sistem politik Indonesia sekarang, lembaga-lembaga yang ada hanya milik pemerintah saja. Lembaga-lembaga di Indonesia sekarang tidak lagi dapat dipegang atau dikendalikan oleh rakyat Indonesia. Dan saya tidak setuju dengan orang yang mengatakan, ya itu budaya Indonesia. Itu omong kosong.

Bab Tujuh

Menyalakan Lilin dalam Kegelapan

2

Goenawan Mohamad

Tentang Perjuangan Demokrasi 1990-an



BICARA **TENTANG** kesadaran sejarah Goenawan Mohamad mengatakan bahwa sekarang ini pengalaman dari satu generasi ke generasi berikut kurang dihubungkan. Sebagai akibatnya, lanjut pendiri dan mantan Pemimpin Redaksi majalah Tempo ini: “Kita jadi gampang mengulang lagi kesalahan sejarah.” Jika demikian, dengan cara apa kita bisa memperkuat kesadaran sejarah? “Dengan banyak membaca,” jawab orang yang biasa kami panggil Mas Goen itu. Tentang bagaimana dulu pemerintah Orde Baru mengontrol informasi dia mengatakan: “Pertama, dengan mengontrol media massa [seperti] TV, surat kabar, radio, dan lain-lain.” Yang kedua? “Kedua, dengan membuat informasi versi sendiri.”

Sementara itu mengenai mengapa masalah Pembunuhan Massal tahun 1965 sangat dirahasiakan oleh pemerintah Orde Baru ia mengatakan: “Pertama, mungkin pemerintah [Orde Baru] menyadari bahwa yang sudah terjadi itu mengerikan dan dosa itu menjadi lebih kelihatan karena banyak orang yang tidak berdosa dibunuh.” Selanjutnya terkait dengan soal ketakutan kolektif akibat kekejaman pada tahun 1965 itu Mas Goen menyebutkan

Lalu saya melihat yang muda-muda. Mereka tidak takut. Kalau mereka tidak takut, saya yang sudah punya nama, kekayaan, anak sudah tidak perlu dijamin, masa sih?

adanya “politik ingatan”, di mana “ingatan dijadikan salah satu alat kekuasaan untuk mengontrol masyarakat.” Berkenaan dengan masalah demokrasi, penulis yang dikenal dengan “Catatan Pinggir”-nya ini bertutur: “Yang seharusnya menjadi batas adalah hukum yang adil. Oleh karena itu hukum

menjadi penting bagi demokrasi. Dan perjuangan dalam bidang hukum menjadi penting dalam perjuangan demokrasi.”

Soal ketegangan antara etnis Tionghoa dan Non-Tionghoa ia mengatakan: “Soal ketegangan dengan etnis Tionghoa itu memang mendalam akarnya”. Menurut dia: “Ada hubungan dengan politik kolonial Belanda. Persepsi orang mengenai ras itu diresmikan, dilembagakan dan dijadikan hukum dalam jaman kolonial.” Dan menurut dia: „Kalau dibilang [bahwa] suatu budaya itu ada hubungan dengan suatu perilaku politik, saya kira itu omong kosong!“

Ada banyak hal yang menurut dia bisa kita pelajari dari para aktivis-politik muda menjelang tumbangnya pemerintahan Orde baru. Misalnya saja „Kemauan anak-anak muda itu untuk berjuang walaupun hidupnya melarat.“ Sementara itu yang menurut Mas Goen mesti dipelajari oleh anak-anak muda itu adalah: “Pertama, perlu belajar bekerjasama.” Selain itu perlu juga “meyakinkan kelas menengah, intelektual yang mereka tidak kenal, para usahawan, dan lain-lain tentang pentingnya perubahan.” Akhirnya tentang tidak mudahnya perjuangan demokrasi ia mengatakan: “Dalam kegelapan kita [hendaknya] jangan mengeluh, tapi menyalakan lilin.” Wawancara di bawah kami lakukan tanggal 15 November 1996, saat Mas Goen sedang berkunjung ke Amerika Serikat.

Pengetahuan Sejarah

T (Tanya): Pengetahuan sejarah yang kami dapat selama ini tidak bisa mengilhami dalam menghadapi kenyataan dalam masyarakat. Menurut

Anda bagaimana pengetahuan sejarah pada umumnya di kalangan aktivis pro-demokrasi?

J (Jawab): Para aktivis kadang-kadang meromantisir tokoh masa lalu, misalnya Bung Karno. Padahal sebetulnya banyak juga yang dapat kita pelajari dari kesalahan-kesalahan beliau pada saat itu. Atau meromantisir PKI —yang memang partai yang luar biasa— sementara banyak juga hal yang bisa dipelajari dari kesalahan mereka. Atau memuja Sjahrir, seakan-akan Sjahrir adalah kesempurnaan. Peng-romantisir-an ini bisa membuat sejarah menjadi legenda.

Saya kira ini disebabkan karena tidak adanya “*institutional memory*”, suatu istilah yang saya pinjam dari Daniel Lev. Pengalaman dari generasi ke generasi itu tidak dihubungkan. Karena yang menyimpan memori ini tidak ada, kita pun harus belajar dari nol lagi. Karena tidak ada *institutional memory* itu kita jadi gampang mengulang lagi kesalahan sejarah. Adanya pemahaman sejarah yang baik bisa membantu menghindari kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Mengenai keberanian mereka menggugat suara resmi pemerintah [dalam hal ini pemerintah Orde Baru] ini sudah bagus. Tentang bagaimana hasilnya, masih lemah atau tidak, itu tidak begitu penting. Mereka kan tidak harus menjadi sejarawan.

T: Langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk memperdalam pengetahuan sejarah ini?

J: Dengan banyak membaca! Dan kalau bisa juga menulis tentang sejarah itu. Sekarang sudah banyak buku-buku sejarah yang bagus. Sekarang juga banyak memoar yang sudah terbit, walaupun tidak selalu harus dipercaya. Memoar ini dapat membantu kita mengingat momen yang sudah berlalu. Memoar menjadi penting karena umur orang makin panjang sehingga banyak orang mengingat dengan membikin memoar. Membaca buku-buku itu akan memperkuat pemahaman sejarah.

Blokade Informasi

T: Di Indonesia banyak informasi yang tidak kita dapatkan. Misalnya soal pembunuhan massal 1965, soal ratusan ribu orang yang dibunuh di Timor

Timur [sekarang Timor Leste], soal penyerbuan markas PDI [Partai Demokrasi Indonesia] 27 Juli 1996, atau soal kerusuhan di Situbondo, Jawa Timur, tahun 1996. Itu semua lebih banyak kami ketahui dengan mengikuti media alternatif seperti di internet. Mas Goen yang sudah pernah menjadi pemimpin redaksi majalah Tempo, tentunya mengetahui banyak lika-liku media ini. Mengapa pemerintah [Orde Baru] menyensor media? Apa pemikiran yang mendasarinya?

J: Saya kira hampir semua pemerintah tidak suka mengungkapkan keadaan yang sebenarnya, apalagi yang negatif, ke masyarakat. Yang menarik pada pemerintah Indonesia adalah yang penting bukan dampak dari informasi itu ke masyarakat, melainkan apakah informasi itu menyakitkan hati pribadi-pribadi. Meskipun informasi itu terbatas lingkupnya atau pasarnya, tetapi kalau menyakitkan hati seseorang itu bisa menjadi masalah. Alasannya karena informasi itu dianggap sebagai ancaman terhadap pribadi. Padahal dalam suatu masyarakat yang pemimpinnya itu dipilih sebetulnya yang menjadi problem bukan menyakitkan hati atau tidak. Yang penting adalah dampak ke pemilih itu apa.

Pikiran yang mendasarinya itu adalah ketidak-percayaan bahwa masyarakat itu bisa memberikan suatu penilaian dengan bebas. Ini sebetulnya penghinaan terhadap kecerdasan rakyat.

T: Bagaimana cara pemerintah Orde Baru mengontrol arus informasi atau mencegah informasi supaya tidak diketahui oleh masyarakat banyak?

J: Pertama, dengan mengontrol media massa seperti TV, surat kabar, radio, dan lain-lain. Kedua, dengan membuat informasi versi sendiri. Problemnya bagi pemerintah adalah, biarpun mereka melakukan semua ini, kejujuran dan kredibilitas pemerintah itu terasa sangat lemah di mata masyarakat. Akibatnya usaha pemerintah sia-sia. Penyebabnya bukan karena berita tandingan di internet saja, melainkan juga desas-desus dan sebagainya.

Pemerintah yang tidak pernah dihadapi oleh pertanyaan-pertanyaan moral dan tidak biasa bertanggung-jawab semakin lama akan [semakin] hilang kapasitasnya untuk bisa persuasif. Bahkan dalam berbohong pun akan susah. Contoh yang baik adalah Peristiwa 27 Juli 1996. Dikatakan ini

PRD [Partai Rakyat Demokratik] yang bikin. Dikatakan PDI yang pecah. Dikatakan ini pekerjaan komunis, dan lain-lain. Tapi yang dikatakan pemerintah itu tidak ada yang meyakinkan. Seorang wartawan yang datang ke daerah Salemba [Jakarta] di dekat gedung yang dibakar waktu 27 Juli 1996 menanyakan kepada anak-anak muda di sana, “Kata pemerintah yang membakar orang komunis, ya?” Anak-anak muda itu ketawa saja. Jawabnya, “Wong kami yang *mbakar*, kok.”

Itu satu contoh bagaimana kemampuan berbohong pun sudah tidak ada lagi. Mungkin juga mereka sudah tidak peduli berbohong atau tidak berbohong. Dalam ceramah di Columbia University pada pertengahan 1990-an saya bilang bahwa salah satu ciri dari birokratisasi bahasa adalah bahwa yang perlu bukanlah apakah kata-kata itu berarti, melainkan apakah kata-kata itu hadir sebagai kekuasaan.

T: Apa Anda bisa menceritakan sedikit tentang keterlibatan konglomerat Indonesia dalam industri media massa ini? Dan apa hubungannya dengan kontrol media itu?

J: Ini dimulai pada awal 1980-an. Contoh yang paling bagus adalah [koran] *Bisnis Indonesia* yang [didirikan dan] dimiliki oleh Liem Soei Liong, Ciputra dan Sukamdani. [Mereka melakukan itu] mungkin karena di tahun 1970-an industri media dianggap menguntungkan. Contohnya [adalah harian] *Kompas* yang [berhasil] tumbuh menjadi bisnis besar. Sebetulnya, menurut seorang teman di *Jawa Pos*, pertumbuhan bisnis media sangat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan bisnis lain. *Tempo* yang kelihatan besar itu setahunnya hanya untung 5 milyar rupiah. *Nggak* beda jauh kalau dibandingkan dengan harga dua-tiga arloji anak Sudwikatmono [saudara sepupu Presiden Soeharto, *Ed.*]. Oleh karena itu minat untuk investasi di media cetak sempat menyusut. Juga karena risikonya yang tinggi.

Tetapi setelah pembredelan *Tempo*, nampak bahwa pemerintah menggunakan konglomerat yang dekat dengan mereka untuk masuk dalam pers supaya bisa mengontrol pers dari kantongnya. Karena kalau pers dimiliki mereka dari dalam, maka tidak perlu ada pembredelan. Ini terjadi

dalam kasus [harian] *Sinar Harapan* yang menulis tentang Timtim [Timor Leste]. Lalu tim redaksinya saja yang dicopot. Konglomerat itu membantu mengontrol arus informasi dengan menguasai kantong dari penerbitan itu.

T: Bagaimana cara orang awam seperti kita-kita ini untuk menjebol blokade informasi itu? Apa Anda bisa menyebutkan beberapa cara yang dianggap berhasil?

J: Saya tidak tahu berhasilnya bagaimana. Tapi yang pasti ada beberapa cara. Pertama, kalau menerbitkan majalah kan harus ada ijin, maka jangan menerbitkan majalah, tetapi bikin buku. Kedua, bikin grup diskusi di mana-mana yang membawa pesan informasi yang dipercaya. Jadi *oral tradition* dihidupkan lagi.

T: Apakah mungkin dilaksanakan diskusi yang betul-betul bebas di Indonesia? Misalnya di kampus-kampus. Karena NKK/BKK [Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan] itu dipaksakan untuk mengontrol kegiatan mahasiswa di kampus.

J: Bisa saja. Kan diskusinya tidak harus terbuka. Di luar kampus bisa dilakukan. Bisa di asrama, di warung, di rumah teman, di taman, di lapangan tenis, di lapangan voli dan sebagainya.

T: Tapi bagaimana jangkauannya? Dengan media massa kan lebih cepat membentuk pendapat umum dan jangkauannya lebih luas. Dengan kelompok diskusi yang Mas Goen sebutkan tadi jumlahnya agak terbatas dan diawasi. Kalau menulis buku, minat baca di Indonesia kan belum begitu tinggi.

J: Ya jangkauannya bisa dimengerti terbatas, tapi kalau tidak ada rotan akar pun jadi, kan? Media yang lain seperti internet, fax, dan lain-lain juga bisa digunakan. Jurnalisme ngawur-ngawuran juga boleh. Ada berita di lapangan, langsung saja tulis di internet. Ini sambil melatih banyak orang untuk mencatat dan itu berguna juga untuk melatih ingatan. Tentu saja ini tidak sempurna, tapi apa boleh buat. Sementara itu ada juga teman-teman yang bisa bertahan dalam penerbitan yang sudah mapan. Mereka juga bisa berperan.

Pembunuhan Massal 1965

T: Pada akhir tahun 1965 terjadi pembunuhan besar-besaran di Indonesia. Yang dibunuh adalah anggota PKI atau ormas-ormasnya. Jumlah korbannya tidak bisa diketahui dengan pasti, tetapi diduga sekitar 500 ribu sampai 1 juta orang. Sampai saat ini, pembunuhan massal ini tidak pernah diungkapkan secara terbuka. Mas Goen sendiri mengalami jaman itu. Setahu Mas Goen apa yang terjadi pada tahun 1965 itu? Mengapa terjadi pembunuhan massal? Siapa yang bertanggungjawab?

J: Mengalami langsung *sih* tidak. Karena beberapa hari setelah G30S meletus saya ke Eropa sampai tahun 1967. Jadi saya tidak merasakan langsung bagaimana kekejaman itu dilakukan. Tapi sebelum itu memang terasa ketegangan keadaan sosial politik di Indonesia. Mengapa terjadi? Saya rasa ini dimulai dari suasana ,apokaliptik', ada perasaan bahwa suatu perubahan besar-besaran akan terjadi. Ada perasaan *either-or*, ya atau tidak, atau *to be or not to be*. Kalau PKI menang, yang bukan PKI habis dan begitu pula sebaliknya. Suasana itu sudah ada sejak sebelum 1965. Itu terjadi pada saat *jor-joran* Manipolis [pendukung Manifesto Politik-nya Presiden Sukarno, *Ed.*], atau kompetisi siapa yang paling revolusioner. Mobilisasi massa besar-besaran terjadi. Sampai di desa-desa pun ada drumband-drumband yang pake seragam. NU, PNI, dan PKI juga bikin. Ini semua melatih kesadaran kelompok dan militansi. Njoto [Ketua Komite Central Partai Komunis Indonesia] pernah menulis di *Harian Rakyat Minggu* tentang ini dan menyebutnya sebagai munculnya "Napoleon" di desa-desa.

Lalu ada juga suasana ketidak-pastian, terutama dengan hukum. Pada saat itu banyak sekali orang berlatih silat atau tenaga dalam untuk mengantisipasi keadaan ini. Akhirnya PKI kena. Tentara membantu pembersihan terhadap PKI, bahkan tentara yang mendorong, terutama di Jawa Tengah. Dan terjadilah pembunuhan massal itu. Yang menarik adalah di Jawa Barat tidak meluas seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur atau Bali.

T: Mengapa?

J: Saya kira karena masalah tanah. Menjelang 1964/65 PKI di Jawa Timur dan Bali mengadakan land reform besar-besaran. Banyak pemilik tanah di

Bali itu orang PNI dan di Jatim itu orang NU. Mereka tidak begitu senang. Dan krisis di desa-desa itu kejam sekali. Yah, menyedihkan sekali. Ada satu “continuous frenzy”, seperti yang disebut oleh George Orwell. Saya tidak bisa dengan gampang menyalahkan siapa pun juga ya, sebab ada banyak faktor. Kalau tentara yang bertanggung jawab, iya. Tapi tidak hanya mereka.

T: Tadi Mas Goen menyinggung masalah kepemilikan tanah berhubungan dengan pembunuhan besar-besaran itu. Apa bisa dijelaskan lebih jauh?

J: Saya hanya dengar-dengar saja. Saya juga tidak tahu persis, *wong* saya ini orang kota. Yang saya dengar, tanah di Jawa tidak begitu besar, tapi yang tidak punya tanah juga banyak. Jadi intensitas untuk mendapatkan tanah lebih hebat dibandingkan di negara lain, seperti Filipina atau Amerika Latin. Kalau tidak salah ini sudah dipelajari oleh Olle Tornquist, sarjana dari Swedia yang menulis *Communism in the Third World*. Olle mengatakan, salah satu kesalahan PKI adalah menempatkan musuh itu pada tuan tanah, padahal musuh yang sebenarnya adalah pada *pengijon* [pembeli hasil bumi sebelum dipanen, *Ed.*] atau lintah darat. Pertentangan kelas di Jawa tidak seperti pertentangan kelas di pedalaman Cina atau Amerika Latin. *Patron-client relationship* masih cukup kuat dibandingkan konflik-konflik kelas. Tapi soal ini saya sendiri tidak tahu, mungkin perlu riset lebih lanjut.

T: Lalu kenapa pembunuhan massal itu dirahasiakan?

J: Pertama, mungkin pemerintah waktu itu menyadari bahwa yang sudah terjadi itu mengerikan dan dosa itu menjadi lebih kelihatan karena banyak orang yang tidak berdosa dibunuh. Kedua, mereka merasa itu tidak perlu dikatakan karena menganggap memang ‘biasa’ *to*, kalau PKI itu dibunuh. Lalu tidak ada rasa sesal kolektif sebagai suatu bangsa dan ini yang mengerikan. Karena kita cenderung untuk tidak belajar. Brutalisasi kehidupan politik di Indonesia yang terjadi sekarang ini mulainya dari sana. Kita pernah melakukan kekejaman yang luar biasa pada tahun 1965, tapi dalam diri kita tidak pernah ada kesadaran dosa bersama. Tidak ada kesadaran bahwa “*something is deeply wrong*”. Jadi hati nurani kelihatan bersih, padahal bukan karena memang bersih, tapi karena tidak pernah dipakai.

T: Dalam wawancara tanggal 7 Juni 1995, Ariel Heryanto mengatakan: „Tahun 1965 adalah titik balik kemenangan modal dan bedil. Sehingga mau ngomong apapun: pendidikan, kesenian, agama dan lain-lain, kita harus paham apa yang terjadi pada tahun 1965 itu.“ Apakah Mas Goen setuju?

J: Sejarah kan tidak bisa dipatok di satu tahun saja. Tahun 1965 ya salah satu patokan. Tapi 1965 juga ada pendahulunya kan? Dan ada selanjutnya. Saya tidak begitu setuju dengan yang dikatakan Ariel, karena sejarah tidak bisa dipatok hanya oleh satu tahun. Tapi memang ada benarnya bahwa pemenangnya modal dan bedil. Sebab setelah perubahan sistem ekonomi-politik di tahun 1965, masalah pasar dan modal itu penting dan ini dijaga oleh suatu kekuasaan yang berdasar bedil. Pasar, modal dan bedil harus ada dalam suasana stabil untuk pertumbuhan ekonomi. Ariel mematok tahun 1965 itu menyederhanakan persoalan. Tapi tidak berarti salah.

T: Apa menurut Mas Goen perubahan setelah tahun 1965 itu ada prakondisinya?

J: Maksud saya begini. Sejarah itu bukan hanya periodisasi tapi juga proses yang dialektis. Setelah 1965, mengapa modal menjadi penting? Karena di tahun-tahun sebelumnya ekonomi tidak pakai modal, tidak tergantung pada modal. Jadinya ekonomi ya berat sekali. Seperti yang kita lihat sekarang di [beberapa negara]. Ketiadaan modal ini menjadi masalah besar. Maka kemudian modal begitu penting lalu orang mulai memasukkan modal. Tapi tidak berarti bahwa persoalan terpecahkan seluruhnya. Dengan kata lain modal dan bedil adalah suatu respon dari keadaan sebelumnya. Menghadapi keadaan sekarang mungkin akan ada respon yang lain.

Ketakutan

T: Ariel juga mengatakan bahwa apa yang terjadi di tahun 1965 itu “membuat masyarakat ketakutan.” Dan ketakutan ini menjadi dasar untuk membuat masyarakat disiplin dan patuh. Mas Goen sendiri pernah menulis tentang budaya ketakutan. Apa pokok pikiran Mas Goen tentang ketakutan dalam masyarakat ini?

J: Ketakutan itu semakin lama semakin jauh dari tahun 1965 karena generasi berubah. Lalu yang berlanjut adalah suatu institusionalisasi dari ketakutan.

Kengerian 1965 akan hilang dari ingatan karena yang mengalami mati dan sudah tumbuh generasi baru. Maka ini harus dilembagakan. Ini yang saya sebut sebagai “*the politics of memory*” atau politik ingatan, yaitu bagaimana ingatan dijadikan salah satu alat kekuasaan untuk mengontrol masyarakat. Nah, problem yang dihadapi penguasa dengan generasi muda adalah bahwa pelembagaan ketakutan ini tidak didukung oleh suatu pengalaman nyata sehingga mereka tidak bisa begitu terpukau oleh ketakutan yang dilembagakan ini. Maka dapat dilihat banyaknya anak-anak muda yang berani, seperti contohnya anak-anak muda dalam PRD.

Mereka pernah menggugat soal pembunuhan besar-besaran pada tahun 1965 ini, dan juga pembunuhan di Timtim [Timor Leste] sejak tahun 1975. Menurut saya ini bagus karena mereka berusaha melawan. Mereka menunjukkan bahwa politik ingatan ini harus di-stop dengan membebaskan diri dari pelembagaan ketakutan itu. Keberanian ini harusnya bisa menular.

T: Tuduhan “PRD mirip PKI” itu berhasil, paling tidak untuk sementara, dalam membungkam gerakan demokrasi di Indonesia. Berhasil pula dipakai untuk mengesahkan penangkapan aktivis, penggebrekan kantor-kantor LSM, dan sebagainya. Tuduhan itu juga sangat berhasil membuat orang ketakutan. Sebenarnya apa yang mereka takuti? Apakah bahaya laten, kekejaman PKI, atau apa?

J: Saya kira orang takut karena kekejaman yang sudah pernah terjadi akibat orang dituduh sebagai PKI. Campur aduk jadinya. PKI yang dianggap kejam, dan celaknya kekejaman komunis ini dibuktikan oleh Pol Pot, oleh Mao, oleh Stalin. Padahal harus diingat bahwa anti-komunis juga mempunyai kebrutalannya sendiri. Ini dibuktikan sendiri oleh militer kita. Jadi ketakutan itu bukan pada PKI-nya, bukan pada anti PKI-nya atau apanya, tapi ya mencakup semuanya. Tidak ada orang yang percaya bahwa PRD itu komunis kecuali orang-orang [tertentu].

2

Tokoh-Tokoh

T: Banyak tokoh yang muncul dalam perjuangan demokrasi dekade 1990-an ini. Kami sendiri melihat dua orang tokoh yang sangat menonjol waktu itu, yakni Gus Dur [Abdurachman Wahid] dan Megawati [Soekarnoputri].

²
Keduanya mendapat dukungan luas dalam masyarakat. Kedua, tokoh jalanan itu menurut kami lebih punya akar di masyarakat. Mereka tidak tergantung pada dukungan Suharto atau militer. Bagaimana Anda memahami kedua tokoh itu?

J: Kalau dilihat dari luar—seperti saya dan juga saudara-saudara ini yang bukan dari kalangan yang dekat dengan Gus Dur dan Megawati—nampak bahwa masyarakat menghendaki tokoh, mencari tokoh. Gus Dur dan Mega, selain karena mereka punya pendukungnya sendiri, itu diciptakan juga oleh masyarakat. Mengapa itu terjadi? Karena selama ini yang dianggap tokoh di Indonesia itu adalah mereka yang diciptakan oleh pemerintah. Dan saudara-saudara tahu bahwa para ,pangeran' yang [waktu itu] berada di podium kekuasaan itu tidak cukup meyakinkan untuk bisa memberi inspirasi. Kenapa? Karena untuk bisa mengilhami dibutuhkan kekuatan kepribadian.

Saya pernah wawancara [mantan Perdana Menteri Singapura] Lee Kuan Yew. Ketika itu saya dengar anak muda Singapura sangat apatis terhadap politik. Lalu saya tanya: “Apa problem Anda dengan generasi muda di Singapura?” Jawaban Lee Kuan Yew memang agak berbeda dari apa yang saya tanyakan, “Dalam partai yang sudah lama berkuasa, maka generasi muda yang ikut dalam partai itu adalah mereka yang mencari jalan yang mudah untuk naik ke atas. Mereka yang punya karakter justru berada di luar.” Kalau kita lihat di Indonesia, anak muda maupun tokoh-tokoh mereka yang punya karakter seperti Gus Dur dan Megawati memang berada di luar. Sedangkan yang bersedia untuk jadi ‘*unthul*’ ya yang kualitasnya seperti Suryadi [pemimpin PDI yang didukung oleh Orde Baru] itu. Dan para pangeran seperti itu tidak bisa memberi inspirasi. Padahal masyarakat menghendaki inspirasi.

Megawati itu orangnya pendiam, rileks. Ini pengamatan dari jauh, ya? Bagi saya yang mengagumkan dari Mega adalah dia tidak *grusa-grusu*. Padahal keadaan begitu kritis. Dia tidak termasuk yang ambil bagian dalam kekerasan yang terjadi. Saya juga setuju dengan Ben Anderson yang pernah bilang: “Karena dia seorang perempuan.” Dia melambangkan sesuatu yang tidak bisa dilambangkan oleh kekuasaan yang serba *macho*. Terlalu banyak *macho*-isme di kalangan pemegang kekuasaan sekarang ini. Terutama kalau

sudah diwakili ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia].² Dengan pelan-pelan Mega juga menunjukkan bahwa dia tabah, gigih, ulet. Dia memang belum menawarkan suatu platform politik yang bisa diterima orang banyak. Dan belum menjangkau ke luar dari warga PDI.

Megawati juga belum menyatakan sikap menjelang pemilu [tahun 1997] ini. Kalau dia menyatakan sikap mungkin itu bisa menimbulkan inspirasi. Tapi mungkin dia harus memikirkan orang-orang di bawahnya. Saya kira hal yang sama juga dialami oleh Gus Dur. Pemimpin yang diharapkan bisa memberi inspirasi itu menghadapi dilema. Di satu pihak dia diharapkan punya kemurnian. Di lain pihak, sebagai pemimpin suatu gerakan dia tidak mungkin murni. Karena harus melakukan negosiasi-negosiasi, dan sebagainya. Karena itu kadang-kadang Gus Dur dan Mega itu membingungkan.

T: Apakah menurut Mas Goen² Mega itu mungkin untuk menawarkan suatu platform politik?

J: Kemungkinan itu ada karena dia dikelilingi oleh orang-orang yang cukup bagus. Meskipun katanya ketrampilan organisasinya kalah kalau dibandingkan orang-orangnya Suryadi. Suryadi memang pernah bilang pada satu kelompok: „Saya mengandalkan mesin organisasi. Akhirnya itu yang akan menang. Bukan personalia.“ Saya tidak tahu, kita lihat saja kelanjutannya.

T: Kalau soal ‘licik’ dan ‘tidak licik’ dalam soal PDI itu gimana Anda memahaminya?

J: Kalau dilihat soal licik atau tidak licik, itu nanti jadinya *kan* bicara soal moralitas. Politik di Indonesia sekarang memang begitu merosot nilai-nilai etiknya sehingga sebagian orang lalu cenderung menjadi moralistis. Bahayanya kita jadi merindukan tokoh-tokoh yang bebas dari cacat moral. Saya kira itu agak kurang *fair*. Karena *nggak* ada orang yang betul-betul bersih.

Saya pernah dengar dari seorang teman, tokoh-tokoh dalam Kitab Suci itu bukannya paradigma tetapi justru paradoks. Ada yang pemungut pajak, anaknya orang kaya, pelacur, dan lain-lain. Mereka punya dosa. Bukan

orang-orang yang sempurna. Tetapi ada harapan untuk bisa berbuat baik. Saya kira kalau ingin menumbuhkan demokrasi, kita bisa mulai dengan satu pemahaman bahwa “Demokrasi itu dibutuhkan karena manusia memang tidak sempurna. Dan demokrasi itu mungkin karena manusia itu baik.” Itu aslinya kata-kata Jimmy Carter.

T: Masyarakat butuh tokoh, butuh simbol. Tokoh itu harus punya watak. Tapi mereka sukar untuk putih-bersih, karena harus main di tempat kotor. Itu pendapat Mas Goen yang kami tangkap. Selain itu apa lagi yang Mas Goen lihat dari kedua tokoh ini?

J: Selain karena punya watak dan juga bisa jadi simbol, ada sarat lain. Gus Dur punya NU dan Megawati itu punya PDI. Kalau Anda [berada] di [sebuah kota kecil di Amerika Serikat], walaupun Anda punya watak yang baik, punya ide-ide yang baik, orangnya berani, dan sebagainya, Anda tetap [saja] *nggak* bakal kedengeran, kan? Paling-paling cuma diomongin sama [teman-teman sendiri].

²
T: Ha...ha...ha!

J: Jadi butuh prasarana—semacam organisasi massa. Dalam suatu keadaan politik di mana lembaga-lembaga dalam masyarakat itu lemah maka tokoh-tokoh menjadi penting. Tapi tokoh sendiri saja tidak cukup, mereka harus punya organisasi.

Prioritas

T: Salah satu narasumber kami, Pak Daniel Lev, berulang kali menekankan “pentingnya ide-ide alternatif”. Tetapi cukup banyak aktivis yang berpandangan lain. “Yang penting adalah mengganti rezim [Orde Baru] yang ada sekarang ini,” kata mereka. Selain itu, bagi mereka yang penting adalah “bagaimana membersihkan rejim yang korup ini”. Sementara itu sebagian aktivis lain, antara lain dari PRD, berkehendak untuk lebih dahulu “membentuk koalisi yang luas.” Bagaimana pendapat Anda mengenai prioritas yang sering dibahas ini? Mana yang mestinya didulukan?

J: Itu memang masalah prioritas, bukan masalah pilihan. Saya cenderung mengatakan bahwa pendapat Dan Lev itu tepat. Prioritasnya adalah ide-ide

alternatif. Saya ingat dalam suatu diskusi [tokoh PRD] Budiman Sujatmiko pernah berdebat dengan satu peserta yang sangat berapi-api membela PDI. Peserta itu ingin aksi. Pokoknya yang penting aksi! Budiman berdiri, lalu tanya, “Sebelum aksi, kita harus tanya dulu: Untuk apa? Ke arah mana?” Jadi aksi saja itu tidak benar. Tapi satu gerakan ke arah yang ditentukan oleh suatu strategi itu yang akan bisa menimbulkan tekanan. Dalam debat itu Budiman menunjukkan bahwa dia tidak menyetujui anarki atau aksi-aksi yang asal-asalan saja. Karena itu dia juga tidak setuju dengan adanya pembakaran.

Tadi kalian menyebut soal koalisi. Setahu saya pikiran PRD tidak persis seperti itu. Mereka pikir yang penting digarap adalah platform politik dulu. Kemudian itu ditawarkan pada yang lain untuk bergabung. Tetapi harus ada persetujuan pada platform dasar dulu. Dalam debat itu tadi Budiman juga menanyakan tiga soal, “Kita setuju-*nggak* pembatasan masa jabatan presiden? Kita setuju-*nggak* anti monopoli? Kita setuju-*nggak* partai-partai yang lebih bebas? Kalau setuju, kita bisa bekerjasama.” Jadi tidak asal aksi, karena itu bisa jadi ledakan yang kemudian menjadi bentrokan SARA, dan sebagainya. Setahu saya itu yang dipegang oleh teman-teman PRD.

T: Kalau misalnya sudah sepakat dengan tiga hal itu, lalu bagaimana?

J: Tiga hal itu tadi cuma contoh. Karena tadi kita ngomong soal prioritas, kan? Mana yang duluan? Itu tadi contoh bagaimana teman-teman di lapangan menyusun prioritasnya. Mereka mulai dengan mengolah ide.

2

Militer

T: Dalam pelajaran sejarah yang selama ini kami dapat, terlihat bahwa Angkatan Darat tidak pernah lepas dari politik —dengan atau tanpa Dwi-Fungsi ABRI. Berikut ini hasil beberapa studi pustaka kami. Pada tgl 17 Oktober 1952, pimpinan AD (Nasution dkk) sudah mencoba membubarkan parlemen. Kemudian dengan UU-Keadaan Perang bulan Maret 1957, AD menjadi kelompok yang sangat berkuasa di seluruh Indonesia. Dengan mewarisi perusahaan asing yang disita dan dinasionalisir tahun 1958, AD mendapat sumber ekonomi. Menurut Daniel Lev yang mempelajari periode ini: “Sejak 1957-58 itu Angkatan Darat sudah memainkan peranan besar dalam politik dan ekonomi Indonesia.”

Dalam salah satu analisisnya, Dr. Harold Crouch —salah seorang ahli tentang militer Indonesia— bilang: “*Their power is largely derived from their territorial structure. They are not organized primarily to defend the country from external aggression but to maintain internal security*” (*International Herald Tribune*, 27 Agustus 1996). Dengan organisasi teritorialnya AD mengawasi masyarakat. Atau, kalau pakai bahasa tentara, “mengadakan pembinaan”. Mengingat pengalaman sejarah itu, apakah persoalan militer dalam politik ini sudah cukup dipelajari? Apa di kalangan gerakan demokrasi yang Mas Goen ketahui sudah ada ide-ide alternatif mengenai peranan militer?

J: Saya kira dari segi sejarah politik, militer itu sudah cukup dipelajari. Bukunya Salim Said *The Genesis of Power* itu juga studi tentang militer yang cukup bagus. Tidak usah kalian setuju, tetapi bagus untuk dibaca. Studi lain dari Ulf Sundhaussen memang cenderung pro-Angkatan Darat. Yang perlu lebih dipahami adalah konteks sejarahnya.

Dulu itu Dwi-Fungsi itu seolah-olah [merupakan] doktrin yang a-historis. Seakan-akan itu jatuh dari langit, dan bukan respons dalam suatu keadaan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Memang keterlibatan AD dalam politik itu bisa ditelusuri kembali sejak naiknya Pak Dirman [Jenderal Sudirman, *Ed.*]. Beliau itu *kan* tidak begitu saja patuh pada kekuasaan sipil. Dan pimpinan AD mengatakan: “Bung Karno dan pimpinan sipil itu sudah menyerah waktu Belanda menyerbu Jogja. Sedangkan kami gerilya. Padahal Bung Karno janji akan ikut gerilya.” Jadi mereka merasa ada alasan yang bisa diterima untuk mengambil jarak, mendiskreditkan atau tidak menghormati pimpinan sipil.

Tapi ini juga bisa ditelusuri kembali pada ide-ide sebelum kemerdekaan. Para pemikir gerakan nasionalis itu tidak pernah memikirkan kemungkinan pergantian kekuasaan dengan senjata. Sehingga mereka tidak paham bagaimana mengatur hubungan dengan Angkatan Bersenjata. Pemimpin Asia lainnya, seperti Mao Tse Tung, itu lain. Dia tahu kekuasaan akan lahir dari bedil. Karena itu dia membangun tentara dan tahu bagaimana mengurusnya. Ada komisaris politik, dan sebagainya. Itu juga yang dilakukan oleh Trotsky dan Lenin dalam revolusi di Rusia. Pemimpin revolusi di Amerika, generasinya George Washington, Thomas Jefferson, juga sudah sejak awal mengatur hubungan sipil-militer itu. Tapi itu tidak pernah

dipikirkan oleh Bung Karno, Hatta, Syahrir, dan lain-lain. Mereka selalu percaya bahwa perubahan bisa dilakukan melalui parlemen. Di situ memang ada naifnya. Akibatnya pimpinan sipil memang tidak pernah mematangkan konsep-konsep tentang hubungan sipil-militer. Konteks sejarah itu perlu lebih dipahami.

Sementara itu konsep AD sendiri berkembang. Dwi-Fungsi bukan menjadi kekuatan alternatif tetapi malahan dipakai untuk meniadakan alternatif. Akibatnya ada kemacetan. Dan yang kemudian juga terkena adalah AD sendiri. Tadi kalian tanya, apakah gerakan demokrasi sekarang ini cukup memikirkan hubungan sipil-militer? Di kalangan AD sendiri juga tidak ada perkembangan pemikiran. Tahun 1966 AD bikin seminar, mengembangkan ide-ide alternatif pasca-Bung Karno. Itu semua digodok dalam Seminar AD ke-2 di Bandung. Tapi sesudah itu *nggak* ada lagi perkembangan pemikiran. Jadi ada kemacetan ide bukan cuma di kalangan sipil tapi juga di AD. Di angkatan-angkatan lainnya saya tidak tahu apakah ada ide-ide alternatif.

T: Kalau di kalangan sipil yang Mas Goen tahu apa ide alternatif yang pernah dibicarakan?

J: Salah satunya begini. Kalau kita hidup dengan pemilik bedil, kita pasti bakal ditodong. Keadaannya tidak seimbang. Nah, supaya seimbang gimana? Orang yang punya bedil harus tunduk kepada hukum. Itu berarti pemegang bedil harus tunduk pada kekuasaan yang tidak pakai bedil, yaitu kekuasaan hukum sipil. Tapi ABRI tidak menyadari itu. Sampai sekarang mereka mau terus melanjutkan keadaan darurat yang mula-mula terjadi dalam perang gerilya. “Dwi Fungsi adalah kelanjutan dari masa darurat pada jaman gerilya,” itu kritik Marsilam Simanjuntak pada Dwi Fungsi.

T: Bagaimana usaha sipil untuk mengimbangi kekuasaan bedil itu?

J: Ini dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Gerakan seperti yang dipimpin Gus Dur dan Megawati ini mungkin harus diolah lebih lanjut. Sipil tidak usah terus-terusan mengatakan, “ABRI kok begini? ABRI kok begitu?” Terkait hal seperti ini para aktivis di Filipina mengatakan: “Dalam kegelapan kita jangan mengeluh. Kita harus menyalakan lilin.”

T: Dalam seminar di AS tahun 1995 Pak Sayidiman Suryohadiprojo pernah bilang: "Sipil nggak siap; makanya ABRI jalan terus."

J: Itu omongan kuno yang berasal dari suatu masa ketika sipil memang tidak siap. Itu adalah masa ketika sipil belum berperan di kalangan swasta. Yang dilihat oleh tokoh ABRI seperti Sayidiman adalah pimpinan sipil di kalangan pemerintahan. Birokrasi pemerintahan sipil itu memang buruk sekali. Walaupun sudah coba diperbaiki berkali-kali, ya tetap saja bobrok. Jadi kalau dibandingkan dengan pemimpin di kalangan ABRI, tentu ABRI yang lebih baik.

Jendral [Purn.] Benny Murdani pernah mengatakan: "Seorang Komandan Peleton bisa mengambil keputusan dalam keadaan kritis. Pimpinan sipil tidak pernah dihadapi dengan keadaan yang betul-betul kritis." Tapi itu kan karena dia hanya melihat kalangan birokrasi sipil. Coba mereka lihat di kalangan swasta, di mana risiko juga *nggak* kalah besarnya. Misalnya seorang direktur bank, *finance manager* suatu perusahaan besar, manager hotel atau rumah sakit, manager perusahaan minyak, dan lain-lain. Mereka itu memimpin organisasi yang besar dan sangat kompleks, dengan risiko yang cukup menentukan. Saya kira banyak di kalangan mereka ini yang kualitasnya lebih baik daripada pimpinan militer. Ini tidak dilihat oleh para jenderal ABRI.

T: Apakah pemikiran Sayidiman itu bisa dianggap mewakili pemikiran pimpinan ABRI lainnya?

J: Saya kira iya.

T: Bagaimana Mas Goen memahami ide-ide profesionalisme di kalangan sebagian pimpinan ABRI seperti mereka yang berada di sekitarnya Edy Sudrajat?

J: Sama saja. Mereka anggap remeh kualitas pimpinan sipil. Karena itu tadi. Pertama, mereka dididik untuk melihat cuma ABRI yang bisa memimpin dalam keadaan kritis. Kedua, mereka hanya melihat pimpinan sipil di kalangan birokrasi yang bisanya cuma nongkrong di belakang meja di departemen-departemen itu.

T: Bagaimana membuka wawasan tentara ini? Apa mestinya mereka lebih banyak bergaul dengan kalangan swasta?

J: Mungkin mereka mesti dihadapkan pada kenyataan bahwa jamannya sudah sangat berubah.

T: Apa mereka yang lulus kursus Lemhanas [Lembaga Ketahanan Nasional] itu nggak paham bahwa persoalannya sudah semakin kompleks?

J: Mesti kita ingat bahwa ini bukan hanya soal pemahaman intelektual. Tetapi juga soal kepentingan. Buntut-buntutnya memang itu!

Modal dan Peranan Luar Negeri

T: Bagaimana Mas Goen memahami peranan modal yang sekarang begitu mobil, mudah sekali keluar atau masuk suatu negara? Itu antara lain yang kami pelajari dari bukunya Jeffrey Winters, Power In Motion, yang terbit tahun 1995. Bagaimana aktivis demokrasi sekarang memahami peranan penting modal ini? Apakah sudah ada pemikiran yang cukup mendalam tentang mobilitas modal ini?

J: Saya kira belum. Kebanyakan aktivis pro-demokrasi tidak begitu suka mempelajari ekonomi. Kedua, karena masih ada bias pemikiran bahwa modal selalu dikaitkan dengan kekuasaan yang mendikte. Soal ini benar atau tidak, itu soal lain. Tetapi bias itu menghambat analisa yang lebih tajam mengenai modal. Siapa yang mendikte? Siapa yang didikte? Itu kita mesti belajar lebih lanjut. Ada teman yang mengatakan bahwa mobilitas modal ini justru ikut melumpuhkan kekuasaan birokrasi, mengurangi kontrol birokrasi terhadap masyarakat.

Sebagai contoh antara lain teman itu menyebut lembaga Satpam [Satuan Petugas Keamanan]. Satpam itu *kan* perangkat pengamanan yang ditangani swasta, sehingga tidak lagi sepenuhnya ditangani pemerintah. Dalam sejarah Eropa, berkembangnya kaum borjuis—yang kemudian menumbuhkan demokrasi—itu antara lain karena munculnya “surat” yang bisa dibawa ke mana-mana seperti uang. Akibatnya para bangsawan dan raja-raja setempat tidak bisa lagi mengontrol modal. Dan karena itu kaum borjuis menjadi kuat

dan bisa menjadi kekuatan alternatif. Nah, apakah ini juga akan terjadi di Indonesia? Saya tidak tahu. Tapi memang belum banyak dipelajari.

T: Apakah Mas Goen melihat faktor luar negeri, terutama Amerika dan Jepang, akan memainkan peranan penting dalam perjuangan demokrasi di Indonesia?

J: Saya kira paling banter mereka bisa menjalankan peran pembantu saja. Dalam diskusi di AS beberapa waktu lalu saya katakan bahwa kita ini tidak bisa mengharapkan pemerintah AS atau Jepang akan berbuat sesuatu untuk demokrasi di Indonesia. Karena yang harus dilayani pemerintah AS atau Jepang itu *kan* banyak. Bukan hanya hak asasi tetapi juga kepentingan dagang, bedil, dan lain-lain. Dan itu memang sah, karena mereka dipilih oleh orang banyak di negaranya, dan bukan cuma oleh mereka yang suka dengan hak asasi atau demokrasi. Maka yang perlu dikembangkan dengan pihak-pihak di luar negeri adalah hubungan orang ke orang, profesi ke profesi. Tapi pada akhirnya yang betul-betul berkelahi itu kita. Yang di luar negeri hanya jadi pelengkap dan pembantu saja.

T: Bagaimana Anda melihat hubungan antara kepentingan ekonomi luar negeri dengan demokrasi? Misalnya kepentingan ekonomi pemerintah AS.

J: Kalau pemerintah AS ikut memperjuangkan demokrasi di Indonesia nanti dia dituduh imperialis yang mau mencangkokkan ide demokrasinya ke kita. Belum tentu baik pengaruhnya. Kalau investor dari AS ingin menanam atau menarik modalnya dari Indonesia, ya terserah saja. Kita nggak usah mengeluh. Modal AS, modal Indonesia, modal mana pun juga tidak akan setia pada demokrasi. Tapi juga tidak harus menghambat demokrasi.

Pada saat yang sama bisa juga dikatakan karena modal masuk maka swasta menjadi kuat. Karena swasta kuat, pemerintah jadi lemah. Persaingan di kalangan swasta menghendaki hukum yang adil, pejabat yang tidak bisa disogok. Jadi modal mungkin bisa mempengaruhi proses demokrasi. Tapi bisa juga dikatakan bahwa —seperti selama ini sudah terjadi— modal dan bedil itu saling bantu-membantu. Peran modal dalam proses demokrasi ini bisa diinterpretasikan macam-macam. Tapi pada akhirnya adalah bagaimana masyarakat itu sendiri berurusan dengan faktor-faktor kekuasaan di sekitarnya itu.

T: Kami setuju itu. Hal yang hampir sama juga pernah dikatakan sinsei Takashi Shiraisi. Menurut sinsei: “Apa yang akan terjadi di Indonesia itu 90% ditentukan oleh orang Indonesia sendiri.”

J: Memang. Bukan karena kita sok patriotik, ya. Tapi karena kenyataannya memang begitu.

T: Belakangan ini banyak sekali arus modal yang masuk. Seperti dari Morgan Stanley, Meryll Lynch, dan lain-lain. Yang tadinya nggak berani masuk sekarang sudah masuk juga. Apakah gejala ini karena mereka optimis dengan politik di Indonesia?

J: Saya nggak tahu karena belum pernah omong dengan orang-orang dari kalangan itu. Bagaimana para investor menilai risiko di Indonesia itu saya nggak tahu. Tapi pemahaman saya begini. Pertama, Asia Tenggara itu sudah menjadi satu kawasan yang pertumbuhan ekonominya sangat pesat. Modal selalu menuju ke kawasan seperti ini. Seperti semut mencari gula. Kedua, mungkin para investor itu melihat tidak ada negeri yang bisa membebaskan diri dari kebutuhan mendapatkan modal asing. Jadi, rezim apapun yang berkuasa pasti akan menjaga modal itu.

T: Apakah dari segi ekonomi Mas Goen merasa optimis?

J: Para investor itu mungkin memang optimis. Mereka lihat keadaan tetap manageable, tetap bisa diatur, untuk investasi.

Hukum

T: Salah satu yang kami amati dalam gerakan demokrasi sekarang ini adalah aktifnya para ahli hukum. Teman-teman di LBH [Lembaga Bantuan Hukum] baik di pusat maupun di daerah sering menjadi tumpuan harapan masyarakat. Munculnya lembaga seperti Komnas-HAM, PTUN [Pengadilan Tata Usaha Negara] dan TPD [Tim Pembela Demokrasi Indonesia] juga menumbuhkan harapan dalam masyarakat. Sedangkan di sisi lain kita amati juga bagaimana hukum dan aparatnya menjadi alat untuk menindas gerakan demokrasi. Seperti terlihat dalam kasus pembredelan media massa, Peristiwa 27 Juli 1996, kolusi di Mahkamah Agung, dipakainya UU-Subversi, dan sebagainya. Bagaimana Mas Goen melihat peranan hukum dan aparatnya dalam perjuangan demokrasi tahun 1990-an?

J: Sebetulnya yang paling bobrok dalam sejarah modern Indonesia selama 30-40 tahun belakangan ini adalah rusaknya hukum ini. Pada jaman Demokrasi Terpimpin hukum dikalahkan oleh politik revolusioner. Revolusi di atas semuanya. Hukum tidak dianggap penting. Di jaman Orde Baru ini kekuasaan militer dan juga kekuasaan uang itu di atas hukum. Hakim bisa disuap. Pengacara menjadi pialang bagi mereka yang punya perkara di pengadilan. Pialang untuk sogok-menyogok. Jadi bukan kebetulan kalau hukum menjadi semacam medan pertarungan yang paling jelas kelihatan. Di mana kebusukan merajalela di situ juga anti kebusukan bisa lahir.

Kadang-kadang saya memang terharu melihat teman-teman di LBH itu. Mereka betul-betul membantu orang-orang kecil, mereka yang dianiaya. Yang buruk sekali adalah karena pemerintah waktu itu sering berpura-pura legalistis. Mereka menggunakan hukum untuk mensahkan tindakan yang anti-sosial. Ini juga yang menyebabkan keruwetan hukum semakin bertimbun dan seakan-akan tak bisa tertolong lagi.

Pada akhirnya peranan hukum ini yang mungkin bakal lebih menentukan. Demokrasi itu lebih banyak membicarakan kebebasan. Kebebasan akan menimbulkan banyak konflik. Maka itu kebebasan harus ada batasnya. Menurut pemerintah batasnya adalah kekuasaan. Padahal yang seharusnya menjadi batas adalah hukum yang adil. Maka hukum menjadi penting bagi demokrasi. Dan perjuangan dalam bidang hukum menjadi penting dalam perjuangan demokrasi. Sejak awal ide-ide tentang hukum harus dikembangkan dan itu yang bakal jadi fondasi kestabilan.

T: Apakah selain membatasi kebebasan, hukum juga bisa berfungsi menjamin kebebasan?

J: Betul. Menjamin sambil membatasi kebebasan. Kebebasan itu *kan* dari siapa dan terhadap siapa. Nah, hukum bisa menjamin kebebasan siapa dan membatasi kebebasan siapa.

Peran Budaya

T: Dalam salah satu wawancara kami, ada narasumber yang mengatakan: "Tidak benar kalau dikatakan bahwa budaya Indonesia tidak cocok untuk

demokrasi.” Lalu ditunjukkan bukti bagaimana dalam Pemilu 1955, yakni pemilu pertama dalam sejarah Indonesia, ternyata 90% pemilih ikut mencoblos dan mereka tidak memilih berdasarkan “politik aliran”. Dan Pemilu 1955 itu betul-betul berlangsung dengan bebas, tanpa tekanan dan tidak terjadi kerusuhan. Bagaimana Mas Goen memahami peranan budaya dalam perjuangan demokrasi sekarang ini?

J: Saya paling cemas kalau bicara soal budaya. Karena budaya itu sudah jadi istilah yang paling banyak disalah-gunakan. Seolah-olah suatu bangsa bisa mempunyai budaya yang baku. Lalu orang bicara soal budaya Jawa, budaya Asia, dan seterusnya. Dengan mengatakan begitu seolah-olah orang memetakan suatu proses yang sudah berhenti. Padahal budaya adalah suatu proses kreasi yang tidak pernah selesai. Kalau kita melihatnya *mandeg* dan menjadi soal identitas maka banyak hal yang tersingkirkan, didepak keluar dan dipilih mana yang paling cocok. Dan itu ditentukan oleh permainan kekuasaan. Jadi kalau dibilang suatu budaya itu ada hubungan dengan suatu perilaku politik, saya kira itu omong kosong!

Saya pernah ikut suatu seminar. Di situ ada seorang intelektual Singapura bilang: “Budaya Asia itu lain dengan demokrasi Barat.” Seolah-olah suatu bangsa itu punya ciri. Padahal bangsa itu kan gejala abad ke-20? Sedangkan budayanya pasti lebih tua, kan? Kemudian ada intelektual Hong Kong yang menanggapi: “Yang kami perlukan itu demokrasi Barat, *kok*.”

T: *Ha... ha... ha!*

J: Orang Singapura itu jadi kelihatan lucu. Tapi omongan dia itu ditiru juga oleh orang-orang Malaysia dan juga Indonesia.

T: *Ini ada gejala lain yang berkaitan dengan budaya sebagai proses yang tidak pernah selesai itu. Masyarakat Jepang itu tadinya sangat feodal. Ada kaisar sebagai penguasa yang mutlak, ada kelompok aristokrasi yang turun-temurun, dan seterusnya. Setelah revolusi Meiji kaisarnya tetap dipertahankan sebagai simbol pemersatu, tetapi feodalismenya mulai dihilangkan. Di Indonesia yang kami amati, rajanya dihapuskan tetapi feodalismenya justru dihidupkan. Gimana tuh?*

J: Jepang yang sekarang itu *kan* diciptakan oleh McArthur. Setelah Perang Dunia Ke-2, kaisar dipertahankan tetapi McArthur langsung mengadakan *landreform* dan *labor reform*. Petani mendapat tanah, buruh bisa berorganisasi. Sehingga feodalisme Jepang dan juga *zaibatsu-zaibatsu* [klik finansial]-nya runtuh. Proses itu sebetulnya juga tidak alamiah. Itu juga berarti hubungan budaya dengan politik itu nggak bisa dianggap natural.

Rasialisme

T: Tahun 1990-an terasa sekali ketegangan di kalangan etnis Tionghoa. Rasialisme dengan kekerasan itu sudah terjadi beberapa kali. Bagaimana Mas Goen memahaminya?

J: Soal ketegangan dengan etnis Cina itu memang dalam akarnya. Ada hubungan dengan politik kolonial Belanda. Persepsi orang mengenai ras itu diresmikan, dilembagakan dan dijadikan hukum dalam jaman kolonial. Pembagian masyarakat kolonial itu sangat *apartheid*: ada Eropa, Timur Asing dan Pribumi. Ben Anderson pernah membandingkan politik ini dengan Filipina. Di Filipina masyarakat kolonial dibagi berdasarkan agama, bukan ras. Seorang keturunan Cina di Filipina tidak usah merasa dirinya Cina. Dia akan merasa diri Katolik atau bukan Katolik. Di Indonesia pemerintah kolonialnya membagi masyarakat berdasarkan ras.

T: Tapi mengapa masalah yang sering muncul cuma Cina dan non-Cina saja? Bukannya Arab, India, atau etnis lainnya?

J: Cina dan non-Cina itu kan warisan lama ya? Sebenarnya kalau dipikirkan, kalau saya amati, minoritas keturunan India itu lebih eksklusif daripada keturunan Cina. Tapi nggak ada persoalan kan? Karena mereka nggak nampak.

T: Apakah itu bisa dipakai sebagai alat politik? Misalnya kita tidak bisa bilang “kamu itu Cina” tanpa perasaan yang lain, seperti misalnya kalau kita bilang “kamu itu Jawa”.

J: Pertama, Cina itu bukan terpaut pada satu daerah, seperti ‘Orang Bali’ misalnya. Kedua, mereka dianggap sebagai pendatang. Walaupun sebenarnya

Cina yang hidup di Indonesia sudah campur, karena bagaimana ya, menikah tanpa perempuan *kan* tidak bisa.

T: Dulu kelompok etnis Tionghoa ini boleh merayakan hari-hari rayanya, dengan budaya mereka, tapi pada jaman Orde Baru tidak boleh.

J: Ya, memang dilarang. Bahkan, salah satu kasus pada masa Orde Baru *kan* tentang agama Konghucu. Itu *kan* lucu sekali, masa anak menjadi *haram jadah* karena agamanya, yaitu Konghucu, dan oleh karena itu tidak terdaftar. *Kan* aneh? Bagaimana seorang anak bisa menjadi haram jadahanya hanya karena urusan politik dan administrasi?!

T: Kembali pada pertanyaan mengenai pelarangan perayaan hari Cina itu. Menurut Mas Goen pelarangan itu baik atau tidak?

J: Tidak.

T: Maksudnya mungkin baik. Untuk menjaga supaya hubungan Cina dengan non-Cina tidak makin meruncing.

J: Saya kira adanya perayaan Imlek itu *kan* menyenangkan, paling tidak ada kue-kuenya. *Hehe...* Variasi kan menyenangkan. Bahwa hubungan itu menjadi tajam bukan karena pelarangan perayaan Imlek, tetapi karena disparitas. Yang saya agak setuju adalah —walaupun ini merupakan dilema berat— penjataan sekolah. Ini dilema berat. Saya tahu kalau tidak ada penjataan sekolah maka golongan keturunan Cina akan banyak di universitas yang paling bagus. Karena mereka ekonominya maju anak-anaknya bisa masuk SMA yang paling bagus, ikut bimbingan *test*, dan sebagainya. Tapi kalau dilakukan penjataan maka dari kecil mereka sudah berpikir untuk sekolah ke luar negeri. Makin tidak mengenal bangsanya. Anak saya dulu di SMP dan SMA Tarakanita. Dia punya teman keturunan Cina yang sudah bilang: “Kalau kita-kita ini *kan* harus ke luar negeri.” Mendengar itu anak saya sedih sekali.

Tapi ada contoh lain. Saya punya teman main tenis, keturunan Cina juga. Dia orang Jawa Timur yang sekolah di Jerman, lalu kerja di perusahaan coklat. Perusahaan coklat itu kepunyaan orang keturunan Cina juga. Nah, anaknya pemilik perusahaan coklat ini dari kecil di Jerman. Pulang, *mimpin* perusahaan akan tetapi *nggak* tahu bagaimana sebaiknya berurusan dengan

buruh Indonesia. Lalu bagaimana ini? Dilema betul *kan* ya? Saya sendiri tidak tahu jalan keluarnya bagaimana. Ini sebuah beban sejarah juga.

Ketegangan Antara Umat Beragama

T: Sebagaimana telah kita singgung di depan, pada tahun 1996 terjadi perusakan dan pembakaran rumah ibadat di beberapa tempat. Menurut Mas Goen apa sebab munculnya ketegangan antara umat beragama ini? Apa inti persoalannya?

J: Dalam sejarah Indonesia modern hubungan Islam-non-Islam itu sekarang [pada jaman Orde Baru] yang paling buruk. Banyak sebabnya. Saya sendiri tidak tahu persis jawabannya. Saya kira, pertama, memang karena munculnya kalangan Islam —ada yang menyebutnya *the new Moslem elite*—ke permukaan dalam lingkungan sosial, politik, dan budaya. Mungkin proses ini mulai terjadi sejak tahun 1960-an. Kalau kalian ingat, demonstran pada tahun 1960-an itu banyak yang dari kalangan HMI [Himpunan Mahasiswa Islam]. Kalau saya tidak salah tangkap Nurcholis Majid pernah menjelaskan begini. Waktu Demokrasi Terpimpin itu inflasi tinggi sekali. Yang tidak terkena inflasi adalah para pedagang, karena pendapatannya dari dagang, bukan pendapatan tetap seperti gaji bulanan. Mayoritas pedagang itu adalah para santri. Jadi pada tahun 1960-an itu para santri banyak yang masuk universitas. Dan proses ini terus berlanjut sampai sekarang.

Sekarang ini dalam birokrasi jadi banyak bekas aktivis HMI. Munculnya mereka menumbuhkan kesadaran baru akan potensinya sebagai kekuatan politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan perasaan bahwa mereka dulu disingkirkan itu memang ada. Walaupun penyingkiran itu bukan hasil suatu konspirasi dari suatu golongan, termasuk golongan Belanda. Namun akibat suatu kondisi sosial-ekonomi dan historis. Akibatnya umat Islam di Indonesia walaupun jumlahnya mayoritas seolah-olah merasa diri minoritas. Waktu jaman Bung Karno ada DI-TII dan Masyumi dianggap oposisi, dan seterusnya. Kemudian Orde Baru pada awalnya memang memusuhi mereka.

Munculnya *the new Moslem elite* ini kemudian punya gema dalam struktur hubungan kekuasaan sekarang ini. Ada pendekatan pemerintah pada kalangan ini karena mereka sudah menjadi konstituen yang menonjol.

Lalu dibentuknya ICMI [Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia], dan sebagainya. Bahkan dalam teknik pemasaran pun itu kelihatan. Misalnya ada busana Islam, *real estate* Islam, bimbingan *test* Islam, dan sebagainya. Ini perkembangan yang sebelumnya *nggak* pernah ada.

Kedua, gejala ini umumnya terjadi di kalangan Islam di perkotaan. Ini analisisnya Ulil Absar Abdalla yang pernah saya baca. Di perkotaan, umat Islam itu *kan* tidak punya ulama yang melindungi iman mereka. Sedangkan di daerah-daerah itu tetap ada para kiai. Padahal di kota-kota, gangguan dan input-input baru itu begitu banyak. Dalam keadaan tegang ini orang mencari pegangan. Dan karena *nggak* ada kiai-kiai, pegangan itu adalah teks. Salah satu akibatnya, orang mencari kemurnian. Dan kemurnian itu menimbulkan persoalan bagi kesediaan untuk menerima keberagaman. Termasuk dalam diri sendiri. Diri kita itu *kan* beragam, sedangkan kemurnian itu meniadakan keberagaman. Apalagi keberagaman di luar diri kita. Kita jadi lebih sukar menerima atau mentolerir perbedaan.

Ada lagi pengaruh dari luar negeri yang memberi ilham atau ide-ide. Belum lagi ada rekayasa pemerintah untuk kepentingan jangka pendeknya. Bahkan ini juga sudah sampai di kalangan ABRI. Sebelumnya ABRI itu tidak membedakan agama. Sekarang sudah mulai ada pembedaan. Ini sangat mengkhawatirkan. Di departemen atau lembaga-lembaga pemerintah juga sudah terkena imbas. Nah, semua faktor itu menyumbang ketegangan agama yang terasa sekarang ini.

T: Apa ketegangan ini terjadi dalam lapisan elite saja, atau juga sudah menyebar luas?

J: Yang saya lihat ketegangan itu bukan di lapisan elitnya, tetapi di perkotaan. Jadi belum tentu elitnya.

T: Ini pengalaman kami sendiri. Sampai tahun 1980-an perayaan Natal di desa itu suasananya meriah. Tapi dalam tahun 1990-an terasa sekali ada perubahan, ada ketegangan. Perubahan itu cepat sekali dan sudah sampai ke desa.

J: Itu contoh bagus dari memburuknya hubungan Muslim dan non-Muslim ini. Dulu memberi selamat Natal, bahkan ikut perayaan Natal itu dianggap

biasa saja. Mengapa kemudian jadi masalah? Komunitas sebagai suatu yang nyata dan beragam itu sudah semakin sulit didapatkan. Ini menyedihkan sekali.

T: Bagaimana Mas Goen melihat kemungkinan ketegangan SARA ini dipolitisir. Misalnya kita lihat kasus di Medan. Demo buruh waktu itu, entah dibelokkan atau berbelok, lalu menjadi urusan SARA. Atau dalam Peristiwa Situbondo sebagaimana kita sebut di atas.

J: Oh, itu selalu bisa dipolitisir. Tapi tidak berarti hanya diciptakan oleh manipulasi politik. Karena memang sudah ada *social tension*-nya. Itu sedih tapi nyata; bukan aneh tapi nyata.

T: Potensinya memang ada, kami setuju. Tapi apa mungkin meledak kalau tidak disulut-sulut oleh segelintir orang?

J: Ya, memang itu yang terjadi. Tapi penyebabnya bukan karena disulut. Penyebabnya lebih dalam dari yang disulut. Potensi itu.... Ini salah siapa, coba? Lalu bagaimana memperbaikinya? Waduh, dari dulu kita sadari persoalan ini, tetapi tetap tidak tahu jawabnya!

T: Demokrasi?

J: Itu salah satunya. Tapi demokrasi tidak menjamin hilangnya rasialisme atau ketegangan umat beragama. Jerman bagaimana? Di Amerika tahun 1995-96 ini puluhan gereja orang Hitam juga dibakar.

T: Sudah beberapa kali ketegangan dan kekerasan terjadi dengan memakai alasan agama Islam? Setahu Mas Goen apakah hal ini disadari oleh para pemimpin umat Islam?

J: Banyak yang sadar. Ada juga yang tidak sadar. Ada satu lapisan intelektual muda Islam yang mengatakan bahwa ini tidak bisa diteruskan karena ini tidak akan mengarah ke demokrasi. Komitmen mereka pada demokrasi. Tapi ada yang mengatakan, ini bisa diteruskan. Meskipun kita dimanfaatkan, kita *kan* mendapat posisi-posisi yang lebih baik. Dan ini baik untuk melindungi kita kalau nanti terjadi pergantian arah. Karena mereka pernah diperlakukan begitu, kan? Lalu yang dituduh itu klik Katolik, CSIS [Center for Strategic and International Studies], Benny Murdani. Ada yang memang tidak sadar,

mereka menganggap bahwa ini merupakan bulan madu yang kekal. Nah, itu menyulitkan juga.

Mereka tidak belajar dari sejarah, bahwa untuk menghadapi kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi, kita harus menyiapkan lembaga-lembaga yang mencegah supaya kesewenang-wenangan tidak terjadi lagi. Baik kepada orang Islam, Kristen, Katolik maupun keturunan Cina. Nah sayangnya, sambil berbulan madu ini tidak menyiapkan lembaga demokrasi. Orang seperti Nurcholis Majid atau Bintang Pamungkas berpikir jauh, bahwa yang harus dibangun itu lembaga-lembaga demokrasi tersebut. Lalu dia menciptakan partai baru yang bersifat sosial demokratis. Lalu dia menciptakan oposisi, dan seterusnya. Sementara ada orang-orang tertentu yang berpikir, okelah kita dimanfaatkan tapi kita sendiri harus main. Saya rasa orang-orang itu juga tidak selalu mengekor pada pemerintah. Memang variasinya terlalu besar. Mungkin kita harus mulai membaca peta secara lebih teliti.

Pemilu dan KIPP

T: Anda sendiri sudah bersedia menjadi pemimpin KIPP [Komisi Independen Pemantau Pemilu]. Apa tujuan KIPP?

J: KIPP ini tujuannya, pertama, membangun sarana untuk bekerja sama antara kekuatan-kekuatan pro-demokrasi yang selama ini tidak bisa bekerja sama. Ini salah satu contohnya. Pada tanggal 17 Agustus tiga tahun 1993, kalau tidak salah, kami ingin mengadakan upacara di Tugu Proklamasi, bukan di kampung-kampung atau istana. Ini sebagai acara alternatif bahwa proklamasi itu bukan hanya punya negara. Proklamasi punya kita juga.

Idenya antara lain datang dari Pak Onghokham juga ingin bikin peringatan di Patung Proklamasi. Ini dianggap sebagai latihan pertama-lah, untuk menggalang kerja sama beberapa kekuatan demokrasi. Tapi acara itu gagal. Hanya untuk menyelenggarakan itu saja gagal! Karena bentrok. ³³SMID [Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi] bentrok sama ³¹PIJAR [Pusat Informasi dan Jaringan Aksi untuk Reformasi] Indonesia. Ini bentrok sama itu, dan lain-lain. Bentrok! Tapi mereka lalu mempunyai ide untuk

membentuk KIPP itu. Tujuannya, pertama-tama, untuk belajar bekerja-sama. Selama saya memimpin KIPP, persaingan memang ada, tapi cukup sopan.

T: Yang menjadi penyebabnya itu apa? Beda tujuan? Kegedean ego? Atau apa?

J: Saya rasa macam-macam: individu, gengsi, militansi. Kalau jadi militan lalu pandangannya menyempit, seperti ujung tombak yang menyempit. Tujuan KIPP kedua adalah untuk menyadarkan masyarakat akan hak-haknya. Bahwa Pemilu ini mengandung unsur hak, bukan kewajiban. Kita semua bisa mengawasi, *wong* ini hak kita *kok*. Tujuan yang ketiga adalah membersihkan kembali nama Pemilu yang selama [Orde Baru] sudah dicemari oleh praktek-praktek kotor. Supaya orang tidak mempunyai ide-ide yang salah atau kita tidak melupakan bahwa Pemilu adalah satu-satunya cara yang paling baik untuk merubah keadaan dengan damai dan teratur. Nah, tentu saja jangan terlalu diharapkan bahwa dalam waktu singkat KIPP sudah akan berkoar sebagai kekuatan besar. Ingat bahwa Namfrael, lembaga pengawas pemilu di Filipina itu, dimulai 16 tahun sebelumnya oleh tiga orang. Nah kita belajar, mulai mengeja dari A.

T: Apa hambatannya?

J: Problem saya sendiri adalah karena saya ini sibuk. Tadinya, janjinya saya tidak ikut aktif. Kemudian PRD [Partai Rakyat Demokratik] ditangkapi. Padahal mereka penggerak yang bagus. Hambatan lain juga banyak. Waktu itu diadakan latihan, lalu dilarang, padahal sudah ada pejabat yang diminta datang. Kita mau *fair* kok, tapi mereka tidak menginginkan kita *fair*. Jadi apa boleh buat. Mereka tidak pernah *fair*. Hambatan lain, dana. Ini berat sekali. Yang mengharukan, bahwa meskipun demikian teman-teman tetap bersedia kerja.

T: Apakah munculnya organisasi tandingan juga merupakan hambatan?

J: Itu lelucon. Itu kebanyakan juga untuk mencari proyek. Cari dana dari pemerintah. Itu kan kelompok-kelompok di kota Surabaya yang memang biasa bikin proyek dari kegiatan demikian. Tapi sekarang sudah mati. Juga karena KIPP tidak mau konfrontasi. Hati boleh panas, tapi kata-kata dan tindakan, jangan.

2

Aktivis Muda

T: Dari jauh ini kami mengikuti aktivis muda pada tahun 1990an yang sangat gigih dalam memperjuangkan demokrasi. Mas Goen sendiri selama beberapa tahun tampak dekat dengan sebagian aktivis muda itu. Apa yang bisa dipelajari dari pengalaman dengan mereka itu?

J: Mereka itu hidup sederhana sekali. Kantor-kantor PIJAR, PRD, SMID, AJI [Asosiasi Jurnalis Independen] itu amat sangat sederhana. Kantor KIPP pun sangat sederhana. PIJAR misalnya, untuk mengontrak rumah mereka berjualan buku. AJI itu jualan T-shirt, buku, majalah. Saya pernah diundang ceramah, kebetulan saudara Satrio Aris Munandar dari AJI ikut ceramah juga. Tapi sambil ceramah dia jualan juga. AJI misalnya, saya tahu, kalau Lebaran membawakan kue-kue jambu mete untuk anggotanya yang ditahan. Kalau kita *kan* beli ya? Anak-anak AJI tidak bisa [beli]; terlalu mahal untuk mereka. Merekapun beli mentah, menggoreng sendiri semalaman, bergantian.

Kemudian cara mereka untuk saling membantu. Anak-anak PRD, dengan uang satu juta rupiah bisa mendatangkan 100 orang dari seluruh daerah. Begitu juga anak-anak FORMACI, Forum Mahasiswa Islam Ciputat. Sementara Jendral Hartono menghabiskan 200 Juta untuk mengumpulkan generasi muda Islam, teman-teman FORMACI hanya perlu beberapa ratus ribu. Seadanya saja. Contoh-contoh itu menunjukkan kemauan anak-anak muda itu untuk berjuang walaupun hidupnya melarat.

T: Dan apa yang perlu mereka pelajari?

J: Yang perlu mereka pelajari juga banyak. Pertama, perlu belajar bekerjasama. Itu sudah kita bicarakan tadi. Selain itu mereka itu serius, tapi kadang-kadang terlanjur terbawa oleh aktivisme. Maunya aksi, aksi, aksi! Tidak terpikir membikin jaringan, membangun kerjasama sebelum aktif. Yang melakukan itu antara lain PRD, tapi jangkauan mereka masih terbatas sekali. Padahal banyak alternatif untuk menghadapi kekuasaan. Dan kalau memang mau serius masuk politik, selain harus siap untuk dipenjara, juga harus siap untuk tidak dipenjara. Yang mereka perlu pelajari juga adalah bagaimana menjangkau, mengambil hati, menarik orang yang belum percaya menjadi

orang yang percaya. Jangan hanya pidato di depan orang yang sudah percaya, sudah mau berjuang saja. Itu mudah. Bagaimana misalnya aktivis PRD bisa meyakinkan

kelas menengah, intelektual yang mereka tidak kenal, para usahawan dan lain-lain tentang pentingnya perubahan. Nah, perlu latihan semacam itu. Tapi ini kan nasihat dari orang tua yang tidak perlu didengarkan. Hahaha....

Kesadaran dan Pilihan

T: Semula Mas Goen dikenal sebagai penulis Catatan Pinggir di Tempo. Pada tahun 1990-an Anda memilih kegiatan yang lain. Misalnya yang kami ikuti antara lain Mas Goen ikut terjun langsung dalam demo di jalanan ketika Tempo, Editor dan Detik dibredel pada tahun 1994; ikut aktif juga mendirikan AJI, ISAI [Institut Studi Arus Informasi], kemudian ikut merintis KIPP, aktif dalam MARI; ikut diperiksa oleh kejaksaan dalam kaitannya dengan kejadian 27 Juli dan lain-lainnya. Pertanyaannya sekarang, apa Mas Goen sendiri mengalami perubahan dalam kesadaran?

J: Sebelumnya pertanyaan kalian itu banyak yang harus dikoreksi. Sebetulnya saya tidak ikut demonstrasi di jalanan. Kedua, saya tidak mendirikan AJI. Sampai waktu rapat yang menentukan nama AJI, saya tidak datang. Saya nggak boleh datang. Mungkin sengaja tidak diundang atau agak dilupakan.. hehe... Mereka mungkin takut terlalu didikte orang-orang tua. Saya tidak ikut MARI juga. Waktu MARI [Majelis Rakyat Indonesia] dibentuk dan demonstrasi, saya lagi ada di Swiss, ada ceramah. KIPP itu bukan saya yang merintis, mereka yang merintis, saya ikut. Nah penjelasan ini penting juga. Kita sudah lupa bahwa kita diilhami oleh pemuda-pemuda. Bung Karno dulu ditodong oleh pemuda-pemuda, bukan sebaliknya.

Lalu mengapa saya jadi begini ya? Pertama-tama waktu Tempo dibredel ada demonstrasi besar. Orang-orang dipukuli. Bagi mereka Tempo dan kami yang bekerja di Tempo itu bukan sanak [kerabat], bukan saudara, bukan teman. Tapi ternyata waktu Tempo mati mereka ikut kehilangan. Saya merasa berhutang budi. Lalu saya ikut mereka. Suatu ketika ada yang menanyakan, “Mas Goenawan sesudah demonstrasi ini mau minta SIUPP [Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers] lagi?” Saya belum sempat menjawab. Saya hanya

tanya, “Kenapa?” Jawabnya, “Sebab kalau begitu berarti Mas Goenawan memanfaatkan kami.” Saat itu saya merasa ditegur dan saya berterima kasih.

Saya lalu mikir yang teman-teman perjuangkan ini sebenarnya bukan *Tempo*. Tapi *Tempo* sebagai simbolnya. Untuk itu kita harus berterima kasih bahwa mereka membela *Tempo*. Karena sebagai simbol atau bukan *Tempo* tetap terbela. Terus saya ke kantor, teman-teman masih berkumpul. Saya lalu bilang, teman-teman, kita berhutang budi pada orang-orang yang sekarang di jalanan, digebukin, dan kita harus membayarnya. Cara membayarnya ya satu, biar saya jadi bayarannya. Kan saya yang dikenal sebagai orang *Tempo*. Jadi, biar teman-teman mencari SIUPP lagi, terserah. Tapi saya tidak, saya ikut mereka. Saya ikut jalan, ya ikut berjuang lah. Apakah budi ini sudah terbayar atau belum, saya rasa belum. Nah itu yang menyebabkan saya lakonnya berubah. Tapi sementara ini saya merasa lebih bahagia.

Kemudian ada alasan lain. Yang paling berat dari semua tugas bagi saya di *Tempo* adalah karena harus berunding, berhubungan dan bergaul dengan pejabat-pejabat. Terutama di kalangan Departemen Penerangan. Karena saya merasa terlalu jauh mereka melarang-larang kami. Terlalu jauh mereka menghina kami. Bersama istri, saya pernah diundang oleh pejabat Deppen ke suatu pertemuan. Sebelah saya ada teman dari *Jakarta Post*. Kami mendengarkan omong kosong. Besar-besaran omong kosong itu! Seolah-olah pejabat itu jadi paling hebat dengan omong kosong itu. Kami harus mendengarkan dan tidak boleh membantah, kan? Teman itu bilang sama saya, “Mas, kita itu dulu dosanya apa ya? Disuruh duduk di sini sama Tuhan mendengarkan orang itu.” Sering dalam pertemuan dengan Menteri Penerangan itu para pemimpin redaksi seperti dianggap bawahannya. Padahal dia itu apa sih? Kita membayar pajak untuk negara. Jasa kita pada masyarakat tidak kalah. Mengapa kita harus merunduk-runduk? Saya *nggak* tahan. Ada penghinaan yang luar biasa. Itu salah satu sebab sudah lama saya ingin mengundurkan diri.

Lalu saya melihat yang muda-muda. Mereka tidak takut. Kalau mereka tidak takut, saya yang sudah punya nama, kekayaan, anak sudah tidak perlu dijamin, masa sih? Jadi itu lakonnya. Bahwa ini mungkin gagal, saya *tak* tahu. Tapi saya tahu bahwa ini tidak akan banyak hasilnya. Harapan itu penting,

tapi *toh* akhirnya orang akan mati *kan*? Seperti lantai itu akhirnya kotor lagi. Lalu kenapa harus terus disapu? Tiap tindakan mengorbankan diri itu ikut menciptakan harapan. Menumbuhkan kepercayaan lagi di benak manusia dalam suatu hidup yang sangat suram.

T: Tadi disebutkan ada pengalaman pribadi yang membekas, ada rasa hutang budi, ada gagasan tentang pengorbanan diri. Sejauh mana hal-hal itu mendorong dan menyemangati Anda ketika menentukan pilihan aktivitas Anda sendiri?

J: Didorong oleh yang muda-muda, terus saya sendiri berpikir-pikir. Mencoba mencari alasan-alasan yang bisa diterima oleh pikiran dan hati nurani saya. Mungkin itu yang mendorong saya sampai sekarang. Tapi keinginan saya yang paling besar adalah menulis. Saya berharap KIPP ini berjalan baik dan saya bisa turun. Saya berharap bahwa suatu gerakan akan terbentuk dan saya tidak perlu ikut-ikut lagi. Saya berharap bahwa dalam umur yang makin bertambah saya tidak perlu berperan lagi sebagai tokoh publik. Dan saya ingin menulis. Betul saya ingin menulis. Saya paling bahagia kalau menulis. Tidak berarti bahwa saya tidak bahagia bersama teman-teman, *hahaha....* Tapi untuk menulis itu perlu menyendiri-lah.

T: Tulisan seperti apa? Biografi? Novel?

J: Tidak. Puisi. Pemikiran. Siapa tahu saya bisa menulis novel. Sampai sekarang saya menulis cerita pendek pun belum bisa. Padahal umur sudah segini.

T: Tapi Catatan Pinggir kan sudah ke mana-mana?

J: Ya, tapi Catatan Pinggir saya pakai untuk latihan menulis cerita pendek. Belum selesai juga.

T: Ada rencana menulis tentang perjuangan demokrasi ini?

J: Nggak lah. Sekarang ini kami sedang menyiapkan menulis karya opera.

T: Pertanyaan terakhir: apa yang bisa kami pelajari atau apa yang bisa Mas Goen bagi dari pengalaman-pengalaman pribadi itu?

J: Saya ingin mengutip Arief Budiman saja: “Kalau berjuang mesti ada kegembiraannya. *When you fight, be sure you still have fun*”. Karena kalau kita kalah, kita masih punya *fun*. Dan satu lagi: “*Don’t take yourself too seriously!*” Nah, ini kok bahasa Inggris jadinya?

T: Ha... ha... ha... Setuju, Mas Goen. Terima kasih banyak.



Seusai wawancara dengan Goenawan Mohamad di Madison, Wisconsin, A.S.
(Dok. Pribadi)

Bab Delapan

Militer dan Orde Baru

Bill Liddle

*Tentang Perjuangan Demokrasi
Tahun 1990-an*



DOKTOR R. William Liddle adalah seorang professor emeritus dalam bidang ilmu politik di Universitas Ohio di Columbus, Ohio, A.S. Spesialisasi akademiknya adalah politik Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Publikasi akademiknya antara lain meliputi: “Improving the Quality of Democracy in Indonesia: Toward a Theory of Action,” dalam Thomas Pepinsky and Michele Ford (2014, Eds.) *Beyond Oligarchy*; “Political Science Scholarship on Indonesia: Revived but Constrained,” dalam Eric Tagliacozzo (2014, Ed.) *Producing Indonesia: The State of the Field of Indonesian Studies*; dan “Indonesian Democracy: From Transition to Consolidation,” yang ia tulis bersama Saiful Mujani, dalam Alfred Stepan and Mirjam Kunkler (2013, Eds.), *Democracy and Islam in Indonesia*.

Terkait pengamatannya atas pemerintahan Indonesia di bawah kekuasaan Presiden Suharto ia mengatakan bahwa militer merupakan kekuatan utama penopang Orde Baru. Tentang peran militer selama rejim Orde

Saya kira mereka tidak dapat dilawan dengan bedil selama-lamanya. Harus ada kompromi. Dan kompromi itu akan menghasilkan pemerintah yang lebih demokratis.

Baru ia mengatakan, “ABRI [Angkatan Besenjata Republik Indonesia] itu kuat dulu sebagai kekuatan *coercive*, karena punya pasukan dan punya senjata. Tangan *coercive* itu diperpanjang ke daerah supaya mereka menguasai masyarakat di setiap daerah. Jadi mereka menggunakan kekuasaan yang di pusat untuk menguasai daerah, tapi tanpa itu mereka akan tetap berkuasa”.

Sementara itu tentang kebangkitan “politik Islam” di Indonesia Pak Bill—demikian biasanya ia kami panggil—mengatakan: “Kebangkitan politik bagi orang Islam itu bukan pendapat saya. Pendapat saya [adalah bahwa] memang ada proses santrifikasi di Indonesia yang ⁸sebenarnya dimulai pada tahun 1950-an. Arus ini menjadi lebih deras pada akhir 1960-an dan awal 1970-an”. Selanjutnya, dalam wawancara ini ia juga mengatakan: “Ketidakpastian hukum memang merupakan kelemahan yang besar bagi pemerintah Indonesia”. Wawancara di bawah kami adakan di Amerika Serikat tanggal 26 November 1996.

Menguat Kembali

T (Tanya): Dalam Journal of Democracy edisi Oktober 1996, Pak Bill menulis artikel “Indonesia: Soeharto’s Tightening Grip”. Yang kami tangkap dari makalah itu adalah dua pokok pikiran ini. Pertama, sampai dengan awal 1990-an kekuasaan Presiden Soeharto sudah mulai melemah. Pada saat yang sama Orba [Orde Baru] sedang menghadapi krisis yang semakin membesar. Itu Pak Bill tulis dalam Journal of Democracy, edisi Oktober 1996.

Kedua, Pak Bill bilang bahwa akhir-akhir ini [sekitar tahun 1996, Ed.] Soeharto menjadi kuat kembali. Alasannya antara lain karena dia berhasil dalam menertibkan dan memecah militer serta berhasil menertibkan dan mengkooptasi kekuatan Islam, khususnya Islam modernis. Apakah penangkapan kami sudah benar, atau perlu diperbaiki?

J (Jawab): Saya kira secara garis besar benar. Tetapi saya harus sedikit mengaku salah. Karena dalam analisa saya yang pertama di *Journal of*

Democracy edisi Oktober 1992 mungkin analisa saya terlalu keras tentang melemahnya kekuasaan Presiden Soeharto. Waktu itu yang saya tekankan secara khusus adalah hubungannya dengan ABRI [Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; sekarang TNI/Tentara Nasional Indonesia, *Ed.*]. Saat itu Jendral Murdani [Jend Purn. L.B. Benny Murdani, *Ed.*] mulai memainkan peranan di luar kekuasaan Soeharto. Dilihat dari segi itu berarti Soeharto tidak lagi menguasai ABRI seperti sebelumnya. Tapi ternyata keadaan ini *cuma* untuk sementara waktu, yakni pada akhir tahun 1980-an saja.

Kedua, perkembangan sesudah 1993 memang merupakan argumen pokok saya dalam artikel ini. Yaitu bahwa Soeharto berhasil mengontrol kembali ABRI setelah menggunakan beberapa perwira ABRI “hijau” untuk mengusir yang “merah-putih”. Saya sendiri tidak melihat di dalam ABRI sendiri ada perpecahan.

Pemerintah Orde Baru Selayang Pandang

T: Artikel Pak Bill dibuka dengan tinjauan selintas rejim Orba. Ada tiga hal yang Pak Bill sebut sebagai kunci utama dari kekuatan Soeharto: (1) Militer sebagai tulang punggung rejim; (2) Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6% per tahun; dan (3) Pelembagaan politik modern dengan parpol dan lembaga Pemilunya untuk mensahkan rejim. Bisakah Pak Bill jelaskan secara ringkas tiga faktor itu?

*J: Sebaiknya kita mulai dari jaman Orla [Orde Lama]. Pada waktu itu ada dua kekuatan politik di bawah Presiden Sukarno, yaitu ABRI dan PKI. Jadi Orla itu bukan suatu rejim yang terkonsolidasi. Di dalamnya terkandung beberapa unsur yang terpisah dan bahkan saling berlawanan. Khususnya ABRI dan PKI. Sesudah itu, pada awal Orde Baru PKI dibasmi dan yang jadi sumber kekuasaan politik di Indonesia *cuma* ABRI.*

Jadi Soeharto menguasai Indonesia karena dia tokoh yang berada di tempat yang paling strategis pada tanggal 1 Oktober 1965. Dan Soeharto mampu memanfaatkan keadaan itu untuk menjadi pemimpin. Intinya, Soeharto sudah menguasai ABRI sejak hari-hari pertama itu.

Kedua, mengenai ekonomi. Kalau dibandingkan dengan Birma [Myanmar], Angkatan Bersenjata Birma juga berkuasa seperti di Indo-

nesia, tapi tidak mendapat dukungan dari rakyat karena hanya menggunakan kekerasan melulu. Soeharto menggunakan kaum teknokrat untuk membangun ekonomi, sehingga banyak mendapat dukungan dari masyarakat dan individu.

Yang ketiga adalah pembentukan organisasi-organisasi politik yang membuktikan keterampilan Presiden Soeharto untuk membangun struktur politik yang seakan-akan demokratis—karena banyak golongan dilibatkan di dalamnya—tetapi kekuasaan yang sebenarnya tetap terkonsentrasi di tangannya sendiri.

Politik Militer

T: Menurut Pak Bill sejarah kekuasaan Soeharto atas militer terbagi atas empat periode. Bisa dijelaskan masing-masing periode itu?

J: Periode yang pertama adalah periode konsolidasi di bawah Jendral Sumitro. Yang kedua, ... sekarang saya lupa ... Yang ketiga, di bawah [Jendral] Benny Murdani. Dan yang keempat, yang dipegang langsung oleh Soeharto dan dia tidak lagi menggunakan orang kuat seperti Benny.

T: Dalam tulisan itu Pak Bill hanya bicara tentang periode terakhir. Yaitu jaman digusurnya Kelompok Benny sejak akhir tahun 1987. Mengapa Kelompok Benny ini digusur? Apakah karena Benny menomor-satukan kepentingan agamanya dibanding kepentingan tentara?

J: O, tidak! Saya sebenarnya belum yakin tentang peranan agama di dalam tentara. Saya kira ini terjadi karena yang dilakukan oleh Benny Murdani, satu kali dia mengatakan kepada Presiden Soeharto bahwa anak-anaknya mulai menjadi masalah bagi masyarakat, dan oleh karena itu mulai menjadi masalah bagi ABRI. Karena ucapan ini Soeharto merasa Benny sudah terlalu bebas, terlalu merdeka.

T: Jadi tidak ada kaitannya dengan agama?

J: Tidak ada.

T: Dalam periode terakhir, sejak pertengahan 1996 ini, menurut Pak Bill, “all senior military posts appear to be filled by officers who enjoy Soeharto’s confidence”. Yang Anda sebut antara lain, PANGAB Feisal Tanjung, KASAD Hartono dan KASOSPOL Syarwan Hamid. Masih menurut Anda, “Each comes from a devout Moslem family”. Lalu analisa Pak Bill menyebutkan adanya keretakan dalam pucuk pimpinan Angkatan Darat, “If there is a currently visible division within the Armed Forces that might conceivably have consequences for regime change, it is this cleavage between “green” (or pro-islamic) and red-and-white officers”. Ada kelompok perwira “hijau” dan ada kelompok “merah-putih”. Apa dasar analisis ini?

J: Tanda-tanda ini saya dapat dari perbincangan saya dengan beberapa pengamat ABRI, atau dengan beberapa perwira atau orang yang masih mempunyai hubungan dengan ABRI, serta dari sumber-sumber lain seperti koran-koran. Umpamanya ucapan Eddy Sudrajat yang mengkritik jendral-jendral “hijau” secara agak jelas. Kesan saya, setelah Benny Murdani dikeluarkan dari struktur ABRI dan dinaikkan menjadi Menteri Pertahanan, Presiden Soeharto ingin berkuasa kembali secara penuh.

Untuk memenuhi keperluan itu dia menggunakan kemarahan perwira-perwira itu kepada Benny Murdani. Dan perwira-perwira itu berasal dari keluarga santri yang merasa bahwa selama Benny berkuasa mereka tidak akan diberi kesempatan untuk naik. Alasannya karena Benny Murdani kuatir kalau ideologi ABRI jadi lebih Islam atau mereka dikuatirkan membuat koalisi dengan orang-orang “ekstrim kanan” di dalam masyarakat.

Ketika saya tanyakan langsung kepada Benny tentang hal ini, ketika saya interview, dia membantah kalau dia pernah mengesampingkan perwira-perwira “hijau”. Tetapi perwira-perwira muda merasa mengalami nasib seperti itu. Seingat saya, Jendral Hartono pernah di interview di *Media Indonesia Minggu*. Dia mengatakan bahwa dia pernah mempunyai kesempatan menjadi ajudan Soeharto tetapi kesempatan itu dicabut oleh Benny Murdani. Jadi mereka merasa frustrasi dengan kebijaksanaan Benny. Soeharto tahu tentang hal itu lalu dia memanfaatkan itu untuk menguasai kembali ABRI.

T: Apakah permasalahannya—yaitu peringatan Benny tentang kelakuan anak-anak presiden—lalu' jadi hilang di kalangan ABRI?

J: Benny pada waktu itu dianggap berani sekali. Dia jauh lebih muda dari Soeharto dan jaman itu... tidak ada orang di ABRI atau di pemerintahan yang bersedia melawan Soeharto. Apalagi mengenai hal-hal yang sifatnya pribadi atau menyangkut keluarga seperti itu. Benny sebenarnya merasa punya hubungan sangat baik, merasa dekat dengan Soeharto saat itu. Jadi dia bisa berbicara dengan Soeharto. Mungkin tidak secara *blak-blakan*, tetapi dilakukan secara Jawa. Tetapi ternyata itu pun masih tidak berkenan di hati Soeharto. Setelah itu perwira lain tahu bahwa mereka tidak boleh membicarakan masalah itu.

T: Meskipun menyangkut kepentingan ABRI?

J: Ya. Meskipun menyangkut kepentingan ABRI. Tapi mereka membicarakan masalah ini juga—soal anak-anak Soeharto—di antara mereka sendiri. Saya mendengar desas-desus mengenai ini. Tetapi mereka tidak berani mengungkapkannya kepada Presiden.

T: Konflik antara kelompok ABRI “hijau” dan “merah-putih” kan juga dibaca masyarakat. Apa ada implikasinya?

J: Memang dibaca juga oleh masyarakat termasuk masyarakat yang berpolitik. Sebelum peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, ada beberapa kelompok yang merasa bisa memanfaatkan keretakan atau perpecahan terlalu keras, antara dua kelompok itu. Bahkan merasa ada tentara yang akan membela mereka, umpamanya di kalangan pemimpin PRD [Partai Rakyat Demokratik]. Mereka merasa yakin betul beberapa hari sebelum 27 Juli 1996 kalau mereka beraksi akan mendapatkan sambutan positif dari sebagian orang ABRI.

T: Jadi Jendral-Jendral itu tidak dinaikkan karena memperjuangkan agama Islam, misalnya?

J: Betul. Mereka tidak memperjuangkan Islam sebagai ideologi yang berdasarkan Islam. Oleh karena itu yang lebih saya tekankan adalah unsur Soeharto daripada perpecahan ABRI, yang saya cabut karena memang saya

tidak melihat adanya garis yang jelas yang memisahkan dua kelompok tadi. Jadi ini hanya taktik Soeharto. Intinya adalah taktik Soeharto.

T: Dalam beberapa wawancara dengan kami, Profesor Takashi Shiraishi mengatakan bahwa kalau ada keretakan dalam tentara itu bukan karena ideologi atau aliran, tetapi keretakan antara dua kelompok, yakni kelompok militer “istana” dan kelompok militer “mainstream”. Bagaimana komentar Pak Bill mengenai pendapat ini?

J: Saya kira dia melihat juga dua kelompok yang saya lihat. Dia [hanya] memberi nama yang lain yaitu kelompok “istana” dan *mainstream*. Saya lihat ada dua nuansa yang berbeda. Karena saya belum yakin bahwa kelompok yang kedua itu dikatakan sebagai kelompok yang *mainstream*. Saya tidak tahu apa yang dia maksud *mainstream* itu.

T: Mungkin yang suka menamakan dirinya tentara “profesional” itu?

J: Saya selalu dengar kata tentara profesional itu dari [para] perwira lulusan Amerika. Kalau saya bicara dengan mereka di Jakarta, mereka selalu menggunakan istilah “profesional” itu. Saya kira mereka menggunakan sebuah kerangka pikiran yang mereka dapat di sini, di Amerika, dan bukan di Indonesia. Kalau tentara profesional di Indonesia, ya yang istana dan *mainstream* kedua-duanya profesional tapi kedua-duanya juga main politik. Tidak ada perwira ABRI yang tidak berpolitik setahu saya.

T: Salah satu contoh yang pernah disebut Prof. Shiraishi adalah keretakan dalam Angkatan Darat Filipina menjelang runtuhnya rejim Presiden Marcos. Menurut dia, pada waktu itu di kalangan AFP (Armed Forces of The Philippines) timbul pertanyaan: “Apakah P dalam AFP itu Presiden atau Filipina?” Pertanyaan itu membuat tentara Filipina pecah.

Pada akhir masa Orde Baru kiranya Jendral-Jendral Indonesia juga pusing memikirkan: “Apakah RI dalam ABRI itu Raja Indonesia atau Republik Indonesia atau Rakyat Indonesia”. Hal itu antara lain kelihatan dari usaha beberapa Jendral untuk ngomong terus tentang Dwi-Fungsi (Jendral Rudini); peranan ABRI yang harus disesuaikan (Jendral Hasnan Habib); atau tentang rakyat dan konsensus nasional (Jendral Nasution), dan sebagainya. Sepertinya mereka mau ambil jarak dari Soeharto. Mereka mau meyakinkan kita bahwa, “ABRI ya ABRI. Soeharto itu Soeharto”. Apa bukan begitu Pak?

J: Ha.. ha.. ha.. Lucu juga. Pada benar orang Indonesia kalau memberi istilah, memplesetkan kata-kata seperti itu, ya? Ini kan bahasa politik. Apakah Jendral Rudini, pada waktu itu berkuasa di ABRI, bisa bertindak bebas? Bukankah dia diangkat karena dianggap setia kepada Soeharto? Begitu juga dengan Jenderal Benny Murdani. Dan juga orang yang pernah memimpin ABRI seperti Jendral Maraden Panggabean, Jendral Sumitro. Mereka semua adalah “Jendral istana” dalam pengertian mereka tidak akan diangkat kalau mereka tidak dianggap setia kepada Presiden. Jadi jangan menyamakan politik ABRI dengan politik di Filipina. Marcos itu bukan bekas tentara seperti Soeharto. Sebenarnya PANGAB [Panglima Angkatan Bersenjata] ABRI sejak 1 Oktober 1965 adalah Soeharto sendiri, dan yang lain-lain adalah pembantu dia.

T: Jadi para Jendral waktu itu sebenarnya tidak ada niat untuk memisahkan kepentingan ABRI dan kepentingan Soeharto?

J: Tidak ada.

T: Dalam bagian selanjutnya tentang militer Pak Bill menjelaskan ada pendapat yang mengatakan bahwa kesetiaan atau identifikasi perwira AD lulusan AMN/ AKABRI itu ada pada “kelas” atau “angkatan”-nya: “One hypothesis is that the academy-trained officers identify with their graduating class”. Lalu ada tiga kelompok angkatan, lulusan 1960-67, 1968-74, 1975-80. ²⁹ Apakah Pak Bill jelaskan lebih lanjut tentang “angkatan” di AMN/ AKABRI [Akademi Militer Nasional/ Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia]? Apa dasar identifikasi pada angkatan itu? Dan apa konsekuensinya?

J: Memang salah satu gejala baru dari ABRI adalah pengelompokan menurut kelas, dalam arti tahun tamat dari akademi militer. Gejala ini mulai dengan pembentukan sebuah organisasi sosial dari beberapa anggota kelas 1965 yang saya kira merupakan kelas yang terbesar. Dan setelah itu terbentuk beberapa organisasi seperti itu. Saya belum bisa menilai signifikansi politik dari kelas atau angkatan ini. Meski saya pernah berbincang-bincang dengan para pemimpin organisasi-organisasi tersebut. Kesan saya, organisasi itu pada umumnya tidak memainkan peran penting.

Saya sebutkan dalam artikel saya, memang ada beberapa pengamat seperti Ben Anderson di jurnal *Indonesia* [terbitan Cornell University, A.S., *Ed.*] yang menganalisa perpecahan atau konflik di dalam ABRI berdasarkan kelas itu. Dia suka mengelompokkan jenderal-jenderal yang berasal kelas ini sebagai suatu kelompok yang bersaing dengan jenderal-jenderal yang berasal dari kelas lain. Jadi kira-kira seperti apa yang terjadi di Muangthai. Saya sendiri belum melihat pola itu. Saya juga melaporkan bahwa majalah *Gatra* juga pernah menganalisa seperti itu.

Tapi saya melihat pengelompokan atas dasar keberanian pribadi atau kepemimpinan pribadi. Ada orang seperti Prabowo [Subianto] umpamanya. Dia tentu saja mempunyai hubungan dekat dengan istana, lalu membentuk grup sendiri. Grup dia melawan grupnya Susilo Bambang Yudhoyono. Kita dapat melihat persaingan antara dua kelompok perwira yang dipimpin oleh Prabowo dan Yudhoyono. Itupun masih sangat awal. Sebaliknya kita tidak mengambil kesimpulan terlalu jauh dari hal seperti itu.

T: Jadi perpecahan di dalam ABRI sendiri tidak begitu nyata?

J: Ya, betul.

T: Bagaimana Pak Bill menghubungkan pokok pikiran tentang tentara “hijau” dan tentara “merah-putih” tadi dengan kesetiaan pada angkatan atau kelas ini? Apa ada hubungan antara ideologi dan doktrin militer, kelompok angkatan, dan agama? Apakah pengelompokan berdasarkan agama yang paling dominan?

J: Sejauh saya ketahui tidak ada. Tetapi itu memang pertanyaan yang menarik. Kalau *macht forming* berdasarkan kelas itu memang ada, harus ada perpecahan pada tingkat yang lebih bawah. Kalau ada itu sudah dibarengi dengan perpecahan di atas antara “merah-putih” dengan “hijau”. Tetapi kelompok-kelompok kelas yang terpecah menurut agama itu belum ada.

T: Kalau kita lihat sejarah terbentuknya, ABRI memang kumpulan dari fraksi-fraksi. Semula korps perwira itu berasal dari 3 fraksi: KNIL, PETA dan Laskar. Sudirman terpilih karena dia berasal dari PETA yang merupakan fraksi yang paling besar. Kalau dilihat selama Orba, apa kunci keberhasilan Soeharto mempersatukan ABRI selama ini?

J: Saya kira salah satu faktor adalah karena sebelumnya ABRI sebetulnya sudah disatukan oleh Jendral [Ahmad] Yani. Jadi kita harus membedakan sejarah ABRI tahun lima puluhan, ketika memang ABRI pecah dan usaha-usaha yang dilakukan oleh Jendral Nasution dan Jendral Yani untuk menyatukan kembali ABRI. Jadi pada akhir Orla sudah ada fondasi untuk persatuan ABRI.

Sesudah Soeharto berkuasa, dia memang menggunakan semua keterampilan politiknya. Dan jangan lupa pembangunan ekonomi. Dia melakukan beberapa hal yang bersifat organisatoris, yaitu dengan mensentralisasikan pasukan di Jakarta, umpamanya. Kekuasaan pasukan disentralisasi *kan* dan garis hirarki dibuat lebih kuat dan lain sebagainya. Ini semua dilakukan di bawah Jendral Sumitro. Salah satu hal yang dilaksanakan adalah konsolidasi hirarki. Tapi yang lebih penting lagi adalah kesempatan ekonomi yang diberikan kepada para Perwira—baik yang sudah pensiun maupun yang mendapat tugas di daerah, dan lain sebagainya.

T: Jadi ada hubungan erat antara kepentingan ekonomi dan militer?

J: Ya. Sangat erat.

T: Apakah bisa dikatakan kesempatan ekonomi memperkuat militer dan militer lalu memperkuat ekonominya?

J: Betul.

T: Dalam tahun 1950-an perpecahan di kalangan AD berhasil diatasi oleh Kelompok Nasution dengan doktrin “Jalan Tengah”. Pada pertengahan 1990-an ini kami baca pendapat dan analisa para mantan dan Jendral pemikir AD yang berusaha mencari ide-ide baru. Sepertinya ada usaha untuk memperbaiki Doktrin Dwi-Fungsi yang dipakai selama Orba ini. Menurut Pak Bill, apa ide-ide utama yang harus dipikirkan tentang hubungan sipil-militer sekarang ini, baik oleh pemikir militer maupun oleh sipil?

J: Istilah seperti *middle way* atau Dwi Fungsi itu diciptakan sebagai respon terhadap masalah pada suatu jaman. Tentu saja setelah Presiden Soeharto tidak berkuasa lagi, setelah ada presiden ketiga, Dwi Fungsi akan dipikirkan juga. Atau hubungan antara ABRI dan masyarakat akan dipikirkan kembali...

Kesan saya tentang pendapat-pendapat mereka? Mereka merasa orang-orang ABRI memainkan terlalu banyak peranan di dalam masyarakat di luar urusan tentara sendiri. Mereka ingin supaya ABRI ditarik kembali. Belum ke tangsi [barak militer, *Ed.*], tetapi paling tidak peranannya tidak lagi seperti yang sekarang, seperti di pemerintahan sipil, di DPR.

T: Jadi ada arah ke sana?

J: Saya tidak mengatakan ada arah ke sana. Tetapi masalah ini sedang dipikirkan.

²
T: Dalam salah satu analisisnya, Dr. Harold Crouch—salah seorang ahli tentang politik militer Indonesia—mengatakan: “Their power is largely derived from their territorial structure. They are not organized primarily to defend the country from external aggression but to maintain internal security” (International Herald Tribune, 27 Agustus 1996). Dengan organisasi teritorial yang dibuat sejajar dengan pemerintahan sipil (Kodam=Propinsi, Kodim=Kabupaten, Koramil=Kecamatan, dan sebagai) Angkatan Darat mengawasi, atau mengadakan “pembinaan” masyarakat sipil. Apa Pak Bill setuju dengan pendapat ini?

J: Benny Murdani sendiri, ketika dia masih menjabat sebagai Pangab ABRI mengatakan bahwa ancaman terbesar yang dihadapi oleh ABRI adalah gejolak-gejolak domestik. Jadi dia sendiri tidak melihat ABRI sebagai kekuatan militer yang digunakan untuk melawan musuh asing, tapi musuh dalam negeri. Jadi tidak ada kontroversi.

Tetapi apakah kekuatan ABRI berdasarkan sistem teritorialnya? Analisa itu terbalik. Bahwa ABRI itu kuat dulu sebagai kekuatan *coercive*, karena punya pasukan dan punya senjata. Tangan *coercive* itu diperpanjang ke daerah supaya mereka menguasai masyarakat di setiap daerah. Jadi mereka menggunakan kekuasaan yang mereka punya di pusat untuk menguasai daerah, tapi tanpa itu mereka akan tetap berkuasa.

T: Apakah ada yang berkebalikan antara yang terjadi pada jaman revolusi dan jaman sekarang ini?

J: Oooo, itu sulit sekali untuk dijawab. Ini kan masalah mitologi bahwa “ABRI berkuasa karena didukung oleh rakyat”. Itu kan? Saya tidak tahu sejauh mana

itu benar. Saya tidak dapat membandingkannya dengan sekarang. Tetapi pada jaman Revolusi itu dukungan dari rakyat jauh lebih spontan atau cukup spontan. Dan sekarang sama sekali tidak ada spontanitas dukungan rakyat.

T: Dan dulu kan dukungan itu murni. Nggak ada pamrihnya, Pak.

J: Ya, murni. Oke, saya bersedia juga jadi orang yang romantis. Ya, memang murni juga saat itu.

T: Karena kan jelas musuhnya. Dan sekarang kan tidak jelas siapa musuhnya.

J: Ya.

Kekuatan Dalam Masyarakat

T: Anda mengutip pendapat Dankwart Rustow yang menjadi dasar analisis Pak Bill. Kami coba terjemahkan kutipan itu: "Proses demokratisasi yang dinamis dimulai oleh perjuangan politik yang panjang dan terus menerus. Mereka yang ikut dalam perjuangan itu harus mewakili kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat dan isu-isu yang diperjuangkan harus punya arti yang mendalam bagi mereka".

Lalu Pak Bill berikan contoh dalam sejarah Indonesia beberapa kekuatan yang pernah ada dalam masyarakat dan beberapa isu yang mereka perjuangkan. Menurut Pak Bill ada tiga isu yang pernah muncul: Negara Islam, ketegangan pusat-daerah dan perjuangan ekonomi atau kepentingan kelas. Yang kami tidak lihat adalah apa hubungan antara isu-isu itu dengan proses demokratisasi.

J: Saya mau menggunakan analisa Rustow, sebab ide-ide dia yang mengatakan bahwa tanpa kesadaran demokratis orang-orang yang berpolitik bisa membentuk sebuah demokrasi. Kalau mereka ingin mencapai tujuan-tujuan yang lain dan mereka menghadapi perlawanan yang cukup keras dari kelompok lain, mungkin dua kelompok itu lalu bisa membuat semacam kompromi. Sebab dua-duanya tidak mungkin menang. Jadi daripada kalah terus, atau tidak stabil terus, akhirnya mereka membuat kompromi. Dan kompromi itu bisa berbentuk demokrasi. Inti analisa Rustow adalah itu.

Dia melihat sejarah Eropa seperti itu. Demokrasi di Eropa tidak diciptakan atas dasar adanya banyak orang yang menginginkan demokrasi di sana. Tetapi ada kelompok yang kuat tapi tidak cukup kuat untuk berkuasa

sendiri. Jadi mereka membuat kompromi supaya mereka bisa sebagian berkuasa. Lalu saya mencari juga di Indonesia dari isu-isu perlawanan dan dari kelompok-kelompok yang saling berlawanan, apakah ada gejala seperti itu.

Yang bisa saya lihat hanya satu dimensi saja. Yaitu antara katakanlah borjuasi dan proletariat. Sebab yang kita lihat sekarang ini kelas pengusaha sedang bangkit dan kelas buruh juga sedang bangkit. Jadi mungkin dari dua kelompok itu akan ada perlawanan yang tidak dapat diselesaikan dengan Demokrasi Pancasila, harus dinaikkan tingkat demokrasinya.

T: Apa Pak Bill maksud itu kedua kelas tadi akan berjuang bersama-sama?

J: Bukan. Kaum buruh punya kepentingan dan mereka selama ini ditindas oleh pemerintah, oleh ABRI. Pengusaha pada umumnya tidak berlawanan dengan negara tetapi memanfaatkan hubungan pribadi dengan pejabat. Oleh karena itu kelas menengah untuk sementara waktu tidak bisa banyak diharapkan untuk demokratisasi. Sebab mereka tidak satu dan tidak menuntut adanya perubahan. Kelas buruh ini sudah mulai menuntut. Tapi selama ini ditindas. Saya kira mereka tidak dapat dilawan dengan bedil selama-lamanya. Harus ada kompromi. Dan kompromi itu akan menghasilkan pemerintah yang lebih demokratis.

T: Dan juga karena jumlah buruh yang terus meningkat?

J: Ya. Seperti di daerah Jakarta, Surabaya, dan Medan. Kembali kepada pertanyaan kalian sebelumnya tentang ABRI di daerah, bagi saya daerah yang paling penting adalah Surabaya dan Medan yang bangkit secara ekonomi. Jadi bukan seluruh Indonesia. Kalau seluruh Indonesia *kan* terbagi menjadi sepuluh daerah teritorial untuk ABRI. Hal ini penting untuk mengawasi orang yang tinggal di daerah. Tetapi dinamisme perkembangan pembangunan politik di Indonesia tidak berasal dari sepuluh teritorial itu melainkan dari beberapa pusat ekonomi.

T: Kalau yang berkaitan dengan politik Islam tadi? Apa sari pikiran Pak Bill?

J: Saya sependapat dengan Gus Dur [Abdurrahman Wahid, *Ed.*]. Saya melihat

kaum modernis yang bergabung dalam ICMI [Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia] sekarang sudah terkooptasi oleh pemerintah.

T: Menurut Pak Bill sejak pertengahan tahun 1980-an mulai terlihat kebangkitan kembali Islam sebagai kekuatan politik. Perkembangan terpenting adalah pada tahun 1990 dengan berdirinya ICMI. Pada tahun 1995 ICMI sudah terlihat sukses besar dengan 42 ribu anggota, dengan wakil-wakilnya duduk dalam kabinet, menguasai Golkar dan dekat dengan Jendral Feisal Tanjung dan Jendral Hartono. Bagaimana Anda menjelaskan perkembangan kekuatan politik Islam yang anda amati itu ?

J: Kebangkitan politik bagi orang Islam itu bukan pendapat saya. Pendapat saya memang ada proses santrinisasi di Indonesia yang sebenarnya dimulai pada tahun 1950-an. Arus ini menjadi lebih deras pada akhir 1960-an dan awal 1970-an. Dan ini karena banyak kesempatan sekolah yang diberikan kepada banyak anak santri yang tinggal di desa. Itu salah satu faktor yang sangat penting, yaitu penyebaran kesempatan untuk sekolah.

T: Kalau gitu sebenarnya itu sekularisasi, bukan santrinisasi, namanya.

J: Apa maksudnya, sekularisasi?

T: Kalau santrinisasi itu sekolahnya ke "pondok" bukan ke sekolah umum.

J: Yang saya maksudkan adalah orang Islam yang berasal dari keluarga santri yang mendapatkan pendidikan modern dalam jumlah yang besar.

T: Bagaimana kalau disebut modernisasi?

J: Modernisasi itu lebih baik. Ini segi pertama. Jadi kalau sekarang banyak pejabat mengucapkan *assalamu'alaikum* ketika mereka mau berpidato, itu adalah hasil dari proses ini. Sebab sekarang banyak pejabat yang berasal dari keluarga santri. Mereka dulu di desa, lalu mendapat kesempatan pendidikan itu.

Segi kedua, dan ini juga salah satu perjuangan Orba, bahwa orang dulu yang dikatakan abangan banyak yang sekarang sudah menjadi santri atau paling sedikit kulitnya santri. Saya katakan perjuangan Orba, sebab Orba mengatakan bahwa atheisme itu sama dengan komunisme, dan orang

abangan tidak pernah diberi hak sebagai orang beragama. Umpamanya, status aliran kebatinan tidak sama dengan agama. Jadi orang kebatinan itu harus memilih agama. Tentu saja sebagian besar akan memilih Islam. Dan ini juga terjadi disekolah, di SD, dan sebagainya. Anda *kan* harus memilih atau mengatakan kepada guru apa agama anda. Lantas kebanyakan akan mendapat pelajaran agama Islam. Jadi mereka lebih banyak tahu tentang ibadah agama Islam daripada orang tuanya.

Selain itu ada juga santrinisasi dari para abangan. Masyarakat Islam sekarang jauh lebih Islami dalam pengertian pokok ini daripada sebelumnya. Demikian juga kelas menengah yang juga jauh lebih Islami daripada dulu. Tetapi saya belum tahu signifikansi politiknya. Kalau menurut pendapat saya itu masih kabur. Jadi kalau kembali kepertengahan tahun 1980-an, presiden Soeharto sudah berkuasa selama dua puluh tahun. Selama itu menteri pendidikan tidak pernah memperbolehkan anak perempuan di sekolah-sekolah negara memakai jilbab. Tapi mulai tahun 1985 ada perubahan kebijakan mengenai hal itu.

Saya kira Presiden Soeharto melihat bahwa ada konstituen baru dalam masyarakat dari hasil santrinisasi tadi. Dan dia juga mengerti bahwa jilbab itu bukan tuntutan yang pertama bagi orang yang menuntut berdirinya negara Islam. Begitu juga dengan Bank Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan sebagainya. Jadi ada beberapa tuntutan dari orang Islam khususnya orang modernis, yang sebenarnya itu merupakan tuntutan-tuntutan lama yang diminta sejak tahun 1970-an. Tapi baru pertengahan tahun 1980-an Soeharto memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut. Jadi saya belum mau mengatakan bahwa ini kebangkitan politik Islam di Indonesia. Sebab bagi saya ini hanya berarti perubahan kebijakan.

T: Mulai pertengahan 1980-an kebijakan mengenai kekuatan Islam memang berganti haluan, jilbab tidak dilarang lagi, disiapkan RUU-Peradilan Agama. Lalu Soeharto mendukung penuh lahirnya ICMI, kemudian dia menunaikan ibadah haji. Apakah kekuatan Islam hanya boleh berkembang dalam pengawasan pemerintah dan tidak boleh berkembang sebagai kekuatan politik yang bebas dari pengaruh pemerintah?

J: Sebagian dari mereka dirangkul didalam ICMI. Saya melihat ICMI terdiri dari dua golongan. Ada golongan ex-Masyumi seperti Bang Imad [Imaddudin, *Ed.*]. atau Dawam Rahardjo dan Adi Sasono mereka bukan berasal dari Masyumi tetapi berasal dari suasana itu juga. Mereka adalah orang-orang yang berada di luar pemerintah yang secara terus menerus melawan pemerintah selama dua puluh tahun. Lalu mereka dirangkul oleh Soeharto. Soeharto melakukannya sebab sekarang dia mempunyai pejabat Islam di dalam pemerintah yang dapat dimanfaatkan, seperti Habibi, Emil Salim, dan lain-lain. Dan siapa yang menjadi ICMI, pegawai bawahannya semuanya juga harus menjadi ICMI. Ini yang menjadi inti dari ICMI, anggota ICMI yang pejabat ini mampu mengontrol anggota ICMI yang non-pejabat.

T: Apa yang terjadi ini sifatnya sangat formal?

J: Betul. Dan belum tentu mewakili siapa pun di dalam masyarakat. Contohnya [Koran] *Republika* itu. Siapa yang membacanya? *Republika* koran ICMI *kan*? Seharusnya mewakili kebangkitan Islam ini. Tapi sejauh pengetahuan saya *Republika* ini masih menjadi koran nomor lima atau nomor enam dalam sirkulasi. Malahan *Kompas* masih menjadi koran yang paling banyak dibaca oleh orang-orang Islam yang sedang bangkit ini. Maksud saya itu seperti para pengusaha atau pejabat yang berasal dari keluarga santri. Memang banyak pejabat yang mengawali pidatonya dengan *assalamu'alaikum* tetapi mereka masih membaca *Kompas*. Ini gejala penting menurut saya.

T: Kalau dilihat dari isinya, Republika itu mewakili siapa? Apakah menyuarakan kepentingan umat Islam, elite Islam atau suara pemerintah?

J: Ya, gado-gado. Kalau Anda membaca *Republika* dengan teliti, *Republika* masih mewakili beberapa kelompok. Ada kelompok Habibi, ada kelompok LSM, ada kelompok agama tradisional dalam arti mereka ingin membaca kolom seperti *Hikmah*. Ada orang yang sangat anti-Barat, umpamanya dalam hal Palestina. Jadi kelompok-kelompok ini terpisah sebenarnya. Mereka punya kepentingan sendiri-sendiri dan masing-masing menggunakan halaman-halaman *Republika* itu.

T: Apakah tidak membingungkan umat?

J: Saya tidak tahu kalau umatnya. Saya sendiri bingung, memang.

T: Dalam makalah itu Anda tidak menyinggung NU. Bagaimana Anda melihat peranan NU dalam proses demokratisasi tahun 1990-an?

J: NU [Nahdlatul Ulama] dan Muhammadiyah akan memilih jalan yang berbeda sepanjang masa. Itulah yang kita lihat sejak tahun 1926 pada saat berdirinya NU. Baru-baru ini ada orang yang mengatakan bahwa umat Islam sudah berubah dan tidak berbeda secara fundamental seperti dulu lagi. Jadi tafsiran tentang agama sudah tidak berbeda.

Tapi yang saya perhatikan jarak NU dan Muhammadiyah masih sangat jauh. Amien Rais yang ingin menjadi politisi besar dan Gus Dur —yang juga ingin menjadi politisi besar— ya sangat berbeda pendapat dalam banyak hal. Seperti pertanyaan kalian tadi: mau dibawa ke mana umat Islam? Saya kira sebaiknya mulai menjawabnya dari sana. Kita harus mencoba mengerti mau dibawa ke mana oleh Muhammadiyah dan akan dibawa ke mana oleh Gus Dur. Saya kira dua jalan itu agak berbeda.

Amien Rais lebih bersedia bekerjasama dengan pemerintah melalui ICMI. Jadi mereka masuk ke dalam sistim yang sudah ada. Dan Gus Dur dengan NU tidak mau masuk ke dalam sistim yang sudah ada. Tetapi dia mau membentuk koalisi politik yang lebih luas yang mencakup lebih banyak anggota dari umat beragama lainnya.

T: Bagaimana implikasi dari dua pilihan itu?

J: Saya kira kelompok demokrasi sudah kalah. Karena Muhammadiyah sudah membuat kompromi sendiri dengan Orba. Banyak orang modernis yang bersedia berpolitik melalui ICMI. Dan Amien Rais memimpin Muhammadiyah yang di dalamnya banyak orang yang bersedia berpolitik seperti itu.

Gus Dur juga sudah kalah. Yang saya maksudkan Gus Dur kalah adalah strategi untuk mendukung Megawati. Megawati diusir dari PDI oleh pemerintah dalam peristiwa 27 Juli [1996]. Itu merupakan langkah terakhir

dari proses pengusiran itu. Sesudah itu Gus Dur mengatakan bahwa dia tidak bisa berjuang melawan pemerintah. Jadi dia sudah berdamai dengan pemerintah.

T: Apa bukannya Gus Dur berniat mengambil jalan lain, Pak?

J: Dia tidak akan mengaku kalah untuk seterusnya, dan ini memang taktis. Tapi saya tidak tahu sampai kapan taktik ini harus berlaku.

T: Tentang tiga isu utama-Negara Islam, hubungan pusat-daerah dan perjuangan kelas/ekonomi-Pak Bill mengatakan: "Konflik kelas mungkin akan menimbulkan dampak yang paling besar". Antara lain karena munculnya kelas buruh. Berbeda dengan kelompok politik Islam yang berhasil dikooptasi rejim dengan ICMI, maka dalam soal buruh ini menurut Pak Bill: "The 'ICMI route' is possible but unlikely. The case of labor is too different from the case of Islam". Bisa dijelaskan perbedaannya?

J: Yang saya maksudkan ada kepentingan dari kaum modernis yang bisa direspons seperti dengan pemakaian jilbab. Tapi kepentingan kaum buruh yang meminta kenaikan upah yang lebih tinggi mungkin sulit direspons oleh pemerintah. Sebab pemerintah *kan* harus berhadapan dengan dunia luar, dengan para penanaman modal yang mencari buruh murah. Jadi kendala kebijakan untuk buruh lebih ketat daripada kendala mereka terhadap kaum modernis Islam.

T: Bukankah keduanya juga mendapat pengawasan yang ketat?

J: Ya, ya. Memang bukan demokrasi.

Kelas Menengah

T: Menurut Pak Bill kelas menengah tidak akan begitu besar peranannya. Mengapa? Bukankah selama dekade 1990-an ini kelompok profesional dan aktivis mahasiswa itu menjadi motor dari gerakan demokrasi dalam kegiatan berbagai LSM, LBH, media alternatif, mendirikan partai baru, bertahan dengan PDI-Perjuangan, dan sebagainya?

J: Ada dua alasan kenapa kelas menengah belum memainkan peranan yang besar. Pertama, sebagian besar kaum menengah itu masih orang Tionghoa.

Dan orang Tionghoa berbeda jauh dengan orang pribumi. Tidak seperti di Muangthai [Thailand] atau Filipina. Di Filipina, misalnya, keturunan Tionghoa bisa menjadi Presiden atau Perdana Menteri. Di Indonesia tidak dapat diharapkan sama sekali. Ini faktor pertama.

Faktor yang kedua, kelas menengah itu jumlahnya masih terlalu kecil. Masyarakat Indonesia itu sangat besar dan kelas menengahnya baru berkembang sejak awal Orba. Jadi berbeda sekali dengan Malaysia, Singapura, Filipina atau Muangthai. Kedua negara yang terakhir itu mengalami perkembangan lebih awal dalam sosio-ekonominya.

T: Dan juga karena kelas menengahnya tidak tergantung pada pemerintah.

J: Ya.

Pemilihan Umum

T: Dari 1.000 anggota MPR hanya 425 orang yang akan dipilih melalui Pemilu. Dan 575 lainnya ditunjuk melalui proses di bawah kontrol Soeharto secara langsung. Seandainya Pemilu yang akan datang [tahun 1997, Ed.] dijalankan menurut aturan main yang sudah ada itu, apakah ini dapat dikatakan bangsa Indonesia sudah demokrasi?

J: Belum

T: Dengan semakin cepatnya arus informasi, apakah Pemilu yang akan datang akan mempunyai dampak yang sama sebagai legitimasi kekuasaan Orba?

J: Ya, menarik untuk diperhatikan nanti. Saya kira mulai November tahun 1991, dunia luar mulai lebih memperhatikan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Mulai dari peristiwa Timor Timur [Timor Leste] yang menjadi perhatian dunia dan juga dengan pemberian hadiah Nobel untuk Uskup [Felipe Ximenez] Belo dan [Jose] Ramos-Horta yang diperhatikan juga oleh dunia. Jadi Indonesia lebih muncul ke dunia luar daripada dulu.

Saya kira juga ada faktor berakhirnya Perang Dingin. Dulu, pemerintah Amerika tidak peduli kalau suatu pemerintahan dipimpin oleh rejim militer asal rejim itu anti komunis. Sekarang masalah itu sudah tidak ada lagi. Semua negara Dunia Ketiga akan lebih disoroti dalam hal ini. Tapi yang mau saya

tekankan, Indonesia sudah mulai diperhatikan oleh Amerika sejak tahun 1991.

Jadi mungkin sekali pada Pemilu berikut [1997] Indonesia akan banyak diberitakan. Kami di sini [di AS] akan membaca lebih banyak tentang Pemilu di Indonesia. Kalau itu benar, dan kalau memang Pemilu itu tidak demokratis, itu akan diberitakan lebih banyak. Dan itu yang akan kami baca. Apalagi dengan adanya KIPP [Komite Independen Pengawas Pemilu]. Para wartawan akan bertanya kepada pemerintah bagaimana Pemilu dijalankan dan mereka juga akan tanya kepada KIPP. Dan KIPP akan menjawab bahwa pemerintah berpura-pura memantau Pemilu itu.

T: Soeharto dapat mengontrol langsung Pemilu termasuk menseleksi daftar caleg [calon legislatif], dan sebagainya. Dan Soeharto juga mampu mengontrol ABRI. Kalau demikian siapa sebenarnya yang menjadi penghambat proses demokratisasi di Indonesia, tentara atau Soeharto?

J: Tidak bisa dipisahkan. Saya selalu mengatakan bahwa yang berkuasa di Indonesia sebetulnya adalah ABRI. Banyak teman saya tidak sependapat dengan itu. Mereka mengatakan bahwa Soeharto yang berkuasa dan ABRI—seperti kekuatan-kekuatan yang lain—dimanfaatkan oleh Soeharto. Saya lebih suka melihat dari segi lembaga. Bagi saya lembaga yang berkuasa di Indonesia adalah ABRI dan Presiden Soeharto adalah pemimpinnya.

T: Apa ABRI akan menjadi penghambat demokrasi lebih lama lagi?

J: Saya kira.

Peristiwa 27 Juli 1996

T: Bagaimana Anda memahami Peristiwa 27 Juli 1996? Dan apa makna peristiwa itu dalam proses demokratisasi di Indonesia?

J: Dari segi demokratisasi saya tidak tahu bagaimana menilainya. Tetapi fakta yang konkrit adalah memang PDI di bawah pimpinan Megawati sedang membuat sebuah koalisi yang pada akhirnya ingin menggantikan Presiden Soeharto. Kalau mereka mendapat cukup suara mereka akan mencoba memaksa kehendaknya di MPR. Kalau bukan mentargetkan siapa yang

menjadi presiden, ya siapa yang akan menjadi wakil presiden. Kalau kalian melihat itu sebagai demokratisasi—dalam pengertian akan ada kelompok baru dari masyarakat melawan pemerintah yang sangat hirarkis dibawah Orba—ya memang ada proses demokratisasi. Itu yang sedang berjalan sampai dengan Kongres PDI di Medan.

Sesudah Kongres di Medan, ketika Megawati tidak lagi diperbolehkan oleh ABRI untuk memimpin PDI, saya kira proses demokratisasi itu berakhir. Yang kita lihat dalam peristiwa pada tanggal 27 Juli 1996 itu adalah kesungguhan dari pemerintah dalam tindakan mereka bahwa proses demokratisasi itu memang harus berakhir di sini. Dan memang berakhir. Bagi saya itu dibuktikan dalam tindakan Gus Dur beberapa waktu kemudian. Ketika dia mengatakan bahwa Megawati seharusnya mencabut tuntutannya dan lain sebagainya.

Faktor Ekonomi dan Hukum

T: Pak Bill sepertinya tidak terlalu menekankan faktor ekonomi sebagai faktor yang sangat menentukan. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi: Jumlah hutang di atas US\$ 100 milyar, Debt Service Ratio yang diatas 30%, berkurangnya devisa dari minyak, dibutuhkannya kepastian hukum untuk para investor, dan sebagainya. Bagaimana hal-hal itu tadi berpengaruh pada proses demokratisasi?

J: itu salah satu *weak point* dalam analisa saya. Kalau saya tanya kepada teman-teman saya yang ahli ekonomi, masalah hutang itu—termasuk *Debt Service Ratio*-nya—tidak terlalu besar dan tidak terlalu mengancam kestabilan ekonomi. Tapi kalau ada resesi, apalagi depresi dunia, itu memang sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi Indonesia tidak stabil atau turun pasti akan ada dampak politik. Jadi Indonesia menjadi “sandera” dari ekonomi dunia. Itu saya kira itu memang benar.

Ketidak-pastian hukum itu memang merupakan kelemahan yang besar bagi pemerintah Indonesia. Saya baru membaca kolom di majalah yang ditulis oleh seorang pengusaha Barat —pengusaha Amerika mungkin— yang mengatakan Indonesia tidak akan maju ekonominya karena adanya langit-langit yang tidak bisa diterobos. Karena sebuah negara yang tidak

mempunyai sistim hukum yang bagus, bagaimana pun juga tidak akan berkembang terus. Saya kira ini benar.

Pandangan Pesimis

T: Penutup tulisan Pak Bill nadanya optimis: "The opposition is still growing and its leaders are learning how to mobilize for a democratic transition". Kami melihatnya dengan lebih pesimis. Kami kira pesimisme akan membuat aktivis pro-demokrasi menjadi lebih berhati-hati. Karena bagaimana pun rejim Orde Baru dimulai dengan pembunuhan massal ratusan ribu orang. Sebagian dari kami berpikir: "Kekuatan yang memperjuangkan demokrasi itu memang sedang tumbuh. Tetapi penindasan juga semakin hebat. Dan usaha rejim untuk memecah belah masyarakat dengan memakai isu agama dan etnis itu juga semakin terbukti". Antara lain itu terlihat dalam peristiwa Situbondo (Oktober 1996) dan demo anti-Belo (November 1996). Bagaimana komentar Pak Bill atas pandangan yang agak pesimis ini?

J: Saya belum percaya kalau pemerintah, katakanlah presiden Soeharto, menggunakan isu agama untuk memecah-belah masyarakat. Itu bukan taktik Soeharto yang saya lihat. Kalau melihat kasus Situbondo, umpamanya, di sana saya tidak melihat suatu usaha oleh pemerintah untuk menggunakan konflik antara umat Islam dan Non-Islam. Itu suatu hal yang terjadi dan pemerintah berusaha untuk menangani saja. Jadi ada yang tidak saya setuju dalam pernyataan kalian itu.

T: Bukankah Pak Bill sudah mengamati Soeharto memang menggunakan isu agama di dalam ABRI?

J: Tetapi jangan ditafsirkan terlalu jauh. Karena Soeharto saat itu hanya memanfaatkan isu itu saja sedangkan tujuan sebenarnya menyingkirkan orang-orangnya Benny. Itu saja. Saya kira Soeharto tetap Pancasila dalam soal ini.

Tapi kalau apakah optimis atau pesimis, saya memang lebih sering pesimis daripada optimis. Dalam pengertian kalau kalian tanya kepada saya apa yang akan terjadi dengan Indonesia kalau Soeharto tidak ada lagi, jawaban saya: yang paling mungkin adalah skenario paska pembunuhan

Park Chung Hee [Presiden Korea Selatan]. Presiden Soeharto tidak akan dituntut. Itu tidak akan terjadi di Indonesia.

⁹ Kalau Soeharto tidak ada lagi, kemungkinan yang saya lihat adalah seorang jendral muda akan naik dan akan mencoba berkuasa secara penuh. Itu terjadi di Korea Selatan, ketika Chun Doo-hwan [Pemimpin Korea Selatan 1979-1988, *Ed.*] naik seperti itu. Saya kira dia seorang Kolonel yang lantas naik jadi Brigjen. Pada awal kekuasaannya dia menggunakan kekerasan. Seperti yang terlihat dalam ⁹ Peristiwa di Kwangju ketika dia membunuh beberapa ratus mahasiswa. ⁹ Sebab dia ingin menunjukkan kepada siapa saja bahwa perlawanan masyarakat akan dihadapi dengan kekerasan. Dan itu yang saya khawatirkan akan terjadi juga di Indonesia.



Audrey dan George Kahin, pertama dan kedua dari kanan. (Dok. Pribadi)

Bab Sembilan

³ **The Making of Southeast Asian Studies: Cornell's Experience**

George McT. Kahin

PADA BAB yang berisi wawancara di depan, pada bagian akhir wawancara dengannya Dr. George Kahin mengungkapkan alasan pribadi mengapa ia tertarik untuk melakukan penelitian tentang Indonesia. Tampaknya di Amerika Serikat sendiri sempat ada kecurigaan bahwa para ilmuwan sosial A.S. seperti Pak Kahin dalam melakukan penelitiannya memiliki kaitan dengan kepentingan global A.S. waktu itu, bahkan dengan lembaga-lembaga intelijen serta perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kepentingan tertentu. Kecurigaan seperti itu antara lain terungkap dalam tulisan Bruce Cumings yang berjudul ⁷“Boundary Displacement: Area Studies and International Studies during and after the Cold War” yang dimuat di *Bulletin of Concerned Asian Scholars* (Vol. 29, No. 1: January-March 1997). Atas kecurigaan demikian Kahin menyampaikan tanggapannya. Di bawah ini kami sampaikan tanggapan Pak Kahin tersebut. Tanggapan diterbitkan di jurnal yang sama pada Volume ⁴dan waktu penerbitan yang sama, disertai tambahan catatan sebagai berikut: ⁴“The following article is provided courtesy of the *Bulletin of Concerned Asian Scholars*. You may copy and distribute this article freely online, but please leave this header attached. For information on subscriptions or back issues, please contact: *Bulletin of Concerned Asian Scholars*, Administrative Office, 3239 9th Street, Boulder, CO 80304 USA. Tel: 303-449-7439. E-mail doub@csf.colorado.edu. Demi konsistensi, format catatan kaki kami sesuaikan. (Editor)

3 ON THE basis of my own experience it would be most appropriate to comment primarily on that part of Bruce Cumings's essay that deals with the Cold War period. But I'd first like to express my appreciation for the value of his contribution as a whole. And this certainly includes his criticisms of the proposed Social Science Research Council restructuring and especially of the National Security Education Act. His assessment of the postwar relationship of the major foundations and the U.S. intelligence arms is persuasive and, I think, healthfully illuminating. I would, however, like to suggest a qualification to this assessment, as well as mention a few complementary additions. Though I like some of the prescriptions in his conclusions, I cannot agree with them all. If Bruce Cumings or others are disposed to pursue the path he has opened, I would hope that the Pentagon's relations—whether direct or through foundations—with the universities during the Cold War could be examined. For I think it very likely that this relationship had significant parallels with what he has disclosed concerning the Central Intelligence Agency (CIA)'s ties with the universities during that period. Admittedly this effort would be difficult, often frustrating, and certainly time consuming. The easiest point of entry would probably be the studies sponsored by the U.S. Advanced Research Projects Agency.¹ These enrolled numerous university-based personnel—sometimes indirectly via such entities as the Bendix Corporation and the Research Analysis Corporation.

A more immediate supplement to Bruce's study that I would like to suggest is an extension of his inquiry to examine the chains of command within the foundations. For it should not be assumed that those manning these posts necessarily saw things the same way as their superiors, nor that they always carried out their orders without significant modification. I urge this examination because my own experience with foundation support for research and teaching on Southeast Asia brought me to conclude that senior, and even intermediate, officials within the foundations sometimes had considerable latitude of discretion and, on occasion, substantially modified the programs their boards of directors and top executive officers had charted. And so, though I think Bruce Cumings has marshaled compelling evidence to

³ support his thesis so far as postwar Soviet and China area work is concerned, I suggest that caution be exercised in arriving at generalizations embracing all programs of area study. In any case, I must acknowledge that never in my own dealings with the officers of the three major foundations, or later with the Luce Foundation, did I feel under any pressure to conform to Cold War considerations.

Of course in the context of the Cold War the Soviet Union and China were both of much greater importance to both the U.S. intelligence community and the foundations than was Southeast Asia. Indeed, with respect to the priorities of the U.S. intelligence arms, it was not until the 1960s that Southeast Asia began to attain much prominence, and by that time the foundations had already made their major financial commitments in the shaping of area studies.² This may help explain why, at least during the formative first decade and a half following World War II, the reins of control held by the top leaderships of the major foundations over their senior officers appear to me to have been looser with respect to Southeast Asian studies than with Soviet and Chinese studies.³

Whatever marching orders may have been given by the Carnegie, Ford, Luce, Mellon, and Rockefeller boards of trustees to their officers in negotiating with Cornell for support of research or teaching on Southeast Asia, in no case did I detect any hint that their grants were conditional on conformity with policies of the U.S. government. On the contrary, among the foundation officials I dealt with I usually found an understanding of and often considerable sympathy for my own criticisms of U.S. policy toward that area. And certainly Cornell did not look to Harvard's Russian Research Center as a model for the establishment of either its Southeast Asia Program or Modern Indonesia Project; nor did those who established these organizations have either CIA ties or background.

Here I should mention that as a consequence of my own adversarial relationships with the CIA, State Department, and Senator Joseph McCarthy, I was particularly alert to any suggestion that grants for research and teaching on Southeast Asia required conformity to U.S. policy toward the area. These relationships were well known to Lauriston Sharp, the first director

of Cornell's Southeast Asia Program, and members of the Departments of Government and Asian Studies when in 1951 I was hired as an assistant professor and concurrently executive director of the university's just launched Southeast Asia Program. To make this clear, and especially for an appreciation of the reaction of foundation officers, I must refer to a bit of relevant personal history.

While carrying out dissertation research in Indonesia in 1948 I had bitterly antagonized the CIA's first representative there during his brief visit to the revolutionary capital of Yogyakarta when he insisted that as the only U.S. citizen living there I had a duty to help him, and I categorically refused, causing him to denounce me both in Washington and Indonesia as "pro-Communist." From mid-1950 through mid-1954 I was similarly attacked by the first U.S. ambassador to Indonesia, Merle Cochran, who was furious because I had prepared memoranda for Arthur Vandenberg and several other senators criticizing him for having pressured the Indonesians into making excessive concessions to the Dutch. To ensure I would not be able to return to Indonesia during his ambassadorship, Cochran elaborated on the CIA agent's charge, alleging to the State Department's Security Division and Passport Office that I had been "constantly involved in Indonesian politics, closely associated with the Indonesian Communist group, involved in the Communist rebellion" (of 1948 against the Indonesian Republic), and had in Indonesia "represented myself as being an American Government agent" (thus violating the Logan Act)—a most remarkable combination of charges such as I suppose few other ambassadors would have had the imagination to concoct!

I had managed to antagonize McCarthy by having organized graduate students at Johns Hopkins in support of Owen Lattimore, and having induced the senator's office staff to let me see the grossly doctored cut-and-paste versions he had obliged them to make up of some of Lattimore's writings. (McCarthy was sufficiently incensed that during my first two years at Cornell he had his agents, paid for by his angel Alfred Kohlberg, make a record of my lectures in my class on U.S.-Asian relations.) Bundling my support of Lattimore together with his own charges and that of the CIA agent,

3

Ambassador Cochran had little trouble in convincing the passport office and the State Department's Security Division, headed by Scott McLeod,⁴ that my passport should be revoked to ensure I would not revisit Indonesia. I go into this detail because both my colleagues at Cornell and the senior officers of the Rockefeller Foundation, which provided the first grants (1951 and 1954) in support of Cornell's Southeast Asia Program, had been made fully aware of these allegations and of my friendship with and support of Owen Lattimore.

Even more supportive was the attitude of the Ford Foundation officials with whom I dealt, especially Cleon O. Swayzee and later Clarence Thurber. In mid-1953 Ford's board of trustees had decided to mount studies of communist movements in four Asian countries headed by noncommunist governments (India, Indonesia, Japan, and I think Iran). That fall the foundation sent Paul Langer to invite me to head such a project on Indonesia. I told him that I was unwilling to direct a study that did not extend to other aspects of Indonesian society, and that with respect to the political dimension it would have to embrace not only communism but the whole spectrum of the country's politics, with the Islamic and social democratic streams each receiving as much attention as communism. Langer did not appear sanguine about such a possibility, but he undertook to report my conditions to his superior, Cleon Swayzee, the Ford Foundation's director of research, with whom I then discussed the matter. I found Swayzee almost as critical of the foundation's inordinate emphasis on communism as I was. He readily agreed that even those obsessed with Indonesian communism alone could understand it better within the context of the whole range of that country's political life.

And thus in the Ford-supported Modern Indonesia Project that was established at Cornell in the spring of 1954, of those of its resources devoted to the study of political parties the proportion assigned to the study of the Communist Party was close to the 18 percent it won in Indonesia's 1955 elections.⁵

I must emphasize that Swayzee arranged this grant to Cornell in full knowledge of the above-mentioned allegations against me, and realizing that because of the continued withholding of my passport there was no assurance

when I might be able to get back to Indonesia to carry out research and supervise the other members of the project, all of whom I was free to select. And he authorized this grant, which was twice later augmented, while fully aware that the State Department strongly disapproved of it. Only in the fall of 1954, six months after Ford had financed the project, was I able—after a persistent effort of more than four years—to reclaim my passport and return to Indonesia.⁶ Even so, Cochran's successor as ambassador to Jakarta and his allies in the State Department tried hard—ultimately unsuccessfully—to stop me from getting back to Indonesia.⁷ And so on the basis of my own experience I believe Bruce Cumings's main thesis should be qualified in so far as Southeast Asia is concerned. There were probably many efforts by the CIA and Pentagon during the Cold War to shape opinion that only a small minority of those involved in area and international studies were aware of. Let me mention two examples that are known to me.

First, of at least significant indirect influence on the U.S. academic community was the CIA's massive book program. By the end of 1967 it had "produced, subsidized or sponsored" both abroad and in the United States "well over 1,000 books," with "a major U.S. publishing house under contract with the CIA" involved with some of them. In some cases their authors worked in direct collaboration with the agency, the chief of its propaganda unit writing in 1961 that it "must make sure the actual manuscript will correspond with our operational and propagandistic intention. . . ." When the Church Committee in 1976 "reviewed a few examples of what the chief of the [CIA's] Covert Action Staff termed books 'published for operational reasons regardless of commercial viability,'" its first example was "a book about the conflict in Indochina [which] was produced in 1954 [sic., 1964] at the initiation of the CIA's Far East Division" . . . "by a major U.S. publishing house under contract to the CIA." Copies were distributed "to selected newspapers and magazine editors both in the United States and abroad," as well as to foreign embassies in this country.⁸ This was almost certainly Hoang Van Chi's savage indictment of the Hanoi regime, *From Colonialism to Communism*, one of the most influential books shaping American attitudes

3 during the early years of U.S. intervention in Vietnam. It was then used in numerous college-level courses.

Not until the end of 1967 did the CIA suspend “direct publication subsidization within the United States not only of books, but also of journals and newsletters.” But the Church Committee in 1976 was stonewalled by the CIA in its efforts to obtain “a number of the titles and names of authors of the propaganda books published” over the previous nine years, that is, since 1967. The CIA was willing to indicate only that the books covered several widely ranging general topics.⁹ When in 1989 Victor Navasky, editor of *The Nation*, brought a suit before three successive levels of U.S. federal courts to obtain a list of just the books the CIA had “produced, subsidized or sponsored before the end of 1967” he was unsuccessful.¹⁰

The U.S. military, too, mounted covert efforts to mold opinion within the U.S. academic community. One of its means for achieving this, I learned by accident, was its Historical Evaluation and Research Organization (HERO), whose activities surely merit further scrutiny. In early May 1965 it undertook a crash program to build public support for Johnson’s newly escalated involvement in the Vietnam War by launching a journal meant to promote backing by U.S. “intellectuals” and especially members of the academic community.¹¹ Officially, establishment of the new journal, *Vietnam Perspectives*, was attributed to its first editor, Wesley Fishel of Michigan State University, and the American Friends of Vietnam, which he chaired. But the initiative for this operation was taken by and its initial financing arranged by Chester Cooper, McGeorge Bundy’s senior Asian adviser, and Colonel T. N. Dupuy, HERO’s executive director, whose office furnished essential management, personnel, and logistics.¹²

Dupuy and his office worked together with Fishel to provide reporting and analysis on Vietnam that would in Dupuy’s words give “the kind of balance which has been so sadly lacking in the past” and “show how uninformed, patriotic American intellectuals have been unwitting, gullible dupes of the Communists because they have accepted distorted and false facts.”¹³ The major target out of the 41,000 readers to whom the journal was to

be sent would be “some 26,000 college-level social science teachers,” followed by “10,600 clergy or leading church laymen, 1,776 daily newspapers, 650 TV stations, 641 Junior Chambers of Commerce, 580 Senators and Congressmen, the presidents of the 500 largest corporations in the U.S., and a few others.”¹⁴

The catalyst in rushing this project through was the upcoming National Teach-in on the Vietnam War that was expected to draw many faculty and students to Washington and where Cooper’s boss, McGeorge Bundy, was scheduled to debate an as yet unidentified representative of the academic community.¹⁵ Thus, though only on 1 May had Cooper brought Fishel and Dupuy together “to develop a plan for utilizing the HERO staff” for the Vietnam publication, by 7 May a memorandum from Dupuy stated that the first draft of the new publication was “being prepared under absolute ‘crash’ conditions in the hope that distribution can begin before the coming May 15 ‘teach-in’ in Washington.”¹⁶ (As it turned out Bundy did not take part because he was called to oversee the new U.S. intervention in the Dominican Republic; he designated Robert Scalapino of the U.C. at Berkeley to take his place.)

Despite the speed of preparation of the new journal, which bore the name *Vietnam Perspectives*, it was handsomely printed. Only the American Friends of Vietnam was indicated as publisher, and its members made up the editorial board. There was no mention of HERO. The price was indicated as 75 cents per issue, but unsolicited copies flooded the offices of faculty in many universities, and I never found anyone who had actually paid for one. Ten issues were circulated until publication was suspended in 1967.

It was presumably the public outcry against Nixon’s invasion of Cambodia in 1970 that brought a reorganized American Friends of Vietnam to commence publication of a successor journal, *Southeast Asian Perspectives*. With William Henderson of Socony Mobil Oil as editor, this had the same format as its predecessor. Its price was still 75 cents and unsolicited, gratis copies again deluged academics. Its first issue of March 1971 was entirely devoted to a forty-eight page article by Douglas Pike, “Cambodia’s War.”¹⁷ While I am in accord with the second and especially the third prescription in Bruce Cumings’s conclusion, I must disagree with his suggestion that the

3 social sciences be abolished and grouped under the one heading of "political economy." One can, I think, justifiably criticize the often artificial divisions among the social sciences, and the cramping and unimaginative parochial vested interests that are frequently built up among each of them without resorting to that expedient. I don't deny the value of political economy as an approach to an understanding of a good many important matters, but I don't think it can effectively subsume all existing routes to an understanding of all important matters now dealt with by the social sciences.

Certainly it is very important to "get the intelligence and military agencies out of free academic inquiry," but abolishing the CIA alone would not achieve this. The Defense Intelligence Agency and other Defense Department operations have probably been equally culpable in trying to influence the course of academic inquiry. Abolishing the CIA alone could easily result in simply shifting its objectionable functions to the Pentagon. Accountability is the central problem, but political leaders and a media intimidated over the possibility of being branded unpatriotic have

not yet seriously pressured Congress to abandon its feckless, proforma charade of oversight of the covert activities of either the CIA or Pentagon.¹⁸ And as yet no president has been inclined to eliminate an instrument that, despite its sullied record and continuing fallibility, is responsive to his own initiatives in a way that can usually shield him from public scrutiny and ultimate responsibility.

Notes:

- 1 Some Advanced Research Projects Agency studies were subsequently made public through publication, often by the U.S. government's Rand Corporation.
- 2 It was not until 1960 that Eisenhower arrived at the bizarre conclusion (and later convinced a gullible Kennedy) that Laos was a key area in the outcome of the Cold War.
- 3 So far as I am aware, the only Southeast Asia area programs supported during this period by the three major foundations were at Yale and Cornell. Unfortunately the Yale program soon atrophied because of the tragic deaths of two of its four faculty. (John Embree was killed by a drunken motorist in New Haven, and Raymond Kennedy was shot to death in West Java, probably either by Turk Westerling's men or the Darul Islam.)
- 4 Scott McLeod, McCarthy's staunch ally, had been appointed by J. F. Dulles to head the State Department's Security Division in the mistaken expectation that this would make the senator more cooperative.

- 5 The scope and nature of the project's research are discussed in the article, "Cornell's Modern Indonesia Project," *Indonesia* (Ithaca, NY), no. 48 (Oct. 1989), pp. 1-25.
- 6 This was possible only after the State Department established a review board (made up of foreign service officers) in 1954 for cases of passport denial, and I was fortunate enough to obtain the help of a very able pro bono lawyer. Once he threatened to subpoena Cochran to testify before the board, the ex-ambassador (by then comfortably positioned in the World Bank) dropped all his allegations.
- 7 Shortly before my departure for Indonesia a memorandum of 21 September 1954 from the head of the Passport Division via Scott McLeod to the head of the State Department's Pacific and Southeast Asia Affairs Office charged with respect to the project I was to direct: "He now proposes to set up in Indonesia a staff numerically superior [sic!] to the regular staff of the diplomatic mission in Indonesia. ... Judging by his previous performance, there will be unrest, discord, and an association with revolutionary elements highly dangerous in a country as disturbed as Indonesia. Why do your risk this? There could develop competing missions in Indonesia, the official mission representing the government of the United States and an unofficial mission financed by the funds provided by the Ford Foundation and purporting to represent Cornell University but having tie-ins with intellectuals in many other organizations." The full text of this memorandum reproduced in "Cornell's Modern Indonesia Project," pp. 4-5.
- 8 U.S. Senate, Select Committee to Study Governmental Operations with Respect to Intelligence Activities, Book I (Final Report) (Washington, D.C.: U.S. Government Printing Office, 1976), pp. 193-94. (The publication date here given for Hoang Van Chi's book is incorrect and should read 1964, when this book was published by Praeger.)
- 9 *Ibid.*, p. 194.
- 10 Victor S. Navasky, "Why Sue the C.I.A.?" *New York Times*, op-ed page, 20 Oct. 1989.
- 11 I was asked in a letter of 6 May 1965 by HERO's Colonel Dupuy to become a member of the editorial board of his projected publication, presumably because he knew nothing of my views on Vietnam. Furthermore his original intention was to entitle the envisaged publication, *Southeast Asia Information Report*, because (as he wrote in his letter of 3 May to Wesley Fishel), among other things, "the intellectual, opinion-forming audience for whom this letter will be intended might be inordinately suspicious of a letter concentrating on Vietnam only." Probably the fact that my own publications had been almost entirely confined to Indonesia made it plausible for him to invite me (and two of my former graduate students who specialized respectively in Malaysia and the Philippines) to serve on this board. So rushed were Dupuy's plans that he sent me, along with his letter of invitation, copies of a relevant internal memorandum, budget, and his letter of 3 May to Fishel. (I declined Dupuy's invitation and had no further communication from him.)
- 12 Memorandum for Valenti from Chester Cooper, The White House, Subject: The American Friends of Vietnam, (CC Bundy), 5 May 1965, 3 pp. I acquired this document well over a decade after these events from the L. B. Johnson Library in Austin, Texas. The memorandum indicated that additional "informational output" beyond the publication here discussed was also being arranged.
- 13 Letter (copy): T. N. Dupuy to Wesley R. Fishel, 3 May 1965. p. 2.
- 14 Memorandum (no designated recipient) from T. N. Dupuy, Subject: Request for Comments on "Southeast Asia Information Report," 7 May 1965.
- 15 I was invited to debate McGeorge Bundy only about a week in advance of the National Teach-In through two friends at Yale, Harry Benda and Mary Wright, partly on the initiative of members of the Council for a Livable World (a group of politically concerned scientists) who seem to have been well-impressed by my success in debating General Edward Lansdale in a private session on U.S. Vietnam policy held under the aegis of the Council in Washington a few months before. Credit for organizing the National Teach-In should, as I recall, go primarily to Marshal Sahlins and some of his colleagues at the University of Michigan.
- 16 Dupuy memorandum of 7 May 1965.
- 17 Mostly a discussion of the internal struggle in Cambodia, it found Nixon's invasion and the continuing South Vietnamese military operations within that country "resoundingly successful" (p. 23) and gave no hint that he and Kissinger helped pave the way by supporting Sihanouk's ouster.
- 18 Probably Congress's last major retreat from responsibility for monitoring covert action came on 31 January 1989 when Speaker of the House Jim Wright announced at the beginning of the Bush administration that as "an opening gesture of good faith on our part" he was shelving legislation that would have required the president to notify Congress of any covert operations within forty-eight hours. Thus Congress permitted to stand the elastic provision sought by the CIA (and its old boss George Bush) that the White House need only consult Congress in a "timely" fashion when launching a covert operation. Though the focus of concern was covert direct or indirect military activity emerging from the recent Congressional investigation of the Iran-Contra operation, this Congressional retreat clearly has implications attaching to the whole range of CIA activities.

Penutup

KEPULAUAN NUSANTARA sebelum datangnya kolonialisme adalah rangkaian kepulauan yang diperintah dalam sistem feodal dan monarki yang berdiri sendiri-sendiri —bahkan tak jarang bermusuhan satu sama lain. Ketika secara silih-berganti berbagai pengaruh asing lain datang, sedikit demi sedikit sistem pemerintahan tradisional itu mulai berubah. Lebih jauh, ketika kekuasaan kolonial bercokol dan akhirnya mendominasi hampir seluruh kepulauan Nusantara, kekuasaan-kekuasaan yang telah berlangsung lama itu akhirnya tumbang satu per satu —dengan beberapa kekecualian, tentu saja. Menariknya, sebagaimana telah kita lihat di depan, ketika kolonialisme berakhir, para pejuang kemerdekaan sama sekali tidak menghendaki agar Nusantara kembali ke sistem pemerintahan feodal dan monarkis sebagaimana yang dijalankan selama beratus tahun di dalamnya. Para pejuang itu lebih menghendaki agar berakhirnya kekuasaan kolonial diikuti oleh sebuah sistem pemerintahan baru yang dasarnya tidak lagi sistem kekeluargaan, keagamaan, etnis, bahasa daerah, atau yang lain, melainkan sebuah negara kesatuan dalam bentuk republik yang mencakup seluruh bekas wilayah Hindia Belanda dan yang semaksimal mungkin melibatkan rakyatnya dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. Jadilah Kepulauan Nusantara yang dengan segala keanekaragamannya menjadi satu dalam bentuk Republik Indonesia.

Sebagaimana telah kita simak bersama, ternyata proses pembentukan Republik Indonesia itu tidak mudah. Ia harus menempuh jalan yang panjang dan berliku. Sejumlah hambatan dan rintangan menghadang di jalan.

Menariknya, di tengah itu semua para pendiri dan pejuang Republik ini berhasil menegakkan Indonesia sebagai sebuah negara kesatuan modern yang berasaskan demokrasi. Dengan asas demokrasi ini diharapkan bahwa kekuasaan akan ²⁵berada di tangan rakyat, dan bukan di tangan segelintir penguasa yang memerintah berdasarkan latar belakang garis keluarga atau kelompok tertentu. Dengan begitu diharapkan bahwa Indonesia yang baru tidak hanya akan berhasil mengusir kekuasaan-kekuasaan asing yang represif dan bengis, melainkan juga akan mampu mengembalikan kedaulatannya ke tangan rakyat dengan segala haknya.

Melalui para narasumber percakapan kita tadi, kita telah bersama-sama mencoba membuka kembali lembar-lembar sejarah Indonesia terkait dengan topik tersebut, sejak dari periode pra-kemerdekaan hingga periode pertengahan tahun 1990-an, yakni menjelang tumbangnyanya rejim Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Dari para narasumber itu kita telah belajar antara lain bahwa sejak awal abad ke-20 sejarah Indonesia telah bergerak dengan penuh dinamika. Ada banyak pemikiran dan peristiwa yang saling menopang satu sama lain sebelum terbentuknya sebuah Republik yang tidak hanya merdeka, melainkan yang juga berdaulat dan percaya diri menempuh langkah-langkah berikutnya.

Boleh saja “Manifesto Politik” yang pada tahun 1923 dicanangkan oleh para pemuda tak terlalu keras dengungnyanya, tetapi semangat manifesto itu kemudian dilanjutkan dalam rumusan Sumpah Pemuda tahun 1928 yang gaungnya sampai ke mana-mana. Boleh saja orang-orang muda pelaku pemberontakan Partai Komunis Indonesia melawan Belanda pada tahun 1926-1927 dibuang ke tempat pengasingan Digul yang amat terpencil itu, namun semangat perjuangan mereka menuju kemerdekaan tetap saja hidup dan dilanjutkan oleh para pejuang kemerdekaan yang lain. Boleh saja pada masa perang kemerdekaan Belanda menangkap elit politik dan intelektual Indonesia, tetapi di lapangan para pemuda selalu siap untuk tetap mengobarkan semangat revolusi. Boleh saja pemerintahan Presiden Sukarno yang berorientasi kerakyatan dihabisi melalui Pembantaian Massal tahun 1965-1966 dan digantikan oleh pemerintahan otoriter Orde Baru, namun pada akhirnya Orde Baru tumbang juga dan demokrasi kembali

bersemi. Bertolak pada spesialisasi penelitian akademik masing-masing para narasumber telah mengajak kita untuk melihat dinamika dan proses di seputar pembangunan Republik itu dengan sabar dan teliti.

Menarik untuk disimak, ternyata tidak selamanya para narasumber kita itu sependapat satu sama lain. Ada kalanya mereka berpandangan sama, ada kalanya mereka berpandangan beda. Sementara George Kahin lebih menekankan peran elit politik dan kaum intelektual sebagai pelaku utama dalam revolusi Indonesia, misalnya, Benedict Anderson justru menekankan peran pemuda yang menurutnya lebih menentukan. Pada bagian lain, sementara Clifford Geertz yakin bahwa pelaku utama dalam peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia adalah orang Indonesia sendiri, George Kahin berhasil menunjukkan bagaimana pihak-pihak asing juga turut “bermain” dalam peristiwa-peristiwa sejarah Indonesia. Pada saat yang sama, Daniel Lev sangat tidak setuju dengan mereka yang menurutnya terlalu bernaftsu dalam melihat segala sesuatu dari segi budaya, apalagi jika mengatakan bahwa budaya Indonesia tidak cocok dengan sistem republik atau demokrasi. Dalam percakapannya di buku ini ia menolak pandangan tersebut, sambil mengacu pada Pemilu tahun 1955 sebagai contohnya. “Pemilu 1955 membuktikan pikiran tadi itu omong kosong!”, sergah Daniel Lev. Ia lantas bertanya: “**Kalau kebudayaan Indonesia tidak bisa menjadi landasan untuk demokrasi, kenapa begitu banyak orang yang ikut memilih?**”

Apa pun persamaan atau perbedaan yang disampaikan oleh para narasumber kita, diharapkan bahwa percakapan-percakapan dengan mereka yang ada dalam buku Anda ini akan membuka lebih banyak ruang-ruang dialog bagi kita untuk semakin giat belajar dan bertukar pikiran tentang sejarah Indonesia. Dengan susah payah Republik ini telah dibangun, dengan susah payah pula ia telah diperjuangkan sejak kemerdekaannya. Adalah tugas kita bersama untuk tidak hanya mempertahankan dan meneruskannya, melainkan juga untuk membuatnya semakin kokoh dalam menyongsong masa depan bersama.



Para pemimpin Republik pada tahun 1950-an.

Daftar Pustaka

- 1
Bourchier, David dan John Legge (editor), 1994. *Democracy in Indonesia, 1950s and 1990s*, Melbourne: Monash Papers on Southeast Asia No. 31.
- 11
Bunel, Frederick P., 1966. "Guided Democracy foreign policy: 1960-1965. President Sukarno moves from Non Alignment to Confrontation", dalam *Indonesia* No. 2, hlm. 37-76.
- 14
Crouch, Harold, 1996. "Indonesia's Military is Likely to Keep Its Sociopolitical Role", *International Herald Tribune*, 27 Agustus 1996.
- 12
Crouch, Harold, 1978. *The Army and Politics in Indonesia*, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
- 12
Evans III, Bryan, 1989. "The influence of the United States Army on the Development of the Indonesian Army (1954-1964)", *Indonesia* No. 47, hlm. 25-48.
- Feith, Herbert, 1995. *Sukarno-Militer dalam Demokrasi Terpimpin*, Pustaka Sinar Harapan.
- 1
Kahin, Audrey R. dan Kahin, G. McT., 1995. *Subversion as Foreign Policy*, New York: The New Press.
- 13
Lev, Daniel, 1966. *The transition to Guided Democracy: Indonesian politics, 1957-1959*, Ithaca, N.Y.: Cornell Modern Indonesia Project.
- 27
McVey, Ruth, 1992. "The Case of the Disappearing Decade", dalam *Democracy in Indonesia*, Monash Papers on Southeast Asia No. 31.
- 16
Oei Tjoe Tat, 1995. *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Sukarno*, Jakarta: Hasta Mitra.
- 10
Ricklefs, M.C. 1991. *Sejarah Modern Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Rocamora, J. Eliseo, 1991. *Nasionalisme Mencari Ideologi: Bangkit dan Runtuhnya PNI, 1946-1965*, Jakarta: Grafiti Pers.

Said, Salim, 1987. *Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian Military in Politics, 1945-1949*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sundhaussen, Ulf, 1982. *The Road to Power, Indonesian military politics 1945-1967*, Oxford: Oxford University Press.

_____, *Politik Militer Indonesia 1945-1967, Menuju Dwi Fungsi ABRI*, Jakarta: LP3ES.

Sumber foto:

Bung Karno di tengah rakyatnya (cover depan), <https://penasoekarno.wordpress.com/tag/bung-karno-penyambung-lidah-rakyat/page/3/>

Dr. Benedict Anderson (hal. 45), http://tns.thenews.com.pk/professor-benedict-anderson-truly-global/#.WP1_REWGPcs

Dr. Bill Liddle (hal.223), <http://islamlib.com/politik/demokrasi/r-william-liddle-hak-hak-dasar-harus-dijamin-rezim-demokratis/>

Dr. Clifford Geertz (hal. 113), <http://profilbos.com/2014/05/31/clifford-geertz-profil-biodata/>

Dr. Daniel S. Lev (hal. 155), www.danlevlibrary.net

Dr. George Kahin (hal. 91), https://en.wikipedia.org/wiki/George_McTurnan_Kahin

Dr. Takashi Shiraishi (hal. 17), http://www.grips.ac.jp/list/facultyinfo/shiraishi_takashi/

Goenawan Mohamad (hal. 189), <https://www.youtube.com/watch?v=KaDs12FKRII>

Lokasi Pengasingan Digul, Papua (hal. 44), <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Berkas:Kamp-digul.jpg&filetimestamp=20140516005449&>

Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan asing tahun 1957-1958 (hal. 154), <http://indonesia-zaman-doeloe.blogspot.co.id/search/label/1957>

Para pemimpin Republik pada tahun 1950-an (hal. 258), <http://indonesia-zaman-doeloe.blogspot.co.id/2014/06/kabinet-republik-indonesia-serikat-1950.html>

Profesor Sartono Kartodirdjo (hal. 1), <http://www.viva.co.id/pab/penerima-penghargaan>

Revolusi Pemuda (hal.16), <http://www.militanindonesia.org/analisa-perspektif/imperialisme-kebangsaan/8614-revolusi-nasional-yang-tak-kunjung-selesai.html>

Index

- abangan 5, 236, 237
ABRI xxiv, 70, 138, 186, 188, 200, 202, 204, 205, 214, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 242, 243, 244, 262
AD 202, 203, 204, 230, 232
Aidit, D.N. 175
Ali Archam 27, 28, 36
Ali Murtopo 13, 38
Ali Sastroamidjojo 99, 159
Amerika Serikat vii, xxiv, 15, 77, 78, 91, 115, 157, 190, 201, 224, 247
Angkatan Darat 64, 73, 157, 159, 161, 202, 203, 227, 229, 233

Baperki 173, 175, 176
Belanda xii, xiii, xiv, xx, xxi, xxii, 4, 6, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 89, 90, 115, 117, 118, 119, 121, 122, 123, 125, 144, 146, 149, 165, 166, 174, 175, 190, 203, 211, 213, 257, 258

Benny Murdani 205, 215, 225, 226, 227, 230, 233
BKR 78
Budi Utomo xx, 5, 6, 9, 117
Bung Karno xxi, 3, 4, 10, 11, 15, 52, 55, 59, 77, 78, 79, 87, 88, 90, 98, 158, 162, 163, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 184, 186, 191, 203, 204, 213, 219, 267
Bung Tomo 53, 54, 66, 90

Chalid Salim 23, 26, 30, 35, 38
Chaves 10
CIA xxiv, 11, 12, 98, 171, 248, 249, 250, 252, 253, 255, 256
CSIS 215

Darul Islam 38, 67, 70, 255
De Graeff 20, 21, 30, 31, 32
de Jonge 31
Dekrit Presiden 166, 179
Demokrasi iv, ix, x, xxv, xxvii, xxviii, 127, 130, 133, 135, 155, 159, 168, 169, 176, 178, 179, 180, 181, 185, 186, 187, 188, 189, 192, 201, 208, 209, 213, 215,

- 216, 223, 234, 235, 261, 267
 Demokrasi Terpimpin 127, 130, 133,
 159, 168, 169, 176, 179, 180,
 181, 185, 186, 187, 188, 209,
 213, 261
 Digoel 24
 Djokosutono 166
- Ende 32, 33
- Federalisme 144
 feodal xvii, xviii, xx, 6, 56, 89, 90, 210,
 257
 feodalisme xii, xx, 3, 5, 6, 211
- Gus Dur 198, 199, 200, 201, 204, 235,
 239, 240, 243
- Haji Agus Salim 35, 99, 110
 Hatta xxi, 32, 33, 43, 58, 77, 78, 90,
 93, 96, 97, 98, 99, 101, 104, 105,
 107, 109, 112, 120, 121, 149,
 150, 158, 163, 204
- Indische Partij* 34, 117
 Inggris 20, 47, 53, 86, 92, 115, 222
 Irian Barat 10, 11, 14, 15, 19, 21
 ISDV 28, 34
 Islam xiii, 17, 28, 32, 35, 38, 48, 54, 55,
 56, 67, 70, 71, 73, 80, 113, 117,
 118, 132, 135, 140, 147, 148,
 152, 153, 167, 180, 183, 184,
 213, 214, 215, 216, 218, 223,
 224, 227, 228, 234, 235, 236,
 237, 238, 239, 240, 244, 255
 Iwa Kusumasumantri 33
- Jakarta x, xi, xiv, xxi, 7, 11, 12, 21, 35,
 38, 54, 56, 83, 86, 90, 100, 101,
 123, 137, 138, 143, 152, 161,
 166, 167, 175, 176, 193, 220,
 228, 229, 232, 235, 252, 261,
 262, 268
- Jalan Tengah 65, 166, 232
 Jaman Normal 38, 39, 119
 Jepang xx, xxv, 7, 13, 18, 36, 37, 38,
 46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 58, 59,
 63, 64, 65, 66, 69, 71, 72, 80, 85,
 118, 121, 123, 124, 135, 207,
 210, 211
- Kennedy, John F. 15
 Kennedy, Robert 11
 KKN 5, 10
 KNIL 23, 62, 63, 64, 69, 70, 71, 72, 75,
 77, 231
 Komunis xii, xx, 17, 58, 92, 113, 124,
 135, 195, 258
 Konstituante 130, 131, 135, 136, 167,
 168, 169, 176, 179, 181, 182,
 183, 184
 korupsi xii, xx, 6, 7, 74, 139, 141, 157,
 165, 181, 183, 184
 Kristen 50, 55, 80, 124, 140, 148, 153,
 158, 170, 172, 174, 175, 184, 216
- Leimena 99
- Madiun 67, 92, 93, 97, 98, 99, 100, 101
 Maklumat Nomor X 57
 Malaysia 46, 47, 210, 241, 256
 Manifesto Politik xx, 2, 3, 9, 195, 258
 Mao 65, 198, 203
 Mao Tse Tung 65, 203
 Marxisme 27, 136
 Masjumi xxii, 61, 62, 87, 89, 92, 98,
 99, 109, 120, 121, 124, 126, 128,
 129, 130, 131, 133, 134, 137,
 140, 142, 149
 Mas Marko Kartodikromo 36
 Massa Mengambang 138
 merdeka xxi, xxvi, 8, 9, 14, 15, 20, 55,
 59, 60, 65, 67, 69, 74, 76, 79, 81,
 89, 226, 258
 Merdeka 100% 60, 88
 Muhammadiyah 50, 68, 117, 126, 142,
 239

- Muso 32, 35, 92, 93, 97, 101
 Nahdlatul Ulama (*lih.* NU) 158, 239
 Nasution 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 93, 101, 102, 106, 107, 130, 157, 158, 161, 163, 165, 166, 168, 181, 202, 229, 232
 New York xxv, 11, 80, 91, 96, 110, 163, 256, 261
 NU 124, 126, 129, 130, 141, 142, 158, 167, 169, 170, 172, 173, 174, 178, 180, 183, 184, 195, 196, 201, 239

 Oei Tjoe Tat 175, 180, 261
 Orde Baru vii, xii, xxiii, xxiv, xxviii, 6, 8, 9, 13, 38, 51, 60, 116, 135, 138, 139, 145, 146, 149, 151, 164, 185, 186, 189, 191, 192, 199, 201, 209, 212, 213, 217, 223, 224, 225, 229, 244, 258

 pamong praja 6, 164
 Pancasila 50, 51, 75, 116, 131, 135, 141, 235
 pangreh praja 6
 Papua xx, 8, 17, 44
 Pare 113, 115, 116, 119, 129, 134, 139, 141, 146
 PARI 17, 31, 32, 39, 41, 42, 43
 Partai Katolik 158, 170, 172, 174
 Partindo 42, 59, 180
 PDI 192, 193, 199, 200, 201, 202, 239, 240, 242, 243
 Pembunuhan Massal 1965 132, 195
 Pemilu 1955 129, 136, 168, 169, 183, 210, 259
 Pemilu 1957 170, 172
 Pemuda xx, xxv, 2, 3, 16, 46, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 66, 75, 79, 100, 258
 Perang Dingin 10, 13, 14, 82, 124, 136, 149, 162, 182, 183, 241
 Perang Dunia xviii, 31, 48, 82, 211
 Perang Dunia Kedua xviii, 31
 Peristiwa 3 Juli 68, 78, 87
 Permesta 11, 146, 148, 149, 162, 166, 171
 PERMI 17, 31
 Pesindo 61, 62, 66, 67, 72, 86, 100, 106
 PETA 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 231
 PID 21, 22, 23, 42
 PKI xii, 10, 19, 28, 31, 32, 35, 36, 39, 40, 42, 58, 60, 73, 77, 84, 89, 92, 96, 118, 124, 128, 129, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 183, 191, 195, 196, 198, 225
 PNI 17, 32, 42, 58, 59, 60, 61, 89, 98, 99, 120, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 136, 137, 138, 158, 166, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 178, 183, 195, 196, 262
 PP-10 173, 177
 Pramoedya Ananta Toer ix, 38, 72, 177
 PRD 193, 198, 201, 202, 217, 218, 219, 228
 Presiden Bush 10, 11
 Priyayi 1, 5, 72
 PRRI 11, 76, 146, 148, 149, 162, 166, 171
 PSII 17, 31, 59

 Reagan 11
 Renville 92, 93, 97, 99
 Revolusi xxii, 16, 47, 73, 79, 83, 91, 92, 114, 117, 120, 121, 122, 138, 139, 160, 162, 168, 170, 174, 185, 209, 234
 Roosevelt 37, 96, 111

 santri 5, 53, 125, 126, 133, 213, 227, 236, 238
 Sarikat Islam 17, 35, 117, 118
 Semaun 18, 19, 28, 34, 41, 48
 Siauw Giok Tjhan 175, 176

- Siliwangi 66, 73, 93, 94, 99, 100
 Sjahrir xxi, 32, 33, 42, 43, 46, 58, 68, 69, 70, 71, 77, 78, 84, 85, 87, 90, 93, 96, 97, 98, 99, 107, 109, 110, 112, 120, 123, 191
 Sjarifuddin 58, 66, 67, 68, 71, 92, 93, 94, 96, 97, 120
 SOBSI 137, 171, 173
 Soedjatmoko 4, 110, 184
 Soeharto xii, xvi, xxi, xxiii, xxiv, 7, 35, 55, 72, 77, 78, 79, 87, 90, 113, 132, 135, 140, 143, 145, 146, 193, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 237, 238, 241, 242, 244, 245, 258
 Soe Hok Gie 36
 sosialis xxii, 71, 156
 sosialis relijius xxii
 Sudirman 65, 67, 71, 87, 88, 93, 100, 159, 203, 231, 262
 Sukarno 10, 14, 15, 30, 32, 33, 43, 53, 58, 77, 79, 93, 97, 98, 99, 104, 105, 107, 109, 112, 113, 120, 121, 123, 125, 126, 130, 132, 133, 135, 136, 137, 140, 143, 145, 148, 149, 150, 166, 195, 225, 258, 261
 Tanah Merah 25, 34, 38, 40
 Tanah Tinggi 25, 27, 34, 35, 36, 38, 40
 Tan Malaka 19, 28, 35, 39, 41, 42, 43, 87, 88, 89, 100, 109, 112, 123
 Timor Leste 9, 78, 90, 139, 192, 194, 198, 241
 Timor Timur 11, 139, 191, 241
 Tionghoa xiv, 6, 174, 175, 176, 177, 190, 211, 212, 240, 241
 Tjipto Mangoenkoesoemo 19, 22
 TKR 75, 78
 TNI 64, 65, 66, 67, 69, 78, 102, 225
 UUD 77, 92, 130, 166, 167, 168, 176, 179, 181, 182, 184
 UUD'45 77
 Vietnam 13, 88, 97, 253, 254, 256
 Volksraad 29
 Washington xxii, xxiv, 15, 110, 155, 183, 203, 250, 254, 256
 Yogyakarta 61, 68, 83, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 110, 116, 123, 143, 152

Tentang Editor

⁵ **BASKARA T. WARDAYA SJ** lulus dari Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara tahun 1986 dan belajar di Marquette University, Milwaukee, Wisconsin, A.S. dari tahun 1993 hingga 2001. Dari universitas tersebut ia menerima gelar Master (1995) dan Doktor (2001), keduanya di bidang Sejarah. Tahun 2004-2005 ia menerima beasiswa Fulbright untuk program *post-doctoral* guna melakukan penelitian Sejarah di A.S. Tahun 2011-2012 ia mengajar Sejarah di University of California-Riverside sebagai Fulbright Scholar in Residence. Tahun 2014 ia mendapat beasiswa dari AIFIS (American Institute for Indonesian Studies) untuk melakukan penelitian di A.S. Kini ia bertugas sebagai pengajar Sejarah dan Kajian Budaya di Universitas Sanata Dharma (USD), Yogyakarta. Ia juga bekerja sebagai Kepala ²² PUSDEMA (Pusat Kajian Demokrasi dan Hak-hak Asasi Manusia) USD.

Karya-karya publikasinya antara lain *Bung Karno Menggugat* ¹⁷ (2006); *Cold War Shadow: United States Policy toward Indonesia 1953-1963* ²¹ (2007); *Berkah Kehidupan: 32 Kisah Inspiratif tentang Orangtua* (2011); *Truth Will Out: Indonesian Accounts of the 1965 Mass Violence of 1965* ¹⁸ (2013); *Luka Bangsa, Luka Kita: Pelanggaran HAM Masa Lalu dan Tawaran Rekonsiliasi* (2014, editor); *Bertemu Matahari* (2014); *Keeping Hope: Seeing Indonesia's Past from the Edges* (2017); dan *Beyond Borders: Notes on the Colonial and Post-Colonial Dynamics in The Americas, Europe and Indonesia* (2017). Selain

itu ia juga menulis di sejumlah jurnal akademik dan media massa. Ia dapat dihubungi melalui email baskaramu@yahoo.com.



Penulis (tengah) bersama Dr. Leong Kar Yen dari Tam Kang University Taiwan (kiri) dan Dr. Asvi Warman Adam dari LIPI Jakarta (kanan), di sela-sela konferensi tentang Tragedi 1965 di Goethe University, Frankfurt, Jerman, 2016.

Membangun Republik 4

ORIGINALITY REPORT

47%

SIMILARITY INDEX

47%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

1%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	arus.kerjabudaya.org Internet Source	17%
2	www.hamline.edu Internet Source	14%
3	csf.colorado.edu Internet Source	14%
4	www.mnet.fr Internet Source	<1%
5	galangpress.com Internet Source	<1%
6	Submitted to International University of Japan Student Paper	<1%
7	publications.ssrc.org Internet Source	<1%
8	marxists.org Internet Source	<1%
9	www.munindo.brd.de Internet Source	<1%
10	sastra.um.ac.id Internet Source	<1%
11	Submitted to 535 Student Paper	<1%
12	www.sejarahsosial.org Internet Source	<1%

13	Internet Source	<1 %
14	www.tribunal1965.org Internet Source	<1 %
15	ejournal.lipi.go.id Internet Source	<1 %
16	Hearman, Vannessa. "THE USES OF MEMOIRS AND ORAL HISTORY WORKS IN RESEARCHING THE 1965-1966 POLITICAL VIOLENCE IN INDONESIA", International Journal of Asia-Pacific Studies/18236243, 20090701 Publication	<1 %
17	www.international.ucla.edu Internet Source	<1 %
18	www.newbooks.mannlib.cornell.edu Internet Source	<1 %
19	fis.um.ac.id Internet Source	<1 %
20	www.ynuseas.cn Internet Source	<1 %
21	www.wilsoncenter.org Internet Source	<1 %
22	www.usd.ac.id Internet Source	<1 %
23	eprints.uny.ac.id Internet Source	<1 %
24	islamlib.com Internet Source	<1 %
25	kumbungcinta.blogspot.com Internet Source	<1 %

26	ml.scribd.com Internet Source	<1 %
27	www.library.ohiou.edu Internet Source	<1 %
28	es.scribd.com Internet Source	<1 %
29	lesperssi.org Internet Source	<1 %
30	Azali, Kathleen Fionna, Ulla. "Research on contemporary Indonesia: complexities and intricacies to explore.", SOJOURN: Journal of Social Issues in Southeast Asia, March 2015 Issue Publication	<1 %
31	etan.org Internet Source	<1 %
32	id.scribd.com Internet Source	<1 %
33	Budi Setiyono. "Civil society organisations' contribution to the anti-corruption movement in Indonesia", Bulletin of Indonesian Economic Studies, 12/2010 Publication	<1 %

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		